

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.



# KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA

Kasus Indonesia,  
Thailand, dan

Myanmar, Filipina,  
Malaysia

LKIS

# **KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA**

Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed

# KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA

**LKIS**

**KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA**

Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.

ÓProf. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., LKIS, 2018

xvi + 278 + halaman; 15 x 24 cm

1. Konflik
2. Etno-Religius
3. Asia Tenggara

ISBN: 978-602-6610-55-3

Editor: Toto Suharto, Safarina HD, Mustakim

Rancang Sampul: Ruhttata

Setting/Layout: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

**LKIS**

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: [lkis@lkis.co.id](mailto:lkis@lkis.co.id)

Anggota IKAPI

Cetakan 1: 2018

Percetakan:

**LKIS**

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: [lkis.printing@yahoo.com](mailto:lkis.printing@yahoo.com)

# **PENGANTAR EDITOR**

## **AGAMA SEBAGAI SUMBER KONFLIK: MEMBACA KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA**

**B**etulkah agama itu sumber konflik? Ini adalah pertanyaan usang terkait tesis abadi Marxian yang menyebutkan bahwa agama itu candu, dan karenanya menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Kasus-kasus konflik sosial yang terkait etno-religius di negara-negara Asia Tenggara justru memperlihatkan bahwa konflik-konflik sosial ini terjadi lebih disebabkan oleh warisan kolonialisme yang telah menyisakan kebijakan diskriminatif secara sosio-historis. Kaum Kolonial yang bercokol di negara-negara Asia Tenggara telah meninggalkan benih-benih konflik yang begitu mendalam melalui berbagai kebijakan masa lalunya. Ini berarti, konflik etno-religius yang sekarang ini masih terus terjadi di Asia Tenggara bukan disebabkan oleh dimensi agama yang dianut oleh masyarakat Asia Tenggara.

Masyarakat Asia Tenggara adalah masyarakat beragama, yang berbeda dengan warga masyarakat di belahan benua lainnya, seperti Eropa atau Amerika. Bagi masyarakat Asia Tenggara, agama adalah kehidupan mereka yang sudah mulai tertanam semenjak mereka dilahirkan. Agama yang dianutnya ini selalu mengajarkan kedamaian dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Agama bagi mereka adalah penyejuk batin, bukan pemicu konflik. Kondisi ini harus dilihat secara berbeda dengan masyarakat yang hidup di Eropa atau Amerika,

## VI Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

yang umumnya memandang agama sebagai bagian dari kehidupan privat, bukan kehidupan publik.

Sejarawan Inggris, Arnold J. Toynbee, pernah mengkritisi bahwa peradaban modern Barat telah kehilangan Tuhan, sehingga acuan moral menjadi berantakan dan berkeping-keping.<sup>1</sup> Agama dalam pandangan Toynbee justru merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan modernitas, yang mengarah pada kemajuan,<sup>2</sup> bukan suatu konflik. Jadi, kalau acuan moral dalam peradaban Barat menjadi "berantakan dan berkeping-keping" ini dikarenakan Barat alfa dengan keberadaan dan fungsi agama. Bagi Toynbee, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti dalam peradaban Barat, kiranya telah menyebabkan terjadinya kekosongan spiritual, karena agama sudah tidak dipercayai lagi. Banyaknya kasus bunuh diri di Amerika oleh Toynbee diindikasikan sebagai kegagalan peradaban Barat yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa dasar spiritual yang kokoh. "Kekosongan ini harus diisi dengan agama, sebagai perbaikan spiritual kita,"<sup>3</sup> demikian tulis Toynbee.

Mengapa agama penting bagi sebuah peradaban? Kelahiran agama dalam perkembangan peradaban model *Toynbeean* adalah sesuatu yang penting, yang disebutnya sebagai "Gelombang Spiritual". Untuk itu, Toynbee di sini menyebut istilah *Higher religions* yang dipahaminya sebagai agama yang berorientasi ke Langit yang muncul setelah Zaman Poros, yaitu zaman primitif di mana pemikiran manusia tentang agama masih bercorak kebendaan. *Higher religions* ini meliputi Yudaisme, Zoroasterianisme, Budhisme, Hinduisme, Kristen dan Islam.<sup>4</sup> Agama-agama inilah yang menjadi gelombang spiritual peradaban, yang menjaga dimensi batin manusia. Ketika dimensi batin ini tidak ada dalam peradaban, maka peradaban ini akan mengalami kekosongan spiritual.

---

<sup>1</sup> Baca A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), hlm. 170-171.

<sup>2</sup> Arnold J. Toynbee, *Menyelamatkan Hari Depan Umat Manusia*, alih bahasa Nin Bakdi Sumanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 50.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Pandangan Toynbee tentang agama itu sebagai bentuk usaha untuk menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan modernitas yang mengarah pada kemajuan, merupakan entri poin bagi temuan Prof. Abdullah Idi dalam buku ini. Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah ini, melalui buku *Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara*, menemukan bahwa konflik-konflik sosial (etnis dan agama) yang terjadi di Asia Tenggara bukan disebabkan karena agama, tetapi lebih merupakan warisan yang berkesinambungan sebagai dampak dari kebijakan diskriminatif kaum Kolonial terhadap pribumi.

Oleh karena itu, temuan buku ini menjadi penting bagi resolusi atas konflik-konflik etno-religius di Asia tenggara. Melalui karya ini, Prof. Abdullah Idi menawarkan adanya pengelolaan isu-isu etnisitas (etnis dan agama) secara jujur, *fair*, dan optimal. Meskipun memang resolusi konflik etno-religius ini tidak mudah dipecahkan seperti halnya 'membalik telapak tangan', tapi hal ini bukan berarti mustahil dapat dilakukan, asalkan lebih difokuskan pada pencarian suatu strategi solutif yang substantif, komprehensif, dengan mengedepankan kolektivitas dalam spirit ASEAN. Aspek agama inilah yang masuk dalam kategori spirit kolektivitas masyarakat Asia Tenggara, yang harus dipupuk, sehingga tesis "agama itu candu" tidak berlaku bagi masyarakat ini, ketika mengalami konflik etno-religius. Inilah tawaran penting buku ini. Selamat Membaca!

Totok Suharto  
Safarina HD  
Mustakim

## PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur, *alhamdulillah*, penulis haturkan kepada Allah SWT, di mana pada akhirnya penulisan buku ini dapat dirampungkan. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis lakukan, yakni Penelitian Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan, UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Selain itu, upaya penerbitan buku ini juga tidak terlepas dari adanya rasa cinta dan empati terhadap dunia akademik yang penulis tekuni. Tidak cukup bijak rasanya dengan menghujat dan mengkritisi saja; tetapi, agaknya dibutuhkan pula kontribusi pemikiran dari segenap insan akademis terhadap berbagai dinamika dan persoalan kemanusiaan dan kondisi konflik yang dapat mengancam perdaban dunia. Pemberian judul buku ini, yakni *Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara*, lebih tampak sebagai 'ikhtiar' akademik atau suatu respons akademik terhadap fenomena konflik sosial dan agama di Asia Tenggara yang berlangsung hingga kini.

Kasus konflik etnis dan agama di berbagai negara di Asia Tenggara sesungguhnya berpotensi menjadi konflik telah terjadi sejak lama serta banyak 'merenggut' korban nyawa manusia tak berdosa dan korban harta dan benda tak terkira. Hal ini pula yang mendorong penulis termotivasi menulis buku ini, sebagai wacana pemikiran terhadap pentingnya memberi 'solusi', setidaknya, dalam jangka panjang sebagai kontribusi ilmiah dalam upaya mengurangi eskalasi konflik etno-religius yang sedang dan agaknya terus dihadapi bangsa-bangsa



## X Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

serumpun ini. Resolusi konflik sosial etnis-agama dan peroalan berbangsa lainnya terkadang memang tidak mungkin dipecahkan dalam waktu singkat dan seperti 'membalik telapak tangan'. Tetapi, hal itu bukanlah suatu yang mustahil, tetapi tergantung dengan upaya dan strategi yang dilakukan berbagai pihak terkait, baik dari internal maupun eksternal suatu bangsa/negara anggota ASEAN. Tentunya, terdapat sejumlah kasus konflik etnisitas dapat diselesaikan alias sukses, seperti GAM Aceh yang dilakukan Indonesia- Finlandia dan kebijakan *Affirmative Action Programs* yang dilakukan kebijakan PM. Mahathir Muhammad, Malaysia pada 1970-an—sebagai upaya resolusi terulangnya konflik etnisitas yang bersifat jangka panjang (*long-terms*).

Selanjutnya, buku ini dapat dipublikasi berkat bantuan dan kontribusi sejumlah pihak, karena itu, sudah seharusnya penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada segenap pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, terkhusus kepada Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M dan para stafnya. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Saudara Mustakim, S.Kom. yang telah mengumpulkan sebagian data dan proses teknis pengetikan dalam naskah buku ini. Kepada Ibu Safarina, M.Pd., M.Si. yang telah banyak memberi masukan, revisi, dalam proses *editing* buku ini. Akhirnya, penulis pun menyadari bahwa dalam buku ini kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dan semua itu merupakan menjadi tanggung jawab pribadi penulis.

Sugiwaras, 30 November 2017

# ABBREVIATION

AAP	<i>Affirmative Action Programs</i>
AIHCR	<i>ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights</i>
AIPR	<i>ASEAN Institute for Peace and Reconciliation</i>
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i>
BCHM	<i>Boriwen Ched Hua Muang</i>
BNPT	<i>Badan National Penanggulangan Terorisme</i>
COC	<i>Code of Conduct</i>
CRPD	<i>Convention on Rights of The Child</i>
CRC	<i>Convention on Rights of Persons with Disabilities</i>
CRCS-UGM	<i>Center for Religious and Cross-cultural studies-UGM</i>
DAP	<i>Democratic Action Party</i>
DUHAM-PBB	<i>Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHCR)-Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
FPA	<i>Final Peace Agreement</i>
FPI	<i>Front Pembela Islam</i>
FPIS	<i>Forum Pemuda Islam Surakarta</i>
GAM	<i>Gerakan Aceh Merdeka</i>
GMIP	<i>Gerakan Mujahideen Islam Pattani</i>
GPI	<i>Gerakan Pemuda Islam</i>
GPM	<i>Gerakan Papua Merdeka</i>
FKUB	<i>Forum Kesukuan Umat Beragama</i>
FPA	<i>Foreign Policy Analysis</i>

## Xii Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

HCS	<i>Holland Chinese School</i>
HICOM	<i>Heavy Industries Corporation of Malaysia</i>
HRAF	<i>Hindu Rights Action Force</i>
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
HTI	Hitbut Tahrir Indonesia
ICATAP	<i>International Criminal Investigative Training Assistance Program</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of Racial</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural</i>
ICRP	<i>Indonesian Conference on Religion and Peace</i>
ISDSF	<i>Institute for Strategic and Development Studies</i>
INTERFIDEI	<i>Institute for Interfaith Dialog</i>
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IRMW	<i>International Convention for Protection of All Migran</i>
LCS	Laut Cina Selatan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MMI	Majelis Mujahidin Indonesia
MNLF	<i>Moro National Liberation Front</i>
MPA	Majelis Peradilan Adat
MUI	Majelis Ulama Indonesia
MPRK-UGM	Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik-UGM
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
MILF	<i>Moro Islamic Liberation Front</i>
MIM	<i>Mindanao Independent Movement</i>
MILF	<i>Moro Islamic Liberation front</i>
NEP	<i>New Economic Policy</i>
NPA	<i>New People's Army</i>
NU	Nahdlatul 'Ulama
OHCHR	<i>United Nations High Commisioner for Human Rights</i>
OIC	<i>Organization of Islamic Conference</i>
OKI	Organisasi Kerjasama Islam
PBM	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

<b>PBM-KUB</b>	<b>Keputusan Bersama Menteri-Kerukunan Umat Beragama</b>
<b>PTKIN</b>	<b>Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri</b>
<b>PULO</b>	<i>Pattani United Liberalized Organization</i>
<b>SFCG</b>	<i>Search for Common Ground</i>
<b>SKB</b>	<b>Surat Keputusan Bersama</b>
<b>SLOCs</b>	<i>Sea Line of Communications</i>
<b>THHK</b>	<i>Tionghoa Hwee Koan</i>
<b>TI</b>	<i>Transparency International</i>
<b>UMFIL</b>	<i>The Union of Myanmar Foreign Investment</i>
<b>UMNO</b>	<i>United Malays National Organization</i>

# DAFTAR ISI

Pengantar Editor	___ v
Pengantar Penulis	___ ix
<i>Abbreviation</i>	___ xi
Daftar Isi	___ xv

## **BAB I PENDAHULUAN** \_\_\_ 1

## **BAB II KONSEP KONFLIK ETNO-RELIGIUS** \_\_\_ 13

- A. Konflik Sosial-Etnis \_\_\_ 17
- B. Konflik Sosial-Agama \_\_\_ 25
- C. Diskriminasi \_\_\_ 29
- D. Konflik Sosial Etnis-Agama \_\_\_ 41

## **BAB III KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA** \_\_\_ 43

- A. Konflik Etnis-Agama di Asia Tenggara \_\_\_ 43
- B. Faktor Pendorong Konflik Etnis-Agama \_\_\_ 57
  - 1. Konflik Etnis-Agama: Indonesia \_\_\_ 57
  - 2. Konflik Etnis-Agama: Myanmar \_\_\_ 116
  - 3. Konflik Etnis-Agama: Filipina \_\_\_ 141
  - 4. Konflik Etnis-Agama: Thailand \_\_\_ 163
  - 5. Konflik Etnis-Agama: Malaysia \_\_\_ 192

xvi Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

**BAB IV KONFLIK ETNO-RELIGIUS DAN PERANAN ASEAN**

\_\_\_227

A. ASEAN dan Konflik Kawasan \_\_\_230

B. ASEAN dan Konflik Etnis-Agama \_\_\_232

C. Kasus: Mindanao, Filipina \_\_\_238

D. Kasus: Rohingya, Myanmar \_\_\_241

**BAB V PENUTUP \_\_\_259**

Daftar Pustaka \_\_\_265

Tentang Penulis \_\_\_277

# BAB I

## PENDAHULUAN

**K**onflik merupakan '*a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of contest, opinions or purposes, mental strife, agony*' ('suatu pertarungan, suatu benturan, suatu pergulatan, suatu pertarungan, pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, tujuan-tujuan, pergulatan mental, penderitaan batin'. Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik, di antaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketimpangan-ketimpangan sosial tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Keinginan masyarakat tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan masyarakat yang merasa dirinya dirugikan. Pasca berakhirnya Perang Dingin menimbulkan perubahan politik dunia, perang antarbangsa mulai berkurang, namun perang antarsaudara semakin meningkat. Terutama banyak terjadi di negara berkembang yang banyak terdapat kelompok etnis. Konflik jenis baru ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing

## 2 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

kelompok dalam negara bersangkutan, baik perbedaan identitas etnis, budaya, dan agama maupun kesenjangan sosial-ekonomi.<sup>1</sup>

Konflik etnis (*ethnic-conflict*) merupakan salah satu bentuk konflik lokal yang terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum terselesaikan. Konflik etnis inilah yang pada akhirnya berubah menjadi gerakan pemberontakan atau separatis yang terjadi pada banyak negara di dunia. Gerakan separatis ini dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Konflik agama (*religious conflict*) dapat didefinisikan sebagai konflik di mana agama tersebut menjadi pusat ketidakcocokan (bersifat substansial); dan sebagai konflik di mana aktor-aktor yang terlibat menganut tradisi agama berbeda sehingga memiliki identitas berbeda pula (bersifat fungsional). Pemahaman kedua definisi konflik agama tersebut dalam konteks Indonesia dinamakan sebagai konflik antarumat beragama.<sup>2</sup>

Kendatipun pluralisme dan multikulturalisme merupakan fakta keras (*hard fact*) dan 'hukum alam' (*sunnatullah*), banyak orang tidak mengakui mengenai hal demikian. Dampaknya, manusia terkadang terjebak pada *truth claim* yang dapat mengarah perpecahan dan konflik manifes. Secara normatif, agama-agama memang mengajarkan bahwa manusia terlahir membawa karakter, sifat dan identitas primordial yang beragam. Agama Islam, sebagai contoh, telah mengajarkan umat manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka saling mengenal.<sup>3</sup>

Bangsa-bangsa ASEAN pada umumnya merupakan negara pluralistik yang terdiri dari beragam ras, suku/etnis, agama, budaya,

---

<sup>1</sup> Cassel Concise English Dictionary dalam Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 17-18.

<sup>2</sup> Matulesy dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine, Myanmar, Tahun 2012-2013', *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 36.

<sup>3</sup> Lihat: (Q.S. Alhujurat: 13 yang dikutip Masdar Hilmy dalam tulisan berjudul 'Politik Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia', *Pendewasaan Sikap Beragama melalui Rasionalisasi Publik*, Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia, Editors: Ahmad Zainul Hamdi dan Mukafi, Penerbit daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 31-32).



dan kepercayaan lainnya. Pluralitas berasal dari kata *plural* yang berarti *jamak*, lebih dari satu. Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari keutamaan atau keunikan dan kekhasan. Pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis atau sebagai objek komparatif dari keragaman dan kesatuan yang merangkum semua dimensinya.<sup>4</sup> Selama ini, barangkali banyak yang berpandangan bahwa Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang penduduknya homogen dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Thailand sejatinya sebagai negara yang tidak pernah dijajah suatu bangsa kolonial, ternyata Thailand juga merupakan negara di mana masyarakatnya pluralistik pula.<sup>5</sup>

Di satu sisi, pluralitas merupakan suatu 'kekayaan', di sisi lain, pluralistik juga memiliki potensi terhadap konflik sosial yang memengaruhi relasi mayoritas dan minoritas yang bernuansa etnis dan agama. Tiap negara Asia Tenggara memiliki pengalaman tersendiri dalam konflik dan cara mengatasi konflik etnis bernuansa agama yang dialaminya. Adapun, suatu sikap yang dikatakan mencerminkan pluralitas, antara lain: hidup dalam perbedaan atau toleransi; sikap saling menghargai, di mana menempatkan semua manusia dalam relasi kesetaraan dan tidak ada superioritas; sikap saling percaya; interdependen, suatu sikap saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hal ini menuntut agar orang selalu bekerjasama dan bertanggung jawab satu sama lainnya. Keadaan seperti ini hanya dapat terjadi dalam tatanan sosial yang sehat di mana manusia saling memelihara hubungan sosial yang kokoh.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 9.

<sup>5</sup> Selain pemeluk agama Buddha, tidak sedikit warga Thailand yang memeluk agama lain, seperti Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Yahudi, Singh, dan Tao. Patut dicatat, saat ini Thailand rumah bagi sekitar 64 juta umat Islam. Pemeluk agama Islam di Thailand berasal dari etnis Persia, Cham (Muslim Kamboja), Bangali, India, Pakistan, dan etnis Melayu dari Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia. Lihat: (*Republika*, 'Muslim Melayu di Thailand Selatan', diakses: 30 Mei 2017).

<sup>6</sup> Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 118.

#### 4 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Dari pengalaman sosio-historis beberapa negara di Asia Tenggara, justeru memperlihatkan suatu sikap dan kondisi hubungan antaretnis (mayoritas-minoritas) yang cenderung berpotensi menjadi konflik etnis dan agama. Pemicu konflik sosial-etnis dan agama tersebut terkadang berhubungan dengan 'tekanan' militer, tetapi sebagai pemicu mendasar adalah adanya perselisihan antarideologi-ideologi mutlak, tidak adanya kompromi, dan adanya desakan nasionalisme negara melawan nasionalisme etnis. Di Asia Tenggara, karenanya, intensitas konflik antaretnis mayoritas (didukung penguasa) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antaretnis berujung pada gerakan 'separatisme'. Dalam banyak kasus, pemerintah negara tersebut, sering memberi 'label' kepada etnis minoritas sebagai 'pemeberontak', 'teroris', dan 'separatisme'. Klaim-klaim sepihak seperti ini, tentunya, dapat merugikan kalangan etnis minoritas dan dapat mempersulit upaya mencari solusi substantif atas konflik etnis dan agama.

Di satu sisi, agama dipandang pemeluknya sebagai sumber moral dan nilai, disisi lain, agama dianggap sebagai sumber konflik. Afif Muhammad mengatakan 'agama sering kali menampakkan diri sebagai suatu yang berwajah ganda'. Johan Effendi juga mengatakan agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, tetapi pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai suatu yang dianggap garang dan menyebar konflik, bahkan tidak jarang seperti tercatat dalam sejarah menimbulkan peperangan.<sup>7</sup>

Dalam setiap agama, terdapat istilah 'dakwah', kendatipun dalam bentuk yang berbeda. Dakwah merupakan upaya untuk mensosialisasikan (mengajak, menyeru) ajaran agama. Bahkan tidak jarang masing-masing agama menjustifikasi bahwa agamanyalah yang paling benar. Jika kepentingan ini lebih dikedepankan, masing-masing agama akan berhadapan satu sama lain dalam sentimen agama. Tidak mustahil benturan pun sulit dihindarkan, dan inilah kemudian yang timbul-

---

<sup>7</sup> Seperti dalam kutipan: (Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 147).

kan konflik antar agama, bukan intraagama. Misalnya peristiwa Perang Salib antara umat Islam dan Kristen di mana tragedi sangat kuat muatan agamanya dari pada politisnya. Kecenderungan sentimen agama di antara umat (Islam dan Kristen) menimbulkan konflik berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban.<sup>8</sup>

Dalam tataran ini tampaknya agama tidak hanya menjadi faktor pemersatu (*integrative factor*) tetapi juga faktor disintegratif (*disintegrative factor*). Faktor disintegratif muncul karena agama itu memiliki potensi yang melahirkan intoleransi (konflik), baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan agama. Sejumlah kasus yang dapat didekati berdasarkan teori diatas. Di Indonesia, misalnya, kasus-kasus intoleransi agama lebih sering disebabkan oleh faktor eksternal yang seringkali bersifat dan bermuatan politis. Banyak kasus yang memicu kerusuhan di berbagai daerah, sering pula dengan dalih mengatasnamakan agama. Seperti beberapa kerusuhan sosial yang pernah terjadi sebelumnya yang terjadi di Indonesia, antara lain kasus Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantan, yang sangat politis dan bertalian erat dengan bias kehidupan beragama.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid<sup>10</sup> menyarankan agar agama tidak disejajarkan dengan etnis dan ras. Betapapun semangat yang terdapat dalam akronim SARA itu mungkin bisa dibenarkan, tetapi dari sudut kepentingan lebih besar dan berjangka panjang, sebenarnya sangat merugikan, terutama dalam bidang pembangunan agama. Dengan demikian, dampak negatif agama berupa daya pemecah belah (*sentrifugal*), juga konflik, dapat dieliminasi; dan sebaliknya, dampak positif agama berupa daya pemersatu (*sentripetal*) dapat dibangun dan dikembangkan.

---

<sup>8</sup> Dadang Kahmad, 'Sosiologi Agama....', *ibid.*, hlm. 147.

<sup>9</sup> Dadang Kahmad, 'Sosiologi Agama....', *ibid.*, hlm. 150.

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid dalam: (Dadang Kahmad, 'Sosiologi Agama....', *ibid.*, hlm. 151).

## 6 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara



Gambar 1: Demonstrasi dan protes dari kalangan etnis & agama minoritas di Asia Tenggara, diakses: 27 Oktober 2017.

Di banyak negara di Asia Tenggara, fenomena konflik etnis dan agama, *ethno-religious*, merupakan suatu hal yang lazim terjadi ditengah masyarakat pluralistik pada negara-negara tersebut. Konflik sosial etnis-agama minoritas Muslim dengan etnis mayoritas (mendapat dukungan penguasa) sering kali memiliki agama yang berbeda. Perbedaan keyakinan agama ini dan pengalaman sosio-historis-kolonialisme suatu bangsa agaknya berpengaruh kuat sebagai 'akar konflik' bernuansa keagamaan di Asia Tenggara. Selain itu, perbedaan struktur sosial, etnis, agama, ekonomi, politik dan budaya, merupakan faktor lainnya, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 'proses' terjadinya konflik etnis dan agama, minoritas Muslim di berbagai negara di Asia Tenggara. Sering kali, upaya 'solusi' konflik etnis minoritas (Muslim) dan mayoritas-Non-Muslim (dukungan 'penguasa'), diperlukan adanya kebijakan internal negara yang tanpa diskriminatif terhadap mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam tulisan ini, lebih difokuskan pada sejauhmana terjadinya konflik sosial-etnis dan agama, *ethno-religious*, di Asia Tenggara. Sebagian konflik sosial-etnis dan agama terjadinya dengan berproses sejak berabad-abad lamanya, yang melibatkan etnis dan agama

(minoritas), khususnya etnis minoritas Muslim. Seperti: minoritas Muslim di Myanmar (Muslim Rohingnya), Thailand Selatan (Muslim-Malay-Fattani); Philipina (Muslim-Moro); Malaysia (etnis Cina dan India); dan Indonesia (Cina). Kecuali di Indonesia di mana sering terjadi konflik sosial etnis Tionghoa (Cina) yang minoritas dengan mayoritas Pribumi (*indigenous*) yang Muslim, selain itu, terdapat pula konflik intra-agama atau sektarian, seperti bertalian dengan perbedaan pandangan tentang aliran agama, seperti anti-Syi'ah dan anti-Ahmadiyah. Konflik anataragama dapat berupa konflik antara pemeluk Islam dengan pengikut agama lainnya karena alasan tertentu bertalian dengan praktik keagamaan, seperti pendirian rumah ibadah. Di Thailand misalnya antara etnis minoritas Muslim Moro dengan mayoritas Buddha, sepertinya halnya terjadi di Rohingnya-Rakhine, Myanmar, antara minoritas Muslim dengan pemerintah Myanmar (Buddha).

Penulisan buku ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan sejauhmana terjadinya konflik *ethno-religious* di negara-negara Asia Tenggara; 2) menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik *ethno-religious* di Asia Tenggara; dan mengungkapkan peranan *Association of South-East Asia Nations* dalam upaya resolusi konflik sosial etnis dan agama di Asia Tenggara.

*Secara akademik*, penulisan buku ini bermanfaat untuk menghasilkan data dan informasi ilmiah (*scientific*) sebagai khazanah pengembangan ilmu pengetahuan sosial-keagamaan dan politik atau studi keislaman. *Secara praktik*, penulisan buku ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah dalam konteks kebijakan etnisitas, yakni sebagai '*in-put*' yang bernilai dalam upaya mereduksi potensi dan eskalasi konflik *ethno-religious* yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara. Penulisan buku ini selanjutnya diharapkan dapat memberi kontribusi akademik sebagai upaya mendorong berkembangnya studi-studi ilmu sosial (sejarah, politik, ekonomi) dan studi ke-islaman di Perguruan Tinggi Kereagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan universitas umum lainnya.

Penulisan buku ini berawal dari hasil penelitian kompetitif 2017 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang meng-

## 8 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

gunakan pendekatan kualitatif. Seperti diungkapkan Nanang Martono, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar ilmiah. Penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan dan memaknai dunia sosialnya, sebagai hasil interaksi sosialnya. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari individu dan sumber referensi lainnya, seperti: buku, jurnal, koran, dokumen, dan sumber lainnya." Data sekunder dengan menelusuri dan meneliti buku, jurnal, artikel, dokumen, website, hasil penelitian, dan sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data (*technique of collecting data*) dilakukan melalui kajian pustaka (*review of literatures*), yang bersumber dari jurnal, buku-buku, koran, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan pembahasan penulisan buku ini. Teknik analisa data, di mana data yang sudah diklarifikasikan dibantu dengan teori-teori kemudian direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah diskripsi yang kemudian di analisis hingga memungkinkan untuk pengambilan suatu kesimpulan. Dikatakan William Wiersma, aktivitas pertama dalam proses penulisan buku ini adalah melakukan riset literatur atau *review of literatures*, dengan mencari data atau informasi sesuai pertanyaan penelitian. Setelah pertanyaan telah diidentifikasi, setidaknya secara tentatif, informasi yang diperlukan tentang pertanyaan agar supaya dapat diletakkan secara tepat dan penelitian dapat berproses dengan efektif. Dengan sejumlah informasi yang diperoleh melalui banyak sumber, riset literatur tidak dilakukan dengan cara 'remeh' atau 'enteng'. Wiersma mengatakan selanjutnya:

'It is a systematic process that requires careful and perceptive reading and attention to detail. In the review of literature, the researcher attempts to determine what others have learned about similar research problems and to gather information relevant to the research problem at hand. This process centers on the three questions: Where is the information found?; What

---

" Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Pengantar: William L. Neuman, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 11-12.

should be done with information after it has been found?; and What is made of information?...the first question deals with the specific sources of written reports... the second question deals with how information is assembled and summarized... answering the third question requires making a judgement about the information in a research report. What parts of the reported results are relevant to the research problem? How well was research conducted? Thus, answering the third question requires a somewhat critical analysis of the report review. Then, information from the related reports can be put together.<sup>12</sup>

Taylor dan Bogdan (1984) mendefinisikan analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Proses analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penulisna buku ini dan membuktikan hipotesis peneitian; menyusun dan menginterpretasikan data sudah diperoleh; menyusun data dalam cara bermakna sehingga dapat dipahami, sehingga lebih memudahkan orang lain dalam memahami permasalahan penelitian dalam kepentingan penulisan buku ini; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan di lapangan; dan menjelaskan argumentasi temuan di lapangan.<sup>13</sup>

Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif meliputi empat hal penting, sebagai-berikut: *Pertama*, pengumpulan data (*data collecting*), yakni kegiatan awal dengan mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pertanyaandalam penelitian. *Kedua*, reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-

---

<sup>12</sup> William Wersma, *Research Methods in Education*, Fifth Edition, A Division of Simon & Schuster, Inc., USA, 1991, pages 49-40.

<sup>13</sup> Dikatakan Creswgeell, kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif. Hal ini bukanlah proses linear; peneliti kualitatif selalu melakukan refleksi atas temuan data yang diperoleh. Lihat: (Nanang Martono, 'Metode Penelitian Sosial...', *ibid.*, hlm. 12).

## 10 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

menerus. Banyak informasi yang diperoleh penulis, tetapi tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian/penulisan buku ini. Untuk itulah, reduksi data diperlukan kapan saja sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan pada akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang mesti diseleksi. *Kedua*, penyajian data (*data display*), yakni kegiatan menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang belum lengkap dan perlu klarifikasi, atau belum diperoleh sama sekali. *Ketiga*, verifikasi, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni kegiatan merumuskan kesimpulan berdasarkan kegiatan atau aktivitas terdahulu. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir.<sup>14</sup>

Selanjutnya, sistematika penulisan buku perlu juga dilakukan, dengan harapan kajian dalam buku ini perlu difahami sehingga pesan penulis dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Untuk itu, buku ini dibagi menjadi lima bagian. Bab I merupakan introduksi atau pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang mengungkapkan deskripsi dan gagasan yang mendorong pengungkapan masalah dalam penulisan buku ini; permasalahan pokok yang diperlukan penjelasannya bertalian dengan konflik etnis dan agama, etno-religius, di Asia Tenggara; faktor-faktor penyebab konflik etno-religius tersebut; dan penjelasan dan analisis tentang peranan organisasi regional, *Association of South-East Asia Nations (ASEAN)*, dalam mereduksi isu konflik etno-religius di Asia Tenggara. Pada Bab ini juga dikemukakan tentang signifikansi penulisan dengan alasan-alasannya: secara akademik-saintifik dan secara praktik penulisan buku ini diharapkan memberi kontribusi positif dalam pengambilan kebijakan etnisitas sebagai upaya mereduksi konflik etno-religius pada negara-negara di Asia Tenggara.

Bab II merupakan kerangka teoretik yang digunakan sebagai '*guidence*' dalam penulisan buku ini, berhubungan dengan pemahaman

---

<sup>14</sup> Nanang Martono, 'Metode Penelitian Sosial...', *ibid.*, hlm.12.



bahwa kebanyakan bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia merupakan masyarakat pluralistik (*plural societies*). Pada bab ini juga diungkapkan tentang perbedaan karakteristik kalangan minoritas dan mayoritas dari perspektif sosiologi. Selain itu, dikemukakan pula secara teoretik tentang penyebab terjadinya suatu konflik etno-religius di Asia Tenggara. Bab III, dikemukakan tentang metodologi penulisan keterkaitan dengan pendekatan dan teknik pengumpulan data. Bab IV merupakan hasil dan pembahasan penulisan buku ini yang terfokus pada sejauhmana eskalasi konflik etno-religius di di Asia Tenggara; faktor-faktor penyebab konflik di Asia Tenggara; dan peranan organisasi regional ASEAN dalam upaya resolusi atau mereduksi berbagai kasus konflik etno-religius di Asia Tenggara. Bab V merupakan penutup yang bertalian dengan simpulan dan saran. Pada bagian ini berisi gagasan utama yang terkandung dalam tema-tema pokok yang diungkapkan dalam pembahasan dalam buku ini sebelumnya. Di samping itu, dalam penutup ini diungkapkan pula tentang saran-saran dari penulis.

## BAB II

# KONSEP DASAR KONFLIK ETNO-RELIGIUS

**K**emajuan sains dan teknologi, terutama teknologi informasi dan transportasi, telah menjadikan dunia sebagai 'kampung besar', yang oleh sebagian ilmuwan sosial, dikatakan sebagai *global village*. Oleh karena itu, penduduk di negara-negara di dunia umumnya telah menjadi pluralistik, dari segi ekonomi, budaya, etnis, ras dan agama. Disatu hal ini, dapat mendorong proses interaksi, kooperasi, akomodasi, dan akulturasi/asimilasi, antara berbagai kelompok masyarakat pluralistik itu. Di sisi lain, pluralistik dapat menimbulkan ketegangan bahan konflik sosial karena tiap kelompok berusaha mempertahankan identitas masing-masing, termasuk pandangan ideologi tentang agama.<sup>1</sup>

Kebanyakan bangsa-bangsa di dunia merupakan masyarakat pluralistik (*plural society*). Masyarakat pluralistik dimaksud adalah keberadaan segmentasi kelompok-kelompok sosiologis yang dapat terbentuk secara efektif dalam hal kultural dan kohesi olitik di dalam masyarakat, pada basis identitas kelompok. Kadang kala kohesi-kohesi itu bersifat langsung dan primordial, kadang-kadang (kohesi-kohesi) diciptakan di luar lawan politik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia*, Sambutan: Jalaluddin, Epilog: Irwan Abdullah, LKIS, Yogyakarta, 2016, hlm. 269.

<sup>2</sup> Daniel Bell, 'Ethnicity and Social Change', *Ethnicity*, Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, pages 138-146.

## 14 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Untuk kasus Indonesia, misalnya, sebagai suatu negara yang masyarakatnya pluralistik, memiliki suatu struktur masyarakat yang paling tidak memiliki dua karakteristik. *Pertama*, secara horizontal, ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat tersebut ditandai dengan adanya perbedaan vertikal lapisan atas lapisan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan-perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan 'masyarakat majemuk' (*plural society*), di mana istilah itu pertama kali digunakan Furnivall (1967) untuk mendeskripsikan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, suatu masyarakat terdiri dari dua elemen atau lebih yang hidup secara terpisah tanpa terintegrasi satu sama lainnya dalam satu kehidupan politik.<sup>3</sup> Definisi 'majemuk' telah dikembangkan M.G. Smith, dalam kajiannya, di Kepulauan Karibia, di mana kelompok-kelompok etnis berbeda 'berbaur tapi tidak larut' (*mix but do not combine*). Dominasi politik oleh satu suku bangsa di mana kelompok-kelompok yang berbeda terlibat di dalam suatu sistem ekonomi bersama, di mana masing-masing menempati suatu posisi tertentu dalam pembagian kerja (*division of labour*) adalah hal yang memelihara masyarakat majemuk (*plural*) dalam keseimbangan.<sup>4</sup>

Etnis (*ethnic*) adalah sebuah kolektivitas yang anggotanya memiliki kesamaan gaya hidup, sejarah dan bahasa namun identifikasi mereka terhadap tanah air nenek moyang bersifat lemah dan berisiko untuk hilang sama sekali sementara etnisitas adalah hasil tarik menarik antara teritori dan budaya. Jika suatu etnis berusaha dan sukses dalam membangun klaim terhadap teritori yang ditempatinya dan dengan teritori itu etnis tersebut menganggapnya sebagai tanah air, maka etnis

<sup>3</sup> J.S. Furnivall, "Plural Societies", *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne, 1980, pages 80-103.

<sup>4</sup> Van der Berghe menerapkan konsep ini ke negara Amerika, di mana dia mengklaim bahwa suku-suku bangsa yang ada terus memiliki dan menduplikasi pranata-pranata dan sistem-sistem nilai asli, kecuali dalam bidang politik dan ekonomi, di mana hanya ada satu sistem bersama. Lihat: (Zulyani Hidayah, "Kemajemukan dan Konflik: Pendekatan Kebudayaan", *Wacana Antropologi: Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Volume 2, Nomor 4, Januari-Februari 1999, hlm. 1-4).

tersebut dianggap sebagai bangsa (Oommen, 1997). Kelompok etnik merupakan suatu kategori khas penduduk dalam masyarakat lebih luas dalam kebudayaannya yang biasanya berbeda dengan kebudayaan kita. Para anggota kelompok tersebut adalah orang/ kelompok yang merasa terikat oleh kesamaan ras, nasionalitas, atau kebudayaan (Moris, 1968).<sup>5</sup>

Secara sosiologis, minoritas<sup>6</sup> dapat didefinisikan dalam konteks perbedaan kekuatan di mana kelompok didalam struktur sosial, menjadi subjek yang didiskriminasi dan atau mendapatkan prasangka buruk dari kelompok yang lebih kuat atas dasar perbedaan yang nyata atau digunakan sebagai kriteria sebuah pengelompokkan tertentu (Carlier, 1974 dalam Carlier, 1974). Untuk menjelaskan mengenai minoritas ini memerlukan proses yang sangat akurat, elemen seperti pengelompokkan, pelabelan dan keseimbangan kekuatan harus ditekankan, tidak hanya sebatas data statistik. Jika bersandar pada teorisosiologi secara umum dan studi minoritas secara khusus (Newman 1973, Rex,1961, Werthem, 1971 dalam Carlier, 1977), maka kata kunci yang kemudian muncul adalah 'diskriminasi' dan 'prasangka' di mana kedua konsep tersebut sering dijadikan kelompok yang berkuasa sebagai *senjata* di dalam konflik sosial.

Theodorson & Theodorson<sup>7</sup> mengatakan bahwa kelompok minoritas (*minority groups*) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan sering dipergunakan untuk menunjukan pada kategori perorangan, dari pada kelompok-kelompok. Seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Istilah minoritas tidak termasuk semua kelompok, yang berjumlah kecil, namun dominan dalam politik. Akibatnya istilah kelompok minoritas hanya ditujukan kepada mereka, yang oleh sebagian besar penduduk masyarakat dapat di jadikan obyek prasangka atau diskriminasi. Akhirnya perlu juga dijelaskan tentang

<sup>5</sup> Sumber: *Internet*, diakses: 29 Juli 2017.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 16 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

hubungan antara kelompok (*Intergroup relation*). Menurut Theodorson & Theodorson (1979) pada dasarnya istilah ini berarti penelitian mengenai hubungan antarkelompok, seperti pada kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Selain itu juga konsisten, atau konflik di antara suku-suku bangsa, atau kelompok-kelompok ras, sehingga dapat dianggap sebagai masalah sosial (*social problem*).

Akhil Malaki<sup>8</sup> mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam studi-studi etnisitas: *primordialis* dan *instrumentalist*. *Primordialis* merupakan studi etnisitas bertalian dengan agama, pertalian darah, ras, bahasa, daerah, dan adat-istadat (*customs*). *Instrumentalist* menempatkan etnisitas sebagai sebuah 'konstruksi sosial' (*social construction*), sumber-sumber politik dan budaya (*political and cultural resources*) untuk perbedaan interes/minat dan status kelompok-kelompok (*status groups*). Dalam pandangan ini, keberadaan makna etnisitas dapat beragam tergantung pada identifikasi sebagai faktor 'tekan-tarik' (*push-pull factors*)<sup>9</sup>, seperti keadaan-keadaan di mana identitas-identitas etnik mengalami transisi-transisi atau rekonfigurasi.

Ketika perhatian terhadap etnisitas, suatu hal yang tidak dibicarakan tentang apa yang diinginkan orang, tetapi dari pada bagaimana dan untuk apa tujuan-tujuan tertentu mereka mengidentifikasi mereka sendiri sepanjang garis-garis atau batasan-batasan etnik. Dalam pemahaman ini, pendekatan *primordialis* dapat menjadi sedikit membantu. Thomas-Erikson (1993)<sup>10</sup> mengatakan bahwa etnisitas muncul melalui situasi-situasi sosial dan pertemuan-pertemuan, dan melalui cara-cara orang mengatasi kebutuhan (*demands*) dan

---

<sup>8</sup> Akhil Malaki, 'Theoretical and Methodological Notes/Notas Teoreticas Y Methodologicas, A Push-Pull Model of Ethnic (Re)configuration in A Plural Society: Trinidad and Tobago', *Iberoamericana, Nordic Journal of Latin America and Caribbean Studies*, Vol. XXXI: 2 2001, pp. 103.

<sup>9</sup> Push-Pull Model' merupakan model yang dikemukakan Albert O. Hirschman's (1979), *Shifting Involvement*, sebagai model dinamis yang dapat membantu menjelaskan perubahan-perubahan dan rekonfigurasi-rekonfigurasi dalam relasi-relasi etnik. Lihat: (Akhil Malaki, 'A Push-Pull Model...', *ibid.*, p. 103.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 104.

tantangan-tantangan (*challenges*) kehidupan—sosial, politik, dan ekonomi. Identitas-identitas etnik merupakan bukan sebagai *ascribed status* (status diperoleh sejak lahir) atau bukan juga sebagai *achieved status* (diraih melalui usaha). Keberdaannya terselip di antara situasi seleksi dan perintah yang tidak mungkin dari suatu yang tidak ada.

### A. Konflik Sosial-Etnis

Seorang ahli sosiologi, Robert E. Park, mengungkapkan bahwa hubungan antarkelompok secara teratur dapat terjadi melalui beberapa tahapan yang disebutnya sebagai 'lingkaran ras'. Lingkaran ini mempunyai bentuk kontak (*contact*), persaingan dan kompetisi (*competition*), akomodasi (*accommodation*), dan asimilasi (*assimilation*). Tahapan-tahapan ini dikenal juga dengan bentuk-bentuk interaksi sosial<sup>11</sup> di mana interaksi sosial yang positif akan mempermudah kerjasama, dan interaksi sosial yang negatif bercenderung terjadinya potensi konflik.

Dalam teori *the Origins of Ethnic Groups*, Max Weber mengungkapkan bahwa suatu suku dengan jelas dibatasi ketika suku itu menjadi sub-bagian dari komunitas yang dalam kenyataan sering membentuknya. Komunitas etnis secara artifisial dinyatakan oleh sejumlah suku (etnis), yang merupakan suatu rekayasa politik (*a political artifact*). Suku-suku yang telah eksis sebelum komunitas etnis (*polis*) terbentuk, merupakan suatu yang identik dengan hubungan kelompok-kelompok politik, yang kemudian diasosiasikan ke dalam suatu komunitas yang dinamakan *ethnos*. Suku-suku yang tak terorganisasikan (*unorganized tribes*) itu dalam waktu yang cukup lama, secara politis, sebagai suatu perkiraan komunitas bertalian darah (*blood community*), akan menggunakan memorinya untuk ikut serta dalam tindakan politis berupa suatu penaklukan atau pertahanan

---

<sup>11</sup> *Interaksi sosial* merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antarorang perorangan dengan kelompok manusia lainnya. Lihat: (J.R. Feagin dan C.B. Feagin, *Racial and Ethnic Relations*, New Jersey Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993, hlm. 27-28; lihat pula: Abdullah Idi, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Editor: Nor Huda, Penerbit Tiara Wacana Yogyakarta, 2009, hlm. 17).

## 18 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

tunggal. Memori-memori politis inilah yang merupakan suatu *tribe*. Oleh karena itu, dalam faktanya, kesadaran suku terutama sekali dibentuk oleh pengalaman politis yang sama, bukan oleh keturunan sama yang menjadi suatu 'sumber'. Pengalaman tersebut acapkali menjadi keyakinan dalam etnisitas bersama.<sup>12</sup>

Max Weber<sup>13</sup> selanjutnya mengemukakan bahwa suatu 'sumber' tidak hanya bertalian dengan kebiasaan bersama (*conditioned customs*) yang mungkin memiliki asal yang beragam. Perpindahan dari adaptasi kondisi-kondisi yang natural, maupun imitasi dengan dengan lingkungan sekitarnya (*neighborhood*), pada gilirannya dalam praktik melahirkan kesadaran suku (*tribal-consciousness*) yang pada umumnya memiliki makna politis. Yaitu akan mudah member 'basis' untuk mengikuti tindakan politis anggota suku (*volgenossen*) yang memper-timbangkan satu sama lain sebagai keluarga yang bertalian darah (*blood relatives*). Adanya keyakinan dalam 'etnis bersama' (*common ethnicity*) itu, sering kali, tetapi tidak selalu, merupakan tantangan bagi keberadaan kelompok, dapat mempermudah hubungan sosial (*soziale verkhergemeinschafen*).<sup>14</sup>

Simpson dan Yinger<sup>15</sup> mengungkapkan kelompok etnis minoritas memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks. *Kedua*, memiliki ciri-ciri yang melemahkan anggapan terhadap diri sendiri (*self-esteem*). *Ketiga*, merupakan kelompok yang memiliki kesadaran kelompok yang tinggi, yang tumbuh karena masing-masing anggota memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri yang menguntungkan atau merugikan. *Keempat*, keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya meskipun tidak ada

---

<sup>12</sup> Max Weber, 'The Origin of Ethnic Groups', dalam John Hutchinsonson and Anthony D. Smith (Eds.), *Ethnicity*, Oxford University Press, 1996, pages 35-36.

<sup>13</sup> Max Weber, 'The Origin of Ethnic Groups...' *ibid.*, page 36.

<sup>14</sup> Max Weber, 'Ethnic Group', dalam Talcott Parsons, dkk.(Eds.), *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*, Volume 1, The Free of Glencoe, USA, 1962, hlm. 305-309.

<sup>15</sup> G.E. Simpson dan J.M. Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Haper and Row Publication, New York, 1972, pages 12-13.

lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol. *Kelima*, anggota kelompok minoritas baik karena pilihan sendiri atau kebutuhan, memiliki kecenderungan untuk kawin dengan mereka berasal dari kelompok sendiri.

R. Dahrendorf<sup>6</sup>, mengutip Max Weber, dalam konteks ciri-ciri mayoritas, terutama bertalian dengan otoritas dan struktur otoritas, mengungkapkan: *pertama*, otoritas menggambarkan 'superordinate' dan 'subordinate'. *Kedua*, superordinate atau kelompok dominan mendominasi atas subordinate yang tergambar dalam bentuk perilaku memerintah dan melarang. *Ketiga*, superordinat memiliki hak membuat ketentuan undang-undang; otoritas merupakan legitimasi hubungan superordinat dan subordinat. Otoritas ini bukan didasarkan atas personal atau akibat situasional, melainkan lebih dari pada penghargaan yang dihubungkan dengan kedudukan sosial. *Keempat*, hak atas otoritas terbatas pada 'kadar' dari orang-orang tertentu. *Kelima*, tidak mengindahkan undang-undang ada sanksinya, serta sistem yang legal atau adat yang sifatnya kuasi-legal yang dapat melindungi efektivitas otoritas.

Perbedaan latar belakang etnis sering kali merupakan salah satu penyebab perpecahan internal. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik etnis dan kemunculan nasionalisme menyebabkan kehancuran relasi sosial di beberapa negara. Hal ini pula telah menyebabkan para ilmuwan sosial untuk mengkaji kompleksitas konsep tentang etnisitas, nasionalisme, dan pembangunan bangsa. Berkembangnya tulisan tentang etnisitas dan nasionalisme (Billig, 1995; Christie, 1998, Hutchington & Smith, 1994, 1996; Erikson, 1993; Kellas, 1991; McCrone, 1998; Nairn, 1997; Schwzrmanted, 1991) memperlihatkan bahwa kedua hal tersebut tidak mudah tergerus oleh modernisasi (Deutsch, 1996; Weber dalam Gerth & Mills, 1948). Kendatipun saat

---

<sup>6</sup> R. Dahrendorf, *Toward a Theory of Social Conflict, Social Change: Sources, Patterns and Consequences*, Amital Etzoini and Eva Etzoini Haley (Eds.), New York, Basic Book Inc., 1972, page 108. Lihat pula: (Louis Wirth, "The Problem of Minority Group", in Talcott Parsons, et al., *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*, Volume 1, The Free of Glancoe, USA, 1962, pages 309-318).



## 20 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

ini agak sulit membangun teori umum tentang etnisitas dan nasionalisme (McCrone, 1998) berbentuk kerangka teori perlu dipertimbangkan, terutama bertalian dengan kelompok etnis dan etnisitas. Misalnya, alasan kelompok etnis memasuki dunia politik dan apa saja pengaruh pergerakan politik dalam masyarakat majemuk. Istilah etnik berasal dari bahasa Yunani '*ethnos*' yang berakar dari kata '*ethnikos*' yang berarti orang kafir (William, 1976; Erikson, 1993). Etnik dan etnisitas juga bertalian dengan 'pengelompokan orang dan hubungan kelompok'. Dikatakan McKay dan Lewins (1978), istilah 'kelompok etnik' hanya bisa digunakan untuk merujuk pada interaksi antarindividu yang mempunyai kesamaan karakter etnik. Dari pandangan McKay dan Lewins, sebuah kelompok etnik bisa terbentuk jika mempunyai dua hal, yakni (1) *kesamaan karakter* etnik yang terjadi karena adanya (2), *interaksi*, di mana keduanya sebagai faktor penting dalam memahami konsep kelompok etnik dan etnisitas.<sup>17</sup>

Dengan demikian, faktor *pertama* yang membentuk kelompok etnis adalah kesamaan karakter. Kesamaan karakter etnik umumnya merujuk pada aspek-aspek penanda budaya seperti ras (ciri biologis), bahasa, dan nenek moyang. Tetapi, perspektif objektif itu, tampak terlalu sempit karena hanya menekankan pada keberlanjutan sosial dan bukannya pada adaptasi sosial (Barth, 1969). Oleh karenanya, pandangan baru yang lebih subjektif pantas dipertimbangkan, seperti aspek kesadaran sebuah kelompok terhadap identitasnya sendiri, yang juga dietujui kelompok lainnya (Glazer & Moynihan, 1963; Weber dalam Parsons, 1961). Kendatipun begitu, Phadnis (1989) berpandangan bahwa 'dimensi psikologis seperti mempunyai masalah tersendiri: bagaimana dan pada saat seperti apa sebuah kelompok dapat menyadari hal demikian?'. Phadnis secara spesifik menekankan bahwa 'pandangan objektif dan subjektif saling melengkapi satu sama lain untuk bisa memahami proses evaluasi dan perkembangan dari sebuah kelompok etnik yang ditandai oleh keberlanjutan, adaptasi, atau

---

<sup>17</sup> Mohamed Mustafa Ishak, *Politik Bangsa Malaysia: Pembangunan Bangsa Masyarakat Majemuk, Versi Indonesia*, Progressio Press, Jakarta, Indonesia, hlm. 7-8).

perubahan, di mana agak sama dengan pandangan Gordon (1964), Royce (1982), Schermerhorn (1978), dan Smith (1986).<sup>18</sup>

Smith mengungkapkan enam sifat yang melekat pada *ethnie* (istilah yang digunakan Smith untuk kelompok etnik), yakni nama yang mirip, mitos yang sama tentang leluhur, kesamaan sejarah, budaya yang berbeda dengan kelompok lain, wilayah khusus, dan rasa solidaritas. Hal itu memperlihatkan secara jelas bentuk kesamaan identitas yang berbeda dengan kelompok lain. Identitas etnik, bagaimana pun juga, 'tidak abadi tetapi merupakan sebuah hasil –bisa terjadi dari keadaan sejarah, tokoh-tokoh strategis, atau konsekuensi yang tidak disengaja dari proyek politik' (Erikson, 1993). Diyakini bahwa identitas merupakan hal yang pasti berubah dan bisa saja menghasilkan etnisitas-etnisitas baru. Dari pandangan Phenix (1989), sebuah kelompok etnis dapat dilihat sebagai 'kumpulan masyarakat yang terbentuk secara historis dan memiliki wilayah khusus yang ditandai secara fisik maupun imajiner serta kesamaan kepercayaan dan nilai-nilai yang membedakannya dengan kelompok lain'.<sup>19</sup>

Faktor *kedua* yang membentuk kelompok etnik adalah interaksi. Stryker (1973) mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok etnik tidak hadir dalam keterasingan, sebaliknya mereka merupakan hasil dari hubungan. Seperti dikatakan Wallerstein (1990) menambahkan bahwa 'sistem keanggotaan dalam sebuah kelompok etnik adalah persoalan definisi sosial, yang dipengaruhi oleh definisi pribadi tentang anggota dan definisi dari kelompok lain'. Ketika dua atau lebih kelompok etnik berinteraksi satu sama lain dalam latar sosio-politik, muncullah fenomena etnisitas. Erikson (1973) berpendapat, etnisitas merujuk pada 'sebuah aspek hubungan sosial antar-keompok yang anggotanya menganggap diri mereka memiliki budaya berbeda dari anggota kelompok lain'. Kendatipun perbedaan kebudayaan dapat membentuk etnisitas, Erikson (1993) berpandangan bahwa ahli antropologi terlalu menganggap terlalu penting kebudayaan

---

<sup>18</sup> Muhamed Mustafa Ishak, 'Politik Bangsa Malaysia....', *ibid.*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Muhamed Mustafa Ishak, 'Politik Bangsa Malaysia....', *ibid.*, hlm. 9.

## 22 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dengan menekankan bahwa kebudayaan berkontribusi terhadap terbentuknya etnisitas hanya jika perbedaan kebudayaan bisa membuat perubahan sosial. Penyamarataan kelompok etnik dengan kelompok kebudayaan dan menganggap bahwa kesamaan budaya merupakan basis dari identitas etnik sebagai pendapat yang tidak tepat. Seperti diungkapkan oleh Barth (1969) bahwa hal-hal yang membatasi sebuah kelompok seharusnya menjadi fokus pembahasan, bukan aspek budayanya.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kerenggangan hubungan antar-kelompok etnik merupakan kerenggangan sosial, bukan kerenggangan budaya. Meskipun terdapat banyak elemen budaya, seperti agama, bahasa, kebiasaan, dan tradisi dimiliki banyak orang, bukan berarti mereka berada dalam kelompok etnik yang sama. Sebagai contoh, masyarakat Kroasia dan Serbia nampaknya memiliki beberapa elemen budaya yang sama tapi mereka berasal dari etnik yang berbeda. Maka dari itu, sangat penting untuk memahami bahwa kesamaan budaya tidak serta-merta menimbulkan rasa kebersamaan. Sebaliknya, dikatakan White (1978), suatu komunitas bisa berdiri tanpa adanya struktur sosial yang mendukung ataupun kebudayaan yang sama. Intinya, perbedaan etnik muncul akibat dari institusionalisasi kontak dalam sebuah wilayah. Dalam kerangka ini, dikatakan Burgess (1978) etnisitas dapat pula dilihat sebagai 'alat dan juga tujuan pergerakan kelompok oleh pemimpinnya melalui penggunaan symbol-simbol etnik yang bertalian dengan tujuan sosio-kultural dan politik-ekonomi'. Hal ini pula yang mendorong pergerakan politik etnik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan etnik tersebut.<sup>21</sup>

Istilah etnik, ras, dan bangsa, terkadang tumpang tindih dan membingungkan. Kellas mengatakan bahwa 'ras dibedakan dari bangsa dan kelompok etnik melalui istilah biologis yang berdasarkan fenotipe, seperti warna kulit, tinggi badan, dan lainnya, serta perkiraan perbedaan genetik. Sebaliknya istilah bangsa meliputi cakupan lebih

---

<sup>20</sup> Muhamed Mustafa Ishak, 'Politik Bangsa Malaysia...', *ibid.*, hlm. 10.

<sup>21</sup> Muhamed Mustafa Ishak, 'Politik Bangsa Malaysia...', *ibid.*, hlm. 10-11.

luas dan kadang-kadang merujuk pada negara. Pada umumnya, bangsa merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan nenek moyang., yang dikatakan sebagai karakter objektif. Sedangkan karakter subjektif bertalian dengan kepekaan masyarakat terhadap kebangsaan mereka dan rasa kasih sayang untuk bangsanya itu sendiri. Sedangkan istilah komunal dan komunalisme memiliki dua konotasi (Barroclough, 1984), yakni *pertama*, istilah itu merujuk pada fenomena politik atau sosial yang didasarkan pada solidaritas kelompok yang disatukan oleh faktor-faktor yang relatif kekal, seperti bahasa, agama, ras, dan identitas etnis. *Kedua*, komunal dan komunalisme juga digunakan untuk menjelaskan aksi sosial dan politik yang berhubungan dengan cek komunal, yang kemudian menghasilkan keyakinan positif dalam kemampuan dan harapan terhadap, atau kecintaan untuk struktur organisasi.<sup>22</sup>

Dalam konteks relasi etnis mayoritas 'penduduk asli' dan etnis minoritas 'migran', Lieberon dalam M. Kurokawa<sup>23</sup>, mengungkapkan hendaklah perlu memahami permasalahan politik, ekonomi, dan sosio-kultural—namun hal itu belumlah memadai. Karena dalam realitasnya, kontak etnik berbeda, masing-masing mereka berupaya mempertahankan dan meningkatkan suatu tatanan sosial tertentu sejak terjadinya kontak demi membela suatu kepentingan tertentu pula. Permasalahan utamanya adalah bertalian dengan institusi politik, sosial dan ekonomi, yang menggambarkan suatu hubungan masyarakat atau 'penduduk asli' disubordinasi oleh kelompok minoritas 'migran', di mana situasi hubungan yang menggambarkan kelompok disubordinasi oleh kelompok mayoritas 'penduduk asli' (*indigenous*). Situasi hubungan yang menggambarkan kelompok mayoritas dibawah dominasi kelompok minoritas 'migran', apabila institusi-institusi ekonomi, politik, dan sosio-kultural kelompok 'penduduk asli', yakni sebelum kedatangan kelompok minoritas 'migran' dirusak dan dikurangi kekuasaannya atau ditundukkan. Bersamaan dengan itu, kelompok 'mayoritas' berupaya

<sup>22</sup> Muhamed Mustafa Ishak, 'Politik Bangsa Malaysia....', *ibid.*, hlm.11

<sup>23</sup> M. Kurokawa (Editor), *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*, Random House, New York, 1972, page 44.

## 24 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

mempertahankan institusi-institusi tradisional, sehingga konsekuensi-konsekuensinya berupa konflik dengan kelompok minoritas dibawah dominasi kelompok mayoritas, di mana sangat memungkinkan terjadinya integrasi (asimilasi). Dalam situasi ini, bahwasanya kelompok minoritas di bawah tekanan untuk berasimilasi, sehingga keputusan untuk berasimilasi dilakukan secara 'sukarela'

Richard Schermerhorn<sup>24</sup>, dalam paradigma tentang 'orientasi konruen dan tidak konruen dari kecenderungan *Sentripetal* dan *Sentrifugal* terhadap *Subordinate* sebagaimana dilihat dari *Subordinate-Superordinate*', menunjukkan bahwa kecenderungan kecenderungan sentripetal mengarah kepada suatu bersifat *kultural*, antara lain berhubungan dengan nilai-nilai berlaku umum dan gaya hidup lazim berlaku pada suatu masyarakat maupun ciri-ciri *struktural*, yakni partisipasi masyarakat dalam suatu kelompok, asosiasi, dan institusi umum.

Kecenderungan sentrifugal, terjadi apabila di kalangan kelompok minoritas (*subordinate*) memiliki keinginan memisahkan (*segregation*) dari kelompok etnis dominan (*superordinate*). Dengan berbagai ikatan sosial di masyarakat, kelompok minoritas cenderung mempertahankan dan melestarikan identitas kelompoknya, sistem nilai, bahasa, agama, pola rekreasi, dan lain sebagainya. Jika kelompok minoritas memiliki *kecenderungan sentrifugal*, integrasi sosial atau juga asimilasi sulit terjadi. Sebaliknya, bila kelompok etnis mayoritas memiliki *kecenderungan sentripetal*, meskipun subordinat cenderung sentrifugal, asimilasi mungkin terjadi, yang dinamakan asimilasi dengan inkorporasi (*assimilation with incorporation*). Idealnya baik superordinate dan subordinat bersama-sama memiliki kecenderungan sentripetal dalam upaya terwujudnya integrasi sosial maupun asimilasi.

Paradigma Schermerhorn tentang kecenderungan sentripetal atau sentrifugal dari pada kelompok mayoritas dan minoritas itu, dapat dijelaskan bahwa peran kelompok mayoritas memiliki andil signifikan

---

<sup>24</sup> Richard Schermerhorn, *Comparative Ethnic Relations: Framework for Theory and Research*, Random House, New York, 1970, page 83.

terhadap terciptanya hubungan antaretnis, termasuk kemungkinan terjadinya integrasi atau pula asimilasi. Suatu kelompok mayoritas memiliki kemampuan (*power*) dan kelebihan lainnya dalam institusi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan mempermudah terjadinya suatu interaksi sosial ke arah integrasi dan asimilasi, baik dalam konteks asimilasi kultural maupun asimilasi struktural. Akan tetapi, apabila kelompok mayoritas tidak menunjukkan peran seharusnya (pada institusi sosial, politik, ekonomi, dan budaya) dan justru kelompok minoritas tampak lebih berperan, integrasi sulit terjadi dan kecenderungan konflik lebih mudah terjadi. Fredrick Barth<sup>25</sup> mengatakan bahwa masyarakat yang telah terintegrasi pun bukan berarti telah terlepas dari perberdaan pendapat atau pun konflik. Adanya perbedaan-perbedaan dan kemungkinan adanya konflik pada masyarakat yang terintegrasi, dikatakan Barth, sebagai instrumen perkembangan menuju proses integrasi.

## B. Konflik Sosial-Agama

Definisi agama menurut Fox dan Sandler meliputi lima dimensi, berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik. *Pertama*, agama merupakan salah satu dasar/basis bagi identitas. Dalam pengertian ini, agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama, kebangsaan, tempat tinggal, dan etnisitas membentuk identitas dari suatu masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. *Kedua*, agama merupakan sistem kepercayaan yang mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Semakin besar kepercayaan agama terlibat (dalam berperilaku), semakin berkurang kemungkinan terjadinya kompromi dan akomodasi. *Ketiga*, doktrin agama atau teologi juga dapat mempengaruhi perilaku. Doktrin agama ini dijadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan. *Keempat*, agama sebagai sumber legitimasi yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan, sekalipun pihak lain menganggapnya tidak

---

<sup>25</sup> Fredrick Barth, 'Ethnic Group and Boundaries', in John Hutchinson and Anthony D. Smith, *Ethnicity*, University Press Oxford, New York, 1996, page 82.

## 26 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dapat dibenarkan, seperti tindakan bom bunuh diri. *Kelima*, agama diasosiasikan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap memiliki otoritas dalam memberikan pendapat atas nama agama. Dengan demikian, mereka memiliki dasar untuk dapat melakukan mobilisasi agama.<sup>26</sup>

Sedangkan konflik agama (*religious conflict*) dapat didefinisikan menjadi dua bagian: *pertama*, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana agama itu sendiri menjadi pusat ketidakcocokan (bersifat substansial). *Kedua*, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana aktor-aktor yang terlibat menganut tradisi agama yang berbeda sehingga memiliki identitas yang berbeda pula (bersifat fungsional). Dalam konteks Indonesia, pemahaman kedua definisi konflik agama ini diistilahkan sebagai konflik antarumat beragama.<sup>27</sup>

Teori identitas sosial dipelopori Henri Tajfel dalam upaya untuk menjelaskan prasangka, diskriminasi, konflik antar kelompok dan perubahan sosial. Ciri khas Tajfel merupakan nonreduksionis, yaitu membedakan antarproses kelompok dari proses dalam diri individu. Jadi harus dibedakan antarproses intraindividual (yang membedakan seseorang dari orang lain) dan proses identitas sosial (yang menentukan apakah seseorang dengan ciri-ciri tertentu termasuk dalam suatu kelompok tertentu). Menurutnya perilaku kelompok berbeda dari perilaku individu. Yang termasuk dalam perilaku kelompok antara lain *ethnosentrisme*, *in-group bias*, kompetisi dan diskriminasi antar-kelompok, stereotip, prasangka, uniformitas, konformitas, dan keterpaduan kelompok.<sup>28</sup>

Menurut teori ini, identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan sosial yang rumit. Proses-proses yang mendasari perilaku kelompok adalah kategorisasi dan

---

\* Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik Rakhine...', *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>27</sup> Matulesy dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine, Myanmar, Tahun 2012-2013', *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 36.

<sup>28</sup> Sumber: 'Teori Identitas Sosial', diakses: 27 Juli 2017.

perbandingan sosial. Hal ini memungkinkan penekanan persamaan pada hal-hal yang terasa sama dan penekanan pada perbedaan pada hal-hal yang terasa berbeda. Pada gilirannya kategorisasi dan perbandingan sosial ini meningkatkan persepsi *in group*. Tidak ada kebenaran yang semata-mata objektif, semua kebenaran disimpulkan dari perbandingan. Tajfel mendefinisikan Identitas Sosial sebagai pengetahuan individu di mana dia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai. Identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, suku keturunan, dan lainnya. Biasanya pendekatan dalam identitas sosial erat kaitannya dengan hubungan *interrelationship* serta kehidupan alamiah masyarakat dan *society*. Kemudian, pendekatan identitas sosial juga mengamati bagaimana kategori sosial yang ada dalam masyarakat tidak terbentuk secara sejajar, tapi juga menimbulkan status sosial dan kekuasaan. Pada mulanya teori identitas sosial adalah evolusi teori yang keluar dari teori kategorisasi sosial. Teori kategori sosial sendiri diperkenalkan oleh Tajfel tahun 1972. Teori identitas sosial adalah teori yang dikembangkan setelah Tajfel melihat kategorisasi yang dilakukan individu melekatkan juga nilai-nilai di dalamnya pada kelompoknya dalam menilai kelompok lain.<sup>29</sup>

Dari pengalaman negara di Asia Tenggara, justru memperlihatkan suatu hubungan etnis mayoritas-minoritas yang cenderung berpotensi menjadi konflik etnis dan 'agama' yang dapat mengancam integrasi sosial di negara tersebut. Pemicu konflik sosial-etnis dan 'agama' di itu terkadang berhubungan dengan 'tekanan' militer, tetapi sebagai pemicu mendasar adalah adanya perselisihan antarideologi-ideologi mutlak, tidak adanya kompromi, dan adanya desakan nasionalisme negara melawan nasionalisme etnis. Di Asia Tenggara. Intensitas konflik antaretnis mayoritas (didukung penguasa) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antaretnis berujung pada gerakan 'separatisme'. Dalam banyak kasus, pemerintah negara itu, sering kali memberi 'label' kepada etnis minoritas (termasuk etnis minoritas

---

<sup>29</sup> 'Teori Identitas Sosial', diakses: 27 Juli 2017.



## 28 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Muslim) sebagai 'pemeberontak', 'teroris', dan 'separatisme'. Klaim-klaim sepihak ini, tentunya, sering kali dapat merugikan kaum etnis minoritas dan juga dapat mempersulit upaya mencari solusi substantif atas konflik etnis dan agama di negara-negara ASEAN.

Setidaknya terdapat tiga yang menghubungkan faktor agama dengan konflik. *Pertama*, dalam pandangan sosio-psikologis, identitas keagamaan yang beragam membentuk identitas kelompok dan dapat menghasilkan eskalasi dinamika antarkelompok. Orang akan cenderung untuk mengistimewakan orang yang beragama sama karena dianggap sebagai satu kelompok dibanding orang lain yang identitas agama kelompoknya berbeda. Hal ini meningkatkan potensi eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain.<sup>30</sup> *Kedua*, identitas keagamaan bersifat khusus karena terhubung dengan ide, norma, dan nilai bersama yang dilegitimasi oleh sumber transcendental. Sifat transcendental kemudian menciptakan klaim kebenaran mutlak/absolut (dari Tuhan) yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Oleh sebab itu, identitas berdasarkan norma dan nilai transcendental tersebut sulit, bahkan tidak dapat dinegosiasikan/dikompromikan. Hal ini meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan oleh aktor agama terhadap mereka yang tidak percaya atau menganut tradisi agama yang berbeda. Melalui klaim sebagai yang paling benar, mereka menganggap dirinya tidak bersalah ketika melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, konflik agama biasanya dilihat sebagai permainan menang-kalah (*zero sum game*), di mana pihak yang kalah akan memulai lagi perkelahian begitu dia memperoleh kesempatan (Linberg, 2008).<sup>31</sup> *Ketiga*, faktor agama sering dipahami sebagai sumber mobilisasi yang memungkinkan dalam konflik. Pemimpin (agama) dapat (dengan mudah) memobilisasi pengikutnya guna melakukan aksi kolektif dan ikut terlibat dalam konflik. Padahal, konflik tersebut mungkin sebenarnya bukan tentang masalah agama, tetapi berakar pada masalah lain, seperti politik dan sosial-ekonomi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sandi Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas dalam Konflik Rakhine....', *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>31</sup> Sandi Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas ....', *ibid.*, hlm. 37.

<sup>32</sup> Sandi Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas ....', *ibid.*, hlm. 37.

Dari hasil penelitian kuantitatif, agama, karenanya, memiliki peranan signifikan dalam konflik bersenjata di Afrika. Polarisasi agama ini rawan konflik hanya jika dikombinasikan dengan diskriminasi agama dan ketegangan agama (Basedau, 2011). Fox dalam Linberg (2008)<sup>33</sup> mengemukakan berdasarkan uji *statistic t-test*, konflik dengan perbedaan agama cenderung mengakibatkan lebih banyak korban meninggal dan intensitasnya lebih tinggi dibandingkan konflik tanpa perbedaan agama. Bahkan dalam penyelesaian konflik pun, Svensson menemukan bahwa kecil kemungkinan konflik agama diselesaikan dengan perundingan.

Dari hipotesis dan hasil penelitian tersebut menjelaskan mengapa konflik melibatkan isu agama cenderung berlangsung lama dan sulit diselesaikan. Jika konflik dapat diselesaikan dengan kemenangan salah satu pihak, konflik berpotensi untuk terjadi begitu pihak yang kalah memiliki kesempatan. Padahal, konflik agama terjadi umumnya berakar dari masalah-masalah non-agama. Oleh karena itu, resolusi konflik yang seharusnya diterapkan setidaknya harus memperhatikan dua hal. *Pertama*, menyelesaikan masalah akar penyebab konflik yang sesungguhnya. *Kedua*, membangun kembali hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut.<sup>34</sup>

## 1. Diskriminasi

Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Ransford (1980) membedakan antara diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*institutional discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*prejudice*). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak

---

<sup>33</sup> Sandi Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas ....', *ibid.*, hlm. 38.

<sup>34</sup> Sandi Nur Ikfal Raharjo, 'Peran ....', *ibid.*, hlm. 38.

### 30 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat (Edward, 1980 dalam Sunarto, 2004).<sup>35</sup>

Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Dalam arti tersebut, diskriminasi adalah bersifat. Aktif atau aspek yang dapat terlihat dari prasangka yang bersifat negatif (*negative prejudice*) terhadap seorang individu atau suatu kelompok. Dalam rangka ini dapat juga kita kemukakan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbunyi demikian: "Diskriminasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya."<sup>36</sup>

Danandjaja menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Objek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi. Kriteria masyarakat, untuk apa yang dianggap perlakuan diskriminasi terhadap seorang maupun kelompok, selalu bergeser, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.

Diskriminasi adalah bentuk prasangka yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh

---

<sup>35</sup> Sumber: "Teori Identitas Sosial", diakses: 27 Juli 2017.

<sup>36</sup> Sumber: Internet, diakses: 27 Juli 2017.

mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat-istiadat, kebiasaan atau hukum (Supartiningsih, 2007). Doob (1995) yang dikutip Supartiningsih (Supartiningsih, 2007) bahkan melihat diskriminasi menjadi perilaku yang ditujukan untuk mencegah atau membatasi satu kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi, memusnahkan, menaklukan, atau mengasimilasi kelompok lain. Ini berarti, sikap diskriminasi tidak lain adalah satu kompleks berpikir. Di dalam interaksinya terkait etnis, diskriminasi adalah memperlakukan orang berdasarkan kelompok atau dari mana ia berasal dibanding kepribadian maupun karakteristik individu tersebut. Diskriminasi juga biasanya dilakukan sekelompok orang yang merasa dominan untuk melindungi kepentingannya sendiri. (Horton dan Hunt, 1980).<sup>37</sup>

Max Weber dan kalangan Weberian berpandangan bahwa fenomena terjadinya suatu konflik tidak sekadar dikarenakan faktor ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja, seperti sering dikatakan sejumlah kalangan selama ini. Weber mengatakan bahwa konflik terjadi dengan cara lebih luas dari hal demikian, akan tetapi, Weber juga mengakui bahwa sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Weber menjelaskan ada dua tipe konflik yang terjadi dalam masyarakat. *Pertama*, konflik dalam arena politik. Konflik ini tidak hanya dimotivasi oleh nafsu memperoleh kekuasaan atau keuntungan ekonomi oleh sebagian individu atau kelompok. Diungkapkan Weber, konflik tipe ini tidak hanya terjadi pada organisasi politik formal, tetapi pula dalam setiap tipe kelompok, organisasi keagamaan dan pendidikan. *Kedua*, konflik bertalian dengan gagasan dan cita-cita. Konflik tipe ini, dikatakan Weber, di mana individu dan kelompok sering tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka, seperti bertalian dengan doktrin agama, doktrin nilai budaya, filsafat sosial, dan konsepsi gaya hidup kultural. Jadi, dapat dipahami, bahwa selain adanya kesenjangan ekonomi,

---

<sup>37</sup> 'Teori Identitas Sosial', Internet, Diakses: 27 Juli 2017.

## 32 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

terdapat pula faktor lain yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Robertson mengungkapkan bahwa konflik dapat pula disebabkan agama. Dalam konteks ini, Emile Durkheim mengatakan, meskipun agama dalam level sosial berfungsi sebagai integrasi kelembagaan masyarakat, tetapi fungsi agama sebagai integrasi kelembagaan masyarakat pada level individu dapat menimbulkan masalah, karena kebutuhan masing-masing warga masyarakat yang tidak selalu seragam, sehingga kemungkinan yang terjadi dalam persamaan adalah perbedaan kebutuhan masyarakat yang beragam yang dapat mengakibatkan konflik. Fenomena seperti alienasi yang meluas, sinisme yang meningkat, standar moralitas pribadi yang berubah drastis misalnya dalam pola pekerjaan, seks, keluarga, dan berbagai tindakan beragam kelompok yang mengejar kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan kelompok lain juga merupakan keadaan yang oleh Durkheim sebagai ancaman konflik sosial yang pada gilirannya dapat pula menyebabkan integrasi.<sup>39</sup>

Konflik atau kekerasan agama (*religious-based violence*) merupakan istilah yang meliputi semua fenomena di mana agama dalam tiap bentuknya menjadi objek atau subjek kekerasan. Kekerasan agama secara spesifik adalah kekerasan yang dimotivasi oleh atau reaksi terhadap aturan, teks, atau doktrin agama. Kekerasan ini meliputi kekerasan terhadap institusi, individu, atau objek keagamaan, jika kekerasan itu dimotivasi oleh aspek-aspek keagamaan dari target kekerasan atau ajaran pelaku kekerasan. Kekerasan agama tidak merujuk secara eksklusif kepada tindakan yang dilakukan suatu kelompok keagamaan tetapi bisa pula dilakukan kelompok non-keagamaan, atau sebaliknya.<sup>40</sup>

---

\* Retnowati, Agama, 'Konflik dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasakonflik)', *Hasil Penelitian, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Yogyakarta*, sumber: [ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00723](http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00723) (diakses: 13/6/2017).

\* Retnowati, Agama, 'Konflik dan Integrasi Sosial....', *ibid.* (diakses: 13/6/2017).

\* Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, 'Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman, Wacana & Praktek Pluralisme Keagamaan Di Indonesia....', *loc. cit.*, hlm. 16-17.

Kekerasan agama sering kali berkecenderungan menekankan pada aspek simbolik dari tindakan. Kekerasan agama, sebagaimana kekerasan pada umumnya, tidak hanya melukai dan menumpahkan darah orang lain, tetapi juga pemaksaan dan perampasan kebebasan. Kekerasan agama juga tidak semata-mata masalah kekerasan secara spesifik yang dimotivasi ajaran agama, tetapi juga kekerasan verbal yang biasanya muncul dalam bahasa-bahasa kebencian dan kekerasan terhadap kelompok lain.<sup>41</sup>

Mark Juergensmeyer<sup>42</sup> mengatakan bahwa sebagai sebuah fenomena sosial, konflik dan kekerasan agama akan terjadi bila memiliki kesempatan sosial- budaya-politik. Kekerasan agama bisa berkombinasi dengan faktor-faktor non-agama. Ketika ia muncul, ia berkombinasi dengan beragam faktor lain sesuai dengan konteks sosial-budaya-politik yang ada. Dengan kata lain, klaim kebenaran absolut oleh suatu kelompok keagamaan memerlukan konteks sosial-politik tertentu untuk meletus menjadi konflik terbuka. Ketika konflik itu sudah dibungkus dengan idiom-idiom agama, maka ia memiliki daya dorong yang sangat dahsyat.

Salah satu kesempatan yang memungkinkan terjadinya kekerasan agama, terutama dalam skala massif, adalah kelumpuhan negara dalam menangani tindak-tanduk kekerasan warganya. Treverton dalam Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi<sup>43</sup> mengungkapkan bahwa negara sering kali mengatasi kelompok agama yang menggunakan kekerasan secara taktis, bukan strategis. Penguasa politik biasanya memberikan konsesi politik sesuai dengan tuntutan kelompok tersebut dalam isu-isu sosial-keagamaan untuk meredakan kekuatan oposisi kelompok ini. Tetapi, sejarah memperlihatkan bahwa cara seperti ini hanya akan meredakan tuntutan sesaat yang kemudian akan melahirkan berbagai tuntutan baru yang selalu disertai dengan ancaman kekerasan.

---

<sup>41</sup> Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, 'Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman....', *ibid.*, hlm. 17.

<sup>42</sup> Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, 'Intoleransi....', *ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>43</sup> Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, 'Intoleransi....', *ibid.*, hlm. 18

### 34 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Konflik keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat timbul karena adanya perbedaan pemahaman dalam menginterpretasikan sumber yang dicampuri atau didukung oleh aspek-aspek lain, seperti politik, ekonomi, dan lainnya. Dalam hal ini konflik keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat timbul karena perbedaan tersebut menajam disertai batas-batas yang makin jelas satu sama lain ketika ekonomi dan politik dalam masyarakat berimplikasi terhadap perbedaan paham yang ada. Jadi, agama dapat memberi andil terjadinya pertikaian hubungan antarumat beragama. Jadi, berbagai masalah sosial dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, seperti: perbedaan individu, perbedaan pendirian, sikap dan perasaan bisa melahirkan bentrokan; dan perbedaan kebudayaan. Setiap anggota masyarakat tidak lepas dari pola-pola yang menjadi latar belakang pembentuk serta perkembangan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budayanya; perbedaan kepentingan bertalian kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya; dan perubahan sosial. Perubahan sosial yang begitu pesat yang didukung globalisasi, modernisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang menerima perubahan, ada pula yang tidak siap menerima perubahan.

Akibat ketidaksiapan itu dapat memicu konflik dalam masyarakat. Lebih jauh lagi konflik dapat disebabkan oleh perasaan curiga antara anggota masyarakat yang saling berinteraksi. Perasaan curiga ini disebabkan oleh adanya pandangan yang tidak wajar, prasangka mengenai golongan lain atau *stereotype* negatif yang telah mendarah daging. Rasa curiga juga disebabkan karena perasaan deterministik hanya pandangan golongan sendirilah yang benar dan golongan lain pada dasarnya buruk, sehingga tidak ada tempat sikap yang menjiwai toleransi. Konflik tidak pernah menghasilkan kesejahteraan bagi umat manusia, melainkan melahirkan kekacauan dan ketidaktentraman dalam hidup. Karena itu konflik tidak perlu berkepanjangan melainkan perlu diakhiri dan diselesaikan. Dalam hal ini Simmel dalam Johnson mengemukakan beberapa cara untuk mengakhiri konflik: *Pertama,*

menghilangkan dasar-dasar konflik dari tindakan mereka yang terlibat konflik. *Kedua*, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak lain. *Ketiga*, kompromi, *keempat*, perdamaian. *Kelima*, ketidakmungkinan berdamai.<sup>44</sup>

Durkheim, dalam konteks teori fungsional, seperti terlihat dalam karyanya, *The Elementary Forms of Religious Life (1976)*, di mana Durkheim dan para pengikutnya bahwa agama harus eksis, karena sistem sosial membutuhkan integrasi. Mereka berpandangan bahwa yang menarik bukanlah apa yang *berbeda* tentang karakteristik keyakinan dan ritual dari, katakanlah, totemisme, Buddisme, Hinduisme, Judaisme, Protestanisme, dan Katolikisme. Tetapi, bagi mereka, yang menarik adalah apa yang *sama* dalam hal kerjanya—yakni tentang fungsi-fungsi integratif yang dijalankan semua agama ini bagi sistem sosialnya.<sup>45</sup>

Seperti diungkapkan Muhammad Tholhah Hasan<sup>46</sup> bahwa setiap agama memiliki dasar teologisnya sendiri dalam mengklaim kebenaran dirinya. Tetapi dalam waktu yang sama, semua agama juga memiliki memiliki dasar teologis untuk menyatakan bahwa hanya Tuhan dan wahyulah yang memiliki bobot *kebenaran yang absolut*. Sedangkan manusia yang menyampaikan ajaran agama itulah yang memberikan interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi manusia atas wahyu menjadi *kebenaran yang tidak absolut*, dan tetap nisbi atau relatif seiring dengan keterbatasannya sebagai manusia. Dengan semangat sikap itu, kemudian dasar-dasar keruunan dan keharmonisan beragama dapat diupayakan dan diwujudkan. Dalam suatu masyarakat majemuk pada suatu negara, seperti Indonesia, agama dapat berperan sebagai *faktor pemersatu*, namun dalam beberapa hal, agama dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai alat pemecah belah. Pakar sosiologis Islam klasik, Ibnu Khaldun, juga menyimpulkan bahwa perasaan seagama

<sup>44</sup> Retnowati, Agama, 'Konflik dan Integrasi....', *ibid.* (diakses: 13/6/2017).

<sup>45</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsional hingga Post-Modernisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 57.

<sup>46</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cetakan ke-3, Editor: Afif Nadjih Anies, Penerbit Lantabora Press-Jakarta Indonesia, 2005, hlm. 274.



## 36 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

mungkin perlu, tetapi belumlah cukup menciptakan rasa memiliki kelompok (*group belonging*) atau kesatuan sosial. Perlu adanya faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial.

Berbagai konflik etno-religius di Asia Tenggara, pada awalnya seringkali berawal dari prasangka golongan yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Arus prasangka etnis, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang masih ada, yang menimbulkan bearagama bentuk konflik. Tahap perkembangan masyarakat pluralistik di beberapa negara Asia Tenggara seakan memperlihatkan belum mampu menghilangkan prasangka golongan secara menyeluruh guna menghindari stigma sosial yang tidak perlu, atau bahkan dalam batas tertentu merupakan keresahan sosial dan terkadang berujung pada situasi konflik sosial (etnis dan agama) di negara-negara ASEAN. Di beberapa pengalaman negara di Asia Tenggara, justeru memperlihatkan suatu hubungan etnis mayoritas-minoritas yang cenderung berpotensi menjadi konflik etnis dan 'agama' yang dapat mengancam integrasi sosial di negara tersebut. Pemicu konflik sosial-etnis dan 'agama' di itu terkadang berhubungan dengan 'tekanan' militer, tetapi sebagai pemicu mendasar adalah adanya perselisihan antarideologi-ideologi mutlak, tidak adanya kompromi, dan adanya desakan nasionalisme negara melawan nasionalisme etnis.

Di Asia Tenggara, karenanya, intensitas konflik antaretnis mayoritas (didukung penguasa) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antaretnis berujung pada gerakan 'separatisme'. Dalam banyak kasus, pemerintah negara itu, sering kali memberi 'label' kepada etnis minoritas (termasuk etnis minoritas Muslim) sebagai 'pemberontak', 'teroris', dan 'separatisme'. Klaim-klaim sepihak ini, tentunya, dapat merugikan kaum etnis minoritas dan juga dapat mempersulit upaya mencari solusi substantif atas konflik etnis dan agama. Seperti diketahui bahwa agama merupakan salah satu elemen peradaban manusia yang sangat penting dan berpengaruh. Agama merupakan panduan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hampir semua agama di dunia mengajarkan manusia tentang nilai-nilai kebaikan dan perdamaian agar dapat hidup dengan selamat. Agama juga menjadi sumber identitas individu dan kelompok yang sangat kuat. Kuatnya identitas agama ini kemudian memunculkan perspektif *in group-outgroup* di mana orang

yang beragama sama dianggap sebagai kawan dan saudara, sementara orang yang memeluk agama lain dianggap sebagai pesaing, bahkan diasosiasikan sebagai lawan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi agama, atau disebut juga dengan ambivalensi agama, yakni agama di satu sisi mengajarkan kebaikan dan perdamaian, tetapi pada sisi lain sering menjadi isu penyebab pecahnya konflik dan kekerasan (Appleby 2000; Basedau dkk. 2011; Philpott 2007).<sup>47</sup>

Taufik<sup>48</sup> menjelaskan bahwa ada lima faktor yang membuat agama dapat menjadi pendorong terciptanya kekerasan: klaim kebenaran mutlak, kepatuhan buta pada pemimpin agama, kecenderungan pada zaman ideal, pembenaran segala cara untuk mencapai tujuan, dan penyeruan perang suci yang ofensif. Konflik yang membawa isu agama umumnya berpotensi menjadi konflik yang sulit diselesaikan (*intractable conflict/unnegotiable conflict*) dan berlangsung lama. Konflik berbasis agama juga dapat menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas, di mana kelompok-kelompok etnis tertentu menjadi pemeluk dari agama yang berbeda sehingga dikenal dengan istilah konflik etnis dan agama (*ethno-religious conflict*). Sejumlah konflik sosial yang melibatkan isu etnis dan agama yang masih berlangsung hingga kini, antara lain: konflik Israel-Palestina antara Islam-Yahudi; konflik di Irlandia Utara antara Katolik-Protestan; konflik di Kashmir antara Islam-Hindu; konflik di Filipina Selatan antara Islam-Katolik; dan konflik di Thailand Selatan antara Islam-Budha; konflik di Republik Afrika Tengah dan Nigeria antara Kristen-Islam; dan konflik di Rakhine-Myanmar, antara Islam-Budha. Seperti diketahui bahwa agama merupakan salah satu elemen peradaban manusia yang sangat penting dan berpengaruh.

Di Asia Tenggara, justeru memperlihatkan suatu hubungan etnis mayoritas-minoritas yang cenderung berpotensi menjadi konflik etnis dan 'agama' yang dapat mengancam integrasi sosial di kawasan negara-

---

<sup>47</sup> Sandy Nur Iqbal Raharjo, 'Peran Identitas Agama Dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013', *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 6 No. 1, 2015, LIPI, 2015, hlm. 35.

<sup>48</sup> Sandy Nur Iqbal Raharjo, 'Peran Identitas Agama Dalam Konflik....', *ibid.*, hlm. 36.

### 38 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

negara tersebut. Pemicu konflik sosial-etnis dan 'agama' di itu terkadang berhubungan dengan 'tekanan' militer, tetapi sebagai pemicu mendasar adalah adanya perselisihan antarideologi-ideologi mutlak, tidak adanya kompromi, dan adanya desakan nasionalisme negara melawan nasionalisme etnis. Di Asia Tenggara, karenanya, intensitas konflik antaretnis mayoritas (didukung penguasa) lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antaretnis berujung pada gerakan 'separatisme'. Dalam banyak kasus, pemerintah negara itu, sering kali memberi 'label' kepada etnis minoritas (termasuk etnis minoritas Muslim) sebagai 'pemeberontak', 'teroris', dan 'separatisme'. Klaim-klaim sepihak ini, tentunya, sering kali dapat merugikan kaum etnis minoritas dan juga dapat mempersulit upaya mencari solusi substantif atas konflik etnis dan agama di negara-negara ASEAN.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara Asia Tenggara merupakan *plural-society*<sup>49</sup> yakni keberadaan segmentasi kelompok-kelompok sosiologis yang dapat terbentuk secara efektif dalam hal kultural dan kohesi politik di masyarakat pada basis identitas kelompok. Kadang kala kohesi-kohesi itu bersifat langsung dan primordial, kadang-kadang (kohesi-kohesi) diciptakan di luar lawan politik.<sup>50</sup> Definisi 'majemuk' telah dikembangkan M.G. Smith, dalam kajiannya, di Kepulauan Karibia, di mana kelompok etnis berbeda 'berbaur tapi tidak larut' (*mix but do not combine*). Dominasi politik oleh satu etnis/suku bangsa di mana kelompok yang berbeda terlibat di dalam suatu sistem ekonomi bersama, di mana masing-masing menempati suatu posisi tertentu dalam pembagian kerja (*division of labour*) adalah hal yang memelihara *plural society* dalam keseimbangan. Van der Berghe menerapkan konsep ini ke negara Amerika, di mana dia mengklaim bahwa suku-suku bangsa yang ada terus memiliki dan

---

<sup>49</sup> Masyarakat plural (*plural society*), merupakan di mana masing-masing kelompok etnik dibiarkan hidup dalam tradisinya masing-masing, agamanya masing-masing, mereka bersatu dibawah kekuasaan pemerintah kolonial, dan konon hanya bertemu dipasar. Lihat: (P.M.Laksono, *Nasionalisme Etnisitas: Perubahan Sosial*, Editor: Th. Sumartana, Elya Zarapig, Zuly Qodir, Samuel A. Bless, Diterbitkan atas Kerjasama DIAN/Interfidei, Kompas, dan Forum Wacana Muda, Kata Pengantar: Cornelis Lay, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 3-11).

<sup>50</sup> Daniel Bell, 'Ethnicity and Social Change', *Ethnicity*, Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, pages 138-146.

menduplikasi pranata-pranata dan sistem-sistem nilai asli, kecuali dalam bidang politik dan ekonomi, di mana hanya ada satu sistem bersama.<sup>51</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara Asia Tenggara merupakan *plural-society*<sup>52</sup> yakni keberadaan segmentasi kelompok-kelompok sosiologis yang dapat terbentuk secara efektif dalam hal kultural dan kohesi politik di masyarakat pada basis identitas kelompok. Masyarakat plural (*plural society*), merupakan di mana masing-masing kelompok etnik dibiarkan hidup dalam tradisinya masing-masing, agamanya masing-masing, mereka bersatu dibawah kekuasaan pemerintah kolonial, dan konon hanya bertemu di pasar. Kadang kala kohesi-kohesi itu bersifat langsung dan primordial, kadang-kadang (kohesi-kohesi) diciptakan di luar lawan politik.<sup>53</sup> Definisi 'majemuk' telah dikembangkan M.G. Smith, dalam kajiannya, di Kepulauan Karibia, di mana kelompok etnis berbeda 'berbaur tapi tidak larut' (*mix but do not combine*). Dominasi politik oleh satu etnis/suku bangsa di mana kelompok yang berbeda terlibat di dalam suatu sistem ekonomi bersama, di mana masing-masing menempati suatu posisi tertentu dalam pembagian kerja (*division of labour*) adalah hal yang memelihara *plural society* dalam keseimbangan.<sup>54</sup>

Suatu konflik sosial etno-religius, dikemukakan Tamrin Amal Tomagola<sup>55</sup> bahwa sekurangnya dapat dikarenakan bertemunya empat

<sup>51</sup> Zulyani Hidayah, "Kemajemukan dan Konflik: Pendekatan Kebudayaan", *Wacana Antropologi: Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Volume 2, Nomor 4, Januari-Februari 1999, hlm. 1-4.

<sup>52</sup> P.M.Laksono, *Nasionalisme Etnisitas: Perubahan Sosial*, Editor: Th. Sumartana, Elya Zarapig, Zuly Qodir, Samuel A. Bless, Diterbitkan atas Kerjasama DIAN/Interfidei, Kompas, dan Forum Wacana Muda, Kata Pengantar: Cornelis Lay, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 3-11.

<sup>53</sup> Daniel Bell, 'Ethnicity and Social Change', *Ethnicity*, Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford, New York, 1996, pages 138-146.

<sup>54</sup> Zulyani Hidayah, "Kemajemukan dan Konflik: Pendekatan Kebudayaan", *Wacana Antropologi: Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Volume 2, Nomor 4, Januari-Februari 1999, hlm. 1-4.

<sup>55</sup> Tamrin Amal Tomagola dalam M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernunsa Agama', *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Editor: Moh. Soleh Isre, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Bersama, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 5-6.

## 40 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

elemen utama dalam waktu bersamaan. Elemen-elemen dimaksudkan: *facilitating contexts*, *core of conflicts*, *fuse factors* dan *triggering factors*.<sup>56</sup> Dalam suatu konflik sosial, *facilitating contexts* (konteks pendukung) itu dapat berupa pola pekerjaan atau pemukiman yang terpisah berdasarkan garis keagamaan antara berbagai kelompok yang terlibat konflik, atau kompetisi perkembangan demografi keagamaan, atau urbanisasi yang berdampak menggusur penduduk lokal (asli) tertentu, dan lain-lain. Keberadaan konteks pendukung ini biasanya tidak serta merta mengakibatkan terjadinya konflik, tetapi berfungsi sebagai tempat berseminya potensi konflik untuk menunggu saat yang tepat. *Core of conflict* (akar konflik) biasanya bertalian dengan suatu tingkat *social deprivation* (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*). Pembuatan batas akhir toleransi itu biasanya dilakukan karena intensitas deprivasi itu sendiri yang tidak dipertahankan lagi atau lamanya waktu deprivasi itu berlangsung—seperti penguasaan sebagian besar lahan dan hasil pertanian oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, atau penguasaan jabatan-jabatan publik tertentu disuatu daerah oleh suatu kelompok tertentu dalam waktu yang berkepanjangan. Apabila kelompok-kelompok yang mendominasi dan terdeprivasi itu berasal dari kelompok agamadan etnis yang berbeda maka konflik yang terjadi dapat bergerak menjadi bernuansa agama dan etnis. *Fuse factor* (sumbu), biasanya juga sudah ada disana, tetapi tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tersulut atau disulut. Sumbu konflik bisa berupa sentimen suku/etnis, ras, agama, dan lainnya. *Triggering factors* (faktor pemicu), merupakan peristiwa atau momentum di mana semua elemen di atas diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial. Momentum bisa terjadi hanya berbentuk pertengkaran mulut atau perkelahian kecil antara dua individu tentang suatu hal yang 'remeh' atau sebetulnya jauh dari akar konflik, tetapi berfungsi menjadi pembeda bagi dimulainya suatu konflik berskala lebih besar.

---

<sup>56</sup> Abdullah Idi, 'Dinamika Sosiologis Indonesia....', *op. cit.*, hlm. 271.

## 2. Konflik Etno-Religius

Kalaupun konflik merupakan gejala sosial alamiah namun tidak diharapkan akan berkepanjangan. Alasan atau motivasi mengakhiri konflik bisa karena bosan atau lelah atau adanya keinginan untuk mencurahkan tenaganya untuk hal-hal lain. Nasikun (1995) menawarkan beberapa cara untuk pengendalian konflik, *pertama*, melalui konsiliasi, yakni pengendalian konflik yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik mengenai persoalan-persoalan yang dipertentangkan melalui cara-cara yang bersifat damai. *Kedua*, pengendalian konflik melalui mediasi. Cara ini diperlukan bila pengendalian melalui konsiliasi tidak berhasil.

Pengendalian konflik sosial (etnis dan agama), di Asia Tenggara diperlukan jalan mediasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang diharapkan dapat memberi strategi dan program menyelesaikan konflik sosial etnis dan agama di Asia Tenggara, dalam hal ini, diperlunya peran mediasi dari lembaga *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)*. Asumsinya, jika penanganan suatu konflik sosial (etnis dan agama) cukup efektif maka dengan sendirinya akan tercipta integrasi sosial antara kedua kelompok yang terlibat konflik di internal negara-negara Asia Tenggara. Namun jika penanganan konflik sosial tidak efektif sangat mungkin konflik terjadi lagi pada masa datang. Agar penyelesaian konflik sosial etnis dan agama, pihak-pihak yang terlibat konflik perlu mengupayakan berbagai langkah untuk mencapai rekonsiliasi dalam kebijakan, strategi, dan program perdamaian dari organisasi atau lembaga ASEAN.

## BAB III

# KONFLIK ETNO-RELIGIUS DI ASIA TENGGARA

**B**agian ini merupakan pembahasan penelitian yang berkaitan dengan dinamika konflik etno-religius di Asia Tenggara. Selain itu, pada bagian ini juga akan dianalisis tentang kemungkinan faktor-faktor yang dipandang berpengaruh kuat terhadap terjadinya konflik sosial bernuansa etnis dan agama di Asia Tenggara, dalam hal ini dengan menggunakan suatu model analisis dikembangkan Tamrin Amal Tomagola<sup>1</sup>. Dari model ini diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya konflik sosial-etnis dan agama, dengan menganalisis aspek-aspek: *facilitating contexts*, *core of conflicts*, *fuse factors*, dan *triggering factors*.

### A. Konflik Etnis-Agama di Asia Tenggara

Untuk menjelaskan kelompok etnis tertentu yang ada di Asia Tenggara, dianggap terlalu kompleks sejak dari isu-isu kesenjangan ekonomi, 'separatisme', hingga 'terorisme'. Tiap negara di Asia Tenggara agaknya menghadapi persoalan hubungan mayoritas-minoritas yang tidak jarang mengarah kepada konflik etnis dan agama, *ethno-religious conflicts*, dengan berbagai latar belakangnya penyebabnya. G.E.

---

<sup>1</sup> Tamrin Amal Tomagola dalam M. Atho Mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama", *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Editor: Moh. Soleh Isre, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Bersama, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 5-6.

#### 44 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Simpson dan J.M. Yinger<sup>2</sup> mengatakan bahwa suatu etnis minoritas biasanya berada pada posisi tersubordinasi oleh etnis mayoritas pribumi karena karakteristik yang dimilikinya.

Di Myanmar, di mana terdapat pemberontakan yang dilakukan kelompok etnis Karen dan Shan terhadap etnis Burmese yang merupakan etnis mayoritas di Burma. Pada era kolonialisme Inggris di Burma, etnis minoritas Karen dan Shan mendapatkan perlindungan dari dominasi Burma melalui peraturan pada periode tersebut. Tetapi, pergerakan nasionalis Burma berhasil mengusir penjajahan Inggris dan meraih kemerdekaannya tetapi dengan mengatasnamakan karakter etnis Burmese sebagai identitas negara Burma. Hal ini terlihat dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan penggunaan bahasa Burmese, memeluk agama Buddha ataupun penerapan budaya yang berkaitan dengan karakter Burmese. Hal ini kemudian membuat kelompok etnis Karen dan Shan melakukan pemberontakan dan gerakan separatis. Pemberontakan ini muncul sebagai bentuk kesadaran kolektif sebagai kaum minoritas yang merasa terancam dengan etnis mayoritas. Adapun hal yang dilakukan pemerintah Myanmar adalah menggunakan militer sebagai instrumen mengatasi pemberontakan. Tetapi, pendekatan militer bukan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi konflik etnis yang berhubungan dengan karakter sosial budaya. Militer sebagai instrumen pemerintah rawan terhadap pelanggaran HAM yang bisa saja terjadi dan dialami.

Nasib etnis Rohingya memiliki cerita yang cukup panjang sehingga akhirnya terkatung-katung seperti saat ini. Kata 'Rohingya' berasal dari kata 'Rohang', nama kuno untuk Arakan. Etnis Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Etnis Rohingya bukan berasal dari Bangladesh ataupun Bangali. Nenek moyang etnis Rohingya berasal dari campuran Arab, Turki, Afghan, dan Indo-mongoloid. Arakan saat ini merupakan bagian dari *Union of Myanmar* dan terletak disisi barat laut berbatasan dengan Bangladesh.

---

<sup>2</sup> G.E. Simpson and J.M. Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Harper and Row Publication, New York, 1972, pages 12-13.



Pada tahun 1930, nama Arakan berubah menjadi Rakhine atau populer dengan sebutan Rakhaing. Ketika rezim militer U Ne Win berkuasa di Burma tahun 1962, etnis Rohingya semakin terpuruk dengan adanya penolakan pemberian status kewarganegaraan. Situasi semakin memburuk dengan terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Berbagai kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya secara individu maupun kelompok telah memaksa mereka untuk mencari perlindungan dalam bentuk suaka ataupun sebagai pengungsi.<sup>3</sup>

Dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas dari perspektif hukum status etnis Rohingya menjadi *stateless*. Pada saat kepemimpinan berpindah kepada Presiden Thein Sein, kondisi dan situasi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan berarti. Penolakan pengakuan oleh rezim Presiden Thein Sein terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar tercermin dalam pernyataan Sein bahwa '*Rohingya are not our people and we have not duty to protect them*'. Sein menginginkan agar etnis Rohingya berada dalam pengelolaan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atau ditampung oleh negara ketiga.<sup>4</sup>

Akibat pertempuran yang terus berlanjut, antara tentara pemberontak etnis Rohingya melawan pasukan Pemerintah Myanmar telah menyebabkan bertambahnya pengungsi di perbatasan Tiongkok. Di daerah terjal di Provinsi Yunnan Barat Daya misalnya konflik tampak lebih keras dan berlarut-larut dari pergolakan sebelumnya di wilayah Kokang pada awal tahun 2015. Setiap hari ditemukan banyak pengungsi Han Tiongkok dari wilayah Kokang, Myanmar. Tenda bantuan yang disediakan Tiongkok juga berdiri di sela tanaman tebu, jagung, dan teh yang mengapit jalan pegunungan berkelok-kelok ke Nansan. Kota terdekat dengan wilayah Kokang dari negara bagian Shan, Myanmar, itu menyediakan perlindungan bagi aliran pengungsi yang diperkirakan pemerintah Tiongkok berjumlah lebih dari 20.000 jiwa. Kekerasan menghambat upaya pemimpin *de facto* Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk mencapai kesepakatan damai yang

---

<sup>3</sup> 'Rohingya Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan', *Masyarakat ASEAN Edisi & Juni 2015*, hlm. 10.

<sup>4</sup> 'Rohingya Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan...', *ibid.*, hlm. 10.,

## 46 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

komprehensif dengan etnis minoritas Myanmar. Beberapa dari mereka bergabung dalam pemberontakan selama beberapa dekade terakhir. Konflik pun membuat cekcok hubungan antara Tiongkok dan Myanmar. Padahal Beijing sudah berharap bisa menjadi gerbang utama dalam strategi multicabang 'Satu Daerah Satu Jalan' untuk mempromosikan hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Eropa. Kokang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok. Sebagian besar dihuni etnis Tiongkok berbicara dialek Cina dan memakai Yuan sebagai mata uang.<sup>5</sup>

Di Kamboja, dikatakan Ajid Thohir, pernah mengalami suatu kemajuan sejarah umat Islam, bertalian dengan politik dan ekonomi. Dominasi kaum muslim dalam perdagangan dan upaya penyiaran Islam yang sangat gencar dilakukan di daerah ini telah menaikkan pamor kelompok Muslim di kerajaan Kamboja. Di Kamboja, peranan dan pengaruh kaum Muslim lebih besar karena beberapa abad sebelumnya di Champa yang kemudian bergabung dengan kerajaan Kamboja pernah terdapat Kesultanan Muslim. Masuknya Islam penguasa Kamboja ini lebih memperkuat posisi dominasi masyarakat Muslim di Kamboja; tetapi, seperti pengalaman Ayutthaya, ketidakstabilan hubungan internasional di wilayah ini mempengaruhi posisi masyarakat Muslim di Kamboja. Mereka belum bisa memperoleh posisi sebelumnya, dan Islam tidak bisa memasuki *elite* penguasa sebagaimana halnya di kerajaan lain di Asia Tenggara. Konspirasi di kalangan istana negara mengakhiri kekuasaan Islam yang singkat di Kamboja. Nasib kaum Muslim yang berubah dengan cepat itu merupakan akibat dari serangan sengit yang dilakukan Eropa yang selanjutnya mengakhiri dominasi kaum Muslim di Asia Tenggara.<sup>6</sup>

Di zaman rezim Pol Pot, kalangan muslim yang dikenal dengan Khmer Muslim juga turut mengalami pembunuhan. Sekitar 70 persen orang muslim mengalami pembantaian. Selanjutnya, dengan perlindungan penuh dari raja, dimulai dari kembalinya Raja Norodom

<sup>5</sup> Arpan Rahman, 'Konflik Etnis Myanmar Meningkat, Pengungsi Banjir Tiongkok', diakses: 30 Mei 2017.

<sup>6</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, PT. Rajawali RajaGrafindo, 2008, hlm. 280-281.

Sihanouk dari pengasingan, justru banyak hal yang didapatkan dengan restu raja. Pada zaman Pol Pot, banyak umat Muslim diusir dari kota besar. Pagoda-pagoda, masjid-masjid, bank-bank serta tempat-tempat bisnis dihancurkan. Kalangan intelektual pun dibantai. Khmer Merah telah merusak seluruh infrastruktur Kampuchea, sejak orang terpelajar, intelektual dan bangunan-bangunan dihancurkan. Orang Muslim merupakan yang paling menderita.<sup>7</sup>

Sekadar ilustrasi, Muslim Kamboja, ketika itu, dalam acara yang tertutup mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*, IDB) yang digunakan semata-mata untuk kaum muslim yang menderita kekurangan bahan pokok dalam segala sektor. Dari laporan statistik mengenai penduduk yang melek huruf di Kamboja pada tingkat sekolah dasar tercatat sebanyak 1.304.225 anak yang 761.811 di antaranya duduk di tahun pertama. Usaha ini yang baru dimulai pada 1975 tergolong begitu membanggakan, mengingat buku-buku pelajaran sekolah ditulis dengan tangan oleh para guru untuk semua tingkatan pendidikan. Sayangnya, di bawah rezim Pol Pot sekolah-sekolah ditutup atau ditinggalkan dan bantuan serta bahan pelajaran sekolah dimusnahkan. Tidak ada lagi anak yang bersekolah. Anak-anak umur 6-10 tahun tidak pernah sekolah dan semuanya duduk di tahun pertama sekolah mereka. Bersama mereka, terdapat pula mereka yang berusia 10-15 tahun; artinya, mereka yang pernah bersekolah selama 2,3, atau 4 tahun, tetapi telah keluar, *drop-out*, dan mereka sudah lupa pada pelajarannya.<sup>8</sup>

Kini, keadaan Muslim Kamboja mulai terus berproses membaik, mereka hidup berdampingan dengan komunitas Budha tanpa ketegangan berarti. Disamping karena kultur masyarakat Islam yang memang sepenuhnya berasal dari masa silam kerajaan Champa yang turut dalam pembentukan Kamboja, juga karena tidak adanya identitas yang multietnis, sepenuhnya homogen dengan etnisitas masyarakat Kamboja secara nasional. Adapun pada pilihan perbedaan keyakinan

<sup>7</sup> Ajid Thohir, 'Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam...', *ibid.*, hlm. 281.

<sup>8</sup> Ajid Thohir, 'Perkembangan Peradaban...', *ibid.*, hlm. 281

## 48 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

tidak pernah menjadi sebuah masalah, bahkan di Kampong Cham Muslim Kamboja tetap dengan tradisi yang diadaptasi dari pelbagai kultur dunia Islam.

Beda halnya dengan di Myanmar, Muslim Rohingya tampak pula mengalami kesukaran yang mendalam atas aksi-aksi kekerasan dan tindakan kurang beradab yang merupakan suatu tindakan kejahatan atas kemanusiaan. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Pelaksana Harian MUI yang membacakan pernyataan sikapnya di kantor MUI, di Jakarta tentang kejahatan di Rohingnya merupakan bahwa suatu upaya sengaja untuk merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran, pembakaran pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). MUI menyesalkan sikap PBB yang tidak proaktif dalam mengatasi masalah pembantaian etnis terhadap kaum muslim Rohingya. Untuk itu MUI mendesak PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk segera melakukan langkah kongkrit dalam mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar. MUI akan melaporkan pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian dalam melindungi etnis Rohingya yang tidak berdosa. MUI juga mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan di Myanmar. MUI mengajak seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya.<sup>9</sup>

Tindakan diskriminatif yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya berlatar belakang agama yang dilakukan dengan cara militer terhadap warga sipil harus segera dihentikan. Seluruh bangsa di dunia harus bertanggung jawab atas nasib dan masa depan etnis Rohingya di Myanmar. MUI mengutuk segala bentuk tindak pembantaian, pengusiran, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan,

<sup>9</sup> <http://www.voaindonesia.com/read/indonesiana/2012/07/26/20007/muitragedi-muslim-rohingya-berlatar-belakang-agama-stop-genocide/#sthash.IH26NKi6.dpuf>, diakses: 8/10/2014

penangkapan, dan sejumlah tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya yang dilakukan terhadap kaum muslimin Rohingya. Tindakan-tindakan yang dilakukan tentara Myanmar ini tidak dapat ditolerir atas nama apa pun. Bahkan, tindakan-tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pembasmian etnis terhadap kaum muslim Rohingya. MUI mendesak Junta Militer Myanmar agar segera menghentikan pembantaian dan segala bentuk kebiadaban tentara Myanmar serta memberikan perlindungan bagi hak-hak hidup dan beragama kaum muslimin Rohingya.<sup>10</sup>

Di Thailand, di mana identitas nasional Thailand dilukiskan dengan budaya kelompok etnis Thai sebagai etnis mayoritas. Padahal terdapat etnis minoritas lain yang ada di Thailand dengan latar belakang sosial-budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Di antaranya, kelompok etnis Tibeto-Burman, Mon-Khmer dan Lao yang tinggal di bagian utara Thailand sedangkan kelompok etnis Malay-Muslim tinggal di bagian selatan Thailand. Tetapi, etnis minoritas itu diabaikan pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan pada pembangunan di bagian pusat Thailand. Sehingga terdapat ketimpangan yang sangat jelas dalam hal sosial, ekonomi, politik dan pendidikan di pusat Thailand yang banyak dihuni etnis Thai dengan Thailand Selatan dihuni etnis Malay.

Adanya ketimpangan itu, telah mendorong terjadinya 'separatisme' bangsa Pattani, PULO (*Pattani United Liberalization Organization*) di Selatan Thailand yang banyak dihuni oleh kelompok etnis Malay-Muslim. Selain itu, pemberontakan ini juga dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah Thailand yang melakukan 'sentralisasi' kebijakan pendidikan dan bahasa untuk mengintegrasikan Muslim menjadi masyarakat Thai. Ditambah lagi dengan dukungan dari etnis muslim lainnya yang ada di Kelantan Malaysia. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah tetapi konflik ini belum dapat terselesaikan sepenuhnya. Dalam konteks ini, agaknya, pemerintah terlalu 'hati-hati'

<sup>10</sup> <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/26/20007/muitragedi-muslim-rohingya-berlatar-belakang-agama-stop-genocide/#sthash.lH26NKi6.dpuf>, *ibid.*, diakses: 8/10/2014.

## 50 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dengan sistem heterogenitas Thailand sehingga menyatukan Thailand hanya melalui etnis mayoritas yang ada. Padahal, sebenarnya walaupun kemungkinan akan ada ancaman ketika pemerintah Thailand membiarkan dan menyamakan etnis minoritas tetapi pada intinya negara berhak untuk menghentikan ancaman tersebut.

Di Filipina Selatan, yang dilatarbelakangi oleh masalah agama dan wilayah. Kolonialisme Barat di Filipina berhasil membentuk masyarakat Filipina yang mayoritasnya beragama Kristen tetapi masyarakat Filipina yang tidak ingin menerima kepercayaan agama tersebut melarikan diri ke Moro dan terbentuklah bangsa Moro yang kebanyakan beragama Islam. Sebelum Filipina merdeka, di bawah kolonialisme Amerika Serikat, akhirnya Moro dikuasai dan dimasukkan ke dalam kesatuan negara Filipina walaupun bangsa Moro sendiri tidak bersedia dimasukkan ke dalam Filipina. Namun demikian, setelah Filipina merdeka bangsa Moro tidak menginginkan untuk bersatu dengan Filipina. Hal ini semakin dipicu dengan kebijakan pemerintah Filipina menerapkan "*Christian Philippines states system*", penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional sebagai bentuk proses asimilasi dari kolonial yang pernah menjajah Filipina. Dengan demikian terdapat ketimpangan secara sosial, ekonomi, politik terhadap bangsa Moro yang terdesak oleh mayoritas Kristen Filipina (etnis Tagalogs, Ilocanos, Cebuanos dan Ilongo), sehingga terjadilah pemberontakan melalui MRLF (*Moro National Liberation Front*).

Hingga ini, pemerintah Filipina belum dapat menyelesaikan konflik tersebut walaupun telah dilakukan berbagai kesepakatan dengan bangsa Moro. Selain itu, pasca 9/11 ketika Amerika Serikat mengobarkan perang terhadap terorisme, Amerika Serikat pernah menawarkan bantuan kerjasama dengan Filipina dalam mengatasi 'pemberontakan' yang dilakukan bangsa Moro. Mengenai konflik etnis di Filipina adalah sesuatu yang kompleks diselesaikan terkait sosio-historis bangsa Moro yang memang tidak menginginkan menjadi bagian dari Filipina. Agaknya, pemerintah Filipina lebih tepat berfungsi sebagai 'mediator' dalam hal ini, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan terkait kebijakan Filipina yang condong pada karakter mayoritas, sehingga dibutuhkan 'mediator' dari negara lain.

Pemberontakan di Filipina telah terjadi sejak awal masa kemerdekaan Filipina di tahun 1946. Terdapat berbagai kelompok pemberontak di Filipina. Salah satu kelompok yang gencar dalam melakukan perlawanan adalah Etnis muslim Moro. Moro adalah sebuah etnis yang mendiami Filipina Selatan tepatnya di Pulau Mindanao. Kelompok pemberontak Moro yang pertama terbentuk adalah Moro National Liberation Front (MNLF) pada tahun 1969. Terbentuk karena perlakuan diskriminatif pemerintah Filipina atas muslim Moro. Etnis moro merasa bahwa pemerintah Filipina tidak pernah mengakomodasi kepentingan mereka, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah Islam. Justru pemerintah Filipina melakukan transmigrasi besar-besaran dengan mengirimkan penduduk Filipina bagian Utara yang beragama Katolik ke Pulau Mindanao. Serta kebijakan Asimilasi atas budaya Moro terhadap budaya Utara yang dipengaruhi ajaran Katolik. Sehingga, etnis Moro menjadi termarjinalkan sebagai sebuah etnis dengan identitas agama dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Filipina Utara. Selain itu puncak kekecewaan Etnis Moro atas Filipina terjadi setelah Peristiwa "Pembantaian Jabidah". Yaitu pembunuhan 200 Muslim Moro oleh angkatan bersenjata Filipina. Mereka dibunuh karena melarikan diri dari kamp pelatihan militer yang dipersiapkan untuk merebut wilayah Sabah, Malaysia.<sup>11</sup>

Setelah pembantaian itu, MNLF resmi melakukan perlawanan bersenjata. Konflik selanjutnya terjadi pada 1974 di kota Jolo, di mana Angkatan bersenjata Filipina melakukan pembunuhan terhadap 10.000 muslim Moro dan Cina. Kemudian ditandatangani perjanjian Tripoli antara MNLF dan Filipina pada tahun 1974. Namun tidak lama berselang kembali terjadi konflik bersenjata, dan berakhir pada sejumlah pembantaian oleh Angkatan Bersenjata Filipina terhadap etnis Moro. Yaitu Pembantaian "Malisbong", Oktober 1977, Pembantaian "Pulau Pata", Februari 1981 serta masih terdapat banyak konflik yang berakhir pembantaian terhadap etnis muslim Moro oleh Filipina. Dalam menanggapi pembantaian yang tetap dilakukan oleh Angkatan

---

<sup>11</sup> Bintang Mupiza, 'Gambaran Konflik Separatisme di Filipina', diakses 28/5/2017.

## 52 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Bersenjata Filipina. Syekh Salamat Hashim mendirikan dari MNLF mendirikan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berideologi Islam pada tahun 1977. Sehingga bertambah jumlah kelompok pemberontak di Filipina. Konflik yang berkepanjangan membuat MNLF sepakat berdamai dengan Filipina dengan mendapatkan status Otonomi Khusus Moro atas Mindanao Selatan dan beberapa pulau disekitarnya. Sementara MILF tetap melakukan perlawanan, Konflik Cotabo Utara (2000), Krisis Kota Zamboanga (2013) merupakan bukti MILF masih memiliki kekuatan hingga sekarang.<sup>12</sup>

Di Indonesia, potensi dan kasus-kasus konflik sosial-etnis dan agama, *ethno-religious*, juga menjadi negara cukup rawan dan kompleks. Perbedaan pandangan antarkelompok masyarakat di suatu wilayah sering kali menjadi 'pemicu' pecahnya konflik antarmereka. Parahnya, di tengah konflik itu, terdapat pula orang yang memanfaatkan situasi sehingga menjadi tambah kompleks suasana konflik dan juga bisa berkepanjangan. Sejak terjadinya konflik SARA pada 1998, setidaknya terdapat beberapa konflik SARA yang krusial patut diungkapkan. Jacques Bertrand mengatakan bahwa sejak 1998, yang menandai akhir dari 33 tahun rezim Orde Baru, kekerasan dan konflik etnis di Indonesia meningkat secara dramatis. Konflik-konflik di Maluku, Kalimantan, Aceh, Papua, dan Timor-Timur merupakan akibat dari tafsir-ulang Orde Baru yang sempit dan mengekang atas 'model kebnagsaan' Indonesia. Pada masa Orde Baru, konsep nasionalisme mengalami penyempitan, yang menurut Bertrand, terdapat beberapa etnis yang merasa tidak terlingkupi dalam konsep tersebut. Pada saat terjadinya transisi, ada ruang untuk menegosiasikan diri antarkelompok etnis dan negara dalam konsep nasionalisme itu sendiri. Seperti pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ada semacam ruang untuk menekan atau menjadi pembelar bahwa bagi kelompok mayoritas agama menempati wilayah itu harus ada keadilan dalam beragama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bintang Mupiza, 'Gambaran Konflik....', *ibid.*, (diakses 28/5/2017).

<sup>13</sup> 'Konflik Etnis dan Agama', internet, diakses 4 Juni 2017.



Sarlito Wirawan Sarwono<sup>14</sup> mengatakan konflik antaretnik, disamping konflik antaragama di Indonesia sudah menjadi masalah yang kronis sejak awal kemerdekaan. Kerusuhan yang dilatarbelakangi kecemburuan sosial terhadap etnik Cina sudah sering terjadi. Salah satu di antaranya yang dikategorikan besar dan mengakibatkan korban jiwa dan materi begitu banyak adalah yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1980. Kasus PRRI/Permesta (Sumatera dan Sulawesi) di tahun 1950-an, kasus Timor Timur, GAM (Aceh) dan GPM (Papua) di tahun 1990-an, walaupun banyak nuansa politiknya, namun juga tidak bisa dilepaskan dari unsur etnis, karena pembagian wilayah etnis masing-masing. Bahkan di tahun 1996, beberapa kerusuhan yang terjadi (antara lain dikenal sebagai kasus Sidoarjo dan kasus Rengasdengklok) merupakan kombinasi antara konflik antaretnis dan antaragama. Di Kalimantan Barat, kerusuhan antaretnik Madura melawan etnik Dayak sudah berkali-kali terjadi sejak 1930-an dan pada tahun 1990-an berkembang melawan etnik Melayu pula, bahkan pada tahun 2001 sudah menyebar ke provinsi Kalimantan Selatan.

Suatu hal yang menjadi pertanyaan, dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono, mengapa Melayu dan Dayak ini hanya agresif pada Madura, tidak pada, misalkan Cina (yang di Jawa sering menjadi sasaran agresivitas massa dan dalam penelitian Warnaen distreotipkan sebagai pelit dan penuh curiga)? Atau pada orang Jawa (yang jadi sasaran di Aceh, Timtim, dan Papua). Atau orang Bugis yang memicu kerusuhan di Ambon? Berbagai teori sudah dikembangkan untuk menjelaskan gejala ini. Yang paling populer adalah teori kesenjangan sosial, karena etnis Madura yang pekerja keras itu memang lebih maju secara sosial-ekonomi ketimbang etnis-etnis yang lain. Tetapi, secara makro, teori ini dianggap kurang relevan dikarenakan jumlah etnis Madura (1,3%) dan mereka hanya bergerak di sector perekonomian papan bawah (buruh tani, pekerja kasar, supir/kenek angkutan umum, dan lainnya). Mereka jelas berbeda dengan etnis Cina di Jawa, yang walaupun minoritas

---

<sup>14</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 'Dari Stereotip Etnis ke Konflik Etnis', hlm. 66, diakses 23 November 2017.

## 54 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

tetapi menguasai perekonomian papan atas (bersama konglomerat pribumi juga).<sup>15</sup>

Al Qadri mengatakan bahwa etnis Madura selalu menjadi pemicu konflik karena kebiasaan mereka membawa-bawa senjata tajam kemana pun mereka pergi. Karena eksklusivisme, mereka tidak bisa menyatu dengan etnis lainnya (pesantren dan khutbah Jumat berbahasa Madura dan kiai-kiai dipanggil dari Madura, sehingga orang-orang Melayu tidak bisa beribadah di masjid-masjid Madura). Tetapi, ternyata, etnis-etnis yang lain pun, di Kalimantan Barat, hidup dalam eksklusivisme masing-masing (Jawa di wilayah transmigrasi, Cina memelihara klentengnya dan sebagainya). Sementara itu, Parsudi Suparlan berpendapat lain, yakni tidak adanya suatu budaya yang dominan di Kalimantan Barat, sehingga masing-masing etnis terus-menerus mengembangkan adat dan tradisinya masing-masing. Tidak seperti di Jawa Barat (budaya Sunda), atau di Jawa Tengah (Jawa), di mana budaya minoritas, mau tidak mau harus beradaptasi dengan budaya mayoritas.<sup>16</sup>

Di Kalimantan Barat, selama etnis-etnis itu tidak saling bersinggungan secara intensif, maka akan berlangsung konsistensi damai (seperti antara etnis Dayak, Melayu, Cina dan Jawa). Tetapi, dalam hal etnis Madura, mereka ini bukan hanya bersinggungan secara intensif (mereka bekerja di sector-sektor pelayanan masyarakat level bawah), tetapi dalam hubungan antaretnis itu mereka sering cepat marah dan menghunus senjata tajam. Apalagi orang-orang Madura ini memiliki julukan bagi etnis lainnya, yang menurut para pakar (N. Struch & S.H. Schwartz, 1989) disebut proses dehumanisasi, artinya kelompok lain tidak lagi dianggap sebagai manusia. Penjelasan Suparlan agaknya sejalan dengan pandangan Warnaen, bahwa semakin sering kontak antaretnis yang memiliki streeotipe yang berbeda, justeru akan semakin mempertajam perbedaan dan pada gilirannya dapat menimbulkan konflik.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 'Dari Streeotip Etnis...', *ibid.*, hlm. 71.

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 'Dari Streeotip Etnis...', *ibid.*, hlm. 72.

<sup>17</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 'Dari Streeotip Etnis...', *ibid.*, hlm. 72.

Kasus penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tak dapat dihindarkan. Krisis moneter berkepanjangan di 1998 berujung pada aksi kerusuhan hebat pada penghujung rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Saat itu, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah sehingga melumpuhkan hampir seluruh persediaan ekonomi dalam negeri. Kerusuhan yang terjadi malah menular pada konflik *ethno-religious* antaretnis Pribumi dan etnis Tionghoa. Saat itu, banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Massa pribumi juga melakukan tindak kekerasan dan ada pula terjadi pelecehan seksual terhadap para wanita dari etnis Tionghoa. Konflik antaretnis itu menjadi catatan kelam di penghujung pemerintahan rezim Soeharto.

Selain itu, konflik sosial etnis bernuansa agama paling tragis meletup pada 1999. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.

Selanjutnya, tragedi Sampit, antara etnis Dayak kontra Madura. Tragedi Sampit merupakan konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan membuat geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi

## 56 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga etnis Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi memertahankan wilayah mereka yang pada waktu itu mulai dikuasai warga berlatar belakang etnis Madura.

Konflik bernuansa SARA berlangsung di Kota Poso pada 1998-2001, merupakan konflik komunal yang terjadi di antara masyarakat. Dari persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda. Solidaritas kelompok telah muncul dalam pertikaian itu, meskipun konteksnya masih murni sekitar dunia remaja, yakni isu miras dan isu tempat maksiat. Tetapi, persoalan remaja dan sepele ini kemudian dieksploitasi oleh petualang politik melalui instrumen isu pendatang versus penduduk asli dengan didukung oleh sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultural, ekonomi, dan jabatan-jabatan politik. Konflik selanjutnya diradikalisasi dengan dengan bungkus ideologi keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa *tawuran* berubah menjadi perang saudara antarkomponen bangsa. Pertikaian yang terjadi menyerebak luas menjadi konflik agama antara masyarakat Islam dan Kristen. Saling serang antara kedua komunitas dan pembakaran tempat-tempat ibadah, menjadikan masyarakat Poso terkota-kotak menjadi dua wilayah, Islam dan Kristen. Tidak sedikit korban yang berjatuhan di kedua belah pihak yang bertikai. Kerusuhan yang terjadi di Poso (25 Desember 1998-5 Desember 2001), telah meletus beberapa kali, yang dikenal dengan Konflik Poso Jilid I, II, III, IV, dan V. Selain terdapat banyak korban jiwa, konflik Poso juga menghasilkan banyak korban materi: rumah yang hangus sebanyak 10.650 buah, rusak 823 buah, dan rusak ringan 554 buah; masjid yang hangus 21 buah, rusak berat 5 buah, dan rusak ringan 2 buah; gereja yang hangus 31 buah, rusak berat 10 buah, dan rusak ringan 2 buah; dan terdapat 1 pura yang rusak ringan.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Laporan Gubernur Sulawesi Tenggara, 2001, dalam Mohammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001', *Hasil Penelitian Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin, 2014, hlm. 52-59.

Dapat dijelaskan bahwa konflik *ethno-religious* merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada beberapa negara di Asia Tenggara. Konflik etnis-agama minoritas Muslim dengan etnis mayoritas (mendapat dukungan penguasa) sering kali memiliki agama yang berbeda. Perbedaan keyakinan agama dan pengalaman sosio-historis-kolonialisme suatu bangsa agaknya berpengaruh kuat sebagai 'akar konflik' bernuansa keagamaan di Asia Tenggara. Selain itu, perbedaan struktur sosial, etnis, agama, ekonomi, politik, dan budaya, merupakan faktor lainnya, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 'proses' terjadinya konflik etnis dan agama, minoritas Muslim di berbagai negara di Asia Tenggara. Sering kali, upaya 'solusi' konflik etnis minoritas (Muslim) dan mayoritas-Non-Muslim (dukungan 'penguasa'), memerlukan adanya kebijakan internal negara yang tanpa diskriminatif terhadap mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

## B. Faktor Pendorong Konflik Etnis-Agama

### 1. Konflik Etnis-Agama: Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya plural atau majemuk dari suku bangsa, budaya, dan agama. Realitas plural tersebut, disadari oleh para pendiri/pemimpin bangsa (*founding fathers*) yang memperjuangkan kemerdekaan ini dari colonial asing. Mereka memandang bahwa pluralistik itu bukanlah kendala untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin bangsa memiliki cara pandang yang positif tentang kemajemukan. Cara pandang seperti itu, sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama-agama yang menjelaskan bahwa kemajemukan itu merupakan *sunnatullah*. Agama-agama mengingatkan bahwa kemajemukan terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mesti diterima dengan lapang dada dan dihargai, termasuk didalamnya perbedaan konsepsi keagamaan. Perbedaan konsepsi di antara agama-agama yang ada merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa diingkari siapa pun.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Perbedaan bahkan benturan konsepsi itu terjadi pada semua aspek agama, baik pada konsepsi tentang Tuhan ataupun konsepsi tentang aturan kehidupan. Hal ini, dalam prakteknya,

## 58 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia memiliki suatu struktur masyarakat yang memiliki dua karakteristik. *Secara horizontal*, ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis/suku bangsa, agama, adat-istiadat dan kedaerahan. *Secara vertikal*, struktur masyarakat itu ditandai dengan adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam. Karena adanya perbedaan-perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan sebagai '*plural society*', di mana istilah itu pertama kali digunakan Furnivall (1967) untuk mendeskripsikan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, suatu masyarakat terdiri dari dua elemen atau lebih yang hidup secara terpisah tanpa terintegrasi satu sama lainnya dalam satu kehidupan politik.<sup>20</sup>

Semboyan bangsa '*Bhinneka Tunggal Ika*' menunjukkan suatu realitas sosial bangsa Indonesia yang pluralistik. Indonesia yang dikenal dengan masyarakat pluralistik, setidaknya memiliki lebih kurang 500 kelompok etnis, di mana setiap kelompok etnis mempertahankan identitas etnis dan budayanya. Para anggota etnis hidup dalam komunitas etnis yang homogen, dengan identitas kultur dan batas-batas teritorialnya sendiri, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia, disatu sisi, merupakan 'berkah' dan 'kekayaan' yang pantas disyukuri. Seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo<sup>21</sup> bahwa kemajemukan tersebut merupakan anugerah yang harus selalu dijaga. Pancasila sebagai ideologi negara, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain, pluralistik justeru berakibat sebaliknya, menempatkan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial dan

---

terkadang dapat memicu konflik fisik antarumat berbeda agama. Lihat: (Nimas Syafitri, 'Konflik Antaragama di Indonesia', internet, diakses 27 Januari 2018).

<sup>20</sup> J.S. Furnivall, 'Plural Societies', *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne, 1980, pages 80-103.

<sup>21</sup> Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika membuka acara Muktamar XII Jami'iyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaraoh An Nahdhliyah (JATMAN) di Pekalongan, Jawa Tengah, 14-18 Januari 2018. Lihat: ('Habib dan Kiai Diminta Ikut Jaga Keragaman', *Republika*, 16 Januari 2018).

disintegrasi bangsa. Tamrin Amal Tomagola mengungkapkan bahwa sesungguhnya Nusantara ini sejak 1950-an kerap kali telah terjadi konflik baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru dan juga PascaOrde Baru (Reformasi). Konflik antaretnis di Kalimantan telah mulai terjadi sejak tahun 1950-an, dalam masa Orde lama dan Orde Baru dengan meledaknya konflik etnis di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat, terakhir di Sampit, Kalimantan Tengah adalah yang ke-16 kalinya. Di masa Orde Baru, terjadi beberapa pertikaian bernuansa agama di Jawa, seperti kasus Situbondo, Tasikmalaya dan Pekalongan. Konflik antarumat beragama secara terbatas di Halmahera Utara telah sering terjadi pada tahun 1960-an. Di Poso, setidaknya dua gejolak antarumat beragama, masing-masing pada 1992 dan 1995.<sup>22</sup> Antara 1994 dan 1996, terjadi kasus konflik dan kekerasan bernuansa etnis dan agama, seperti antara Kristen dan Muslim. Dari Flores hingga Tasikmalaya, insiden-insiden yang menjadi pemicu tampak beragam tetapi akibatnya agak serupa atau mirip. Para perusuh menjadikan gereja, kedai dan toko-toko Muslim pendatang dan Cina Kristen dan kantor-kantor pemerintah sebagai sasaran.<sup>23</sup> Konflik sosial-etnis dan agama selanjutnya pada era Reformasi pun juga tidak jauh berbeda dalam hal pemicu dan dampaknya dengan era sebelumnya, sebelum Reformasi.

Diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel, berikut.

'After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regional resistance movements, the inability to curb corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of "messy stages". In the breaking up of the nation-state'.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Tamrin Amala Tomagola, 'Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan', *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Editor: Moh. Soleh Isre, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 41-42.

<sup>23</sup> Nimas Syafitri, 'Konflik Antaragama di Indonesia, internet, *ibid.*, (diakses 27 Januari 2018).

<sup>24</sup> Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (Eds.), 'Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories', *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004, pp. 1-2. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, hlm. 90.

## 60 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Syafuan Rozi<sup>25</sup> mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena buruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi cepat marah dengan orang lain. Frans Magnis Suseno<sup>26</sup> mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia. *Pertama*, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras, etnik dan daerah. *Kedua*, berhubungan dengan akumulasi perasaan iri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). *Ketiga*, perilaku seorang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. *Keempat*, sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Supardi Suparlan<sup>27</sup> mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih rentan terhadap potensi konflik. Potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk "sumber-sumber sosial" (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi etnisitas sebagai cara mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuatan tertentu. Pada kekuatan struktural sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Franz Magnis-Suseno<sup>28</sup> menulis bahwa insiden Ketapang (1998) terhadap gereja-gereja Kristen—yang barang kali merupakan satu

<sup>25</sup> Syafuan Rozi, "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No. 1/2003, hlm. 91-92.

<sup>26</sup> Frans Magnis Suseno, "Faktor-faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 121-122.

<sup>27</sup> Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 70.

<sup>28</sup> Franz Magnis-Suseno, "Faktor-faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan", *Konflik Komunal di Indonesia Saat*



faktor yang menyebabkan peperangan Kristen-Islam di Ambon—dihasad oleh konflik antara orang Betawi (penduduk asli Jakarta) dengan orang Ambon. Sejak 1990 telah terjadi serangan terhadap gereja-gereja dengan peningkatan momentum, mencapai klimaksnya pada insiden yang mengerikan pada 1996 dan 1997 di Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya dan Rengasdengklok; sedangkan di bagian Timur Indonesia telah terjadi serangan terhadap masjid-masjid. Semua ini telah dikalahkan oleh (berakhir dengan) pecahnya apa yang disebut dengan perang sipil anatar Kristen dan Muslim di Maluku dan Sulawesi Tengah dan konflik etnis antara penduduk asli Dayak dan Melayu disatu pihak dan pendatang Madura di pihak lain. Di Maluku, konflik mulai terjadi pada tanggal 19 Januari 2000, hari pertama Idul Fitri di Kota Ambon. Dari sini, konflik meluas ke seluruh pulau, kemudian ke pulau-pulau sekitarnya, dan setelah tenang beberapa bulan, selanjutnya berlanjut ke Maluku Selatan, Buru, Ternate, dan Halmahera. Hanya di Maluku Selatan dan Utara saja perdamaian secara solid dapat diterapkan. Akan tetapi, sampai kini, situasi di Ambon dan sekitarnya sudah stabil. Ketika itu, kadang-kadang telah terjadi serangan di mana kekerasan bisa terjadi kapan saja. Konflik di Poso dan sekitarnya dan Luwu di bagian tengah Sulawesi telah membara sudah agak lama sebelum menjadi hal yang menakutkan pada bulan April 2000, dan masih belum ada pemecahan hingga kemudian. Perang etnis di antara penduduk setempat dan pendatang Madura di beberapa bagian Pulau Kalimantan hanya diselesaikan dengan memindahkan orang-orang Madura. Juga sudah terjadi benturan antara masyarakat dar Flores dan dari Batak di Pulau Batam. Konflik-konflik ini, khususnya disekitar Ambon, telah diperburuk oleh faktor politik, secara parsial dari TNI dan Polri dan orang-orang yang datang dari luar yang melibatkan diri di dalamnya.<sup>29</sup>

Keputusan Presiden RI No. 12/ 2014 yang ditandatangani pada 12 Maret 2014 merupakan salah satu langkah maju terhadap

---

Ini, Diterbit atas Kerjasama *Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)* dan Pusat Bahasa dan Budaya (*The Center for Languages and Cultures*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 119-120.

<sup>29</sup> Franz Magniz-Suseno, 'Faktor-faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia....', *ibid.*, hlm. 120.

## 62 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

penghapusan diskriminasi dan politik adu domba. Disisi lain, sebagian kalangan berpandangan bahwa Kepres ini terlalu berlebihan dan cenderung mengistimewakan etnis Cina-Tionghoa. Beragam pandangan yang ada sesungguhnya sah-sah saja karena begitu banyak persoalan etnis Cina-Tionghoa seiring dengan sejarah perjalanan bangsa sejak pra-kolonial. Banyak riset dan publikasi ilmiah yang telah dilakukan tentang relasi etnis Cina-Tionghoa dan Pribumi agaknya memang tidak mudah diselesaikan dengan cepat dan dalam tempo hitungan tahun. Kehadiran Kepres ini, terkesan tiba-tiba yang memunculkan multitafsir karena sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi-Pemilihan Umum 2014.<sup>30</sup>

Istilah *Tjina*, *Cina* dan *Tionghoa* sudah banyak dibahas dalam studi akademik, baik bertalian dengan pendekatan sosiolinguistik dan bertalian dengan interaksi sosial antaretnis yang berbeda. Istilah *Tjina* dan *Cina* sudah mendunia. Dalam konteks Indonesia, penggunaan istilah *Tjina*, *Cina* dan *Tionghoa* merupakan suatu hal yang lazim dan biasa pula digunakan dalam masyarakat dan tidak selalu diartikan negatif. Dalam banyak literatur ilmiah (buku, artikel jurnal) internasional juga sering menggunakan istilah *Chinese* ketimbang istilah *Tionghoa*. Para akademisi Indonesia juga tampak fleksibel dalam penggunaan kedua istilah itu, ada yang menggunakan istilah *Tionghoa* dan banyak pula yang menggunakan istilah *Cina*. Istilah *Tjina*, *Cina* dan *Tionghoa*, di banyak daerah selama ini tidak selalu bermakna negatif baik bagi etnis Cina-Tionghoa dan mayoritas Pribumi. Sejumlah riset konflik sosial bernuansa etnis dan rasial pada pasca 1998 menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus-kasus konflik tersebut cenderung dikarenakan adanya ketimpangan struktur sosial-ekonomi pada etnis berbeda.<sup>31</sup>

Dari perspektif sosial-ekonomi, faktanya, justeru etnis mayoritas cenderung yang terdiskriminatif. Jadi, kurang jelas seberapa jauh sebetulnya dampak penggunaan istilah *Tjina*, *Cina*, dan *Tionghoa* terhadap terjadinya kasus-kasus konflik sosial pada 1998. Padahal,

<sup>30</sup> Abdullah Idi, 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik', *Sriwijaya Post*, 2 April 2016.

<sup>31</sup> Abdullah Idi, 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik', *ibid*.

pada awalnya, hubungan etnis mayoritas pribumi dengan etnis minoritas Cina-Tionghoa berjalan dengan hangat dan normal. Justeru, relasi etnis Cina-Tionghoa dan kolonial Belanda tampak tidak harmonis ketika itu. Suatu tindakan kekerasan massal bangsa kolonial Belanda terhadap etnis Cina-Tionghoa pada 1740 di Batavia yang menelan korban sekitar seratus ribu orang Cina-Tionghoa. Akan tetapi, bangsa kolonial Belanda selanjutnya berubah pendirian erat akan membahayakan kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Belanda selanjutnya memilih strategi menempatkan orang Cina-Tionghoa sebagai kolega dalam kegiatan ekonomi Hindia-Belanda. Tindakan ini secara politik berupaya menjauhkan mereka dari relasi sosial yang erat dengan orang pribumi.<sup>32</sup>

Agaknya, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dalam kategori negara yang sering terjadi konflik sosial-etnis dan agama. Salah satu faktor penyebabnya ialah keterkaitan dengan 'akar' sosio-historis sebagai masyarakat-pluralistik itu sendiri. Sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan persoalan etnisitas selalu menjadi perhatian seksama dari pihak penguasa pemerintah kolonial. Karena dipandang masih krusialnya persoalan etnisitas, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2014 bertalian dengan istiah Cina dan Tionghoa. Hampir semua wilayah Indonesia secara etnis dalam kategori heterogen, sejalan dengan kedatangan para migrant dari kelompok etnis yang berbeda dan hidup berdampingan dengan komunitas etnis lokal, tidak hanya dikota-kota atau pusat-pusat urban saja, tetapi juga di desa-desa dan daerah-daerah pedalaman. Sehingga, interaksi antaretnis menjaid lebih interaktif dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal ini juga mendatangkan masalah baru dalam mengakomodasi perbedaan kultur antara para migran dan masyarakat setempat, karena para migran secara ekonomi lebih mapan dibandingkan komunitas lokal. Perbedaan-perbedaan etnis dan kultur di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangannya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdullah Idi, 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik', *ibid.*

<sup>33</sup> Supardi Suparlan, 'Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia', *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Diterbitkan atas kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan Pusat Bahasa dan Budaya (*The Centre for Language and Cultures*), Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 79-80.

## 64 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Sebagian kalangan berpendapat bahwa jika tujuan itu untuk menghilangkan diskriminatif dan politik adu domba terhadap etnis Cina-Tionghoa agaknya kurang akurat. Karena dalam praktik interaksi sosialkomunikatif antara orang etnis Cina-Tionghoa dan masyarakat lokal-pribumi selama ini, umumnya penggunaan istilah itu dalam realitasnya tidak selalu berkonotasi negative oleh etnis Cina-Tionghoa, tergantung konteks sosiolinguistik di mana bahasa itu digunakan. Akan tetapi, kehadiran Kepres No. 12 Tahun 2004 tetap dipandang suatu hal yang positif untuk mengingatkan semua elemen bangsa betapa pentingnya keharmonisan dalam keberagaman dan perbedaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Seperti diketahui bahwa Indonesia sebagai negara pluralistik atas suku/etnis, budaya dan agama sejak awal telah disadari para pemimpin bangsa, yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, dari penjajahan asing. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa tersebut mempunyai cara pandang yang positif tentang kemajemukan. Cara pandang seperti ini selaras dengan ajaran agama yang menjelaskan bahwa kemajemukan itu, bagian dari *sunnatullah*. Agama mengingatkan bahwa kemajemukan terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus diterima dengan lapang dada dan dihargai, termasuk di dalamnya bila adanya perbedaan konsepsi keagamaan. Perbedaan konsepsi di antara agama-agama yang ada adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dimungkiri oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsepsi itu terjadi pada hampir semua aspek agama, baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan.

Hal ini dalam praktiknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat berbeda agama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perbedaan konsep keagamaanlah yang menjadi sumber konflik utama antara umat manusia. Tidak dapat dimungkiri bahwa sejumlah teks keagamaan memang mengatur masalah kekerasan dan peperangan.

Jika dilihat Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman dalam banyak hal, dari Suku, Bahasa, Budaya, dan tidak terlepas dengan agama. Bahkan agama yang di Indonesia yang diakui oleh negara ada 5 yaitu, Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Katolik, bahkan pada saat pemerintahan mantan presiden KH. AbdulRahman Wahid, yang sering dipanggil dengan sebutan Gus Dur, beliau mengakui keberadaan aliran Konghucu di Indonesia, yang dulu tidak diakui keberadaannya, maka dari itu semakin bertambah pula beragam agama di Indonesia.<sup>34</sup> Dari sisi agama konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik antara umat agama Islam dan Kristen; tetapi bila dilihat dari sisi etnis yang paling sering etnis Cina/Tionghoa dan pribumi (*indigenous*).

Dalam kasus konflik agama di Indonesia, disini 'konflik agama' dapat diartikan sebagai 'perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan' (Ali-Fauzi, Alam, dan Panggabean, 2009). Konflik keagamaan dibagi kedalam dua kategori pokok, yakni konflik antaragama dan konflik sektarian (intra-agama). Konflik antar-agama misalnya bertalian dengan konflik terkait tempat ibadah. Untuk konflik intra-agama, atau konflik sektarian, seperti konflik sektarian di kalangan dalam agama yang sama. Konflik antaragama, seperti konflik pembangunan tempat ibadah meliputi sejumlah unsur atau isu konflik, seperti PBM tentang pembangunan tempat ibadah dan intimidasi. Politik identitas salah satu konteks sosial yang lebih luas dari konflik ini. Sementara itu, *konflik sektarian (intra-agama)* meliputi partikularisme keagamaan berbasis doktrin keagamaan, perebutan pengikut, hubungan mayoritas-minoritas, opini legal-keagamaan atau fatwa, premanisme, dan intimidasi terhadap sekte tertentu.<sup>35</sup>

Bentuk konflik agama bertalian dengan tempat ibadah dan sektarian bisa berupa (1) benturan bilateral, ketika dua kelompok

<sup>34</sup> <http://nimassyafitri.wordpress.com>. 'Konflik Antaragama di Indonesia', Diakses: 5 Agustus 2017.

<sup>35</sup> Rizal Panggabean, et al., *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM, The Asia Foundation, Jakarta, 2014, hlm. 307.

## 66 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

bentrok dalam konflik terbuka, (2) serangan unilateral, ketika salah satu kelompok menyerang kelompok lain, dan (3) kerusuhan terbuka dan lebih luas sehingga mencakup seluruh kota dan melibatkan lebih banyak pihak. Bentrok bisa melibatkan kelompok keagamaan versus kelompok keagamaan; atau kelompok keagamaan versus aparat keagamaan seperti polisi dan satuan pamong praja (polisi milik pemerintah daerah). Penyerangan dapat terjadi terhadap orang atau sekelompok orang, terhadap property dan tempat ibadah milik sekelompok orang, dan penyerangan terhadap aparat dan properti milik pemerintah. Dalam konflik tempat ibadah dan sektarian, penterangan dapat meliputi salah satu atau lebih dari beberapa bentuk kekerasan, seperti intimidasi, penyisiran, pengusiran, penyanderaan, penculikan, penahanan, penganiayaan, penganiayaan hingga tewas, pembunuhan, penembakan, penyitaan, penyegelan, perusakan, perusakan yang disertai penjarahan atau pembakaran (tempat ibadah atau perumahan sekte tertentu), atau pengeboman.<sup>36</sup>

### a. *Facilitating Context*

#### 1) Politik Etnisitas Kolonial

Fredrik Barth (1969) bahwa etnisitas dapat dikatakan eksis ketika orang mengklaim identitas tertentu bagi dirinya dan didefinisikan oleh orang lain juga dengan identitas yang diklaimnya itu. Etnisitas, dengan demikian, harus dimaknai sebagai identifikasi seseorang dalam berafiliasi dengan kelompok sosialnya. Identitas dan etnisitas merupakan hasil konstruksi (proses) sosial yang lazim disebut askripsi (*ascription*). Askripsi, proses penandaan sekelompok orang/masyarakat tertentu dengan sembarang: apa pun tandanya (sebagai ciri khas, *labelling* kelompok tertentu), umumnya berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Dalam proses itu terjadi interaksi orang dari beragam latar belakang di berbagai bidang kehidupan. Artinya, proses askripsi tidak akan terjadi justeru ketika seorang benar-benar menyendiri, dengan tidak berinteraksi dengan orang lain. Agama dan etnisitas merupakan konsekuensi adanya klaim-klaim terhadap

<sup>36</sup> Rizal Panggabean, et al., 'Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia'..., *ibid.*, hlm. 12-13.

identitas itu. Sebagai seorang Melayu, bisa saja mengatakan orang: Melayu-Bangka, Melayu-Riau, Melayu-Palembang, Melayu-Jambi, dan Melayu-Deli (Medan). Sama halnya, ketika orang menyebut identitasnya: Cina-Palembang, Cina-Medan, Cina-Solo, Cina-Bangka, Cina Jakarta, dan lain. Karena, konsep 'identitas' dan 'etnisitas' adalah konsep tentang identifikasi diri dan asal-usul sosial yang bersifat relasional. Di sisi lain, dalam konteks berbangsa, orang mengatakan sebagai 'orang Indonesia'; disisi lain, sebagai 'orang Muslim' atau 'orang Kristiani'.

Dalam buku Denys Lombard tentang *Nusa Jawa*, isinya berupaya menemukan apa itu budaya Jawa atau mentalitas Jawa dalam persilangan arus global, budaya-budaya global akibat kekuatan pembaratan, dan jaringan-jaringan Asia, Islam, India, Cina dan Jepang. Lombard mencoba menemukan satu kekuatan yang *pongah* yakni Jawa itu sendiri di dalamnya terdapat motor besar bagi terbentuknya negara besar, Indonesia. Salah satu bagiannya, Lombard menceritakan bagaimana kehadiran penjajah, kehadiran VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda itu tidak diikuti dengan satu proses yang disebut asimilasi. Orang Barat dan orang Jawa, orang di Indonesia pada umumnya saling kawin-mawin dan melebur menjadi satu.<sup>37</sup>

Hal ini berbeda dengan di Philipina. Di Filipina hingga hari ini kekuatan dari Mestiso dalam panggung politik masih sangat kuat. Dan budaya Mestiso bertahan. Di Indonesia praktis habis, kira-kira tahun 1957. Orang Indo habis dari Indonesia bahkan partai Indo yang cukup kuat pada masa pergerakan itu juga habis, kontak atau hubungan negara bekas penjajah dan negara Indonesia praktis terputus, gerakan anti barat juga menguat. Jadi ada separasi yang besar. Sesungguhnya proses seperti ini sudah berjalan lama, karena sejak lama Belanda membiarkan budaya-budaya lokal atau masyarakat lokal hidup dibawah organisasi sosial lokal, dibawah kepemimpinan lokal juga, entah itu para raja kecil di pulau-pulau, para kepala desa, para orang kaya, kalau di Maluku orang kayo dan di Minang juga orang Kayo. Disana, lalu ada yang

<sup>37</sup> PM. Laksono, 'Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme', *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, Editor: Th. Sumarhana, Elga sarapung, Zuly Qodir, Samuel A. Bless, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 3.

## 68 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

disebut *plural-society*, masyarakat di mana tiap-tiap kelompok etnis dibiarkan hidup dalam tradisinya masing-masing, agamanya masing-masing, bahasa masing-masing, mereka bersatu dibawah kekuasaan pemerintah kolonial, dan konon hanya bertemu di pasar. Dalam buku Denys Lombard juga disebutkan bagaimana bahasa Melayu tetap bertahan sebagai lingua franca bukan bahasa Belanda, bukan pula bahasa Inggris, berbeda di Philipina dan Malaysia, juga orang-orang pribumi dibiarkan hidup dalam dunianya.<sup>38</sup>

Lombard mengungkapkan bahwa pemerintah kolonial juga memperkenalkan dualisme hukum. Masyarakat pribumi diurus dengan hukum adatnya, masyarakat Eropa diurus dengan hukum orang Eropa. Yang agak problematik tentu juga orang-orang asing dari Timur, India, Cina, dan Jepang. Mereka diatur dan masuk dalam kelompok Eropa. Orang-orang Kristen juga pada waktu itu diadopsi sebagai subjek hukum Eropa. Tetapi antara 1930-an sampai Jepang masuk, masyarakat plural begitu hidup dan diketahui adanya dunia yang terpisah antara orang asli dan pendatang yang berkuasa. Hukum adat menjamin dan memberi *previlise* kepada penguasa-penguasa adat, penguasa lokal untuk mempertahankan komunitasnya dengan nuansa lokal, mereka juga patuh di bawah kepentingan (penguasa) lokal.<sup>39</sup>

Pada zaman Belanda, dikatakan bahwa di Maluku, kalau seorang kepala adat atau kepala desa melakukan kesalahan dia pun akan dilindungi oleh pemerintah Belanda karena kepentingan pemerintah Belanda dipertaruhkan dibawah atau dalam perantaraan para pemimpin lokal itu dalam suatu kebijakan yang disebut *indirect rule* (sistem pemerintahan tidak langsung). Sehingga kita menemui ada dunia etnik, yang kuat hidup dan sebagainya, dunia Hindia Belanda ada di atasnya dan menguasai jaring-jaring internasional. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berlakunya UUD'S tahun 1949, wewenang para kepala adat untuk memutuskan perkara dihilangkan atau dihapus. Kepala-kepala adat dan kepala-kepala desa di seluruh

---

<sup>38</sup> PM. Laksono, 'Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme....', *ibid.*, hlm. 4

<sup>39</sup> PM. Laksono, 'Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep ....' *ibid.*, hlm. 5.



Indonesia tidak bisa lagi memutuskan perkara. Perkara kemudian ditarik ke pengadilan, dan dualism hukum dihilangkan mulai saat itu, lalu dikenal hukum yang satu. Penyatuan dalam kerangka nasionalisme ini berlanjut tahun 1979 dengan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, seluruh desa di Indonesia diseragamkan. Di Jawa, para Lurah masuk kota, artinya sekarang di desa tidak ada lagi lurah yang ada kepala desa atau hanya di kota-kota. Di luar Jawa, kades datang. Dulu tidak ada kades, tetapi (mungkin) yang ada itu raja. Dalam konteks Maluku raja atau Hilai, tokoh-tokoh local kemudian diseragamkan dalam suatu system pemerintahan desa yang berlaku umum, yang hingga hari ini pelaksanaannya masih menghadapi banyak sekali benturan. Di Maluku misalnya, pelaksanaan Undang-Undang No. 5/ 1979 (ketika itu) karena berbarengan dengan turunnya dana bandes mendorong lahirnya banyak desa karena administratur, para camat tertarik dengan porsi dana yang semakin banyak.<sup>40</sup>

Pada awal prakolonial, banyak sumber atau literatur sejarah mengatakan bahwa kehadiran orang-orang Cina ke Nusantara bukanlah persoalan. Bahkan, dikatakan terdapat peran berarti dari orang Cina dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Benny G. Setiono, dalam bukunya *Tionghoa Dalam Pusaran Politik (2003)*, menulis bahwa sebelum tiba di Jawa pada 1405 Laksamana Ceng Ho terlebih dahulu singgah di Samudera Pasai, menemui Sultan Zainal Abidin Bahian Syah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan. Pada 1407, Laksamana Ceng Ho singgah di Palembang dan menumpas para perompak Hokkian dan membentuk masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara. Dalam tahun itu Ceng Ho juga membentuk masyarakat Tionghoa di Sambas. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa sebelum kedatangan ekspedisi Kaisar Yung Lo yang dipimpin Laksamana Ceng Ho di Palembang dan Sambas telah ada komunitas Tionghoa.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> PM. Laksono, 'Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan...', *ibid.*, hlm. 5.

<sup>41</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Elkasa, Jakarta, 2016, hlm. 43; dan lihat pula: Sugeng Haryadi, *Sejarah Berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebek Besar*, CV. Mega Berlian, Jakarta, 2002, hlm. 47-48.

## 70 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Benny G. Setiono<sup>42</sup> mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa beberapa orang Walisongo merupakan Tionghoa. Di antaranya adalah Sunan Ngampe yang nama aslinya Bong Swi Hoo alias Raden Rachmat. Bong Swi Hoo berasal dari Yunnan dan cucu penguasa tertinggi di Campa, Bong Tak Keng (Carmain). Bong Swi Hoo datang ke Jawa tana isteri pada tahun 1447 dan menikah dengan Ni Gede Manila puteri Gan Eng Cu alias Arya Teja, kapten tionghoa yang berkedudukan di Tuban. Gan Eng Cu sebelumnya berkedudukan di Manila dan menikah dengan wanita setempat dan memiliki puteri yang diberi nama Ni Gede Manila. Bong Swi Hoo mempunyai seorang putera yang bernama Bong Ang (Bonang) yang kelak menjadi Sunan Bonang. Bonang diasuh oleh Sunan Ngampel bersama dengan Giri (Raden Paku), anak Maulana Wali Lanang alias Maulana Iskak yang menikah dengan puteri Blambangan, Giri kelak dikenal sebagai Sunan Giri dan Maulana Wali Lanang atau Sayid Iskak (Maulana Iskak) adalah paman Bong Swi Hoo, anak Bong Tak Keng dari Campa.

Dalam perkembangannya, relasi sosial etnis Cina dan bangsa kolonial Belanda, telah menempatkan etnis Cina dalam struktur masyarakat Hindia Belanda diposisikan sebagai warga kelas dua (Timur Asing), seperti India dan Arab. Sedangkan etnis pribumi dikategorikan sebagai warga kelas tiga (*inlander*). Jadi, benih-benih kecemburuan dan prasangka memang sengaja diciptakan bangsa kolonial dengan politik *divide et impera*. Jadi, struktur sosial-etnis yang diskriminatif yang terjadi selama ratusan tahun pada zaman Hindia-Belanda telah menempatkan posisi imperior dan tersubordinasi bagi masyarakat pribumi. Struktur sosial-etnis yang berbeda berdampak pula terhadap perbedaan kesempatan dalam meraih kesejahteraan dan prestasi ekonomi di negeri Hindia-Belanda.

Wang Gungwu<sup>43</sup> mengungkapkan bahwa menjelang abad ke-19 banyak pedagang Cina-Tionghoa memegang posisi penting sebagai pemimpin di berbagai perusahaan Eropa. Sebagian mereka bertindak

<sup>42</sup> Benny G. Setiono, 'Tionghoa Dalam Pusaran Politik....', *ibid.*, hlm. 43.

<sup>43</sup> Abdullah Idi, 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik', *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 2015, hlm. 27-28.

sebagai penasehat bisnis bagi raja-raja pribumi dan gubernur provinsi di Hindia Belanda. Sebagian lainnya menjadi agen perekrut kuli-kuli dari Cina daratan, penarik pajak pertanian, atau sebagai pemimpin (*capiten*) komunitas Cina. Belanda menilai orang-orang Cina penting sebagai ahli-ahli lokal (*local experts*) dan perantara (*middlemen*), dan lebih bernilai dibandingkan dengan para pedagang Asia lainnya. Belanda dan Inggris kemudian tidak ragu lagi untuk menempatkan orang Cina dalam upaya ekspansi aktivitas perdagangan mereka di Nusantara selama abad ke-17 dan ke-18. Mereka melihat orang Cina memiliki mobilitas tinggi dan senantiasa siap ambil bagian dalam berbagai kesempatan yang mereka lakukan. Posisi-posisi orang Cina yang strategis itu jauh melebihi posisi-posisi etnis India dan Arab, kendatipun sama-sama kelas Timur Asing. Sebagian besar etnis Cina-Tionghoa selanjutnya betul-betul memanfaatkan hubungan baik dengan Belanda yang secara ekonomi politik tentu menguntungkan. Dalam sejarah perlawanan dan peperangan dengan bangsa kolonial Belanda, memang ada keterlibatan sebagian kecil etnis Cina-Tionghoa yang masih loyal dalam membantu elit pribumi yang menentang bangsa kolonial-Belanda. Diungkapkan Mason Hoadley (1998) ketika Belanda melakukan perluasan aktivitas ekonomi, sejumlah besar etnis Cina-Tionghoa berminat untuk bermigrasi ke negeri Hindia Belanda.

Ketika nasionalisme bangsa mulai tumbuh sejak organisasi Boedi Oetomo berdiri pada 20 Mei 1908, sebagai tanda dimulainya arah pembangunan dan kesatuan bangsa, yang terjadi dikalangan etnis Cina-Tionghoa justru sebaliknya. Pada 1900, di Batavia berdiri perkumpulan Cina, yakni *Tionghoa Hwee Koan* (THHK) yang pada prinsipnya bertujuan memupuk nasionalisme dan budaya Cina melalui pendidikan umum. Sejak 1927, kegiatan politik masyarakat kolonial bersifat komunal. Orang Cina yang sebelumnya terintegrasi dalam masyarakat Hindia Belanda, hanya berjuang demi kepentingan kelompoknya sendiri. Organisasi-organisasi politik komunal itu tetap eksis setelah Indonesia merdeka. Hal ini memperlihatkan bahwa latar belakang terjadinya kegiatan politik komunal, yakni pembagian kepentingan berdasarkan etnis, tidak berubah. Di kalangan orang Cina, usaha memperkuat kecinaannya dilakukan dengan sejumlah cara, misalnya

## 72 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

melalui bahasa. Pada 1901, bahasa Cina di kalangan komunitas Cina-Tionghoa. Di *Holland Chinese School (HCS)* didirikan oleh Belanda, sebagai respons pemerintah kolonial. Pendidikan HCS didasarkan pada kurikulum otonomi kecinnaan, seperti halnya kurikulum dan kegiatan sekolah di Cina daratan (*mainland China*).<sup>44</sup>

Dari perspektif politik, konflik sosial-etnis dan agama, *ethno-religious*, di Poso, misalnya dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda. Keberpihakan pemerintah kolonial Belanda pada penduduk Kristen sebetulnya bukan dilandaskan secara kuat pada spirit keagamaan, tetapi lebih kepada kepentingan politik, terutama karena aksi pembangkangan pribumi yang umumnya memang dimobilisasi Islam. Politik agama peninggalan kolonial ini telah membangun dua *image* utama dalam konstelasi Poso, yakni Poso identik dengan komunitas Kristen, dan birokrasi di Poso secara historis didominasi umat Kristen. Namun, di era kemerdekaan, fakta keagamaan tersebut menjadi terbalik. Fakta pergeseran komunitas keagamaan ini selanjutnya berdampak pula terhadap tatanan politik di Poso. Disinilah politik komunitas keagamaan mulai berperan pula dalam dunia birokrasi-kepegawaian di Poso, antara lain: 1) Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan Islam; dan 2) jabatan strategis yang semua didominasi Kristen, secara alamiah terjadi pergeseran didominasi Islam. Kalangan terdidik orang Islam bermunculan dan mulai ikut bersaing dengan para elite Kristen dalam memperebutkan posisi-posisi strategis di birokrasi. Dalam situasi inilah mulai muncul sentimental keagamaan, komunitas Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan Islam. Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persaingan politik pun mulai terjadi.<sup>45</sup>

Dalam kasus Poso ini, pengaruh kekuatan rezim Orde Baru diklaim sejumlah pihak menjadi 'bom waktu' yang sedikit banyak ikut andil menjadi faktor terjadinya penyebab konflik. Terjadinya marginalisasi

---

\* Abdullah Idi, 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik...', *ibid.*, hlm. 28.

\* Muhammad Rendi, 'Konflik SARA...', *op.cit.*, hlm. 64-65.

politik oleh rezim Orde Baru dengan dilanggarnya prinsip *power sharing* yang dipegang teguh sebelumnya. Kaum mapan Kabupaten Poso selama dekade hidup dibawah titik terbawah birokrasi otoriter yang tersentralistik itu. Pemerintah Orde Baru menempatkan perwira-perwira militer di semua kunci Pemerintahan Sulawesi Tengah, seperti Gubernur, Bupati, dan Ketua DPRD. Pascaruntuhnya Orde Baru maka berakhir pula kekuasaan militer, namun tanpa mekanisme politik yang matang. Bagi kelompok elite lokal, berbagi kekuasaan secara komunal merupakan salah satu cara merebut berbagai peluang yang ada. Pengorganisasian kelompok etnis dan keagamaan yang begitu tersebar luas pada dewasa ini mencerminkan berkurangnya kepercayaan terhadap partai politik sebagai sarana untuk mengatasi konflik. Pembagian kekuasaan secara etnis telah lama menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri dalam berbagai kesepakatan rahasia untuk menghindari masalah, tetapi kini hal tersebut menjadi isu pokok bagi publik dalam berbagai *bargaining* politik. Dalam perkembangannya secara diam-diam wacana politik bersandar pada kepentingan agama mulai berkembang.<sup>46</sup>

## 2) Ekonomi, Demografi, dan Mayoritas-Minoritas

Setelah era kemerdekaan, sentimen terhadap etnis Cina tentunya tidak mudah hilang begitu saja. Dalam kasus G/30/S/PKI/1965 misalnya, pemerintah Orde Lama mengklaim indikasi keterlibatan etnis Cina, yang kemudian memunculkan ketegangan diplomatik dengan Beijing. Pemerintah Orde Lama pun membuat sejumlah peraturan yang membatasi aktivitas sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik etnis Cina di Indonesia. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang agak serupa dengan kebijakan Orde Lama sebagai upaya mencari solusi beragam dan dinamika persoalan etnis Cina.

Seperti diungkapkan Benny G. Setiono bahwa perilaku ekonomi etnis Cina periode 1986-1999, merupakan masa keemasan bisnis etnis Cina di Indonesia, terlebih bagi yang terdekat dengan "Cendana". Etnis Cina mengokohkan diri sebagai salah satu penyangga pertumbuhan

---

<sup>46</sup> Muhammad Rendi, 'Konflik SARA...', *ibid.*, hlm. 66.

## 74 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku etnis Cina-Tionghoa lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama, dan jaringan kerja dengan pihak luar negeri menjadi *point* istimewa perilaku ekonomi etnis Cina-Tionghoa di tahun-tahun ini. Kedekatan dengan para pejabat sampai cenderung dikaitkan dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina. Krisis Mei 1998, telah menempatkan sentra-sentra ekonomi etnis Cina telah menjadi sasaran amuk massa. Sejumlah orang Cina pergi keluar negeri atau kembali ke daerah-daerah asal kelahiran dalam negeri untuk tujuan keselamatan.<sup>47</sup>

Pada 2008, Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono mengeluarkan UU RI No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, pada Pasal 9 diatur tentang hak-hak: sipil, politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era Reformasi, yang dipertegas dalam UU No. 40/2008, telah banyak perubahan dan kemajuan yang dialami etnis Cina, yang telah memungkinkan mereka mencalonkan diri menjadi anggota legeslatif, eksekutif, dan lain-lainnya. Sejak UU ini dikeluarkan pada 2008, tampak bahwa sejumlah anggota legeslatif dan eksekutif di negeri ini ditempati oleh etnis Cina-Tionghoa. Presiden SBY juga mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2014 tentang penggunaan istilah Cina dan Tionghoa. Jika, tujuan Kepres ini untuk menghilangkan diskriminatif dan politik adu domba terhadap etnis Cina-Tionghoa agaknya kurang akurat. Karena, dalam praktik interaksi-sosial-komunikatif antara orang Cina dan Pribumi, penggunaan istilah itu tidak selalu diartikan negatif oleh etnis Cina, tergantung konteks sosiolinguistik di mana bahasa itu digunakan.

Kehadiran Kepres No. 12 Tahun 2014, tentunya, dapat dipandang suatu hal positif yang setidaknya untuk mengingatkan semua elemen masyarakat-pluralistik Indonesia tentang betapa pentingnya memelihara keharmonisan dalam keberagaman demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya saja, karena kebijakan mengeluarkan Kepres ini menjelang akan dilaksanakan pesta demokrasi pada

---

<sup>47</sup> Dikutip Abdullah Idi: ('Dinamika Sosiologis Indonesia....', *op.cit.*, hlm. 28).

9 April 2014, keberadaannya dapat ditafsirkan beragam yang salah satunya sebagai upaya untuk mendongkrak suara bagi partai politik tertentu. Begitulah faktanya, sejak zaman kolonial hingga zaman reformasi keberadaan etnis minoritas Cina sarat dengan *political interest* penguasa, yang terkadang solusi substantifnya justeru terabaikan, yakni tanpa adanya diskriminatif bagi semua etnis mayoritas dan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan. Agaknya itulah solusi substantif ke depan.<sup>48</sup>

Memang sejak awal para *founding fathers* seakan telah menyadari keberadaan Indonesia sebagai bangsa pluralistik—kemungkinan akan rentannya konflik sosial yang dapat melemahkan integrasi sosial di kemudian hari. Jika, ada orang Melayu beragama lain, selain Islam, karena proses perjalanan sejarah yang berbeda, tetapi asal usul nenek moyangnya sama, dari perspektif sosioantropologis, hal itu juga merupakan identitas/jati diri yang mereka miliki, yang harus dihargai dan dihormati. Konsep Islam yang menghargai perbedaan dan toleransi sangat jelas, dan bukanlah persoalan lagi. Hal ini sama halnya, sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) di Indonesia, apa yang termaktub dalam sila ke-1 Pancasila, di mana intinya 'setiap penganut agama patut menjalankan ajaran agamanya', apa pun agamanya. Para *founding fathers* agaknya sudah memprediksi tentang 'kebutuhan' masyarakat pluralistik-Indonesia ke depan, dengan perlunya merumuskan kelima sila dari Pancasila, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-1 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, meskipun keyakinan berbeda, tapi asal-usulnya sama, dalam konteks berbangsa bukanlah persoalan, '*Bhinneka Tunggal Ika*'.<sup>49</sup>

Konsep '*Bhinneka Tunggal Ika*' dilihat sebagai pemersatu bangsa yang majemuk, untuk mencapai integritas suatu bangsa, Indonesia. Dalam konsep ini, suatu negara terdiri atas kelompok-kelompok atas dasar: suku/etnis, agama, ras, dan antargolongannya yang tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang antara kelompok satu dengan

---

\* Abdullah Idi, 'Dinamika Sosiologis....', *ibid.*, hlm. 29.

\* Abdullah Idi, 'Dinamika Sosiologis....', *ibid.*, hlm. 29.

## 76 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

lainnya tidak saling melengkapi tetapi justru bersifat kompetitif. Untuk itu, bangsa Indonesia memilah-milah budaya bangsa sebagai universal yang terbagi atas beberapa subbudaya daerah yang beragam., di mana dianggap sebagai khazanah kebudayaan. Untuk itu, diperlukan *image* masyarakat dalam satu, yang dinamakan '*Bhinneka Tunggal Ika*'. Jika keragaman dalam suatu bangsa tidak berhasil dikelola dengan bijak maka disintegrasi akan muncul sebagai akibat dari kegagalan itu. Adapun gagal tidaknya integrasi nasional terletak dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan ideologi nasional. Jika masyarakat merasakan manfaat dari keberagaman itu, integrasi akan tercipta. Sebaliknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat keragaman itu, yang akan terjadi adalah ancaman disintegrasi nasional (bisa berupa keinginan pemisahan antarwilayah).<sup>50</sup>

Ilmuan sosial-politik, R. William Liddle (1997) mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru (1966-1997) telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya. Fase manajemen/kebijakan konflik di tanah air. *Pertama*, manajemen konflik etnis sebelum tahun 1965. Pada 1928, para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dengan tujuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam upaya menciptakan kesatuan nasional. *Kedua* fase manajemen konflik dibawah Demokrasi Perwakilan (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965), yang membolehkan keinginan etnis mengekspresikan diri mereka sendiri melalui suatu sistem politik terbuka, partai-partai politik berkompetisi dalam Pemilu untuk duduk di Parlemen dan pemerintah dibentuk berdasarkan mayoritas parlemen. Dibawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno mencoba menghadapi aspirasi etnis-etnis dan kelompok lain melalui suatu kombinasi: tekanan (*coercion*, persuasif (*persuasion*) dan ko-optasi (*co-optation*). Dua hubungan konflik etnis paling penting pada 1950-an, adalah Hubungan Islam dan Negara; dan pemberontakan daerah-daerah dan pusat. *Ketiga* fase manajemen konflik pada masa Orde Baru (1966-1997). Pada level yang paling umum, pemerintah Orde Baru, dalam menangani manajemen

---

<sup>50</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 90.



konflik sosial menggunakan strategi politik yang mengkombinasikan elemen: tekanan (*coersion*); persuasif (*persuasion*); pertukaran (*exchange*) dan ko-optasi (*co-optation*).<sup>51</sup>

Terkhusus terhadap etnis Cina misalnya, kebijakan pemerintah Orde Baru difokuskan pada sejumlah kebijakan. Barbari mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Cina dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, kebijakan umum, sebagai upaya pemerintah orde baru untuk menyatukan etnis berbeda ke dalam masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh atau pemaduan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi bangsa baru. Sebagai proses pembangunan bangsa (*nation-building*) bangsa Indonesia. *Kedua*, kebijakan khusus sebagai penjabaran kebijakan pertama, dengan menerapkan strategi asimilasi dalam berbagai bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.<sup>52</sup>

Kebijakan Pemerintahan B.J. Habibie (1997-1999), lebih tampak pada bidang sosial budaya dan politik, dengan memberikan kesempatan kepada orang Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai etnis Cina. Mereka juga diperkenankan untuk mempraktikkan adat istiadat dan budaya leluhur. Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000 dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan praktik adat istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) memperkuat kembali bagi orang Cina untuk melaksanakan adat istiadat dan seni budaya Cina. Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), dalam konteks kebijakan etnisitas, lebih memfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antaretnis (UU PDRE) dan kerukunan umat beragama (PBM-KUB No. 9 & No. 8/2006).<sup>53</sup>

Pengesahan PBM-KUB No. 9 dan No. 8/2006 tersebut menunjukkan respons positif pemerintah SBY ketika itu terhadap berbagai konflik

---

<sup>51</sup> Abdullah Idi, 'Etnisitas & Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis terhadap PBM No. 9 & No. 8/2006', *Dinamika Sosiologis Indonesia...op. cit.*, hlm. 40.

<sup>52</sup> Abdullah Idi, 'Etnisitas & Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis...', *ibid.*, hlm. 40.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 : 27-60.

## 78 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

sosial. Hal ini, menunjukkan bahwa potensi konflik sosial, baik bernuansa etnis maupun agama, dengan beragam pemicunya masih menjadi ancaman dan tantangan dalam kehidupan berbangsa yang akan mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa. Berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya ledakan konflik dalam internal etnis dan agama. Pada 21 Maret 2006 telah ditanda tangani Peraturan Bersama Menteri (PBM): Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Amat Beragama. Dan Pendirian Ruman Ibadah. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah Ibadah yang menggantikan ketentuan lama, seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/VER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.<sup>54</sup> Hal ini bertanda bahwa para rezim pemerintahan, pada prinsipnya lebih jauh telah menyadari bahwa sebagai bangsa kepulauan, beragam etnis, agama dan ras, bangsa ini rentan terhadap potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi sosial dan juga disintegrasi bangsa.

Ada sejumlah Peraturan dan Undang-Undang diterapkan Orde Lama, Orde Baru dan era-Reformasi sebenarnya bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik etnis dan agama. Tapi, dalam perkembangannya harus diakui upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Faktanya, berbagai perilaku kekerasan bernuansa etnis dan agama hingga kini masih terjadi yang sekaligus bertanda bahwa masalah etnisitas di negeri ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas integrasi sosial. Potensi, kasus konflik etnis dan agama di Indonesia dengan beragam pemicunya agaknya masih menjadi ancaman serius kedepan sebagai tantangan dalam kehidupan berbangsa.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> 'Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9....', *ibid.*, hlm. 27-60.

<sup>55</sup> *Majalah Tempo*, 11 September 2005.

Oleh karena itu, pada 21 Maret 2006 lalu, telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah ibadah menggantikan ketentuan lama seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Jauh sebelumnya, upaya pembinaan kehidupan umat beragama di Indonesia telah dimulai sejak dikeluarkannya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (KH Ahmad Dahlan dan Amir Machmud), No/01 BER/MDN-MAG/1969. SKB ini, berkenaan dengan pengaturan beribadah para pemeluk agama. Meskipun SKB ini dipandang positif oleh kalangan umat Islam umumnya. Namun, untuk sebagian penganut Nasrani, terutama Protestan yang memiliki banyak sekte, dapat dipandang negatif.<sup>56</sup>

Pro dan kontra tentang SKB ini dalam proses pembentukan PBM yang lalu tetap ada, tentunya mereka memiliki perspektif atau argumen berbeda. Misalnya, ketika Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP)-yang mengklaim disokong 27 organisasi massa Islam: Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jama'ah Tabligh, dan Hizbut Tahrir-menutup 23 gereja di Jawa Barat.<sup>57</sup> Dalam hal ini, kalangan Nasrani, terutama Protestan, merasa terancam dan meminta SKB dua menteri itu dicabut. Tetapi, ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa SKB dua menteri itu bertujuan baik hingga tanpa harus buru-buru mencabutnya, dan perlu melihat kembali kandungan atau persyaratan dalam SKB itu.<sup>58</sup>

\* *Majalah Tempo*, 11 September 2005.

<sup>57</sup> *Majalah Tempo*, 11 September 2005.

<sup>58</sup> *Republika*, 5 September 2005.

## 80 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Surat Keputusan Bersama yang disempurnakan menjadi PBM itu tetap menjadi pedoman dalam mendorong atau membangun kualitas umat beragama di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya menelaah kualitas kerukunan antarumat beragama dengan beragam kasus konflik dan etnis sebagai respons terhadap PBM. Menurut hemat penulis, setidaknya, dalam upaya aplikasi PBM itu, ada tiga dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun kualitas umat beragama, yakni: *faktor intrinsik* (hubungan internal umat beragama), *faktor ekstrinsik* (hubungan antarumat beragama), dan *faktor pemerintah* dalam mengimplementasikan PBM. Faktor intrinsik, bertalian dengan sejauh kalangan intern umat beragama mengupayakan para penganutnya memiliki pengetahuan dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Setiap agama memiliki kekhasan tersendiri, terutama bertalian dengan doktrin-doktrin ajarannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama tertentu, semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya frekuensi kualitas keagamaan umat beragama. Faktor internal umat beragama ini diarahkan pada pemberdayaan individu-individu pengikut umat beragama agar lebih memahami, mengetahui, dan mempraktekkan ajaran agamanya. Kesalehan atau ketaatan individu umat beragama akan tercermin dalam perilaku sosial. Sedangkan, faktor ekstrinsik, bertalian dengan hubungan antar umat beragama. Bila bagian pertama menekankan pentingnya meningkatkan pengajaran dan pengetahuan sebagai proses menuju keshalehan atau ketaatan individu umat beragama, pada bagian kedua, faktor ekstrinsik, lebih menekankan pada pentingnya instraksi sosial dan keshalehan sosial, dalam konteks hubungan antarumat beragama. Kualitas kesalehan sosial antarumat beragama itu tentu banyak bergantung pada keshalehan individu umat beragama masing-masing. Upaya pembinaan atau pembangunan kualitas umat beragama memiliki basis (*grass-roots*) pada kesalehan individu umat beragama tadi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Musyawarah Antarumat Beragama, 1981-1982, hlm. 99.

Keterangan di atas agaknya sejalan dengan pandangan R. Schermerhorn<sup>60</sup> bahwa dalam paradigm subordinat dan superordinat, kecenderungan *sentrifugal* terjadi apabila kelompok minoritas (*subordinate*) memiliki keinginan memisahkan (*segregation*) dari kelompok mayoritas (*superordinate*). Dengan berbagai ikatan sosial di masyarakat, kelompok minoritas cenderung melestarikan identitas kelompoknya, sistem nilai, bahasa, agama, pola rekreasi, dan lain-lain. Jika suatu kelompok etnis minoritas memiliki kecenderungan *sentrifugal*, integrasi sulit terjadi. Sebaliknya, jika suatu kelompok etnis mayoritas memiliki kecenderungan *sentripetal*, meskipun subordinat cenderung *sentrifugal*, integrasi kelompok etnis mayoritas dan etnis minoritas lebih mungkin terjadi.

Problem krusial bertalian hubungan mayoritas (pribumi)-minoritas (Cina), sesungguhnya, bertalian dengan ketimpangan ekonomi. Keberadaan etnis minoritas sebagai superordinat dan etnis mayoritas sebagai subordinat dalam bidang ekonomi, dipandang sebagai kendala utama dalam proses integrasi sosial.

Simpson & Yinger mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok etnis minoritas adalah: a) kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks; b) kelompok minoritas memiliki ciri-ciri yang melemahkan anggapan terhadap diri sendiri (*self-esteem*); c) kelompok minoritas merupakan kelompok yang memiliki kesadaran tinggi yang tampak dari adanya sejumlah cirri khusus, baik ciri menguntungkan maupun merugikan, yang sama dimiliki tiap-tiap anggota; d) keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi berikutnya walaupun ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol tidak tampak lagi di generasi berikutnya itu; dan e) anggota kelompok etnis minoritas, baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan, memiliki kecenderungan kawin dengan orang dari kelompok sendiri.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> R. Schermerhorn, *Comparative Ethnic Relations: Framework for Theory and Research*. Random House. New York, 1970, hlm. 83.

<sup>61</sup> G.E. Simpson & J.M. Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Harper and Row Publication, New York, 1972, pages 12-13.

## 82 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Untuk kasus Indonesia, agaknya hal tersebut, ciri-ciri etnis minoritas, dalam hal ini etnis minoritas Cina-Tionghoa tidak sepenuhnya relevan dengan apa (ciri-ciri) yang diungkapkan Simpson & Yinger bahwa etnis minoritas biasanya ter subordinasi oleh mayoritas etnis pribumi. Untuk bidang ekonomi, etnis minoritas Cina-Tionghoa justru menjadi superordinat dan mayoritas pribumi sebagai subordinat yang sudah tercipta sejak zaman kolonial Belanda. Struktur sosial-ekonomi demikian harus diakui sering kali menimbulkan kecemburuan sosial dari mayoritas pribumi, dan cenderung menjadi salah satu 'pemicu' dalam konflik sosial dan agama.

### 3) Motif Ekonomi & Politik 'Netralitas' Agama

Dari *facilitating context* terutama dari perspektif sosiohistoris yang memposisikan penduduk Hindia Belanda berdasarkan strata (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi/*inlander*) dapat dikatakan sebagai kompleksitas yang terus berpotensi terjadinya konflik di Indonesia periode-periode selanjutnya. Keberadaan konteks pendukung ini biasanya tidak serta merta mengakibatkan terjadinya konflik, tetapi berfungsi sebagai tempat berseminya potensi konflik untuk menunggu saat yang tepat.

#### b. *Core of Conflict*

*Core of conflict* di sini adalah suatu tingkat *social deprivation* (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditoleransi lagi dalam perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*). Pembuatan batas akhir toleransi itu biasanya dilakukan karena intensitas deprivasi itu sendiri yang tidak dipertahankan lagi atau lamanya waktu deprivasi itu berlangsung—seperti penguasaan sebagian besar lahan dan hasil pertanian oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, atau penguasaan jabatan-jabatan publik tertentu disuatu daerah oleh suatu kelompok tertentu dalam waktu yang berkepanjangan. Apabila kelompok-kelompok yang mendominasi dan terdeprivasi itu berasal dari kelompok agama dan etnis yang berbeda maka konflik yang terjadi dapat bergerak menjadi bernuansa agama dan etnis.

Dalam kasus Poso misalnya, para elite yang memiliki kepentingan dalam memperebutkan kekuasaan cenderung menarik *ethno-religious* agar konflik dapat berlangsung lama. Kelompok-kelompok dominan dalam memperebutkan kekuasaan menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan. Para elite berupaya mengejar kekuasaan dengan menampilkan konflik antarumat beragama, di mana sebenarnya akar permasalahan berupa konflik politik. Para elite juga tampak cerdas membungkus pesan politik yang bermakna simbol-simbol keagamaan dalam mencapai tujuan kekuasaan. Tujuan ini pada umumnya bersifat politik yang meliputi antara lain tuntutan pemerintahan sendiri, otonomi, akses ke sumber daya dan kekuasaan, penghargaan atas identitas dan kebudayaan kelompok, dan hak-hak minoritas.<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan pendekatan *instrumentalis*, seperti dikatakan Jhon T. Ishiyama dan Marijke Breuning<sup>63</sup>, bahwa memahami etnisitas atau keagamaan sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mempersatukan, mengorganisasi, dan memobilisasi populasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

#### 1) Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Terlebih, hingga era reformasi di mana peranan etnis pribumi (mayoritas muslim) kurang berperan optimal dalam berbagai aspek kehidupan tadi, karena adalah suatu kewajaran dan proporsional bila mayoritas lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, kelompok mayoritas pribumi (sebagai mayoritas etnis dan agama) dapat dikatakan sebagai *social deprivation* terkhusus dalam bidang ekonomi yang begitu lama, sejak colonial Belanda hingga kemerdekaan. Ketika, bangsa migran-minoritas dalam penganut agama tertentu lebih berperan begitu signifikan dibanding bangsa pribumi (*indigenous*) yang mayoritas, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, maka ketidakseimbangan dan kegoncangan dalam relasi kehidupan masyarakat pluralistik lebih mudah terjadi yang secara gradual berproses menuju konflik sosial

<sup>62</sup> Muhammad Rendi, *Konflik SARA di Kabupaten Poso....'*, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>63</sup> Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21*, Kencana PM. Group, Jakarta, 2013, hlm. 233.

## 84 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

lebih besar. Idealnya, aspirasi dan hak-hak masyarakat dari etnis dan agama mayoritas dengan tanpa mengabaikan hak minoritas tentunya, patut diperhatikan. Berbagai konflik rasial-etnis dan (bernuansa) agama pada era reformasi dan pasca reformasi faktanya sangat kuat bertalian dengan kecemburuan atas ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat tajam, yang disinyalasi di mana etnis minoritas tertentu (Tionghoa) disinyalasi telah menguasai mayoritas aset ekonomi nasional.

Studi Achmad Habib (2004) tentang 'pasang surut hubungan Cina-Jawa' dalam 'konflik antaretnik di pedesaan', misalnya bertolak dari apa yang dikatakannya sebagai 'bias modernisme' yang cenderung melihat etnisitas sebagai gejala pra-modern dan kekuatan mundur (*declining forces*). Habib berpandangan bahwa persoalan etnisitas merupakan karakteristik masyarakat modern. Konflik antaretnik di pedesaan, antara etnis Cina dan Jawa, berasal dari masuknya 'modernisme' ke pedesaan yang dibawa oleh pengusaha Cina bersama modal dan teknologi, secara hipotetik, dampak positifnya berupa pengalihan teknologi pertanian, tersedianya lapangan pekerjaan serta penuluran sikap kewirausahaan. Dampak negatifnya berupa kesenjangan sosial yang memicu kecemburuan sosial bernuansa etnis dan agama.<sup>64</sup>

### 2) Perbedaan Doktrin & Sikap Mental

Konflik sebagai kategori sosiologi bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan. Yang terakhir ini merupakan hasil dari proses asosiatif, sedangkan yang pertama dari proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mempersatukan; dan proses disosiatif sifatnya menceraikan atau memecah. Fokus kita tertuju kepada masalah konflik atau bentrokan yang berkisar pada agama. Dalam konteks ini konflik sebagai fakta social melibatkan minimal dua pihak (golongan) yang berbeda agama bukannya sebagai konstruksi kayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi padazaman sekarang juga. Misalnya; bentrokan antara umat Kristen Gereja Purba, benturan umat Kristen dengan

<sup>64</sup> Achmad Habib dalam: (Thung Ju Lan, Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Jurnal Antropologi Indonesia* 1, 2010, hlm. 36).



penganut agama Romawi (agama kekaisaran) dalam abad pertama sampai dengan ketiga. Dalam penyorotan sekarang ini kita hanya ingin mengkhususkan pada satu sumber bentrokan saja, yaitu perbedaan iman.<sup>65</sup>

### 3) Perbedaan Suku/Etnis & Ras Pemeluk Agama

Bahwa perbedaan suku dan ras berkat adanya agama bukan menjadi penghalang untuk menciptakan hidup persaudaraan yang rukun hal itu sudah terbukti oleh kenyataan yang menggembirakan dan hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Yang menjadi masalah di sini ialah, apakah perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar umat manusia. Khususnya apakah dalam satu Negara yang terdiri dari 5 berbagai suku bangsa dan yang menerima adanya agama yang berbeda-beda bukannya membina dan memperkuat unsur penyebab yang lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan bangsa dan Negara itu. Bahwa faktor ras itu sendiri terlepas dari agama sudah membuktikan bertambahnya permusuhan dan pencarian jalan keluarnya, dan emuannya itu menjadi bahan menarik dalam diskusi ilmiah maupun dalam kalangan kaum politisi, adalah merupakan masalah yang tetap aktual yang tidak dijadikan sasaran dari pembicaraan kita sekarang ini.

### 4) Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Fenomena agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan bahwa tingkat kemajuan budaya berbagai bangsa di dunia ini tidak sama. Demi mudahnya pendekatan kita bedakan saja dua tingkat kebudayaan, yaitu kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah, meskipun pembagian dikotomis dan simplistik ini menanggelmkan nuansa kekayaan kultural yang memang ada di antara ujung yang tinggi dan rendah. Tolak ukur untuk menilai dan membedakan kebudayaan dalam dua kategori itu berupa asumsi yang sudah umum, *pertama* akumulasi ilmu pengetahuan positif dan teknologis di satu pihak dan hasil pembangunan fisik di lain pihak dan

---

<sup>65</sup> <http://nimassyafitri.wordpress.com>, diakses: 5 Agustus 2017.

## 86 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

kedua yaitu bahwa agama itu merupakan motor penting dalam usaha manusia menciptakan tangga-tangga kemajuan.

### 5) Mayoritas-Minoritas Agama

Fenomena konflik sosial mempunyai beberapa penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang mengamuk adalah beragama Islam sebagai kelompok mayoritas, sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah orang Kristen yang minoritas di Indonesia. Sehingga nampak kelompok Islam yang mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas yakni orang Kristen. Karena itu, di beberapa tempat orang Kristen sebagai kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti: adanya tindakan pengrusakan dan pembakaran tempat ibadat.

Maraknya aksi-aksi kekerasan dan teror mengatasnamakan jihad pascatumbangnya rezim Orde baru pada 1998 menandai ekspansi dan meningkatnya pengaruh radikalisme Islam dalam lanskap politik Indonesia kontemporer. Dalam konteks ini, dimensi ekonomi politik yang mewarnai pergeseran lanskap geopolitik global dan ketegangan hubungan agama-negara yang terjadi dalam ranah politik domestik selalu menjadi bagian penting yang berperan mendorong pertumbuhan radikalisme.<sup>66</sup>

Posisi dan keadaan minoritas Cina sebagai '*superordinate*'—dalam bidang ekonomi—merupakan faktor penting dalam konteks relasi etnis mayoritas pribumi dan nonpribumi. Keadaan struktur sosial-ekonomi yang timpang yang berawal dari era kolonial Belanda hingga era kemerdekaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, adalah faktor positif dalam menentukan potensi konflik etnis dan agama dalam perjalanan bangsa ini, di mana sebagian besar konflik sosial dilatarbelakangi faktor ekonomi. Beragam kebijakan pemerintah di era kemerdekaan pun agaknya belum mampu menjadi suatu solusi

---

<sup>66</sup> <http://nimassyafitri.wordpress.com>, diakses: 5 Agustus 2017.

substantif terhadap beragam potensi konflik etnis mayoritas pribumi (*indigenous*) dan minoritas nonpribumi. Hal ini berbeda dengan Malaysia, melalui kebijakan Mahathir Muhammad, pada 1970-an yang dikenal dengan *Affirmative Action Programs*, dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dipandang banyak kalangan cukup berdampak positif terhadap perbaikan hubungan minoritas bumi putera Melayu dengan etnis migran lainnya.

Lieberson dalam M. Kurokawa<sup>67</sup> mengungkapkan bahwa dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas, penting dan perlunya mengetahui dimensi struktur: politik, ekonomi, dan sosiokultural—tetapi hal itu belumlah memadai. Karena dalam realitasnya, kontak antaretnis berbeda, masing-masing mereka berupaya mempertahankan dan meningkatkan suatu tatanan sosial tertentu sejak terjadinya kontak demi membela suatu kepentingan tertentu pula. Permasalahan utamanya bertalian dengan institusi politik, sosial dan ekonomi, yang menggambarkan suatu hubungan masyarakat atau ‘penduduk asli’ disubordinasi kelompok minoritas ‘migran’, di mana situasi hubungan yang menggambarkan kelompok disubordinasi minoritas ‘migran’ terhadap kelompok mayoritas ‘penduduk asli’ (*indigenous*). Situasi hubungan yang menggambarkan kelompok mayoritas dibawah dominasi kelompok minoritas ‘migran’, apabila institusi-institusi ekonomi, politik, dan sosiokultural kelompok ‘penduduk asli’, yakni sebelum kedatangan kelompok minoritas ‘migran’ dirusak dan dikurangi kekuasaannya atau ditundukkan. Bersamaan dengan itu, kelompok ‘mayoritas’ berupaya mempertahankan institusi-institusi tradisional, sehingga konsekuensi-konsekuensinya berupa konflik dengan kelompok minoritas dibawah dominasi kelompok mayoritas, di mana sangat memungkinkan terjadinya integrasi (asimilasi). Dalam situasi ini, bahwasanya kelompok minoritas di bawah tekanan untuk berasimilasi, sehingga keputusan untuk berasimilasi dilakukan secara ‘sukarela’.

Jelas sekali disini bahwa betapa kompleksnya persoalan hubungan kedua kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Terdapat kelompok

<sup>67</sup> M. Kurokawa (Editor), *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*, Random House, New York, 1972, page 44.

## 88 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

minoritas (etnis dan agama) yang ter subordinasi dalam banyak hal; disisi lain, terdapat kelompok mayoritas (etnis dan agama) justru memperlihatkan ter subordinasi dalam struktur sosial tertentu, terutama ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman etnisitas memerlukan pemahaman komprehensif yang meliputi semua elemen struktur sosial tergantung di mana wilayah kelompok etnis mayoritas dan minoritas berada. Untuk memahami dinamika hubungan etnis mayoritas dan minoritas di negara-negara Asia dan Asia Tenggara juga memerlukan memahami dimensi-dimensi struktural, seperti idealnya perlunya, antara lain: menganalisis asal-usul etnis, sosio-historis, pengalaman kolonial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan pendidikan yang pada masyarakat/negara pluralistik tersebut.

### c. Fuse Factor

*Fuse factor* biasanya juga sudah ada disana, tetapi tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tersulut atau disulut. Sumbu konflik bisa berupa dan suku, ras, keagamaan, dan lainnya. Tentunya terdapat banyak yang menjadi 'sumbu' terjadinya potensi konflik etnis dan agama ini. Seperti diketahui bahwa dengan berakhirnya era Orde Baru pada 1998 ditandai mulainya era Reformasi merupakan tonggak penting bagi kehidupan kebebasan beragama, dari hal positif hingga hal negatif yang bisa mengancam nilai reformasi. Bagi kalangan Muslim, era transisi itu merupakan momentum bagi 'kebangkitan' Islam di Indonesia. Pada masa ini, identitas keislaman yang tak tunggal muncul kepermukaan—suatu yang dipandang agak sulit berkembang pada masa Orde Baru. Banyak organisasi massa Islam, simbol, dan lebel-label Islam, termasuk media-media Islam baru, bermunculan. Setidaknya terdapat tiga corak organisasi keagamaan berkembang di era Reformasi: kelompok eksklusif, moderat, dan progresif.<sup>68</sup>

Dalam deretan kelompok eksklusif, bahkan cenderung berhaluan 'keras', antara lain: Laskar Jihad (sudah dibubarkan), Front Pembela Islam (FPI), Front Hizbullah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),

---

<sup>68</sup> Siti Musdah Mulia, 'Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi' ..., *op. cit.*, hlm. 349.

Hizbuttahrir Indonesia, Laskar Jundullah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Forum Pemuda Islam Surakarta. Ketika itu, dalam aksinya, sebagian mereka terkadang tidak segan melakukan aksi-aksi kekerasan. Di level ideologi, ciri khas sebagian kelompok ini adalah perjuangan mereka menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Usaha mereka terbilang gigih dan mendasar hingga kalangan akar rumput. Mereka juga cukup mendapat respon di lingkungan kampus-kampus umum. Mereka memanfaatkan momentum otonomi daerah dalam mendesak agenda islamisasi mereka. Sementara itu, peran moderasi tetap disetujui oleh ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok keagamaan yang lebih bercorak sufistik seperti kelompok Majelis Az-Dzikra pimpinan Muhammad Arifin Ilham dan kelompok-kelompok zikir yang sekarang berkembang juga dapat dimasukkan dalam kelompok berhaluan moderat. Di luar keduanya, tumbuh kelompok-kelompok yang tidak hanya terbuka tapi juga kritis terhadap isu keagamaan dan sosial. Antara lain, *The Wahid Institute* Jakarta, Lakpesdam NU, *Institute for Interfaith Dialog* (Interfidei) di Yogyakarta, ICIP, *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), dan *Maarif Institute*.<sup>69</sup>

Potensi konflik kalangan etnis mayoritas-minoritas pun lebih terbuka dengan munculnya beragam ormas agama (Islam) yang memiliki pandangan berbeda terhadap kelompok etnis dan agama lain. Hal ini merupakan hal baru dan sekaligus 'tantangan' baru dalam pengelolaan pluralitas era selanjutnya dalam memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa sebagai masyarakat pluralistik, masa depan Indonesia akan menjadi sensitif atas kemungkinan beragam konflik. Dikatakan Suparlan, potensi integrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk "sumber-sumber sosial" (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan memanipulasi etnisitas sebagai cara

<sup>69</sup> Siti Musdah Mulia, 'Potret Kebebasan Beragama'..., *ibid.*, hlm. 349.

## 90 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.<sup>70</sup>

Timo Kivimaki<sup>71</sup> bahwa hampir semua daerah yang bergejolak separatism Aceh, Papua, Riau, Maluku) memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi-provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme. Tetapi, tiap daerah tampak memiliki motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatism. Di Papua, tokoh perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob Prai, mengatakan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan, seperti Belanda tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan kekuasaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan. Banyak tokoh politik asli 'Republik Maluku Selatan (RMS)' memperjuangkan kemerdekaan karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan dan ancaman militer.

### d. *Triggering factors*

*Triggering factors* (faktor pemicu) merupakan peristiwa atau momentum di mana semua elemen diatas diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial. Momentum bisa terjadi hanya berbentuk

---

<sup>70</sup> Parsudi Suparlan, 'Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia'.... op. cit., hlm. 79.

<sup>71</sup> Timo Kivimaki, *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: Dewi Portuna Anwar, Helene Bouvie, Glend Smith, Roger Tol, Yayasan Obor Indonesia-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-Jakarta, Jakarta, 2005, hlm. 107-108; dan lihat pula: Abdullah Idi, "Dinamika Sosiologis Indonesia....", *loc. cit.*, hlm. 2.

pertengkaran mulut atau perkelahian kecil antara dua individu tentang suatu hal yang remeh atau jauh dari akar konflik, tetapi berfungsi menjadi pembeda bagi dimulainya suatu konflik yang berskala lebih besar.

Lebih jauh sebetulnya, misalnya tragedi era Reformasi pada tahun 1998 dan sejumlah kasus konflik rasial/kerusuhan selanjutnya, sesungguhnya secara akumulatif telah menemui momentumnya, di mana dari hal yang sepele menjadi besar dan mejadi konflik sosial-etnis dan agama. Faktor *trigger* tampak beragam tetapi sesungguhnya diyakini sekali bertalian erat dengan keadaan struktur sosial-ekonomi, dalam konteks mayoritas-minoritas yang tidak berimbang. Mengutip Lieberman dalam Furokawa, bahwakondisi sosial-ekonomi yang tidak berimbang inilah sesungguhnya menjadi penyebab utama sebagai penyulut konflik yang bernuansa etnis dan agama, seperti terjadi pada tahun 1998. Bila tidak menjadi perhatian memadai dalam kebijakan pembangunan, ketimpangan ekonomi etnis minoritas (migran) dan mayoritas (pribumi) sepertinya akan terus berdampak negatif terhadap terjaganya dan kesinambungan atas potensi konflik etnis dan agama pada masa datang.

Apalagi jika etnis mayoritas pribumi terus merasa dirugikan dalam banyak hal, potensi konflik sosial akan mudah terjadi secara tiba-tiba, *unpredictable*, dan sering kali memerlukan waktu lama memperbaikinya kembali. Beragam konflik sosial bernuansa etnis dan agama yang pernah terjadi di negeri ini, antara etnis pribumi-lokal dengan sesama etnis pribumi lain atau etnis pribumi lokal dengan etnis migran tertentu. Pada umumnya lebih disebabkan adanya ketimpangan (*gap*) ekonomi. Sebagai konsekuensi logis dari berbagai kejadian/konflik antaretnis tersebut telah menyebabkan trauma dan *image* yang buruk antara etnis pribumi dan etnis minoritas Cina yang tidak mudah hilang begitu saja, karena itu, diperlukan upaya kebijakan pembangunan yang sungguh berpihak kepada semua elemen warga negara tanpa terkecuali, agar kejadian serupa tidak terus berulang kembali. Lebih dari itu, adanya kebijakan yang komprehensif dan substantif tanpa parsial-politis semata, diharapkan 'luka lama' dengan berangsur dapat disembuhkan kembali dan sekaligus dapat memperkuat kembali proses integrasi sosial.

## 92 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Konflik sosial-etnis dan agama yang terjadi selama ini, terjadi tidak hanya pada mereka berbeda etnis dan agama tetapi juga mereka sesama etnis dan agama yang dapat dipicu beragam motif/alasan, terutama kondisi mikro dalam masyarakat-pluralistik: ekonomi, politik, budaya, dan daerah—alasan ekonomi lebih krusial dan signifikan tentunya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa ke depan termasuk 'agenda' nasional yang dapat menyita banyak energi dan biaya (*cost*). Masalah itu semakin mengkristal ketika dikaitkan dengan fenomena terjadinya konflik sosial bernuansa agama di berbagai kota dan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kendatipun demikian patut diungkapkan lebih jauh bahwa faktor struktural berdampak atau berkontribusi positif terhadap terjadinya konflik etnis dan agama di Indonesia pada tahun-tahun terakhir.

Akan tetapi, keberadaan agama selama ini memiliki betulnya fungsi integrasi dan pemersatu tidak diragukan lagi. Harsja W. Bachtiar<sup>72</sup> menyatakan bahwa agama-agama besar, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, di Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber-sumber daya pemersatu atau perekat bangsa yang ampuh. Tiap agama itu menarik penganut agama dari berbagai masyarakat daerah, dari berbagai nasion lama (etnis-etnis atau suku-suku pribumi). Dikatakan Bachtiar selanjutnya, agama-agama yang besar mempersatukan anggota-anggota dari nasion-nasion lama (suku-suku pribumi) yang berbeda, sehingga merupakan basis yang kuat untuk menanam dan memupuk perasaan solidaritas yang tidak terbatas pada nasion lama masing-masing saja, tetapi meliputi semua penduduk wilayah negara Republik Indonesia yang secara bersama-sama mewujudkan nasion Indonesia.

### a) Sosio-historis (Ajaran) Agama

Dari perspektif sosio-historis, 'akar' dan potensi konflik etnis dan agama memang telah terjadi sejak lama. Azyumardi Azra mengatakan, seperti halnya dengan agama lain, Islam jelas mengandung klaim-klaim

---

<sup>72</sup> Harsja W. Bachtiar, 'Masalah Integrasi Nasional di Indonesia', *Prisma*, No. 8, Agustus 1976, hlm. 11-12.



eksklusif. Bahkan mengingat kenyataan bahwa Islam agama wahyu, eksklusivisme Islam itu, dalam segi-segi tertentu bisa sangat ketat. Misalnya, dalam dua kalimah syahadat yang merupakan kesaksian dan pengakuan terhadap kemahamutlakan Allah SWT dan sekaligus keabsahan kerasulan Muhammad. Pengakuan tentang kemahamutlakan Allah, yang disebut sebagai doktrin *tauhid*, merupakan salah satu konsep sentral Islam; sama halnya pula dengan kesaksian mengenai Muhammad sebagai rasul terakhir yang diutus Allah ke muka bumi. Tetapi, disamping klaim-klaim eksklusif, Islam juga memberikan penekanan khusus pada inklusivisme keagamaan, sebagaimana dapat disimak dari sejumlah ajaran alquran dan Hadist. Menurut Azyumardi Azra, setidaknya inklusivisme Islam dapat dilihat pada dua tingkatan: tingkatan doktrin, konsep, dan gagasan; dan pada tingkatan historis, tegasnya pengalaman masyarakat-masyarakat muslim dalam mengimplementasikan inklusivisme Islam. Pada tingkatan kedua ini, bertalian dengan pengalaman historis kaum muslimin Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk di negara ini, dan dilengkapi dengan persyaratan umum yang diperlukan dalam mengembangkan inklusivisme Islam di Indonesia pada masa kontemporer.<sup>73</sup>

Dikatakan Azra pula, lebih dari seribu tahun lalu kalangan Muslim dan Kristiani telah mencoba mengembangkan ide-ide kerukunan hidup antarumat beragama berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Sejak masa pertengahan, dialog-dialog antaragama yang pertama dalam sejarah telah mulai dilakukan di istana-istana para penguasa muslim di Baghdad dan Andalusia. Tapi saling pengertian dan kerukunan timbal-balik tidak berkembang seperti diharapkan karena adanya prasangka dari tiap-tiap pihak dan situasi politik yang tidak menguntungkan.<sup>74</sup>

Dikatakan Azyumardi<sup>75</sup>selanjutnya bahwa dalam dialog itu, para teolog muslim (*mutakallimun*) mempelajari Perjanjian Lama dan

<sup>73</sup> Azyumardi Azra, 'Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Muslim Indonesia', *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Diterbitkan atas kerjasama ICRP dan Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 12-13.

<sup>74</sup> Azyumardi Azra, 'Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk...', *ibid.*, hlm. 14.

<sup>75</sup> Azyumardi Azra, 'Toleransi Agama dalam Masyarakat ...', *ibid.*, hlm. 14.

## 94 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Perjanjian Baru untuk menyanggah ketuhanan Yesus dan, karena al-Qur'an menolak bahwa Yesus disalib, mereka menganggap penganut Kristiani telah menyelewengkan kitab suci. Sebaliknya, para teolog Kristen mempelajari Islam untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama *bidat* dan anti-Kristus. Hanya sebagian kecil di antara para teolog dari kedua belah pihak yang mampu mencapai pengertian lebih baik tentang agama kedua agama Ibrahim ini. Teologi dalam pembicaraan ini tidak terbatas pada *discourse* tentang Tuhan sebagai salah satu aspek yang paling sentral dari agama manapun. Secara tradisional, dalam Islam *discourse* tentang teologi menyangkut tentang tiga hal besar: sifat iman dan status muslim yang melakukan 'dosa besar'; determinisme dan kebebasan manusia; dan sifat-sifat Tuhan. Dalam dunia pemikiran dan intelektualisme muslim, *discourse* mengenai teologi tidak lagi terbatas pada ketiga hal itu, tetapi sudah masuk ke wilayah lain, sehingga memunculkan beragam jenis 'teologi', seperti teologi tanah (Hasan Hanafi), teologi lingkungan hidup (Seyyed Hossein Nasr), teologi pembebasan, dan sebagainya. Mempertimbangkan perkembangan ini, kata Azra, *discourse* tentang 'teologi kerukunan umat beragama' merupakan hal yang cukup absah pula.

### b) Kualitas Pelayanan Publik (*Public Services*)

Ternyata setelah hampir lima belas tahun (sejak 1998-2017) era reformasi berlalu, perilaku korupsi di negeri ini cenderung memburuk. Berdasarkan hasil survei 2010 memperlihatkan bahwa Indonesia pernah menempati peringkat pertama terkorup dari sepuluh negara ASEAN yang disurvei. Buruknya peringkat korupsi ini berkorelasi pula terhadap peringkat nomor dua negara terburuk kinerja birokrasinya dari sepuluh negara ASEAN.<sup>76</sup>

Berbagai kalangan berkeyakinan bahwa terjadinya multi-krisis sejak 1997 telah menyebabkan berbagai permasalahan dan konflik sosial. Ketimpangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, semuanya

---

\* Abdullah Idi, 'Selamatkan Generasi Muda dari Perilaku Korupsi', *Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Politik, Kebijakan, Sosial, dan Budaya*, Editor: Darol Arkum & Shulby Yozar Ariadhy, Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12, Bangka-Belitung, 2015, hlm. 95.

diyakini telah mengganggu ketenteraman dan kedamaian kehidupan berbangsa yang telah diupayakan pembinaan sebelumnya melalui pembangunan. Krisis ekonomi dan krisis-krisis lainnya—baik krisis sosial, politik, ekonomi, dan budaya—pada prinsipnya bersumber dari 'krisis moral-etika' berbangsa. *Transparency International (TI)* merilis Indeks Persepsi Korupsi (awal) 2016, berdasarkan pandangan para ahli dari seluruh dunia untuk mengukur tingkat persepsi di sektor publik suatu negara<sup>77</sup>.

Tampak bahwa tingkat pelayanan terhadap masyarakat (*public services*) dalam beragam bidangnya yang tampak belum optimal merupakan salah satu dimensi penting lainnya sebagai faktor pemicu (*triggering factors*). Dalam bidang politik, Djameludin Ancok<sup>78</sup>, mengatakan sudah menjadi rahasia umum adanya kerjasama politisi dengan pengusaha untuk memenangkan pertarungan menjadi pemimpin (gubernur, bupati dan walikota). Hal seperti ini pun pada tingkat tertentu terjadi di negara maju, seperti Jerman dan Italia di mana para pengusaha memberikan uang untuk partai politik. Cuma bedanya, kalau di negara maju bila gubernur, bupati, dan walikota membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat luas, mereka akan berhadapan dengan hukum dan penjara. Untuk mencegah kondisi demikian memang perlu ditumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama kaum muda, untuk menjadi anggota *corruption watch* dan *government watch* untuk mengawasi pembangunan. Dikatakan Ancok, bagi para pejabat yang mencoba untuk melakukan tindakan korupsi hendaknya segera

<sup>77</sup> Dikawasan ASEAN, Singapura (dengan skor 85/peringkat ke-8 di dunia yang paling sedikit korupsinya). Sementara Jepang ( skor 75) merupakan negara paling tidak korupsi, sementara Cina jauh dibawahnya dengan skor 37. Malaysia menempati peringkat ke 5 dengan skor 50. Thailand dengan skor 38, Indonesia dengan skor 36 (meningkat sedikit dari 34 tahun lalu/ peringkat ke-88), Filipina dengan skor 35, Vietnam dengan skor 31, Laos dengan skor 25, Kamboja dan Myanmar termasuk di antara 20 negara paling korup di dunia dan hanya memperoleh skor 21. Lihat: (Abdullah Idi, 'Jabatan Publik, Virus, Suap, dan Agama', *Sriwijaya Post*, 26 September 2016).

<sup>78</sup> Djameludin Ancok (Epilog), 'Membaca Kembali Arah Pembangunan', *Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Politik, Kebijakan Sosial, dan Budaya*, Editor: Darol Arkum & Shulby Yozar Ariadhy, Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12, Bangka-Belitung, 2015, hlm. 120.

## 96 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

menyadari bahwa kehadiran teknologi informasi (*internet, facebook, twitter, youtube*) akan menjadi sarana penyebarluasan perilaku korupsi dan perilaku penyimpangan lainnya kepada masyarakat luas.

Dalam konteks demokrasi dalam menuju kesejahteraan rakyat peranan para pemimpin (*elites*) menjadi pertimbangan terdepan. Seperti ungkapkan Martin Hedegger (1889-1976) dalam Daniel Dhakide (2017)<sup>79</sup> dengan serta-merta merendahkan demografi, demokrasi, dan statistik dalam hubungannya dengan perwakilan. Menurut Martin, upaya menghitung manusia sebagai unsur demografis dalam demokrasi tidak lain dari cara melihat di mana manusia seolah menjadi karung-karung sampah. Konsep dari massa pemilih tidak lain adalah konsep perusak yang membuat manusia menjadi rusak dan kehilangan autentitas sebagai manusia. Dengan memungkinkan orang lain 'mewakili diriku, semakin aku memperdalam kerusakanku'. Yang dicari adalah pemimpin, *der Fuhere*, yang bisa menjadi perubahan kehendak sesungguhnya dan kehendak umum. Itu berarti perwakilan secara hakiki tidak dimungkinkan.

Untuk itu, diperlukan jalan untuk menyelamatkan demokrasi dari tuduhan yang demikian fundamental tersebut. *Pertama*, membangun legitimasi sistem perwakilan dengan ciri utama keautentikannya. Empati, pada gilirannya, belum cukup karena harus diimbangi oleh kemampuan profesional untuk menggali dan mengenal tuntutan rakyat. *Kedua*, perwakilan dan kekuasaan, yang diperoleh sebagai akibatnya, adalah semata-mata alat. Dengan demikian, konsep teologis melekat dalam demografi. Kemana demokrasi itu bergerak tidak lain dari menuju kemaslahatan rakyat. Tanpa kedua hal itu, demokrasi tidak lebih dari pepesan kosong. Demokrasi dalam politik seharusnya mampu membawa kemakmuran. Pandangan selintas ke wilayah Asia Tenggara, agaknya, di mana negara-negara paling tidak demokratis paling makmur adanya; sedangkan yang paling demokratis tidak atau belum berhasil membangun sistem sosial untuk mengejar kemaslahatan rakyat, dan keadilan pun tidak kelihatan di dalamnya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Daniel Dhakide, 'Demokrasi, Demografi, & Kemaslahatan', *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial-Ekonomi*, Volume 36, 2017, LP3ES, Jakarta, hlm. 2.

<sup>80</sup> Daniel Dhakide, 'Demokrasi, Demografi, & Kemaslahatan....', *ibid.*, hlm. 2.

## c) Kebijakan Politik-Ekonomi &amp; Keadilan

Posisi hubungan mayoritas-minoritas, di mana etnis mayoritas-pribumi yang cenderung pada posisi ter subordinasi (*subordinate*) dalam berbagai bidang—terutama dalam bidang ekonomi—akan mempersulit persoalan etnisitas yang substansial. Keadaan itu akan berubah menjadi lebih baik ke depan, bila ada kebijakan yang berpihak kepada semua elemen masyarakat pluralistik, etnis mayoritas dan minoritas, dalam makna sesungguhnya. Selain itu, suatu kehidupan yang keadilan, sejahtera, dan damai pada masyarakat pluralistik dapat tercipta bila adanya suatu kebijakan pemerintah yang memberi pencerahan terhadap semua kebutuhan sosial (*social needs*) pada masyarakat pluralistik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Zaiyardam Zubir dan Nurul Aizah Zaysda<sup>81</sup> menunjukkan bahwa dalam penataan kota, kalangan 'tak berpunya' (*the poor*) harus tergusur atau penggusuran. Suatu yang menyakitkan mereka lagi bahwa 'kalangan berpunya' juga sering kali difasilitasi pemodal. Kebijakan penggusuran pemukiman di kota-kota besar yang dianggap kumuh, seperti terjadi baru-baru ini di DKI dan kota-kota besar lainnya, yang jauh dari bijak dan manusiawi (dari perspektif masyarakat) akan mempermudah menjadi penyulut terjadi kerusuhan dan konflik sosial etnis dan agama pun dikaitkan pula. Konflik yang terjadi di Minangkabau beragam bentuknya, sejad dari konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarkampung, hingga perkelahian antarkeompok etnis. Konflik yang paling tinggi intensitasnya adalah konflik tanah, yang bertalian dengan pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan pembagian harta pusaka. Inti dari akar persoalan konflik tanah dan konflik-konflik lain adalah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat.

---

<sup>81</sup> Zaiyardam Zubir dan Nurul Aizah Zaysda, "Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat, Dana dari DP2M DIKTI Depdiknas melalui Program Hibah Strategis Nasional, 2009, dipublikasi dalam *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia-LIPI*, Edisi XXXV No.1, 2010, 2009, hlm. 49-70.

## 98 Konflik Etno-Religius di Asla Tenggara

Peta konflik di daerah pedalaman sebagai daerah inti Minangkabau dan daerah rantau memiliki perbedaan. Di pedalaman Minangkabau, kelompok yang terlibat konflik tanah lebih banyak melibatkan orang-orang satu kaum/suku atau antara mamak dengan keponakan. Sementara itu, konflik yang terjadi di rantau lebih banyak melibatkan pebisnis yang didukung oleh penguasa, aparat keamanan, dan preman melawan rakyat. Dengan luasnya tanah di wilayah rantau dan jarang penduduk, tanah-tanah ini dapat digunakan untuk perusahaan perkebunan besar. Tetapi, dalam setiap pembebasan tanah, masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan, dan sekaligus hal itu sebagai 'benih-benih konflik yang muncul dalam bentuk kekerasan di kemudian hari. Persoalan resolusi konflik berdasarkan kearifan lokal Minangkabau sebenarnya sudah dikembangkan di beberapa kampung. Pembentukan Majelis Peradilan Adat (MPA) menjadi alternatif dari penyelesaian konflik yang berbasis perdamaian adat. Upaya menghindari pengadilan negara yang selalu saja 'menang jadi bara, kalah jadi abu' menempatkan pengadilan adat untuk penyelesaian konflik tanah.<sup>82</sup>

Sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi, memperlihatkan bahwa belum tampak adanya suatu kebijakan pemerintah yang dianggap menjadi solusi substantif dalam mengatasi persoalan etnisitas. Otonomi daerah yang digulirkan pada sejak tahun 1999 dengan sejumlah 'agenda reformasi' ternyata juga belum memiliki perhatian 'serius' terhadap persoalan-persoalan etnisitas dengan memberi alternatif solusi dan antisipasi jangka panjang—yang tampak justru konspirasi berlebihan antara penguasa dan pengusaha (pemodal) dan sering kali kebijakan menempatkan masyarakat kebanyakan sebagai 'penonton'.

Keterangan di atas sejalan dengan pendapat Sunyoto Usman<sup>83</sup> bahwa integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika

---

<sup>82</sup> Zaiyardam Zubir dan Nurul Aizah Zaysda, 'Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat, Dana dari DP2M DIKTI Depdiknas melalui Program Hibah Strategis Nasional...', *ibid.*, hlm. 49-70.

<sup>83</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 78-80.

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan dalam menciptakan relasi sosial, ekonomi dan politik. Proses terjadinya integrasi sosial itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi. *Pertama*, masyarakat dapat terintegrasi berdasarkan kesepakatan kebanyakan anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat mendasar. *Kedua*, masyarakat dapat terintegrasi dikarenakan kebanyakan anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial sekaligus (*cross-cutting affiliations*). *Ketiga*, masyarakat terintegrasi karena adanya saling ketergantungan unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam mencapai kehidupan ekonomi.

Sisi lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam konteks kesejahteraan ekonomi ini, seperti diungkapkan Christian von Soest,<sup>84</sup> bahwa bila demokrasi dijabarkan sebagai penggunaan peluang untuk menentukan pemimpin atau wakil rakyat semata, maka demokrasi terjebak dalam relasi kuasa atas nama kesejahteraan yang pada tataran praktik termanifestasi dalam beragam corak, termasuk di antaranya patronase berkedok populisme, ikatan etnis (etnisitas), diskriminasi, aristokrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, praktik kekuasaan dalam pengelolaan kesejahteraan perlu dipahami lebih dari sekadar penentuan pemimpin politik, melainkan juga konteks kekuasaan yang melatarbelakangi dan mengarakterisasi interaksi proses kekuasaan. Pemetaan terhadap konteks kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya menjadi relevan untuk menganalisis proses penciptaan kesejahteraan di negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki pengalaman sejarah, institusi, dan budaya berbeda dengan negara Eropa dan Amerika. Proses industrialisasi yang berlangsung di Eropa dan Amerika melahirkan mekanisme pengelolaan sumber daya berbasis hirarki, pertukaran, dan solidaritas sosial. Beda halnya dengan negara-negara Asia dan Afrika, terdapat mekanisme lain yang justru mendominasi praktik pengelolaan sumber daya, yakni mekanisme *patronase*<sup>85</sup> dan populisme.

<sup>84</sup> Christian von Soest dalam Caroline Paskarina, 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal', *Prisma*, Vol. 36, No. 1, 2017, LP3ES, Jakarta, hlm. 61.

<sup>85</sup> *Patronase* lazim disebut *patrimonial* atau *neopatrimonial* merujuk pada sistem governance atau pengelolaan urusan publik, tempat aparat formal-legal negara/pemerintah berada

Diungkapkan Caroline Paskarina<sup>66</sup> bahwa mekanisme kerja patronase menimbulkan fenomena *hybrid*, tempat kekuasaan sebenarnya dalam pengambilan keputusan public tentang distribusi sumber daya berada di luar institusi-institusi formal kenegaraan. Proses pengambilan keputusan tersebut berada ditangan politikus bersama para kroninya yang terhubung melalui jrejang relasi informal dan personal. Implikasi dari corak kekuasaan patronase terhadap pengelolaan sumber daya adalah peyimpangan peran pemerintah yang hanya mengumpulkan dan mendistribusikan sumber-sumber daya pada para pendukung atau kliennya, sehingga ada sekelompok kecil orang yang memperoleh kesejahteraan lebih baik ketimbang sebagian besar anggota masyarakat lainnya.

Mekanisme patronase juga bekerja berdasarkan relasi imbal-balik di antara patron, klien, dan publik di luar patron-klien. Patron memelihara dukungan kliennya dengan memberikan insentif berupa sejumlah kemudahan dan keluasan akses dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dengan mendudukkan klien pada jabatan-jabatan penting dalam struktur formal kenegaraan. Patron membebaskan semua pembiayaan atas pemberian insentif itu kepada publik, misalnya melalui mekanisme pajak. Pajak tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrument redistribusi pendapatan karena digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk memelihara loyaltas klien. Kalaupun ada program-program pelayanan publik yang diselenggarakan dengan menggunakan dana pajak, umumnya tidak disertai dengan kualitas dan aksesibilitas merata. Mekanisme patronase akan bertahan selama patron mampu memberikan insentif yang diperlukan untuk memelihara loyalitas klien. Dalam banyak kasus, loyalitas klien dipelihara dengan menggunakan instrument etnis/tribalisme atau identitas sosial budaya lainnya sehingga daya ikatnya lebih erat.<sup>67</sup>

---

berdampingan dengan dan didukung oleh sistem *governance* yang bersifat informal. Patronase didefinisikan sebagai pengaturan sosial dan politik, tempat patron memelihara kesetiaan dan dukungan klien dengan memberikan dukungan klien dengan memberikan manfaat yang berasal dari sumber-sumber daya yang dimilikinya atau dimiliki negara. Lihat: (Caroline Paskarina, 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal...', *ibid.*, hlm. 61).

<sup>66</sup> Caroline Paskarina, 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal...', *ibid.*, hlm. 61.

<sup>67</sup> Mekanisme patronase memiliki kemiripan dengan mekanisme solidaritas karena basis nilai-nilai sosial dan kedekatan personal yang melatarbelakangi relasi sosialnya, tetapi kedua



Dikatakan Caroline Paskalina<sup>88</sup> selanjutnya bahwa mekanisme patronase menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks politik kesejahteraan, karena ada konteks relasi kekuasaan yang menjadi perhatian dalam menjelaskan pengelolaan sumber daya. Dalam mekanisme patronase, produksi dan distribusi kekuasaan ditentukan juga oleh kedekatan personal dan emosional. Legitimasi kekuasaan patron ditentukan oleh kemampuannya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya untuk memberikan kesejahteraan kepada klien-nya, sehingga dapat memelihara ketergantungan dan kepatuhan klien pada patron. Oleh sebab itu, akuntabilitas patron pun terbatas hanya pada klien, bersifat personal dan informal, sehingga konsep akuntabilitas publik seperti dikenal dalam konsep demokrasi prosedural menjadi tidak relevan. Patronase dapat menghambat konsep ekonomi-politik yang memberi ruang partisipasi politik yang bermakna bagi publik untuk menentukan tatanan ekonomi-politik yang adil dalam ruang politik demokrasi. Sedangkan populisme muncul ketika para aktor politik berupaya membangun kedekatan hubungan dengan warga atau konstituennya melalui program-program yang berpihak pada aspirasi publik.

#### d) Politik Lokal dan Manipulasi Agama

Suatu hal yang perlu disadari bahwa setiap terjadinya konflik sosial yang melibatkan simbol-simbol agama dan mengenai umat beragama, jarang sekali memiliki sebab tunggal. Istilah 'konflik agama' itu sendiri bisa saja digunakan untuk kejadian di mana simbol agama dirusak misalnya, atau identitas keagamaan orang-orang yang terlibat dalam konflik itu (pelaku atau korban) tampak nyata. Akan tetapi, setiap konflik biasanya memiliki faktor-faktor penyebab dan konflik

---

mekanisme ini juga berbeda dalam hubungan orientasinya. Mekanisme solidaritas/intimitas berorientasi pada motif-motif altruistic dan etis, sedangkan mekanisme patronase berorientasi pada pemeliharaan kelanggengan kekuasaan patron (*incumbency*). Meskipun patron menunjukkan kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan klien, tetapi terbatas untuk memelihara ketergantungan klien sehingga posisi sosialnya naik. Berbeda dengan mekanisme solidaritas sosial yang didalamnya terkandung motif pemberdayaan sosial. Lihat: (Caroline Paskarina, 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal...', *ibid.*, hlm. 62).

<sup>88</sup> Lihat kembali: (Caroline Paskarina, 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal...', *ibid.*, hlm. 62).

## 102 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

agama tidaklah sepenuhnya mengenai persoalan agama tapi ada faktor melatarbelakanginya. Dalam Laporan *CRCS-Graduate School*, UGM (2015) mengenai Politik Lokal dan Konflik Keagamaan, menunjukkan bahwa semua konflik keagamaan yang dibahas menunjukkan cirri-ciri tersebut. Seperti, kasus penyerangan sebuah komunitas Syiah di Sampang, kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan masjid Nur Musafir, Batulpat, Kupang. Konflik agama tidak sepenuhnya bersentuhan langsung dengan agama. Semua konflik agama umumnya menunjukkan ciri itu. Seperti, kasus penyerangan sebuah komunitas Syiah di Sampang, kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan masjid Nur Musafir, Batulpat, Kupang. Pada 2016, terjadinya pembakaran terhadap rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara.<sup>99</sup>

Dari berbagai kasus menunjukkan, 'konflik agama' pun bisa terjadi karena bertemunya kepentingan-kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol keagamaan. Pilkada di banyak daerah misalnya dapat memberi kesempatan bagi berkembangnya jenis politik identitas yang buruk. Dengan demikian faktor penting lainnya disini adalah bisa juga karena adanya politik lokal (yang biasanya memanas menjelang atau sedang berlangsungnya Pilkada), dan tentu setiap kasus 'konflik agama' tersebut tidaklah berdiri tunggal, tetapi biasanya terdapat faktor lain meliputinya.

Di Indonesia, tentunya terdapat banyak kasus-kasus konflik sosial lainnya yang mempolitisasi agama yang dapat berdampak potensi dan kasus konflik sosial-etnis dan agama, *ethno-religious* tersebut. Dalam konteks hubungan agama dan politik di Indonesia, Ridwan Lubis<sup>99</sup> mengatakan bahwa isu yang tadinya berdimensi agama akan tetapi dapat berubah menjadi isu politik manakala ada kelompok yang merasa terancam seperti pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang baku dalam konsep

---

<sup>99</sup> Abdullah Idi, *Paper* disampaikan pada *Seminar Duta Toleransi, dengan Tema: 'Dialog Antaragama dan Peningkatan Pelayanan Publik'*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 September 2016.

<sup>99</sup> M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Sambutan: Prof. Achmad Fedyani Sifudin, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 144.

pelayanan terhadap umat beragama. Sekali pun sekarang telah dirumuskan secara kompromi tentang penanggulangan hal di atas, akan tetapi dalam fakta di lapangan banyak kasus masih dan berpotensi terjadi sewaktu-waktu sebagaimana terjadi di Binjai, Sumatera Utara, yakni pendirian gereja oleh umat Kristen. Sekalipun berdasarkan aturan yang ada sudah diperkenankan, tetapi keberatan masih terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang suatu peraturan, dan juga kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah pada masa lalu secara kreatif dan inovatif melakukan upaya perujukan terhadap masyarakat.

Dalam konteks etnisitas dan pembangunan demokrasi, Djamaludin Ancok<sup>91</sup> mengatakan bahwa suatu hal positif dengan munculnya beberapa tokoh keturunan Tionghoa dalam dunia politik, murni karena motivasi membela rakyat bukan sekadar membela kepentingan etnis tertentu, khususnya kepentingan kelompok bisnis. Kalau kehadiran para politisi dari kelompok etnis Tionghoa hanya untuk kepentingan etnis Tionghoa berarti proses demokrasi (di Bangka-Belitung) mengalami kemunduran. Seandainya komunikasi dalam pemenangan pemilu menggunakan *words of mouth* (getok tular) diharapkan yang disampaikan bukan isu membela etnis tertentu (Melayu, Tionghoa, atau etnis lainnya), tetapi betul-betul isu membela kepentingan rakyat secara keseluruhan.

#### e) Pemolisian Aparat

Penyebab konflik 'agama' itu dikarenakan adanya 'gab' bertalian dengan buruknya struktur sosial. Dalam kehidupan masyarakat pluralistik (*plural-societies*). Dalam kasus Tolikara misalnya, konteks penting yang patut dipahami adalah kompleksitas dan kerentanan persoalan Papua pada umumnya. Kerentanan ini, seperti dapat dilihat dalam beragam kasus non-agama lainnya di Papua, kerap direspon

---

<sup>91</sup> Djamaludin Ancok (Epilog), 'Membaca Kembali Arah Pembangunan', *Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Politik, Kebijakan, Sosial, dan Budaya...*, *op. cit.*, hlm. 121.

<sup>92</sup> M. Ridwan Lubis, 'Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama....', *ibid.*, hlm. 144.

aparatus keamanan secara represif dengan menggunakan senjata. Secara lebih khusus, Kabupaten Tolikara sendiri cukup rawan secara politik, seperti dalam konflik di sekitar Pilkada pada Februari 2015.<sup>92</sup> Walaupun disadari bahwa peranan aparat keamanan memiliki kontribusi besar dalam mereduksi jatuhnya korban dan kerugian harta benda dalam berbagai kasus. Akan tetapi, terkadang aparat juga tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan dalam menangani konflik sosial bernuansa etnis dan agama di berbagai daerah konflik.

Dalam riset yang dilakukan PUSAD-Paramadina, MPRK-UGM, dan *The Asia Foundation* (2014), terhadap delapan kasus konflik sosial-keagamaan, tiap-tiap empat kasus sengketa terkait tempat ibadah: Gereja HKBP Filadelfia, Kab. Bekasi; Gereja GKI Yasmin, Kota Bogor; Masjid Abdurrahman di Wolobheto, Ende; dan Masjid Nur Musafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, terdapat empat kasus lainnya terkait konflik sektarian: Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang; anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan; anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur; dan anti-Syiah di Bangil, Pasuruan. Kasus-kasus ini dipilih untuk melihat variasi pemolisian dalam setiap kategori konflik keagamaan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemolisian konflik keagamaan di Bekasi, Bogor, Kupang, Ende, Kuningan, dan Pasuruan, memperlihatkan keberhasilan dalam mencegah ketegangan sehingga tidak menjadi kekerasan terbuka. Kadang-kadang dalam situasi yang tegang dan kritis, ada provokasi dari pihak-pihak yang bertikai yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut. Akan tetapi, tindakan pemolisian dapat mencegah kekerasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Konflik kekerasan di Sampang dan Pandeglang adalah dua kasus yang menunjukkan kegagalan pemolisian sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar.<sup>93</sup>

Dalam konflik sektarian, strategi pihak-pihak yang bertikai mempengaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihak-pihak yang bertikai memberi kesempatan kepada polisi melaksanakan

<sup>92</sup> Rizal Panggabean, et al., 'Pemolisian Konflik Keagamaan ....', *op. cit.*, hlm. 309.

<sup>93</sup> Rizal Panggabean, et al., 'Pemolisian Konflik Keagamaan....', *ibid.*, hlm. 310.

tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban. Di Sampang, pihak-pihak yang berikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi kecuali sebagai pendukung terhadap tujuan pihak-pihak yang bertikai. Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada strategi pemolisian yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan dalam mencegah eskalasi dan penekanan pada agama (antar-agama dan sektarian) sebagai cirri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian karena memicu politik identitas.<sup>94</sup>

#### g) Persaingan Antarkelompok Agama

Perspektif lain, dari kasus Tolikara- Papua misalnya, adalah adanya persaingan antara Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mendominasi di daerah itu dengan kelompok agama lainnya (termasuk dengan Kristen denominasi yang berbeda). Kondisi ini, agaknya potensial terjadinya konflik dalam beragam bentuk dan polanya. Jadi, mengidentifikasi 'kasus Tolikara' bertalian dengan kasus GIDI, kasus konflik yg dicetuskan menjadi kekerasan akibat aparat yang dipandang agak represif, atau faktor lainnya, bisa faktor lokal maupun luar, bahkan internasional. Kasus konflik sosial bernuansa etnis agama yang sepintas dipandang atau dipersepsikan persoalan agama berbeda sebagai penyebabnya, ternyata terdapat kombinasi faktor lain yang dipandang sebagai pelengkapannya, termasuk juga konflik bisa terjadi dalam agama yang sama dengan latar belakang aliran yang berbeda.

Hasil riset yang dilakukan Rizal Panggabean, et al.<sup>95</sup> menunjukkan bahwa konflik-konflik terkait tempat ibadah tidak hanya terjadi di masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam (dalam kaitannya dengan pembangunan gereja), tetapi juga, di masyarakat yang mayoritas penduduknya beragam Kristen atau Katolik (dalam kaitannya dengan pembangunan masjid). Ini tampak jelas dari kasus-kasus yang terkait dengan pembangunan gereja oleh jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi, pembangunan gereja oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor, dan pembangunan masjid baik di Ende maupun Kupang, Nusa Tenggara Timur.

<sup>94</sup> Rizal Panggabean, et al., 'Pemolisian Konflik ....', *ibid.*, hlm. 311.

Faktor sosiokultural-keagamaan dapat berkontribusi positif terhadap potensi konflik di banyak daerah di Indonesia. Kasus konflik Poso misalnya jika dibandingkan berdasarkan agama, orang Islam telah ada di Poso sejak 50 tahun yang lalu, dibandingkan orang Kristen. Orang Islam dibawa masuk oleh pedagang Arab dan Gorontalo, yang terpusat dibagian pesisir kota, sementara orang Kristen dalam hal ini suku Pamona mendiami bagian pegunungan dari Kota Poso. Para pendatang ke Poso berasal dari suku/etnis Bugis, Gorontalo, Jawa, dan Arab yang mayoritas beragama Islam. Pendatang dari kalangan Kristen berasal dari etnis Minahasa dan Toraja. Masuknya arus transmigrasi intensif terjadi sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, terutama setelah dibukanya jalur prasarana angkutan darat Trans-Sulawesi yang menghubungkan Makasar-Palopo-Poso-Palu-Gorontalo-Manado. Kebijakan Orde Baru tentang transmigrasi juga telah 'memaksa' penduduk lokal untuk beradaptasi dan menerima berbagai kebudayaan baru bagi mereka yang terutama didominasi suku Jawa, diistilahkan 'Jawanisasi' yang diikuti pemberian lahan-lahan pertanian dan biaya hidup selama dua tahun. Kebijakan transmigrasi yang positif bagi pemerintah Orde Baru disisi lain dipandang sebaliknya oleh penduduk lokal, yakni munculnya kecemburuan dan potensi konflik sosial dikarena terkotak-kotaknya wilayah berdasarkan agama, tidak terjadi akulturasi pribumi dan pendatang.<sup>96</sup>

Hal ini ada relevansinya dengan pandangan Koetjoroningrat<sup>97</sup> bahwa setidaknya ada empat sumber konflik dalam masyarakat majemuk: persaingan antara kelompok etnik dalam memperoleh sumber kehidupan; adanya kelompok etnik yang memaksakan kebudayaan kepada kelompok etnik lainnya; adanya golongan agama yang memaksakan ajarannya kepada golongan lainnya; dan adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dipastikan terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan konflik, terutama ekonomi, politik, dan ketimpangan sosial lainnya.

\* Muhammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso....', *loc. cit.*, hlm. 79.

\* Seperti dikutip: (Muhammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso....', *loc. cit.*, hlm. 79).

#### h) Kompetisi Kelompok Etnis

Hasil penelitian Rusmin Tumanggor, et al (2005) patut diperhatikan bahwa konflik sosial-etnis dan agama yang terjadi di Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Ternate, meskipun masing mempunyai *constraint* yang berbeda bahwa pada umumnya konflik di wilayah itu terjadi, di mana baik faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas. Konflik Sampit dan Sambas misalnya, banyak dipicu oleh kenyataan bahwa etnis Madura pada level tertentu telah menjelma menjadi kelompok yang berhasil menguasai berbagai sumber daya ekonomi, disisi lain, perilaku sosial mereka cenderung eksklusif semakin menegaskan komunalitas etnisnya. Maka ketika terjadi gesekan-gesekan sosial meskipun itu kecil, dengan etnis Dayak atau Melayu sebagai penduduk asli cukup untuk 'menyulut' sebuah konflik yang massif dan berkepanjangan. Sama halnya, yang terjadi di Ambon, Poso, dan Ternate dengan isu identitas yang sedikit berbeda (yakni, isu agama dan kasus di Ambon juga dibalut dengan isu etnis, yaitu Boton, Bugis, Makasar, dengan penduduk asli). Secara mikro, konflik-konflik tersebut dilatari adanya ketidakpuasan antarperilaku lintas etnis, agama, keamanan, birokrasi (dalam penguasaan aset dan lapangan pekerjaan). Masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan dan mencari solusi bersama yang saling mengalahkan dan saling beruntung ('win-win' yang terjadi 'win-lose'), dan juga lemah dalam menganalisis provokasi dari luar. Kelabilan itu menjadi 'faktor penunggu' (*predispose factors*) yang potensial terhadap ledakan konflik.<sup>68</sup>

Antara lain: (a) *Kesenjangan sosial-ekonomi, di mana realitas menunjukkan ekonomi dikuasai etnis Tionghoa (Cina)*. Mereka makin lama makin kaya karena aparat dan kepala daerah bekerjasama dengan mereka. Ini terjadi, dalam setiap Pilkada, mereka terlibat menjadi *cukong* kepada setiap calon yang bertarung dalam pilkada, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyandang dana dan kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berhutang budi kepada mereka.

---

\* Abdullah Idi, 'Seminar Duta Toleransi...', *Ibid*.

## 108 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Kondisi seperti ini, menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar dan masyarakat menjadi marah, benci, dan anti terhadap mereka yang kebetulan dari etnis Tionghoa (Cina); (b) *Tumbuh arogansi dikalangan mereka terhadap masyarakat pribumi*, yang merupakan penyakit orang kaya yang merasa dilindungi aparat. Mereka tidak lagi sensitif menyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memendam kebencian dan kemarahan terhadap mereka; (c) *Persepsi masyarakat terhadap mereka menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, aparat selalu berpihak kepada mereka*. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan munculnya teroris dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dan dendam; (d) *Kebijakan dan perlakuan yang mengistimewakan mereka yang kaya*, yang kebetulan adalah etnis Tionghoa/Cina, telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu-waktu diledakkan jika ada masalah sekecil apa pun; (e) *Faktor global* turut mempengaruhi masyarakat berperilaku tempramental, cepat marah, dan emosi; dan (f) *faktor masyarakat membentuk klaster, kumpulan dan kelompok berdasarkan agama, etnis, pekerjaan, dan lainnya*.

### i) Perilaku Eksklusif dan Arogansi

Dikatakan Musni Umar<sup>99</sup> bahwa faktor sosiostruktural berpengaruh kuat terhadap terjadinya konflik etnis dan 'agama' atau bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera-Utara. Ketegangan berawal menjelang shalat Isya', setelah Meliana, seorang perempuan Cina/Tionghoa berusia 41 tahun yang meminta agar pengurus Masjid Al-Maksum di lingkungan tempat tinggal dapat mengecilkan volume pengeras suaranya. Sesudah shalat Isya', sekitar pukul 20.00 sejumlah jema'ah dan pengurus Masjid mendatangi rumah Meliana. Lalu, atas prakarsa Kepala Lingkungan, Meliana dan suaminya dibawa ke Kantor Lurah. Suasana memanas, Meliana dan suaminya dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai Selatan. Tiba-tiba selanjutnya pembakaran sejumlah rumah ibadah (vihara dan klenteng) pun terjadi.<sup>100</sup> Terjadinya

<sup>99</sup> Abdullah Idi, 'Seminar Duta Toleransi....', *ibid*.

<sup>100</sup> Lihat: ('[www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/08/160801\\_trensosial\\_tanjungbalai\\_walubi](http://www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/08/160801_trensosial_tanjungbalai_walubi)'), 'Serangan Vihara di Tanjung Balai, Pelajaran Toleransi', diakses: 25 Oktober 2016).



pengrusakan sejumlah vihara dan klenteng di Tanjung Balai tersebut berawal dari permintaan seorang perempuan etnis keturunan Cina kepada imam masjid agar mengecilkan pengeras suara pada masjid berakibat ketersinggungan dari pihak umat muslim sekitar tempat tinggal itu, yang berakibat pada pembakaran terhadap sejumlah rumah ibadah itu.

Persoalan ekonomi juga dipandang sebagai salah satu penyulut konflik SARA di Kabupaten Poso. Hal ini dikarenakan perebutan lahan antara suku asli dan pendatang. Kebiasaan suku asli Poso, yakni orang Pamona, Lore, dan Mori, menjual tanah kepada pendatang. Dibeberapa kasus terjadi para pendatang menguasai tanah yang oleh orang lokal dianggap sebagai milik mereka secara adat, tetapi oleh hukum formal dianggap sebagai tanah menganggur. Hal ini mengakibatkan marjinalisasi di satu sisi (terhadap masyarakat asli-lokal). Para petani gurem pegunungan dengan cepat kehilangan tanah ulayat mereka yang jatuh kepada para petani perdagangan yang berjiwa wiraswasta tinggi. Di mana kemudian kebun-kebun cokelat memenuhi sisi bukit yang menghubungkan Poso-Palu, merupakan tanaman yang pernah mengalami *booming* dengan harga yang tinggi pada era krisis 1998. Tetapi hanya petani kaya lokal dan para wiraswasta pendatang dari luar Poso yang dapat beradaptasi, seperti dari Bugis, Makasar, Gorontalo, dan Jawa. Selain penanaman cokelat yang mendorong kehadiran pemodal yakni penanaman kayu eboni dan penambangan pasir. Banyak orang suku asli Tana Poso umumnya berlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil (PNS) untuk merubah status sosial mereka sehingga terlenta atau tidak siap mencari jenis pekerjaan lainnya. Dikuasanya sektor ekonomi oleh pendatang semakin menimbulkan rasa kecemburuan para penduduk lokal karena sumber ekonomi mereka mulai terganggu dan hilang, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi, yang berbeda dengan pendatang keadaan kehidupan mereka terus membaik. Keberhasilan pendatang ini merupakan benih-benih dan potensi konflik sosial yang bersifat laten karena kalangan pribumi-lokal berpandangan mereka tergusur dari negerinya sendiri.<sup>101</sup>

<sup>101</sup>Muhammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso...', *loc.cit.*, hlm. 75.

### j) Peran FKUB belum Maksimal

Wadah dialog dan komunikasi tidak ada, walaupun ada, seperti Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)<sup>102</sup> masih berperan terbatas, dan belum mampu menjangkau kelompok yang dibangun berdasarkan stratifikasi sosial-ekonomi. Peranan dan fungsi FKUB (sebagai mitra pemerintah) dipandang belum efektif dan terkesan masih mengedepankan formalitas seperti terlihat dari banyak kasus pendirian rumah-rumah ibadah yang tidak jarang berujung pada kericuhan atau konflik yang menyeret etnis dan umat beragama berbeda. Sejak 2007 mulai terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) diseluruh Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sebagai sebuah organisasi, FKUB memiliki struktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan unsure, keterwakilan dan jumlahnya yang telah ditentukan PBM (Ps 10), termasuk waktu pembentukannya (PBM Ps 27), serta pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Ps 26), serta Tugas Pokoknya (PBM Ps 9).

Kehadiran FKUB memiliki tugas: 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Gubernur (untuk tingkat provinsi, dan kepada Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/kota 'memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah'; dan 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di masyarakat (PBM Ps 9 ayat 1), serta program kerja dan pelaksanaannya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, Jakarta, 2008.

<sup>103</sup>Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 'Sosialisasi PBM...', *ibid.*

Dalam implementasinya, faktor kendala yang sering dihadapi FKUB di berbagai daerah adalah keberpihakan (*political will*) pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) rendah, terutama bertalian dengan penyediaan sekretariat dan dana.<sup>104</sup> FKUB, dalam hal ini, dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak secara optimal, baik dengan kepala daerah, aparat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyediakan forum dialog bersama-sama. FKUB, seperti dikatakan dalam Pasal 1 PBM 2006, berkepentingan dengan usaha-usaha 'membangun hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945'.

Dari beragam latar belakang terjadinya konflik sosial di Indonesia, agaknya lebih berhubungan dengan ketidakpuasan terhadap perlakuan politik, ekonomi, budaya dan agama. Pendekatan pluralism diharapkan dapat mereduksi berbagai konflik sosial dan potensinya yang akan mengancam disintegrasi sosial dan disinterasi bangsa. Dikatakan James A. Bank<sup>105</sup> bahwa pluralisme atau multikulturalisme dapat dikatakan sebagai berkompetisi dengan berkesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, dan pendidikan.

Setidaknya, dengan pendekatan sosiohistoris perjalanan bangsa dan pendekatan sosiologis keterkaitan realitas kehidupan sosial pada masyarakat pluralistik pada negara-negara tersebut, diharapkan dapat membantu dalam memahami persoalan konflik etnis dan agama. Untuk memahami konflik etnis dan agama di Indonesia agaknya diperlukan pemahaman secara makro dan mikro tersebut, sebagai bahan pertimbangan kebijakan etnisitas. Secara mikro, konflik-konflik sosial

---

<sup>104</sup>M. Yusuf Asry, 'Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama (Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara)', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol IX, No. 34, April-Juni 2010, hlm. 93-106.

<sup>105</sup>Dalam kutipan: (Abdullah Idi, 'Dinamika Sosiologis Indonesia....', *op. cit.*, hlm. 3).

## 112 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

bernuansa agama dan etnis umumnya dilatari oleh adanya ketidakpuasan antarprilaku lintas etnis, agama, keamanan, birokrasi (dalam penguasaan aset dan lapangan pekerjaan). Masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan dan mencari solusi bersama yang saling mengalahkan dan saling beruntung ('win-win' yang terjadi 'win-lose'), dan juga lemah dalam menganalisis provokasi dari luar. Kelabilan itu menjadi 'faktor penunggu' (*predispose factors*) yang potensial terhadap ledakan konflik.<sup>106</sup>

Penyebab konflik itu sendiri lazim diawali dengan kasuistik individual, disharmoni komunikasi kebutuhan yang kemudian dimanfaatkan pihak tertentu lewat pengembangan isu-isu sensitif kehidupan etnis, keagamaan hingga hajat hidup. Masyarakat labil tersebut cepat terprovokasi untuk harapan menang secara 'duniawi' atau 'mati suci' mempertahankan kebenaran. Sentimen agama, etnis dan perspektif, menjadi faktor pelengkap (*precipitating factors*) terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Seperti kasus kerusuhan atau konflik di Tanjung Balai, Sumatera Utara misalnya secara sederhana, pada awalnya terjadinya, berawal dari seorang pasangan keluarga (suami-isteri) keturunan etnis Tionghoa (Cina) yang mendatangi ke Masjid untuk memprotes karena kumandang adzan mengganggu lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat muslim di sekitar itu pun bereaksi dan marah serta secara spontanitas membakar sejumlah Vihara dan Klenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara.<sup>107</sup>

Suatu konflik agama tidak sepenuhnya bersentuhan langsung dengan persoalan agama. Semua konflik agama umumnya menunjukkan ciri itu. Seperti, kasus penyerangan sebuah komunitas Syi'ah di Sampang, kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan Masjid Nur Musafir, Batulpat, Kupang. Pada 2016, terjadinya pembakaran terhadap rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Dari berbagai kasus menunjukkan 'konflik agama'

<sup>106</sup>[www.Bbc.com/berita\\_indonesia/2016/07/160730/Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Klenteng di bakar \(30/7/2016\)](http://www.Bbc.com/berita_indonesia/2016/07/160730/Amuk_Massa_di_Tanjung_Balai,_Vihara_dan_Klenteng_di_bakar_(30/7/2016)), diakses: 24 Oktober 2016.

<sup>107</sup>[www.Bbc.com/berita\\_indonesia/2016/07/160730/Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Klenteng di bakar \(30/7/2016\)](http://www.Bbc.com/berita_indonesia/2016/07/160730/Amuk_Massa_di_Tanjung_Balai,_Vihara_dan_Klenteng_di_bakar_(30/7/2016)), diakses 24 Oktober 2016.

pun bisa terjadi karena bertemunya kepentingan-kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol keagamaan. Pilkada di banyak daerah misalnya dapat memberi kesempatan bagi berkembangnya jenis politik identitas yang buruk—yang paling terbaru kasus menjelang Pilkada DKI di mana kasus 'penistaan agama'<sup>108</sup> melalui pernyataan Ahok terhadap tafsiran Surat Al-Maidah: 51 disinyalir sebagian kalangan sarat dengan kepentingan politis. Hal itu juga dipandang rawan sebagai 'penyulut' konflik sosial-etnis dan agama yang diinisiasi dengan adanya demo besar-besaran di berbagai kota besar. Setelah melakukan sidang dan musyawarah antara Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan Fatwa dalam bentuk Pendapat dan Sikap Keagamaan menyikapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 tersebut.

Dengan demikian faktor penting lainnya disini adalah bisa juga karena adanya politik lokal (yang biasanya memanas menjelang atau sedang berlangsungnya Pilkada), dan tentu setiap kasus 'konflik agama' tersebut tidaklah berdiri tunggal, tetapi biasanya terdapat faktor lain meliputinya, yakni bertalian dengan kondisi struktur sosial yang tidak berimbang, etnis minoritas berposisi sebagai *superordinate* dan etnis mayoritas sebagai *subordinate*. Keadaan pola relasi etnisitas, etnis mayoritas dan minoritas seperti ini akan mudah menyulut konflik sosial-etnis dan agama dengan beragam faktor penyebabnya.

Kendatipun demikian, secara mikro-lokalitas terdapat beberapa daerah menunjukka suatu kondisi relasi etnisitas yang cenderung integratif dan asimilatif pada level tertentu. Abdullah Idi (2006), dalam penelitian Disertasi Sosiologi di UGM, tentang asimilasi (pembauran) orang Cina dan Melayu di Bangka, memperlihatkan cenderung terjadi secara *natural and reatively full-assimilation* yang telah terjadi dikarenakan adanya suatu kondisi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Bangka yang relatif berimbang—memang terdapat orang Cina-Bangka yang kaya, banyak pula orang Melayu-Bangka yang kaya; banyak orang Cina-Bangka yang miskin banyak pula orang Melayu

<sup>108</sup>Lihat: (berita.islamedia.id, diakses: 25 Oktober 2016).

yang miskin; adanya keadaan etnis Melayu-Bangka sebagai mayoritas dan etnis Cina sebagai minorita dalam *size*, karakteristik etnis Melayu yang realtif terbuka (*ex-trovert*), status elite pada etnis Melayu-Bangka; adanya suatu keadaan pemukiman relative menyebar berdaasarkan etnis; adanya suatu keadaan sistem pendidikan yang demokratis—untuk anak-anak Melayu dan anak-anak Cina; tidak adanya tindakan diskriminasi terhadap (anak-anak) etnis minoritas Cina oleh etnis mayoritas Melayu; adanya suatu keadaan yang mana agama Islam (agama orang Melayu) sebagai agama mayoritas dalam hal jumlah (*size*); dan adanya keadaan sistem politik yang lebih demokratis dan cenderung tidak diskriminatif terhadap etnis minoritas Cina.<sup>109</sup>

Patut disadari bahwa perubahan sosial bisa saja menjadi kendala bagi relasi orang Cina dan Melayu di Bangka ke depan, misalnya karena: perubahan lingkungan ekonomi, yakni adanya berkurang peran ekonomi timah dan proses penyempitan lahan perkebunan bagi masyarakat; perubahan pendidikan, yakni semakin majunya pendidikan anak-anak Cina dan Melayu yang berpengaruh terhadap pola pikir, pergaulan, dan wawasan mereka, termasuk dalam hal persepsi dan perilaku sosial sesama mereka maupun dengan anak-anak berlainan etnis; dan perubahan kehidupan keagamaan, yakni adanya peningkatan pengetahuan agama anak-anak Cina dan Melayu yang memperkuat keyakinan terhadap ajaran agama mereka masing-masing berpegaruh terhadap pola pikir, pergaulan, dan wawasan mereka, serta pola perilaku sosial mereka dengan anak-anak berlainan etnis itu.<sup>110</sup>

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia patut mewaspadaai atas potensi kemungkinan terjadinya konflik sosial etnis dan agama. Muhammad Tholhah Hasan<sup>111</sup> bahwa sebagai bangsa yang ditakdirkan sebagai negara pluralistik (etnis, agama, budaya, dan bahasa), perbedaan-perbedaan tersebut selama ini memang belum sampai merobek keutuhan bangsa dan tidak sampai memporak-porandakan

<sup>109</sup>Abdullah Idi, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Editor: Nor Huda, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm. 270.

<sup>110</sup>Abdullah Idi, '*Asimilasi Cina Melayu....*', *ibid.*, hlm. 271.

<sup>111</sup>Muhammad Tholhah Hasan, '*Islam dalam Perspektif Sosio Kultural....*', *op. cit.*, hlm. 275-276.

kesatuan bangsa, meskipun kadang kala mengalami goncangan-goncangan, gangguan-gangguan, dan benturan-benturan lokal. Dengan adanya sejumlah agama (Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kepercayaan) patut disyukuri sampai hari ini belum pernah mengalami perang agama (war of religions) seperti yang pernah terjadi di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-17 M. Juga tidak sampai mengalami penindasan agama (*religious persecution*), bukan arti suatu agama ditindas oleh agama lain, tetapi juga suatu sekte ditindas oleh sekte yang lain yang kebetulan berkuasa. Kondisi seperti itu hingga kini masih dapat disaksikan di beberapa negara, misalnya saling meledakkan bom di Beirut itu bukan orang Isla Arab melawan Yahudi Israel, tetapi sama-sama Islam dan sama-sama Arab. Sama halnya yang terjadi di Irlandia Utara yang saling membunuh di sana sama-sama penganut Kristus, yang satu mengaku Katholik dan yang lainnya mengaku Protestan. Meskipun lebih jauh apabila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya konflik-konflik tersebut lebih banyak dipicu oleh kepentingan-kepentingan politis dari pada perbedaan teologis.

Secara kebetulan atau memang karena rahmat Tuhan, bahwa semua agama yang masuk ke Indonesia tidak ada yang dibawa oleh panglima militer atau melalui *military conquest*. Agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen masuk ke Indonesia secara damai. Dengan demikian maka tidak pernah terjadi situasi dalam sejarah sejak merdekanya bangsa ini, adanya dua kelompok dalam komunitas agama yang satu sebagai kelompok yang menang dan yang lain sebagai kelompok yang dikalahkan. Andaikan suatu agama dibawa seorang panglima militer, akan muncul satu pihak yang menang dan pihak lain yang dikalahkan, seperti yang banyak terjadi di beberapa negara lain, sehingga situasinya menjadi labil dan suatu waktu kondisinya akan mengalami perubahan dengan penuh ketegangan dan sikap pembalasan. Masalah yang dapat ditemui dalam kehidupan beragama yang plural ini, adalah kecurigaan dan kesalahpahaman dari satu penganut agama terhadap sikap dan perilaku agama lain, dan juga sering pula terhadap sesama penganut agama tertentu.<sup>112</sup>

<sup>112</sup>Muhammad Tholhah Hasan, 'Islam dalam Perspektif Sosio Kultural....', *ibid.*, hlm. 275-277.

Tampaknya, berbagai kesulitan atau belum berhasilnya mereduksi konflik etnis dan agama secara meyakinkan di Indonesia selama ini perlu adanya kebijakan strategis dan optimal sebagai solusi substansial terhadap isu-isu konflik etnisitas—bertalian konflik sosial-etnis dan agama—dengan pentingnya menelusuri lebih jauh terhadap faktor-faktor penyebabnya sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan.

### 2. Konflik Etnis-Agama: Rohingya, Myanmar

Pemberitaan media massa dan referensi yang mengungkap perihal pengungsi Rohingya, menunjukkan bahwa kebijakan keras dan diskriminatif pemerintah Myanmar atas etnis Rohingya ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian tersebut. Sejak pemerintahan sipil Myanmar hasil pemilihan umum terbentuk tahun 2010, isu diskriminasi dan intimidasi terhadap warga Rohingya terus mencuat dan mencuri perhatian dunia. Diskriminasi yang diterapkan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya dinilai masyarakat internasional jauh lebih buruk daripada segregasi rasial ala Apartheid di Afrika Selatan. Kebijakan diskriminatif, termasuk tidak diakuinya warga Rohingya sebagai warga negara dalam konstitusi Myanmar, disebut sebagai akar persoalan krisis kemanusiaan ini. Penilaian tersebut juga ditegaskan Deputy Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony J. Blinken saat bertemu Presiden Thein Sein di Naypyidaw, Myanmar, 21 Mei 2015. Selama ini Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai warga ilegal asal Bangladesh. Di Myanmar, kelompok minoritas itu kerap diperlakukan diskriminatif dan mengalami kekerasan. Di antara etnis-etnis yang ada di Myanmar, Rohingya adalah salah satu kelompok etnis minoritas, dan etnis mereka lebih mirip masyarakat Asia Selatan dibanding orang-orang Asia Tenggara. Etnis ini belum diakui oleh Pemerintah Myanmar sehingga dianggap ilegal keberadaannya dan mendapat perlakuan diskriminatif yang berlebihan dari pemerintah dan penduduk setempat. Orang-orang Rohingya tidak mendapatkan hak kewarganegaraan dan dianggap sebagai imigran gelap.<sup>119</sup>

<sup>119</sup>Simela Victor Muhamad, 'Masalah Pengungsi Rohingnya, Indonesia, dan ASEAN', Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis', *Info Singkat Internasional* Vol. VII, No. 10/1/P3DU Mei 2015 (Diakses: 26 Juli 2017).



Komisaris Tertinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Zeid Ra'ad al-Hussein (2017), mengatakan bahwa lebih dari 647 ribu warga Rakhine, telah melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer di Rakhine pada Agustus 2017 lalu. Hal ini tak pelak menyorot perhatian dunia yang dikatakan juga sebagai genosida abad 21. Sejumlah pelanggaran Hakan Asasi Manusia (HAM) diungkapkan dalam konflik itu. Dalam suatu investigasi PBB dengan mewawancarai pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, mereka mendapati jika operasi militer Pemerintah Myanmar menjadi langkah strategis untuk memastikan etnis Rohingya keluar dari negeri Myanmar. Dewan HAM menilai tindakan militer yang dilakukan sangat terorganisasi, terkoordinasi, dan sistematis. Operasi militer itu dimulai sebelum serangan pemberontakan terhadap pos polisi pada 25 Agustus 2017, dari pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan anak-anak. Hal ini merupakan contoh nyata dari operasi pembersihan etnis (*genoside*).<sup>144</sup>

Keterkaitan dengan terjadinya konflik etnis dan agama etnis Rohingya (Muslim) dan etnis Rakhine (Buddha) dapat diungkapkan berdasarkan analisis konflik etnis dan agama, sebagai berikut.

#### a. *Facilitating Contexts*

##### a) Kolonial Inggris & Kebijakan Diskriminatif

Dalam konteks sosial, bertalian dengan konflik etnis dan agama di Rohingnya patut pula memahami dimensi demografi dan perilaku diskriminatif dan anti etnis dan muslim Rohingnya oleh bangsa kolonial Inggris di Myanmar. Muslim Rohingnya berjumlah 20% dari total penduduk Myanmar berjumlah 55 juta jiwa. Mereka menempati provinsi Arakan. Provinsi ini menjadi bagian dari negeri Muslim sejak abad ke-7 M di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang 1430-1784M, kaum Muslim memimpin negeri ini. Tahun-tahun

---

<sup>144</sup>Pemimpin *de facto* Myanmar, Aung San Suu Kyi, berpotensi dibanjar tuduhan genosida oleh PBB. Dakwaan itu muncul menyusul perlakuannya terhadap minoritas Muslim Rohingnya di Rakhine. Zeid Ra'ad al-Hussein menjabarkan tuduhan terhadap Myanmar atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan kepada etnis Rohingnya. Seperti memuntahkan peluru secara acak, penggunaan granat, menembak dalam jarak dekat, menikam, memukul hingga tewas, dan membakar rumah yang di dalamnya masih dihuni warga yang tak berdosa. Lihat: (Rizkyan Adiyudha, 'Tuduhan Genosida untuk Suu Kyi', *Republika*, 19 Desember 2017).

setelahnya, raja Burma menduduki wilayah Arakan. Sejak saat itulah bumi Arakan yang damai berubah menjadi mencekam. Pembunuhan-pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dilakukan, harta benda kaum Muslim dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara. Pada tahun 1842 M, Inggris menduduki wilayah ini dan memasukkan Arakan di bawah negara persemakmuran Inggris-India. Pada 1937M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Budha supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun yang sama, colonial Inggris mempersenjatai Budha. Pada 1942 penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya dilakukan kembali.<sup>119</sup>Jadi, 'benih-benih' konflik telah ditanamkan Inggris sejak ratusan tahun lalu dengan mempersenjatai penganut Budha untuk berhadapan dengan Muslim Rohingnya.

Pada Juni 2012, konflik etnis terjadi di bagian Barat negara bagian Rakhine, Myanmar, antara Etnis Arakan yang mayoritas beragama Buddha, dengan Etnis Rohingnya yang mayoritas beragama Islam. Konflik tersebut berpuncak pada 8-12 Juni 2012, yang membuat Etnis Rohingnya terpaksa mengungsi keluar dari Myanmar untuk mencari perlindungan ke Bangladesh dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai dampak dari adanya konflik yang terus meningkat. Konflik tersebut pada kenyataannya bukan merupakan hal baru di negara bagian Arakan, Myanmar. Sebelumnya pada bulan Februari 1978 dan bulan Mei 1991 hingga Maret 1992, juga pernah dilakukan pemerintah Myanmar sebanyak dua kali. Sementara konflik yang terjadi pada 2012 terjadi juga sebanyak dua kali, yakni pada bulan Juni dan Oktober. Pada Oktober 2012, konflik kembali terjadi yang dilakukan oleh Etnis Arakan bersama militer Myanmar terhadap komunitas muslim, dalam hal ini bukan hanya Etnis Rohingnya tetapi juga komunitas muslim Kaman yang menjadi korbannya yang lebih terkoordinasi dan tersusun rapi. Pada 2013, konflik tersebut diperkirakan telah meluas menjadi Genosida (pembantaian besar-besaran) tidak hanya pada salah satu

---

<sup>119</sup><https://galanggriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-negara-asean-dalam-penyelesaian-konflik-etnis-rohingnya> (diakses: 22 Juli 2017).

etnis saja. Karena itu, pusat lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan jumlah umat muslim di Myanmar turun sangat drastis dengan adanya konflik Rohingya yang terjadi di sana.<sup>116</sup>

Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingnya, antara lain disebabkan status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar melainkan sebagai pendatang ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Rohingnya, antara lain mereka tidak diberi izin usaha; diberikan pajak yang tinggi dan berlebihan, jika pajak tersebut tidak mampu untuk dibayarkan maka lahan pertanian, tambak, atau properti apa pun yang mereka miliki akan disita; khusus bagi Etnis Rohingnya yang terkonsentrasi di Rakhine Utara, mereka diperlukan izin untuk keluar dari otoritas lokal; mereka juga dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan dieksploitasi sebagai pekerja paksa; Selain itu, mereka juga tidak diberi akses untuk mendapatkan pendidikan, sulit untuk mendapatkan izin perkawinan, kerap terjadi pemerkosaan terhadap perempuan Rohingnya, serta mereka sering dihukum tanpa mengetahui kesalahan yang jelas dan tanpa melalui proses peradilan.<sup>117</sup>

Akar konflik etnis ini adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingnya. Populasi etnis Muslim Rohingnya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingnya pun sangat mungkin dianggap 'mengganggu'. Keberadaan etnis Rohingnya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingnya. Populasi etnis Muslim Rohingnya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingnya pun

<sup>116</sup><https://galangriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-asean-dalam-penyelesaian-konflik-etnis-rohingnya> (diakses: 22 Juli 2017).

<sup>117</sup>*ibid.*

## 120 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

sangat mungkin dianggap 'kerikil dalam sepatu', yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Pemerintah Myanmar juga tak mengakui bahwa kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.<sup>118</sup>

Diungkapkan Matthew Smith, direktur eksekutif organisasi hak asasi manusia *Fortify Rights* berdasarkan dokumen resmi yang secara langsung memperlihatkan keterlibatan pemerintah Myanmar dalam kebijakan keras dan diskriminatif atas Muslim Rohingya. Dokumen rahasia yang dipublikasikan setebal 79 halaman itu mengungkapkan, para pejabat Myanmar telah mengeluarkan perintah kepada otoritas negara bagian Rakhine sejak 1993 hingga 2008 agar secara konsisten menjalankan kebijakan negara yang membatasi Rohingya. Kelompok HAM yang memperoleh bocoran ini mengatakan sebagian besar kebijakan tersebut hingga kini masih berlaku. Pada tahun 2014 Pemerintah Myanmar melarang penggunaan istilah Rohingya dan mendaftarkan orang-orang Rohingya sebagai orang Bengali dalam sensus penduduk saat itu. Pada bulan Maret 2015 Pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas penduduk bagi orang-orang Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Situasi yang tidak kondusif, ditambah dengan pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan suku Rakhine dan Rohingya, semakin menambah kekhawatiran orang-orang Rohingya akan keamanan mereka jika tetap bermukim di Myanmar. Ini menyebabkan mereka mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Simela Victor Muhamad, 'Masalah Pengungsi Rohingnya, Indonesia, dan ASEAN', *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, *Info Singkat Internasional* Vol. VII, No. 10/MP3DI/ Mei 2015 (Diakses: 26 Juli 2017).

b) Dominasi Budaya Agama dan Etnis

Konteks sosial merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi dinamika konflik (Gelfand & Cai 2004). Perbedaan tempat dan budaya mengakibatkan perbedaan karakteristik konflik. Oleh karena itu, pemahaman tentang konteks sosial di Myanmar, terutama negara bagian Rakhine, menjadi sangat penting untuk dapat memahami konflik antara Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine. Sebagai sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, Myanmar secara sosial ekonomi masih tergolong negara berkembang. Pendapatan per kapita pada tahun 2011 masih tergolong rendah, yaitu US\$1.144. Tingkat pendidikan warganya juga cenderung rendah, yaitu pada level sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Sementara itu, wilayah Myanmar terbagi menjadi 7 negara bagian yang dinamai berdasarkan etnis mayoritas yang menjadi penduduknya dan 7 wilayah yang didiami mayoritas etnis Burma. Jumlah penduduk Myanmar pada 2011 berkisar 48,337 juta jiwa. Adapun komposisi etnis penduduknya menurut *Central Intelligence Agency* (2013) adalah etnis Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2%, dan lain-lain 5%. Di sisi lain, komposisi agama penduduknya meliputi 89% Buddha, 4% Islam, sisanya Kristen, dan kepercayaan lain.<sup>120</sup>

Myanmar dikelilingi oleh banyak negara, yaitu India, Tiongkok, Laos, Thailand, dan Bangladesh. Tidak mengherankan jika kelompok etnik di negara ini begitu banyak jumlahnya, di mana sebagiannya memiliki kemiripan dengan etnis yang mendiami negara tetangga. Terdapat lebih dari 135 kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya dan bahasanya tersendiri. Etnis terbesar adalah Burma (Bamar) yang berasal dari Sino-Tibet dan tinggal di dataran tengah Myanmar. Agama mayoritas etnis Burma adalah Buddha Theravada. Bahasa dan budaya mereka menjadi bahasa dan budaya nasional Myanmar. Mereka juga menguasai pemerintahan dan militer (Oxford Burma Alliance, tt.). Dominasi budaya dan agama etnis Burmalah yang menjadi faktor

<sup>120</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine....', *op. cit.*, hlm. 38-39.

## 122 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

determinan bagi konteks sosial Myanmar. Walaupun mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha, kondisi yang unik terjadi di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini, selain terdapat etnis Rakhine yang memeluk agama Buddha Theravada, terdapat juga etnis Rakhine/Arakan yang beragama Islam. Mereka mengindentifikasikan diri sebagai Arakan Muslim. Mereka memiliki adat istiadat seperti orang-orang Buddha Rakhine dan juga menggunakan bahasa Rakhine. Selain itu, terdapat juga etnis Rohingya yang juga beragama Islam, tetapi memiliki ciri fisik, budaya, dan bahasa lebih mirip dengan dialek Chittagonian yang berasal dari bahasa Bengali yang banyak digunakan di Bangladesh (*Minority Rights Group International, 2008*). Jumlah orang Rohingya sendiri diperkirakan 4 persen dari jumlah penduduk Rakhine (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dengan demikian, walaupun Rakhine merupakan negara bagian yang jumlah orang muslimnya paling banyak (sekitar 45 persen dari total orang Muslim di seluruh Burma), bila dibanding dengan jumlah penduduk Rakhine yang Budha, jumlahnya sangat kecil. Komunitas muslim ini tinggal di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, dan Kyauktaw. Dengan demikian, orang muslim, baik muslim Rakhine maupun muslim Rohingya, menjadi kelompok minoritas di Rakhine maupun di Myanmar secara umum.<sup>121</sup>

Sejak pemerintahan junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1962, politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan, terutama terhadap muslim Rohingya yang dianggap sebagai orang asing, bukan asli orang Burma. Kebijakan 'Burmanisasi' dilakukan melalui marginalisasi orang-orang muslim Rohingya. Akses mereka untuk berpindah, menikah, dan mencari pekerjaan dibatasi dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang sogokan. Mereka juga hanya diperbolehkan memiliki maksimal dua anak per keluarga dan tidak diberi sertifikat kelahiran untuk anak-anak mereka. Hak anak-anak muslim Rohingya untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar juga sangat

---

<sup>121</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama...', *ibid.*, hlm. 39.

dibatasi. Bahkan, pada 1982 Pemerintah Myanmar mengeluarkan UU kewarganegaraan baru yang tidak memasukkan Rohingya sebagai warga negara Myanmar (Oxford Burma Alliance, tanpa tahun). Akibatnya, sekitar 800 ribu Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan apa pun. Hal ini tentu menjadikan muslim Rohingya dalam kondisi tanpa perlindungan negara sehingga rawan terhadap berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan (O'Brien, t.t). Diskriminasi agama juga terjadi di mana pemerintah junta militer Myanmar mendeklarasikan dan hanya mengakui Budha sebagai agama nasional (*the religion of 'true' Burmese people*) (Hukil & Shaunik 2013). Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap orang Muslim maupun pemeluk agama lainnya. Namun pada tahun 2011 terjadi perubahan politik yang signifikan di mana Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilu dan mulai lebih membuka diri dengan dunia internasional<sup>122</sup>. Keberadaan konteks pendukung ini biasanya tidak serta merta berdampak terjadinya konflik, tetapi berfungsi sebagai tempat bersemunya potensi konflik untuk menunggu saat yang tepat.

Konflik yang melibatkan etnis Rohingnya dan Rakhine ini tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah. Kata *Rohingya* berasal dari kata *Rohang*, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan Muslim. Pada 1203 M, Bengali menjadi sebuah negara Islam, dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk kewilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M, Arakan menjadi sebuah negara Muslim yang ditandai dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Selama 350 tahun kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1784 M. Raja Boddaw Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1826. Tahun 1935 diputuskan

---

<sup>122</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama ....' *ibid.*, hlm. 39.

## 124 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937 melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada 1948.<sup>123</sup>

Pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak pemerintahan junta militer berkuasa di Myanmar. Hal ini terutama terjadi karena pemerintah menganggap etnis Rohingya bukanlah masyarakat pribumi negara Myanmar, dan hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan penjajah Inggris dari Bangladesh. Selain itu, dengan dibuatnya UU Kewarganegaraan Myanmar 1982, etnis Rohingya resmi dideklarasikan sebagai warga asing di Myanmar. Hal tersebut kemudian membuat berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM terjadi pada etnis Rohingya dengan tujuan untuk mengusir keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Kasus pelanggaran HAM yang telah termasuk dalam tindakan genosida yang terjadi pada etnis Rohingya membuat OHCHR sebagai bagian dari badan HAM PBB mengambil peran dalam penyelesaian kasus tersebut. Adapun peranyang dilakukan OHCHR, dilakukan melalui fungsi inisiator, fasilitator, dan mediator.<sup>124</sup>

Seperti dikemukakan Abdullah Idi:

"In Burma (Myanmar), for instances, where there is insurgency by ethnic group against ethnic Karen and Shan ethnic Burmes who constitute the majority in Burma. Earlier, at the time of British colonialism in Burma, ethnic minorities such as the Karen and Shan obtain protection through the regulation of Burmese domination in the period. However, the Burmese nationalist movement successes in outsting the Bristish colonization and won independence, but on behalf of the Burmese as the identify of the ethnic character of the country Burma. It is seen by the government policy that requires use Burmese language, embracesd Buddhism or application of culture related to Burmese character. This then makes the Karen and Shan

<sup>123</sup>John Frank Cady, *A History of Modern Burma*, Cornell University Press, Michigan, 2008, hal 12.

<sup>124</sup>Dewi Asriyani, 'Peran Office of the Hight Commisioner for Human Right dalam penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar (1978-2012)', *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013, 1 (2): 42-50.



ethnic groups and separatist rebellion. This rebellion emerged as a form of consciousness as a minority who feel threatened by the ethnic majority. The thing that made the government of Burma itself is using the military as an instrument to overcome the insurgency. But, apparently, the military is not the best solution to resolve the ethnic related to socio-cultural character. The military as an instrument of government vulnerable to human rights violations that may have occurred and experienced by minorities.<sup>125</sup>

Perbedaan agama dan budaya antara etnis Rohingya dan etnis Burma yang mayoritas Buddha tersebut tentunya telah menyulitkan terjadinya proses integrasi sosial. Terkait hal tersebut, Peter M. Blau<sup>126</sup> menyebutkan bahwa suatu masyarakat dapat terintegrasi bila adanya suatu keadaan dalam konteks struktur sosial yang menunjukkan adanya kecenderungan parameter-parameter strukturalnya yang terinterseksi (*intersecting structural parameters*).

#### c) Kebijakan Migrasi Inggris

Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh tenggara.

Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Naramaikhla (1430-1434). Setelah

<sup>125</sup>Abdullah Idi, 'Conflict Ethnic Minorities in Asia: Cases of Ethnic Muslim Minorities Myanmar, Cambodia, Philippine, Thailand, China, and Indonesia', *Proceeding International Seminar: Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to the Development of Islam at Southeast Asia*, Palembang, 10-11<sup>th</sup> November, 2014., Academic Center Building UIN Raden Fatah Palembang, 2015, hlm. 98.

<sup>126</sup>Peter M. Blau, *Inequality and Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structure*. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., New York, page. 249-251.

dibuang ke Bengal, Naramekhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Naramekhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan, Rakhine. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58 ribu orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun ini pulalah mulai timbul konflik dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Bertambahnya jumlah penduduk migran membuat penduduk lokal khawatir<sup>127</sup>

Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "*rahma*" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "*rogha*" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruhadi Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya. Dengan demikian, lepas dari apakah Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau tidak? Sudah jelas bahwa Rohingya merupakan komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak

---

<sup>127</sup>Abdullah Idi, 'Conflict Ethnic Minorities in Asia...', *op.cit.*

mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Jadi, kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.

Sentimen antimuslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali. Ketika Myanmar merdeka pada 1947, etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan Kolonial Inggris. Selama PD II, etnis Rohingya pun setia kepada Inggris yang menjanjikan mereka negara muslim sendiri. Karena itulah etnis Rohingya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi.<sup>128</sup> Sampai sekarang, etnis Rohingya tidak mempunyai kartu identitas yang sah. Mereka tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Dari penjelasan mengenai konteks sosial Myanmar, khususnya negara bagian Rakhine, terlihat bahwa identitas agama dan etnis dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi membuat masyarakat Myanmar rawan terhadap provokasi dan mobilisasi yang menggunakan isu identitas agama dan etnis. Masyarakat Myanmar ibarat rumput kering yang mudah tersulut api. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya konflik antara kelompok Buddha dengan kelompok Muslim di Rakhine yang cepat membesar dan melibatkan kekerasan massal.

---

<sup>128</sup>Beril Lintner, *Burma in Revolt: Opium and insurgency since 1948*, Westview Press, California, 1994, hlm. 34

b. *Core of Conflict*

*Core of Conflict* (akar konflik) biasanya bertalian dengan suatu tingkat *social deprivation* (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*). Bertalian dengan konflik etnis Rohingnya dan Budha-Rakhine, ada beberapa akar konflik yang patut dijelaskan sebagai berikut.

a) Diskriminatif Pemerintah Myanmar

Kelompok Muslim minoritas ini hingga saat ini tetap menjadi korban diskriminasi dan pemerasan di Myanmar. Diskriminasi pada warga Islam ini secara nyata terbukti dengan penolakan pemerintahan Presiden Thein Sein atas status etnis tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini belum mengakui etnis Rohingnya sebagai warganya. Pemerintah menganggap Rohingnya sebagai migran ilegal dari Bangladesh. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperkirakan 800.000 Rohingnya hidup di negara bagian Rakhine di sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh.<sup>129</sup> Ribuan orang mencoba untuk melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, Malaysia dan tempat lain di kawasan itu. Mereka mencoba melarikan diri karena hak-hak mereka yang ditindas karena kerja paksa dan penindasan. Mereka ini tidak memiliki kewarganegaraan dan sangat rentan terhadap diskriminasi dan pemerasan. Permasalahan etnis Rohingnya sering menjadi sorotan media internasional mulai dari pengungsian besar-besaran ke Bangladesh hingga insiden tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand. Kini, terjadi konflik sektarian yang sangat mencemaskan antara etnis Muslim Rohingnya dan penganut Budha di negara bagian Rakhine. Tidak seperti etnis lain yang setidaknya diakui warganegarannya oleh Myanmar, masyarakat Rohingnya dianggap sebagai penduduk sementara. Sebagai "orang asing", masyarakat Rohingnya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan

---

<sup>129</sup><http://jaringnews.com/internasional/asia/25719/kasus-rohingya-lebih-buruk-dari-apartheid-afrika-selatan-pada-an> (Diakses 25 Juli 2017).

masyarakat Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Mayoritas, sekitar 53 juta, penduduk Myanmar beragama Bud-dha, dan sisanya adalah minoritas Kristen (2,9 juta), Muslim (2,27 juta), dan sekitar 300 ribu Hindu. Tetapi, Muslim Rohingya secara berulang diperlakukan sewenang-wenang selama sejarah Burma. Para pengamat menganggap pembunuhan itu telah berlangsung secara sistematis dan dilembagakan sepanjang sejarah Burma. Muslim Rohingya – yang terdiri dari berbagai etnis, India, Banglades, Cina, Arab, Persia dan Burma sendiri – tampaknya selama ini dianggap punya 'dosa besar', yakni karena mereka adalah pekerja keras, sehingga banyak yang berhasil dalam perdagangan dan di dunia pendidikan.

Etnis yang terletak di Myanmar Utara ini terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer dan di wilayah Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal dari golongan etnis Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya. Pemerkosaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim bagi etnis Rohingya di Myanmar. Tentara Myanmar kerap kali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat Rohingya juga mengalami penyiksaan secara religi. Hampir seluruh masyarakat Rohingya adalah beragama Islam. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 12 Masjid di Arakan Utara dihancurkan, dengan jumlah terbesar pada tahun 2006. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid. Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering bertugas ke daerah-daerah krisis kemanusiaan mengatakan bahwa perlakuan rezim Burma terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya, disebut-sebut "seburuk-buruk perlakuan terhadap kemerdekaan manusia". Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Valerie Amos, menyatakan bahwa Rohingya dipandang sebagai salah satu komunitas paling tertindas di dunia.<sup>130</sup>

<sup>130</sup><http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb-bahas-isu-kewarganegaraan-etnisrohingya-di-burma/1560024.html> (diakses: 24 Juli 2017).

Seperti diketahui bahwa prasangka (*prejudice*) pada suatu masyarakat pada prinsipnya tidak dapat dihindari. Hanya saja frekuensi prasangka yang rendah terhadap etnis minoritas migrant tertentu berpengaruh positif terhadap proses integrasi sosial antaretnis, yang dalam hal ini antara etnis minoritas migran dengan etnis mayoritas pribumi. Peter M. Blau<sup>131</sup> mengatakan bahwa keadaan masyarakat yang pluralistik akan mendorong individu untuk berinteraksi dengan individu lain di dalam kelompoknya. Dengan kata lain, keadaan tinggi atau rendahnya frekuensi prasangka dalam masyarakat pluralistik-multietnis merupakan aspek atau jaringan sosial yang dapat mengindikasikan terjadinya penguatan integrasi sosial.

b) Migran tanpa Warga Negara

Etnis Rohingya (dibawa Inggris) dan datang dari Afghanistan, merupakan turunan para tentara (bayaran) feodal Inggris, untuk melawan perjuangan rakyat India merebut kemerdekaan. Mereka adalah para pemberani yang dibayar untuk melawan rakyat India. Ketika Bangladesh berdiri sebagai Negara Merdeka, etnis-etnis tersebut masih belum banyak berubah, bahkan ditolak oleh Bangladesh sebagai bukan warga asli Bangladesh; mau kembali ke Afghanistan, terlalu jauh untuk melangkah, dan tak mungkin untuk dilakukan. Akibatnya, *mereka menjadi orang-orang tanpa Negara*. Sebagai etnis yang di tolak sana-sini, tentu saja mereka berharap bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, muncul sifat sensitif, sikap pasrah menerima keadaan; serta reaktif dan *perlawanan* terhadapapa dan siapa pun. Hal-hal itulah, yang kemudian menjadi akar konflik (dan kemudian meluas), sehingga menjadi konflik antaretnis; dan bersamaan dengan itu, karena Rohingya mayoritas Muslim, sedangkan pemerintah dan warga Myanmar mayoritas Budha, maka dijadikan sebagai konflik agama. Stewart Davies, juru bicara Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA PBB) di Burma, mengatakan bahwa Presiden Burma ketika itu, Thein Sein perlu menyelesaikan isu kewarganegaraan itu dengan cara yang positif dan memasukkan semua elemen

<sup>131</sup>Peter M. Blau, 'Inequality and Heterogeneity....', *op. cit.*, page 249-251..

masyarakat.<sup>132</sup> Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam *Al Jazeera*, 29 Juli 2012, pernah mengatakan bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok etnis Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.<sup>133</sup>

Sejak Myanmar merdeka pada 1947, etnis Rohingnya tidak diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan Kolonial Inggris. Selama PD II, etnis Rohingnya pun setia kepada Inggris yang menjanjikan mereka negara muslim sendiri. Karena itulah etnis Rohingnya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi.<sup>134</sup> Hingga kini, etnis Rohingnya tidak mempunyai kartu identitas yang sah. Mereka juga tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingnya sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka sebagai imigran gelap.

Kondisi ini tampak bahwa nasib Muslim Rohingnya terus mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap sebagai *illegal citizens*, dan di luar negara tidak diterima. Ribuan orang Muslim Rohingnya menjadi korban pembantaian. Tidak hanya itu, presiden Myanmar, Thein Sein melontarkan pernyataan kontroversial mengusir Muslim Rohingnya sebagai penyelesaian konflik bernuasa etnis dan agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka.

Dari data yang ada, pada 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter militer memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar.<sup>135</sup> Ketika itu ada undang-undang baru yang namanya *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Payung

<sup>132</sup><http://www.voaindonesia.com/content/pejabat-pbb-bahas-isu-kewarganegaraan-etnisrohingya-di-burma/1560024.html>, (Diakses: 29 Juli 2017).

<sup>133</sup>'Peranan Negara ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya', diakses: 30 Mei 2017.

<sup>134</sup><http://internasional.kompas.com/read/2012/11/17/18535480/Myanmar.Pertimbangkan.Hak.Etnis.Rohingya> (Diakses: 3 Agustus 2017).

<sup>135</sup>[http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=8937&type=13#.UL2ZNmfvzMw](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=8937&type=13#.UL2ZNmfvzMw) (Diakses: 27 Juli 2017).

## 132 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing. Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak, eksplorasi minyak dan gas bumi itu menjadi incaran bukan hanya Cina tapi juga AS. Apalagi Chevron leading bermain di situ, ada juga Petro China, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan lain. Reputnya rezim militer ini memproteksi lewat undang-undang *The Union of Myanmar Foreign Investment Law*. Cina dan beberapa negara yang diluar AS dan Eropa Barat kelihatannya lebih unggul, sementara AS ketinggalan.

Menurut catatan sejarah, penderitaan etnis Rohingya dimulai sejak 1978. Yaitu, ketika ada 300 ribu jiwa etnis Rohingya yang dipaksa mengungsi dari negerinya ke Bangladesh dan terlunta bertahun-tahun. Sejak 1991-1992, terjadi eksodus gelombang berikutnya. Tak hanya ke Bangladesh, gelombang eksodus juga terjadi ke negara Asean lainnya.<sup>136</sup> Namun, seringkali mereka tidak diterima oleh negara tujuan dan menjadi manusia perahu. Puluhan ribu dari mereka tewas dan banyak lagi mengungsi akibat kekejaman yang dipertontonkan oleh umat Budha dan pemerintah junta Myanmar. PBB sendiri menyebut Muslim Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia.

### c) Populasi Penduduk dan Ekonomi

Penduduk Rohingya merupakan sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

---

<sup>136</sup>[http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=10134&type=105#.UL2XIWfvzMw](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=10134&type=105#.UL2XIWfvzMw), (Diakses: 29 Juli 2017).



Siegfried O Wolf mengungkapkan bahwa komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksplorasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antarkedua kelompok. Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat yang ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha.<sup>137</sup>

Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat di mana hal tersebut telah menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan terhadap etnis minoritas Rohingya. Keberadaan etnis Rohingya dianggap 'kerikil dalam sepatu' yang seakan keberadaannya terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap dapat mengurangi hak atas lahan dan ekonomi di Myanmar, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti lain, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar, dan dianggap sebagai pendatang ilegal. Pelanggaran atau perilaku diskriminatif terhadap etnis Rohingya, antara lain: tidak diberi izin usaha; diberikan pajak yang tinggi dan berlebihan, bila pajak tidak mampu dibayarkan maka lahan pertanian, tambak, properti apa pun yang mereka miliki akan disita; khusus bagi etnis Rohingya yang terkonsentrasi di Rakhine Utara diperlukan izin untuk keluar dari otoritas lokal; mereka juga dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan dieksplorasi sebagai pekerja paksa; tidak diberikan

---

<sup>137</sup> Apa sebenarnya penyebab Myanmar menindas Muslim Rohingya? Senin, 21 November 2016 Reporter: Septian Tri Kusuma, Ramadhian Fai 2017(dillah).<sup>9</sup>REUTERS/Soe Zeya Tun (Diakses: 30 Mei 2017).

## 134 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

akses untuk memperoleh pendidikan; sulit memperoleh izin perkawinan; sering pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya; sering dihukum tanpa melakukan pelanggaran yang pasti dan tanpa melalui proses peradilan.<sup>138</sup>

### c. *Fuse Factors*

#### a) *Sentimen Etnis*

Sebagai *fuse factor* bertalian dengan adanya sentimen etnis dan agama. Sekitar 53 juta jiwa penduduk Myanmar beragama Buddha, Kristen (2,9 juta), Muslim (2,27 juta), dan sekitar 300 ribu Hindu. Bedanya, Muslim Rohingya sering kali mengalami perlakuan sewenang-wenang dalam sejarah Burma, dan terkesan berlangsung secara sistematis dan dilembagakan. Muslim Rohingya—yang terdiri dari etnis, India, Banglades, Cina, Arab, Persia dan Burma sendiri—tampaknya selama ini dianggap punya 'dosa besar', yakni karena mereka adalah pekerja keras, sehingga banyak yang berhasil dalam perdagangan dan di dunia pendidikan.<sup>139</sup>

Data penduduk dalam versi lainnya, bahwa etnis Muslim Rohingya berjumlah 20% dari total penduduk Myanmar yang berjumlah 55 juta jiwa. Mereka menempati Provinsi Arakan. Provinsi ini merupakan bagian dari negara Muslim sejak abad ke-7 M dibawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang tahun 1430-1784 M, kaum Muslim memimpin negeri ini. Tahun-tahun setelahnya, raja Burma menduduki wilayah Arakan. Sejak itulah wilayah Arakan yang tadinya damai menjadi penuh pergolakan dan mencekam. Kasus-kasus pembunuhan terhadap Muslim Rohingya terus dilakukan, harta kaum Muslimin dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara. Pada tahun 1842, Inggris menduduki wilayah ini dan memasukkan Arakan ke negara Persemakmuran Inggris-India. Pada 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Buddha. Supaya Muslim terkuasai, umat Buddha diprovokasi untuk menindas Muslim

---

<sup>138</sup>'Peran Negara ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya', diakses: 30 Mei 2017.

<sup>139</sup>'Peran Negara ASEAN Dalam Penyelesaian ....', diakses: 30 Mei 2017.

Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai Buddha dan pada tahun 1942 penyerangan terhadap Muslim Rohingya dilakukan kembali.<sup>140</sup>

#### b) Tindakan Diskriminatif

Diskriminasi yang paling menonjol yang dilakukan pemerintah Myanmar adalah dengan menolak mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya dan mengklasifikasikan mereka sebagai *illegal imigrants*, padahal mereka telah tinggal di negeri itu selama beberapa generasi. Lembaga Hak Asasi Manusia PBB mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan sektre di Rakhine. PBB meminta pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan konflik sebagai alasan mengeluarkan minoritas Muslim Rohingya dari negara mereka. Permasalahan etnis Rohingya sering menjadi sorotan media internasional mulai dari pengungsian besar-besaran ke Bangladesh hingga insiden tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand. Hingga kini, terjadi konflik sektarian yang sangat mencemaskan antara etnis Muslim Rohingya dan penganut Budha di negara bagian Rakhine. Sentimen anti-Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali.<sup>141</sup>

Isu yang bersifat mendasar, konflik di Rakhine yang berulang dan berkepanjangan tersebut sebetulnya merupakan puncak gunung es dari serangkaian kebijakan diskriminatif Pemerintah Myanmar sejak tahun 1962. Proses diskriminasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui pemisahan tempat tinggal warga Muslim dengan warga mayoritas Buddha, perampasan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan untuk tidak memberikan status warga negara bagi orang Muslim Rohingya. Mereka harus membayar ketika ingin mengunjungi desa tetangga, tidak diizinkan melakukan perjalanan untuk lebih dari tiga kota, dan dibatasi

<sup>140</sup> <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/1208/1199>, diakses: 25 November 2017.

<sup>141</sup> 'Peran Negara ASEAN Dalam Penyelesaian ...', *op. cit.*, (diakses: 30 Mei 2017).

aksesnya terhadap tingkat pendidikan kedua dan ketiga, serta layanan-layanan publik lainnya (Robinson & Rahman, 2012).<sup>142</sup>

Tindakan diskriminatif Pemerintah Thailand ini lama-kelamaan mempengaruhi cara pandang orang-orang Buddha yang mayoritas terhadap orang Muslim yang minoritas di Rakhine. Akibatnya, terjadi stereotip-stereotip negatif terhadap mereka sehingga tindakan diskriminatif akhirnya dilakukan masyarakat Buddha pada umumnya. Oleh sebab itu, konflik komunal antara orang Buddha dengan Muslim Rohingya tampak berulang, seperti pernah terjadi pada 1978, 1992, 2001, 2012, 2013, dan hingga kini pun kondisinya belum kondusif dan sangat mungkin sewaktu-waktu konflik yang sama bisa berulang.<sup>143</sup> Pada tahun 2017 pun terjadi konflik di Rohingya, di mana polisi di Rakhine Myanmar menyerang penduduk Rohingya setelah sekelompok pemuda Rohingya menyerang pos keamanan yang menewaskan sejumlah polisi. Akibatnya ratusan ribu orang Muslim Rohingya harus mengungsi negara tetangga, terutama ke Bangladesh.

#### d. *Triggering factors*

##### a) Keberpihakan terhadap Fundamentalisme Buddha

*Triggering factors* merupakan peristiwa atau momentum di mana semua elemen diatas terakumulasikan sehingga melahirkan konflik sosial bernuansa etnis dan agama, antara etnis Rohingya yang beragama Islam dan etnis Rakhine beragama Buddha. Sehingga suatu peristiwa dan momentum dapat terjadi dalam bentuk pertengkaran atau perkelahian kecil antara dua individu (berbeda identitas) tentang suatu hal yang remeh atau jauh dari akar konflik, yang berfungsi menjadi pemicu bagi dimulainya suatu konflik yang berskala lebih besar. Terjadinya konflik etnis dan agama ini merupakan suatu akumulasi persoalan sosio-historis bertalian dengan diskriminatif terhadap etnis migran Rohingya sebagai minoritas etnis migran dan agama (Islam) yang dilakukan etnis mayoritas pribumi Myanmar

<sup>142</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine...', *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>143</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama...', *op. cit.*, hlm. 46.

(Rakhine). Selanjutnya, kebijakan elite-pemerintah Myanmar yang tidak memperlakukan etnis Rohingnya sebagai warga negara yang sah alias *illegal citizens* dengan tanpa memperoleh hak-hak seharusnya, bahkan dipandang sebagai ancaman bagi warga pribumi Myanmar dalam persaingan sosial-ekonomi misalnya telah mempersulit terciptanya rekonsiliasi yang diharapkan. Selain itu, diyakini pula bahwa buruknya keadaan beragam struktur sosial (ekonomi, politik, dan pendidikan) karena lemahnya kinerja pemerintah akan mempersulit pula dalam mewujudkan suatu perdamaian yang didambakan semua pihak elemen masyarakat.

Di sisi lain, tampak bahwa adanya sikap pemerintah Myanmar yang cenderung kurang mendorong rekonsiliasi, tetapi lebih mendukung kelompok fundamentalis Buddha. Umat Buddha di dunia bahkan mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar di mana pada 2014 Dalai Lama pernah meminta Umat Buddha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka, di mana dalai Lama membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi muslim dari serangan umat Buddha. Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingnya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan di Rohingnya. Nasib Muslim Rohingnya pun masih jauh dari kedamaian.<sup>144</sup>

#### b) Pemerksaan dan Pembunuhan

Pada isu pemicu (*trigger*), tindakan pemerksaan dan pembunuhan terhadap perempuan Muslim Rohingnya sering kali menyebabkan kemarahan masyarakat Rohingnya. Isu pemerksaan dan pembunuhan juga bisa dilakukan pihak oleh laki-laki Muslim Rohingnya yang sekanjutnya menyebabkan kemarahan warga Buddha Rakhine (Human Right, 2013). Pada tahap ini, kasus pemerksaan dan pembunuhan yang semestinya merupakan ranah kejahatan dan hukum

<sup>144</sup>Septian Tri Kusuma, 'Apa sebenarnya penyebab Myanmar menindas Muslim Rohingnya?' Senin, 21 November 2016 (Diakses: 27 Juli 2017).

## 138 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

sering kali diseret dengan memasukkan identitas agama. Jika saja kasus tersebut dapat dikelola sebagai hanya benar-benar kasus kejahatan tanpa embel-embel 'perempuan Muslim' atau 'perempuan Buddha' dan 'laki-laki Muslim' atau 'laki-laki Buddha', mungkin setiap kejadian tidak akan mengeskalasi konflik dan kekerasan komunal.<sup>145</sup>

Pada isu yang bersifat akselerator, sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Rakhine tahun-tahun sebelumnya, sudah ada perdebatan antarkelompok terkait isu orang-orang Muslim Rohingya tentang apakah etnis asli Myanmar atau bukan. Kelompok pro-Rohingya mengatakan bahwa mereka merupakan penduduk asli Myanmar yang sudah menempati wilayah Rakhine jauh sebelum era-kolonial Inggris. Mereka berpandangan etnis Rohingya harus dicatat sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar dan diberi hak kewarganegaraan. Disisi lain, pemerintah Thailand dan kelompok anti-Rohingya yang lebih besar kekuatannya mengatakan bahwa orang Rohingya tidak pernah menjadi ras asli nasional di Myanmar, tetapi mereka adalah imigran dari Bengali yang datang setelah Perang Anglo-Burma pada tahun 1824. Sebagai imigran mereka tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan (Than & Thuzar, 2012).<sup>146</sup>

Kementerian Luar Negeri Malaysia<sup>147</sup> menyatakan bahwa kekerasan dan pembunuhan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar selama ini merupakan tindakan "pemusnahan etnis." Faktanya bahwa hanya satu etnis tertentu yang sedang didorong keluar (di Myanmar) dapat didefinisikan sebagai pemusnahan etnis. Praktik kekerasan ini harus dihentikan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Malaysia sebelumnya memang telah melayangkan protes keras terhadap kekerasan yang terus mendera etnis Muslim di Myanmar, khususnya etnis Rohingya. Warga Malaysia yang mayoritas beragama Muslim ini terus mengkritik upaya Myanmar yang dinilai masih minim dalam

<sup>145</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine....', *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>146</sup>Sandy Nur Ikfal raharjo, 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine....', *ibid.*, hlm. 46.

<sup>147</sup>Riva Dessthania Suastha & Riva Dessthania Suastha, 'Malaysia: Kekerasan terhadap Rohingya adalah Pemusnahan Etnis', *CNN Indonesia*, Senin, 05/12/2016. (Diakses: 30 Mei 2017)

menangani kekerasan di negara bagian Rakhine, salah satu wilayah di utara Myanmar di mana kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya banyak terjadi. Menurut Kemlu Malaysia, isu Rohingya, tak dimungkiri juga menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Malaysia. Pasalnya, sejak kekerasan serupa terjadi tahun 2012 lalu, ada peningkatan jumlah etnis Rohingya yang mengungsi dari Myanmar ke Malaysia dan negara tetangga lainnya, termasuk Bangladesh dan Indonesia. Tingginya jumlah pengungsi Rohingya yang mencoba melarikan diri ini menjadikan isu kekerasan di Myanmar itu menjadi "masalah internasional". Sebagai bentuk protes terhadap Myanmar, Negeri Jiran juga menggelar aksi unjuk rasa solidaritas membela etnis Muslim Rohingya yang dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Kabinet Malaysia juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam pembunuhan sistematis etnis Rohingya di Myanmar. Malaysia juga telah memanggil Duta Besar Myanmar untuk Malaysia terkait hal ini. Kritik kuat seperti ini jarang terjadi di antara negara ASEAN yang memiliki kebijakan non-intervensi sesama anggotanya. Pemerintah Myanmar menuding "teroris Rohingya" berada di balik serangan itu. Memang, ketika itu belum ada bukti yang jelas bertalian dengan tuduhan tersebut.

Sejak penyerangan itu, militer Myanmar meningkatkan pengawasan ketat dengan melakukan "operasi pembersihan" di wilayah Rakhine. Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta. *Reuters* melaporkan setidaknya 86 warga tewas dan 30 ribu lainnya melarikan diri akibat serangkaian aksi kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine sejak Oktober 2012 lalu. Lebih dari 1.000 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, juga ambruk dan hangus terbakar karena serangan militer di sana. Kekerasan sejak awal Oktober ini merupakan insiden berdarah terparah sejak bentrokan antara umat Buddha dan etnis minoritas Muslim Rohingya yang terjadi pada 2012 lalu. Insiden itu menewaskan ratusan orang.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup>*Ibid.*

## 140 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Konflik etnis Rohingnya dan Rakhine yang bernuansa agama itu, sesungguhnya lebih dominan disebabkan alasan politik dan ekonomi ketimbang alasan ajaran agama berbeda, antara ajaran Islam (Rohingya) dan Buddha (Rakhine). Posisi perbedaan agama sesungguhnya hanyalah sebagai *fuse factor*. Selain itu, buruknya kondisi sosial-ekonomi Myanmar pada umumnya, terutama tingginya angka kemiskinan di wilayah Rakhine, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta lemahnya *performance* pemerintah Myanmar bertalian dengan *cleant dan good government* (seperti terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme) secara akumulatif justru memang mempersulit terciptanya proses menuju rekonsiliasi dan perdamaian yang diharapkan.

Respons dan perlawanan etnis Muslim Rohingnya itu merupakan jawaban atas tindakan-tindakan diskriminatif yang dialami cukup lama, setidaknya sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948. Dalam hal ini, dapat dibagi kedalam duaperiode yaitu periode Junta Militer dan periode Transisi Demokrasi. Dalam perkembangannya, ternyata pada kedua periode tersebut terdapat perbedaan pola perlawanan. Adanya perbedaan perlawanan pada masing-masing periode didukung secara akumulatif terus dan dinamis terjadi pada tiap periode. Pada periode pertama yaitu zaman Junta Militer, respon yang dilakukan lebih kepada respon terhadap kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Burma-Myanmar. Pada masa ini, perlawanan yang dilakukan lebih ditujukan kepada pemerintah otoritas Burma-Myanmar yang kala itu dipimpin Junta Militer. Sedangkan respon pada periode yang kedua yaitu Transisi Demokrasi, lebih disebabkan oleh gesekan atau konflik horizontal yang terjadi seperti konflik anta etnis. Selain itu, masalah identitas dan budaya menjadi salah satu hal yang membuat terdapat perbedaan pola resistensi terutama saat periode Transisi Demokrasi. Sehingga faktor yang menyebabkan terdapat perbedaan kedua respon tersebut juga bisa terlihat dari masa atau situasi dalam negeri yang mendukung pada setiap periode. Perbedaan pola perlawanan juga diakibatkan oleh berubahnya sistem tatanan dunia yang ada. Sehingga terdapat perbedaan strategi maupun



perlawanan yang dilakukan. Hal ini juga diakibatkan adanya perbedaan kepentingan yang diusung oleh etnis Muslim Rohingya itu sendiri.

### 3. Konflik Etnis-Agama: Filipina

Konflik di Filipina Selatan merupakan konflik yang sangat tua dan klasik, berawal dari penolakan penduduk Mindanao terhadap upaya penjajahan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-15 Masehi. Selama masa penjajahan, Spanyol menerapkan politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan *mission secret* (misi suci) penyebaran agama Kristen terhadap orang-orang Islam yang berada di wilayah Mindanao dan Sulu. Spanyol dalam menjajah Filipina dengan sengaja menciptakan *image* yang buruk terhadap orang Muslim Filipina yang berada di Selatan. Spanyol menyebut orang Muslim itu dengan sebutan *Moor* (Moro), sebuah kata yang bermuatan unsur politis. Menurut Helmiati<sup>149</sup> kata Moor berasal dari bahasa Spanyol, Moor berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan *juramentados* (tukang bunuh). Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan. Muslim Moro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang menempati kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipina Selatan. Kawasan Filipina ditemukan pada tahun 1521 oleh seorang berkebangsaan Portugis bernama Ferdinand Magellan. Namun, baru tahun 1564 Filipina resmi dijadikan jajahan Spanyol. Spanyol menjajah Filipina selama kurun waktu lebih dari 3 abad (1564-1898).<sup>150</sup>

Selama penjajahan itu bangsa Spanyol telah berhasil mengkristenkan penduduk Filipina, kecuali penduduk Muslim Moro di wilayah Selatan yang beragama Islam. Selama masa penjajahannya di Filipina, Spanyol tidak dapat menguasai secara penuh wilayah Moro sebab orang-orang Muslim melakukan perlawanan secara gigih terhadap Spanyol yang ingin menjajah dan menyebarkan agama Kristen Katholik di wilayah itu. Upaya penaklukan wilayah Moro terus

<sup>149</sup>Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara*, Penerbit Suska Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 219.

<sup>150</sup>Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara...*, *ibid.*, hlm. 219.

## 142 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dilakukan oleh Spanyol sampai terjadinya perang Spanyol – Amerika Serikat tahun 1989, perang ini diakibatkan campur tangan Amerika Serikat atas isu politik terhadap negara jajahan Spanyol di Karibia dan Pasifik Selatan.<sup>151</sup> Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya kepulauan Sulu dan Mindanao tidak terlepas dari letak geografis Filipina yang strategis di sepanjang rute perdagangan dunia telah menarik Filipina secara perlahan masuk ke dalam rute perdagangan maritim internasional yang membentang dari Laut Merah hingga Laut Cina Selatan. Sejak abad IX hingga abad XVI Masehi, rute perdagangan ini dikuasai oleh para pedagang muslim. Sejak abad X para pedagang muslim singgah di Kalimantan (Borneo) dan memasuki abad XIII mereka mulai singgah di Sulu. Sejak saat itu para pedagang muslim sering singgah di kepulauan Filipina Selatan dan menyebarkan agama Islam sebelum melanjutkan perjalanan ke Utara menuju Cina. Mengenai tahun pasti kapan agama Islam masuk ke wilayah Filipina beberapa sejarawan berbeda pendapat mengenai hal itu, Abu Ibrahim Muhammad Daud (2008) dan John Gershman dalam Moeflich Hasbullah (2003) mengungkapkan bahwa Islam masuk ke wilayah Filipina pada tahun 1210 M, berbeda dengan pandangan John Gershman, menurut Salah Jubair (Heru Susetyo, 2008) sejarah keislaman orang Moro ada sejak tahun 1310 M dengan ditemukan bukti arkeologi berupa nisan yang merupakan seorang pemimpin Islam generasi awal di Mindanao.<sup>152</sup>

Pemberontakan di Filipina terjadi sejak awal kemerdekaan Filipina pada 1946. Terdapat berbagai kelompok pemberontak di Filipina. Salah satu kelompok yang gencar dalam melakukan perlawanan adalah etnis Muslim Moroyang mendiami Filipina Selatan tepatnya di Pulau Mindanao. Kelompok pemberontak Moro yang pertama terbentuk adalah *Moro National Liberation Front (MNLF)* pada 1969. Terbentuk karena perlakuan diskriminatif pemerintah Filipina atas muslim Moro. Etnis Moro merasa bahwa pemerintah

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Lihat: (Ibrahim Muhammad Daud, 'The Secret of Jihad Moro...', *op. cit.*, 2008, hlm. 6; Moeflich Hasbullah, 'Asia Tenggara Konsentrasi Baru...', 2003, *op. cit.*, hlm 238).

Filipina tidak pernah mengakomodasi kepentingan mereka, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah Islam. Justru pemerintah Filipina melakukan transmigrasi besar-besaran dengan mengirimkan penduduk Filipina bagian Utara yang beragama Katolik ke Pulau Mindanao. Serta kebijakan Asimilasi atas budaya Moro terhadap budaya Utara yang dipengaruhi ajaran Katolik. Sehingga, etnis Moro menjadi termarginalkan sebagai sebuah etnis dengan identitas agama dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Filipina Utara. Selain itu puncak kekecewaan Etnis Moro atas Filipina terjadi setelah Peristiwa 'Pembantaian Jabidah'. Yaitu pembunuhan 200 orang Muslim Moro oleh angkatan bersenjata Filipina. Mereka dibunuh karena melarikan diri dari kamp pelatihan militer yang dipersiapkan untuk merebut wilayah Sabah, Malaysia.<sup>153</sup>

Setelah pembantaian itu selanjutnya MNLF resmi melakukan perlawanan bersenjata. Konflik selanjutnya terjadi pada 1974 di kota Jolo, di mana Angkatan bersenjata Filipina melakukan pembunuhan terhadap 10.000 muslim Moro dan Cina. Kemudian ditandatangani Perjanjian Tripoli antara MNLF dan Filipina pada 1974. Namun tidak lama berselang kembali terjadi konflik bersenjata, dan berakhir pada sejumlah pembantaian oleh Angkatan Bersenjata Filipina terhadap etnis Moro, yakni Pembantaian 'Malisbong', Oktober 1977, Pembantaian "Pulau Pata" pada Februari 1981 serta masih terdapat banyak konflik yang berakhir pembantaian terhadap etnis muslim Moro oleh Filipina. Sebagai repons terhadap sejumlah pembantaian yang tetap dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Filipina, Syeikh Salamat Hashim mendirikan dari MNLF mendirikan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berideologi Islam pada 1977. Sehingga bertambah jumlah kelompok pemberontak di Filipina. Konflik yang berkepanjangan membuat MNLF sepakat berdamai dengan Filipina dengan mendapatkan status Otonomi Khusus Moro atas Mindanao Selatan dan beberapa pulau disekitarnya. Sementara MILF tetap melakukan perlawanan, Konflik Cotabo Utara (2000), Krisis Kota Zamboanga (2013) merupakan bukti MILF masih memiliki kekuatan.<sup>154</sup>

<sup>153</sup>Bintar Mupiza, 'Gambaran Konflik Separatisme di Philipine', diakses: 27 Juli 2017.

<sup>154</sup>Bintar Mupiza, 'Gambaran Konflik....', *ibid*.

## 144 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

### a. *Facilitating contexts*

*Facilitating contexts* bertalian dengan, antara lain:

#### a) Sentimen SosioHistoris

Dari perspektif sosiohistoris, di antara faktor-faktor menyebabkan munculnya konflik Muslim Moro bertalian dengan dampak dari penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Keduanya berupaya mengintegrasikan wilayah Morodengan Filipino. Seperti diketahui bahwa wilayah Filipina Selatan (Kepulauan Mindanao dan Sulu) sebelum kedatangan penjajah, sudah terlebih dahulu adanya agama Islam yang telah berakar di wilayah itu. Muslim Moro, ketika itu, telah memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi dan Muslim Moro telah memiliki sistem hukum dan politik yang diatur berdasarkan Syariat Islam.<sup>155</sup> Muslim Moro tidak pernah berhasil ditundukkan bangsa Spanyol selama 300-an tahun sebagai daerah koloninya. Mereka tetap bertahan dari pengaruh kebudayaan Spanyol dan agama Katholik hingga kini. Untuk menentang penjajahan Spanyol, orang Muslim Moro membangun armada-armada perahu dan bertindak sebagai pajak laut yang tangguh.<sup>156</sup>

Pascakemerdekaan Filipina<sup>157</sup> pada 4 Juli 1946, pemerintah Filipina menghadapi ancaman pemberontakan dari gerakan separatis Muslim di Mindanao Filipina Selatan dan Tentara Rakyat Baru (*New People's Army*) yang beraliran komunis. Perlawanan yang paling krusial bagi pemerintah adalah separatis Muslim Moro yang menyebabkan terjadinya konflik Mindanao. Adapun, faktor utama terjadinya konflik antara kelompok separatis Muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina adalah karena adanya sentimen masa lalu di mana secara sepihak wilayah Mindanao dimasukkan ke dalam wilayah kesatuan Filipina oleh kolonial Amerika Serikat.

---

<sup>155</sup>Helmiati, Helmiati, 'Dinamika Islam Asia Tenggara....', *loc.cit.*, hlm. 217.

<sup>156</sup>Mangandaralam, Syahbuddin. 1988. *Mengenal Dari Dekat Filipina Tanah Air Patriot Pujangga - Jose Rizal*, Remadja Karya CV, Bandung, 1988, hlm. 21-22.

<sup>157</sup>John Bresnan, *Krisis Filipina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya*. PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 7-8.

Penjajahan Amerika Serikat atas Filipina ternyata tidak sesuai harapan Amerika, daerah jajahan itu tidak dianggap sebagai *asset* yang berarti dibidang ekonomi. Keuntungan yang berhasil diperoleh dari investasi dijajahan Filipina sangat sedikit. Biaya pemerintahan tidak dapat sepenuhnya ditutupi dari pemasukkan pajak setempat, sementara biaya tersebut diperbesar oleh tambahan untuk biaya pertahanan militer. Singkatnya, Filipina secara ekonomis dapat dipandang sebagai merugikan bagi Amerika Serikat. Pada tahun 1934, melalui *Tydings McDuffie Act*, Amerika Serikat mengizinkan Filipina merdeka pada tahun 1944. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1935 untuk memilih Presiden *Commonwealth of the Philippines*. Pemilihan itu dimenangkan oleh Manuel L. Quezon dan kemudian sebuah pemerintahan Filipino dibentuk dengan dasar konstitusi Amerika Serikat. Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, antara tahun 1946-1972, Filipina terus menggunakan sistem dua partai seperti Amerika Serikat. Sebagai presiden pertama pasca kemerdekaan Filipina adalah Manuel Roxas, Manuel Roxas terpilih sebagai presiden dari partai Liberal mengalahkan lawan politiknya yaitu Osmena. Masa diawal-awal kemerdekaan Filipina, peranan Amerika Serikat sangat dominan dalam merekonstruksi kembali Filipina. Kemerdekaan Filipina tidak memiliki makna yang berarti terhadap masyarakat Moro, mereka tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan marjinalisasi seperti; kemiskinan, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan diwilayah Moro, bahkan tidak jarang diskriminasi telah mengarah kepada kekerasan militer. Seperti insiden Jabidah 1968 yang mempercepat ketegangan konflik Moro.<sup>158</sup>

Dampak dari penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat yang berupaya mengintegrasikan wilayah-wilayah Moro dengan Filipino. Telah diketahui Wilayah Filipina Selatan (Kepulauan Mindanao dan Sulu) sebelum kedatangan penjajah, sudah terlebih dahulu ada agama Islam yang sangat mengakar di wilayah tersebut. Pada saat itu, Muslim Moro telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi dan

---

<sup>158</sup>John Bresnan, 'Krisis Filipina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya....' *ibid.*, hlm. 7-8.

## 146 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Masyarakat Moro sudah memiliki sistem hukum dan politik yang diatur berdasarkan Syariat Islam.<sup>159</sup>

### b) Demografi dan Sentimen Keagamaan

Konflik di Filipina merupakan konflik yang telah terjadi begitu lama dan klasik. Hal ini berawal dari penolakan penduduk Mindanao terhadap upaya penjajahan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-15 M. Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan *mission secret* (misi suci) penyebaran agama Kristen terhadap orang-orang Islam yang berada di wilayah Mindanao dan Sulu. Spanyol dalam menjajah Filipina dengan sengaja menciptakan *image* yang buruk terhadap orang Muslim Filipina yang berada di Selatan. Spanyol menyebutkan orang Muslim Mindanao dengan sebutan *Moore* (Moro), yang merupakan kata yang bersifat politis. *Moore* berasal dari bahasa Spanyol yang berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan tukang bunuh (*juramentados*).<sup>160</sup>

Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami wilayah Filipina Selatan. Muslim Moro atau Bangsa Moro merupakan komunitas Muslim menempati kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipian Selatan. Kawasan Filipina ditemukan pada 1521 M oleh seorang berkerbangsaan Portugis bernama Ferdinand Magellan. Tetapi, baru tahun 1564 M Filipina resmi menjadi jajahan Spanyol. Spanyol menjajah Filipin selama 3 abad (1564-1898). Selama penjajahannya, Spanyol telah sukses mengkristenkan penduduk Filipina, kecuali penduduk Muslim Moro di wilayah Selatan Filipina. Selama masa penjajahannya, Spanyol tidak sukses untuk menguasai secara penuh wilayah Moro dikarenakan orang-orang Muslim Moro melakukan perlawanan terhadap Spanyol yang menerapkan misi Kristen Katholik di wilayah itu. Upaya penaklukan wilayah Moro terus dilakukan oleh Spanyol sampai terjadinya perang Spanyol-Amerika Serikat pada 1989, yang dikarenakan campur tangan Amerika

---

<sup>159</sup>Helmiati, *Dinamika Islam Asia Tenggara*, Penerbit Suska Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 217.

<sup>160</sup>Helmiati, 'Dinamika Islam Asia Tenggara....', *op.cit.*, hlm. 217.

Serikat atas isu politik terhadap negara jajahan Spanyol di Karibia dan Pasifik Selatan.<sup>161</sup>

Perlu dijelaskan bahwa Filipina merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 300.000 km<sup>2</sup> mayoritas penduduk beragama Katolik 83%, Protestan 9%, Islam 5%, dan 3 % beragama lain. Sentimen agama berupa adanya kebencian agama yang ditanamkan Kolonial Spanyol kepada etnis Kristen Filipino untuk memusuhi etnis Muslim Moro dan diskriminasi pasca kemerdekaan. Oleh pemerintah Pusat yaitu penghapusan hukum adat Moro dan pendekatan represif oleh pemerintah yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik ditandai dengan terjadinya aksi saling menyerang antara kelompok etnis Muslim Moro melawan pemerintah Pusat dan etnis Kristen Filipino sejak tahun 1960an yang berdampak pada kestabilan keamanan, jatuhnya banyak korban jiwa dan menghambat pembangunan sehingga membuat pemerintah menggunakan pendekatan akomodatif dengan menempuh jalur damai dengan kelompok separatis Muslim.<sup>162</sup>

#### c) Imperialisme Bangsa Kolonial

Sejarah konflik Filipina ditandai dengan kedatangan Negara-negara penjajah di Filipina seperti Spanyol, Amerika Serikat dan Jepang. Imperialisme Spanyol di Filipina berlangsung selama 350 tahun (1565-1898). Pada tahun 1565, Spanyol datang ke Filipina melakukan imperialisme dengan mendirikan koloni dan melancarkan misionarisme, namun ketika Spanyol melakukan upaya ekspansi kekuasaan dibagian selatan, mendapat perlawanan keras dari Muslim Moro. Kemudian, Amerika Serikat melanjutkan imperialisme di Filipina yang berlangsung selama 50 tahun (1898-1946). Pada masa pendudukan, Amerika mendirikan pemerintahan persemakmuran di Filipina. Selain itu, Jepang juga melakukan imperialisme di Filipina yang berlangsung selama 4 tahun (1941-1945). Dan pada masa pendudukan

<sup>161</sup>Riswanto, et al., 'Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968-1996 (Suatu Kajian Historis)', FKIP-Universitas Riau, hlm. 3, (diakses: 16 Januari 2018).

<sup>162</sup>Diana Anisa, 'Resiko Implementasi Perundangan Damai Moro Islamic Liberation Front dengan pemerintah Filipina (2012-2016)', *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (1) 277-292 ISSN 2477-2623, [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id). (diakses: 25 Juli 2017).

## 148 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Jepang terjalin persatuan antara kelompok Moro dan Kristen Filipino dalam mengacau Jepang. Setelah, Jepang berhasil dikalahkan oleh rakyat Filipina dengan bantuan dari Amerika, Filipina diberikan kemerdekaan oleh Amerika. Negara Filipina diproklamasikan sebagai Republik yang merdeka pada 4 Juli 1946. Namun, pemerintahan Filipina yang baru merdeka pada waktu itu ditandai dengan permusuhan antara kelompok Moro dengan kelompok Kristen Filipino sehingga terjadi beberapa peristiwa.<sup>163</sup>

### d) Kasus *Jabidah Massacare*

Pada 1934, melalui *Tyding McDuffie Act*, Amerika Serikat mengizinkan Filipina merdeka pada 1944. Pemilihan Umum selanjutnya dilaksanakan pada 1935 untuk memilih Presiden *Commonwealth of the Philipines*. Pemilihan Umum tersebut dimenangkan Manuel L. Quezon dan kemudian sebuah pemerintahan Filipina dibentuk dengan dasar konstitusi Amerika Serikat. Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada 1946. Antara 1946-1972, Filipina telah menggunakan sistem dua partai seperti halnya di Amerika Serikat. Presiden terpilih pertama pascakemerdekaan Filipina yakni Manuel Roxas yang berasal dari Partai Liberal mengalahkan lawan politiknya Osmena. Pada awal kemerdekaan Filipina, peranan Amerika Serikat sangat dominan dalam merekonstruksi kembali Filipina. Kemerdekaan Filipina kurang memiliki makna yang berarti terhadap bangsa Moro di mana mereka tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kriminalisasi dan marjinalisasi, sehingga berakibat berlanjutnya: angka kemiskinan, kesulitan memperoleh lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Moro. Diskriminasi dan kekerasan militer pun sering terus terjadi, sebagai contoh pada pemerintahan Presiden Marcos, terjadi insiden *Jabidah* 1968 yang mempercepat ketegangan dan konflik Moro.<sup>164</sup>

Pada masa rezim Ferdinand E Marcos tersebut, Maret 1968, terjadi peristiwa *Jabidah Massacare* yaitu pembunuhan terhadap 23 orang

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Riswanto, et al., 'Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina...', *op. cit.* hlm.7.



Muslim oleh pemerintah Filipina. Akibat ketidakadilan pemerintah terhadap Moro menyebabkan perlawanan Moro yang ditandai dengan terbentuknya MIM sebagai gerakan separatis pertama yang memperjuangkan aspirasi Bangsamoro secara legal dan damai, mendapat banyak dukungan dari rakyat Mindanao. Kemudian Pemerintah memberlakukan kebijakan *Martial Law* yakni operasi militer yang menargetkan masyarakat muslim Mindanao dan mempersenjatai Kristen Visayan, Illaga dan mengirim tentara-tentara untuk menyerang kelompok Islam yaitu *Blackshirt* dan *Barra-cuda*. Pertempuran ditandai dengan beberapa insiden: Insiden Upi yakni pembunuhan terhadap enam orang Islam pada Maret 1971 oleh penempat Visayan; Penyerangan *barrio-barrio* yakni pembunuhan dan pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Islam pada Juni 1971 oleh tentara Illaga. 70 orang Islam dibunuh di dalam masjid; Aktivistis Bangsamoro menyusun manifesto yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 1971 di *Manila Times*.<sup>165</sup>

#### e) Imperialisme Spanyol dan Amerika

Sentimen masa lalu yakni ketidakadilan kolonialisasi Spanyol dan Amerika<sup>166</sup> yang berpihak kepada kelompok Kristen Filipino dari pada kelompok Moro. Pada masa kolonialisasi, Spanyol mengambil alih secara paksa tanah Moro, melakukan tindak kekerasan, pembantaian, mengambil alih kekuasaan, menganak tirikan etnis Muslim dari etnis Kristen Filipino atau indio, dan berkerja sama dengan indio untuk memerangi Moro yang ditandai dengan terjadinya "Perang Moro. Kemudian, kekuasaan imperialisme beralih ke kolonial Amerika.

Kemenangan Amerika Serikat itu berarti berhasil memperoleh daerah jajahan baru. Melalui *Treaty of Paris* tahun 1898, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat termasuk wilayah Moro, Spanyol mengklaim wilayah Moro termasuk sebagai daerah jajahannya. Spanyol menjualnya kepada Amerika Serikat seharga 20 juta dolar

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Nadeak, Kustigar & Atmadji, *Revolusi Damai Rekaman Kemelut di Filipina*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 170.

## 150 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Mexico. Gagasan perjuangan masyarakat Moro untuk menuntut kebebasan dan kemerdekaan di Filipina telah berlangsung cukup lama, sejak zaman kesultanan-kesultanan di wilayah Filipina Selatan, baik ketika melawan penjajahan Spanyol ataupun penjajahan Amerika Serikat serta perjuangan gerilya melawan pemerintah pusat Filipina. Baru pada tahun 1968 dibentuk gerakan atau organisasi yang menyatukan kelompok Muslim dalam gerakan *Mindanao Independent Movement* (Gerakan Kemerdekaan Mindanao) yang didirikan dengan tujuan perjuangan menuntut kemerdekaan masyarakat Muslim Mindanao dari negara Filipina, yang dipimpin oleh Udtog Matalam. Dalam perkembangannya MIM melebur ke dalam gerakan perjuangan pembebasan Moro, yaitu MNLF (*Moro National Liberation Front*) terbentuk pada pertengahan tahun 1971 yang diprakarsai oleh Nur Misuari, sebagai akibat dari tragedi Jabidah di Pulau Corregidor pada 18 Maret 1968 yang merenggut nyawa 180 orang Muslim.<sup>167</sup>

Nur Misuari<sup>168</sup> berpandangan bahwa konflik Moro merupakan konflik yang bersifat rasial karena terjadi politik genosida terhadap komunitas muslim. Konflik di Filipina Selatan telah menempatkan Muslim Moro menjadi korban utama dari kebijakan pemerintah Filipina, sehingga Nur Misuari mengajak kepada komunitas Islam untuk memperhatikan persoalan tersebut secara serius. Nur Misuari juga meminta kepada seluruh *datu* di Mindanao untuk bersatu padu guna mendesak pemerintah Filipina untuk menghentika *genosida*, diskriminasi, marjinalisasi masyarakat Muslim di Filipina Selatan dengan mengeluarkan Manifesto Moro yang kemudian menjadi embrio lahirnya Organisasi Pembebasan Moro (*Moro Nation Liberation Front*).

### d. *Core of Conflict*

#### a) Kebijakan Imigrasi Kristen ke Mindanao

Pada masa kolonialisasi, Amerika melakukan imigrasi secara besar-besaran etnis KristenFilipino utara dan tengah ke Pulau

---

<sup>167</sup>Nadeak, Kustigar & Atmadji, 'Revolusi Damai Rekaman Kemelut...', *ibid.*, hlm. 170.

<sup>168</sup>Riswanto, et al., 'Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina...', *loc. cit.*, hlm.4.

Mindanao dan Kepulauan Sulu, Hal tersebut sebagai upaya untuk memminoritaskan rakyat Moro yang merupakan pemilikan tanah Mindanao. Hal ini menunjukkan bahwa Moro menjadi minoritas di tanah sendiri. Kemudian, kolonial Amerika, menerapkan sistem pendidikan Barat sekuler yang bertentangan dengan sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh Bangsa Moro. Pada masa transisi kemerdekaan, Amerika Serikat mendukung Filipina untuk secara administratif menggabungkan wilayah Mindanao ke dalam kesatuan wilayah Filipina tanpa memberitahu pihak Moro. Atas hal tersebut, Moro mengajukan petisi dan Amerika Serikat tidak menerima petisi yang diajukan Moro agar wilayah Mindanao tidak dimasukkan dalam wilayah Filipina, yakni petisi masyarakat Sulu, *Zamboanga Declaration* dan *Dansalan Declaration*.<sup>169</sup>

Sentimen agama yang ada antara Kristen Filipino dengan Moro terjadi karena adanya doktrin agama oleh Spanyol kepada Indio. Kristen Filipino melakukan penyerangan kepada Muslim Mindanao karena motif Agama yang didoktrin oleh Spanyol untuk melakukan pelayanan agama yang tercermin dari perang salib abad pertengahan dan Presiden Manuel Quezon menghapuskan hukum Muslim Moro dengan menerapkan undang-undang nasional sebagai upaya doktrinisasi. Sentimen agama ini terus berlanjut hingga kini.

#### b) Diskriminasi Hukum dan Marginalisasi

Selain adanya sentimen masa lalu dan sentimen agama, konflik juga disebabkan karena diskriminasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina pasca kemerdekaan, di antaranya adalah sebagai berikut: Pemberlakuan hukum positif Filipina yang menghapuskan hukum Islam dan hukum adat Moro; Undang-Undang Agrarian seperti Akta Tanah 1902, Akta Komisi Philipina No. 718 dan Akta Tanah Umum 1903 yang mengatur tata pengelolaan pemilikan tanah yang baru. UU Agraria tersebut menyatakan pembatalan terhadap bukti kepemilikan tanah yang didasarkan kepada hukum adat Moro; Pada masa Rezim Ferdinand E Marcos, Maret 1968, terjadi

<sup>169</sup> *Ibid.*

## 152 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

peristiwa *Jabidah Massacare* yaitu pembunuhan 23 orang Muslim oleh pemerintah Filipina; dan Kebijakan *Martial Law* pada tahun 1972. Undang-undang darurat perang yang menargetkan Bangsa Moro. Karena besarnya reaksi terhadap pembunuhan Jabidah.

### c) Kesulitan Pekerjaan dan Penghidupan

Heru Susetyo<sup>170</sup> mengungkapkan bahwa kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan penyebab permasalahan masyarakat Moro. Penduduk Muslim sukar mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah maupun di pertanian umum, hanya karena mereka muslim. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan juga jelaskan Erni Budwanti<sup>171</sup> sejumlah perusahaan dan industri yang dikembangkan oleh pemerintah dan swasta. Misalnya, perusahaan baja nasional menyerap pekerja-pekerja non Muslim dari Luzon dan Visayas. Erni Budiwanti mengatakan diskriminasi dan tekanan juga terlihat dari perubahan pemakaian tanah-tanah Moro, banyaknya tanah-tanah Moro digunakan untuk pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara Filipina, seperti jalan raya, gedung perkantoran, daerah perdagangan, pembangkit listrik, dan kawasan industri lainnya. Penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat Moro seringkali dilakukan untuk kepentingan pembangunan.

### e) Implementasi Otonomi Khusus

Implementasi pemerintahan otonomi khusus pada akhirnya berpotensi mengakibatkan disintegrasi Bangsa. Adapun beberapa resiko implemementasi otonomi khusus Bangsamoro seperti terjadinya konflik yaitu: 1) potensi konflik antaretnis, di mana otonomi khusus yang bernuansakan etnisitas dalam hal ini etnis Moro sebagai basis dari pemerintahan otonomi khusus yang mendapatkan hak eksklusif sebagaimana dalam pasal 2 dan 9 dalam BBL, akan memicu timbulnya

---

<sup>170</sup>Heru Susetyo, *The Journal of a Muslim Traveler, Sebuah Jurnal Melintasi Asia, Amerika, Eropa, dan Australia*. Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2009, hlm. 15.

<sup>171</sup>Eni Budiwanti, *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina : Gerakan Separatis Mor*, 2003, hlm. 83.

konflik etnis di Mindanao antara Moro, Lumads dan Kristen Filipino yang disebabkan karena adanya arogansi, kecemburuan, sentimen dan kepentingan dari masing-masing etnis di Mindanao; 2) Potensi terjadinya konflik internal kelompok Moro dan kelompok Kristen Filipino karena tidak semua dari kalangan Muslim maupun Kristen dapat menerima kesepakatan damai; 3) terjadinya penolakan penerapan sistem Peradilan Syariah darikalangan Kristen Nasionalis oleh karena melanggar prinsip konstitusi pemisahan Gereja dan Negara, kekhawatiran tidak adanya inklusifitas karena Bangsa Moro sebagai basis dari pemerintahan Bangsa Moro; 4) potensi terjadinya korupsi karena luasnya kewenangan keuangan dan ekonomi yang dimiliki pemerintah otonom dan menyebabkan lemahnya kewenangan pemerintah pusat; 5) Kerugian bagi pemerintah Pusat Filipina karena berkurangnya pendapatan daerah yang disebabkan pembagian yang sedikit dari hasil pengelolaan sumber daya alam sementara Pusat harus memberikan dana yang besar ke daerah otonomi khusus; 6). Wilayah otonomi khusus yang terdiri dari beberapa kelompok yang saling berperang dapat beresiko terjadinya pertarungan politik dan sindrom kekerasan menjelang penyelenggaraan PILKADA di Mindanao yang dilihat dari konflik-konflik yang telah terjadi antara etnis Moro-etnis Kristen Filipino maupun antarklan.<sup>172</sup>

### c. *Fuse Factors*

#### a) Ketimpangan Ekonomi dan Sumberdaya

Sebenarnya bila dicermati lebih lanjut, konflik Muslim Moro dengan penguasa (pemerintah Filipina), dipengaruhi oleh sikap dan tindakan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Sikap dan tindakan pemerintah dapat dilihat dari pola-pola kebijakannya. Melihat kasus konflik yang terjadi di Filipina tersebut, latar belakang timbulnya konflik tidak hanya sekadar faktor sejarah saja, melainkan juga sikap dan kebijakan penguasa yang tidak adil terhadap wilayah Muslim Moro.

Dijelaskan oleh Caesar Adib Majul<sup>173</sup>terkait masalah Moro berdasarkan berbagai laporan Komite Senat telah menekankan, bahwa

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Caesar Adib Majul, *Dinamika Muslim Filipina*, LP3ES, Jakarta 1989, hlm.34.

masalah-masalah di Cotabato disebabkan oleh besarnya gelombang kaum penetap dari provinsi-provinsi lain, dan akibat kegagalan pemerintah dalam membantu orang-orang Islam meningkatkan produktivitas mereka. Misalnya, sebuah laporan Senat mengungkapkan bahwa sampai 1971, di daerah-daerah yang terutama terdapat populasi Islam, disana tidak terdapat proyek-proyek irigasi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa di daerah-daerah yang orang Islamnya telah menjadi minoritas, tidak ada orang-orang Islam yang dapat dipilih untuk jabatan-jabatan politik. Disisi lain ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat pada pendapatan per kapita wilayah Muslim. Angka kemiskinan di wilayah muslim Moro tampak menunjukkan sangat tinggi.

### b) Otonomi Khusus dan Separatisme Baru

Otonomi khusus yang bernuansa etnisitas ini juga berpotensi munculnya separatisme baru di Mindanao yang berangkat dari pemekaran yang dapat memicu pada terbentuknya separatisime untuk menuntut pemisahan diri diwilayah Mindanao dan Kesultanan Sulu yang berpotensi menjadi separatis baru karena wilayah leluhurnya terancam oleh kesepakatan damai antara MILFFilipinayang difasilitasi oleh Malaysia akan menghapuskan wilayah Sulu dari kesatuan Filipina, sehingga dapat dimiliki oleh Malaysia. Selain itu, dapat menyebabkan konflik antardaerah yang ditimbulkan dari kecemburuan dari daerah lain dan dapat menjadi pemicu bangkitnya separatis bernuansa komunis di Tenggara yang dilakukan oleh CCP (*Communist Central Party*) untuk menuntut hal yang sama atau bahkan kemerdekaan kepada pemerintah pusat. Implementasi otonomi khusus mendapat hambatan dari kelompok penentang yang berusaha untuk menggagalkan perdamaian yaitu dari kalangan konservatif dari Kristen Filipino maupun separatis Muslim Moro. Lebih dari semua resiko yang ada, hal yang paling ditakutkan pada implemtasi pemerintahan adalah dapat berpotensi memicu Bangsa Moro untuk menuntut kemerdekaan penuh di Mindanao mengingat luasnya cakupan otonomi yang diberikan.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid.*

*Fuse factor* ini memang sudah ada di sana, walaupun tidak dengan sendirinya 'menyala' menjadi konflik jika tersulut atau disulut. Tetapi, sumbu konflik sudah tampak berupa sentimen suku, agama, politik, ekonomi, budaya, peperangan, yang dalam beberapa hal memang sedang berlangsung. *Triggering factors* merupakan momentum di mana semua elemen diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial etnis dan agama di Mindanao yang mungkin dalam skala lebih kompleks. Momentum juga bisa terjadi hanya karena suatu hal yang sebetulnya remeh atau jauh dari akar konflik sesungguhnya, tetapi berfungsi menjadi 'pembenar' dimulainya suatu konflik berskala dalam skala lebih besar.

### c) Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Filipina

Sebagai respon masyarakat Moro atas kebijakan pemerintah Filipina yang tidak menguntungkan mereka. Maka masyarakat Moro mendirikan gerakan-gerakan perlawanan untuk menuntut pemisahan dari negara Filipina dan membentuk negara sendiri. Gerakan-gerakan Muslim Moro di Filipina Selatan, antara lain:

#### 1) *Mindanao Independent Movement*/Gerakan Kemerdekaan Mindanao

Gerakan Muslim Moro pertama kali didirikan di Filipina Selatan khususnya wilayah Mindanao dan Sulu yaitu MIM (*Muslim Independent Movement*) yang kemudian berubah nama menjadi *Mindanao Independent Movement*. Gerakan MIM ini didirikan Datu Udtog Matalam pada 1 Mei 1968. Tujuan dari berdiri organisasi MIM adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bagi Mindanao dan Sulu. Latar belakang berdirinya *Mindanao Independent Movement (MIM)* di tahun 1968 tidak terlepas dari peristiwa pembantaian Jabidah pada 18 Maret 1968, pada masa presiden Ferdinand Marcos. Tragedi Jabidah merupakan titik awal lahirnya gerakan kemerdekaan bagi masyarakat Moro, yang kemudian diikuti oleh organisasi *Moro National Liberation Front (MNLF)*, dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup>Cesar Adib Majul, 'Dinamika Muslim Filipina....', *op. cit.*, hlm.43.

2) *Moro National Liberation Front*/Front Pembebasan Nasional Moro

MNLF adalah suatu organisasi perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Moro di Filipina Selatan. Proses berdirinya MNLF menjadi 9 organisasi perjuangan Moro tidak terlepas dari berbagai bentuk diskriminasi rakyat Moro terlebih akibat dari Pembantaian Jabidah. MNLF merekrut para anggotanya dari beberapa kelompok etnis seperti etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggota pertamanya terdiri dari golongan pemuda yang berlatar belakang dari pendidikan sekuler, pemuda tersebut mendapat pelatihan militer di Malaysia. Seperti Nur Misuari, pemimpin MNLF, anak-anak muda ini pada umumnya berlatar belakang pendidikan sekuler, dan beberapa orang diantaranya pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa beraliran kiri.<sup>176</sup> *Moro National Liberation Front* (MNLF)/ Front Pembebasan Nasional Moro adalah suatu organisasi perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Moro yang berada di Filipina Selatan. Proses berdirinya MNLF menjadi 9 organisasi perjuangan Moro tidak terlepas dari berbagai bentuk diskriminasi rakyat Moro terlebih akibat dari Pembantaian Jabidah. MNLF merekrut para anggotanya dari beberapa kelompok etnis seperti etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggota pertamanya terdiri dari golongan pemuda yang berlatar belakang dari pendidikan sekuler, pemuda tersebut mendapat pelatihan militer di Malaysia. Seperti Nur Misuari, pemimpin MNLF, anak-anak muda ini pada umumnya berlatar belakang pendidikan sekuler, dan beberapa orang diantaranya pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa beraliran kiri.<sup>177</sup>

MNLF didirikan, tujuannya adalah untuk menciptakan independensi kampung halaman Muslim Moro. Namun, di bawah tekanan negara-negara Islam, MNLF telah menerima opsi otonomi

---

<sup>176</sup>Moefflich Hasbullah (Editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2003, hlm. 241.

<sup>177</sup>Moefflich Hasbullah (Editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2003, hlm. 241.



dalam negara Filipina. Para pemimpin MNLF sekarang ini bekerja dalam pemerintahan wilayah otonom Muslim Mindanao.<sup>178</sup> Gerakan MNLF mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan baik berbentuk finansial maupun material dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Seperti pemimpin Libya kolonel Muammar Khadaffy, dan dari organisasi Islam OIC (Organisation of Islamic Conference)/ Organisasi Konferensi Islam (OKI). Menurut Erni budawanti (sejak tahun 1972 OKI sering membicarakan permasalahan Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan Negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muslim Moro. Tetapi, pada 1977-1978, dibalik adanya dukungan itu gerakan MNLF sebetulnya mengalami masa-masa kesulitan. MNLF sebagai induk perjuangan Moro akhirnya terpecah. *Moro National Liberation Front (MNLF)* dipimpin oleh Nur Misuari dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* dipimpin oleh Salamat Hashim.<sup>179</sup>

### 3) *Moro Islamic Liberation Front/ Front Pembebasan Islam Moro*

*Moro Islamic Liberation Front (MILF)* adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Moro yang bertujuan untuk membebaskan Islam, gerakan tersebut sangat berpengaruh di bagian Filipina Selatan terutama di kawasan Mindanao dan pulau-pulau lainnya. Lahirnya gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) tidak terlepas dari konflik intern yang pernah dialami MNLF. Faksi Salamat Hashim melihat perjuangan MNLF dirasakan kurang memenuhi aspirasi masyarakat Moro di Filipina Selatan, sebab MNLF telah mengadakan negosiasi damai dengan pemerintah Filipina, hal ini dirasa oleh faksi Salamat Hashim telah keluar dari tujuan utama dibentuknya MNLF yaitu, untuk mendirikan negara terpisah dari Filipina. Konsep-konsep jihad yang pada awalnya dibentuk oleh Salamat Hashim dengan Prof. Nur Misuari tentang bentuk sistem pemerintahan Islam, akan

<sup>178</sup>Moeflich Hasbullah (Editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru....*, *ibid.*, hlm. 241.

<sup>179</sup>Eni Budiwanti, *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa....*, *op.cit.*, hlm. 94.

tetapi dalam perjalanan gerakan MNLF mengalami kemunduran dan melemahnya konsep-konsep jihad yang sudah dibentuk. Karena banyak tawaran yang diterima oleh Nur Misuari dari pemerintah Filipina, walaupun dari segi *zhahir* tawaran tersebut menguntungkan orang-orang masyarakat Moro. Maka dari itu, Salamat Hashim memutuskan untuk memisahkan diri dari gerakan MNLF dan membentuk gerakan Islam yang dinamakan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).<sup>180</sup>

*Moro Islamic Liberation Front* (MILF) secara resmi didirikan tahun 1984, berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh anggota Komite Sentral yaitu Salamat Hashim yang keluar dari MNLF tak lama setelah gagalnya Perjanjian Tripoli tahun 1977. MILF mulanya disebut MNLF-New, kemudian tahun 1984 secara formal berganti menjadi MILF. Moeflich Hasbullah menerangkan bahwa MILF lebih menekankan pada persoalan-persoalan Islam, dan kebanyakan pemimpinnya adalah para sarjana Islam yang berlatar belakang agama dan aristokrat tradisional. MILF mengakui memiliki 120.000 para pejuang bersenjata dan tak bersenjata serta sejumlah besar simpatisan. Kebanyakan anggotanya berasal dari Manguindanao dan kelompok etnis Iranun, serta sebagian kecil dari etnis Maranao.<sup>181</sup>

Untuk mereduksi konflik Moro, pemerintah Filipina sebetulnya telah melakukan berbagai upaya politis, di antaranya, dengan melakukan perundingan dengan gerakan pembebasan Muslim Moro yang diwakili oleh MNLF:

1) *Tripoli Agreement 1976*. Seperti diketahui bahwa sebelumnya pemerintah Filipina memilih posisi tidak kompromi dengan gerakan rakyat Moro. Tetapi, atas desakan OKI akhirnya pemerintah Filipina melakukan perundingan dalam menyelesaikan konflik Moro. Atas bantuan Lybia, pejabat pemerintahan Filipina dan pimpinan MNLF melakukan negosiasi tentang kependudukan yang dikenal dengan nama *Tripoli Agreement 1976* (Perjanjian Tripoli 1976). Kesepakatan

<sup>180</sup>Daud, Abu Ibrahim Muhammad. 2008. *The Secret of Jihad Moro (Fakta-fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro*, Islamika, Bandung, 2008, hlm. 112.

<sup>181</sup>Moeflich Hasbullah (Editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam....*, *op. cit.*, hlm. 241-242.

Perjanjian Tripoli, selain gencatan senjata juga berisikan pembentukan pemerintahan otonomi di Filipina Selatan yang meliputi 13 provinsi: Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga de Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato Utara, Manguindanao, Sultan Kidarat, Lanao lataNorte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato Selatan, dan Palawan.<sup>182</sup>

2) *Jeddah Accord*. Perjanjian *Jeddah Accord* dilakukan sejak jatuhnya pemerintahan Marcos pada 1985. Sejak itu Corazon Aquino yang menggantikan Marcos, melakukan gencatan senjata dengan MNLF. MNLF dan pemerintah Filipina menandatangani perundingan Jeddah Accord di Jeddah, Arab Saudi pada Januari 1987. Hasil perjanjian menyatakan bahwa kedua belah pihak menyetujui proposal yang menjamin pelaksanaan otonomi penuh di Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Palawan, selain menyepakati gencatan senjata. Corazon Aquino selanjutnya membentuk komisi konstitusi untuk membuat undang-undang yang menjamin pelaksanaan otonomi bagi Muslim Mindanao melalui referendum.<sup>183</sup>

3) *Peace Agreement 1996*. *Peace Agreement*, seperti diungkapkan Moeflich Hasbullah<sup>184</sup>, merupakan perjanjian lanjutan sebelumnya. Perjanjian *Peace Agreement* ditandatangani antara Pemerintahan Fidel Ramos dan Pemimpin MNLF Nur Misuari. Tidak seperti Aquino yang menolak peran OIC dalam menyelesaikan konflik Moro, Fidel Ramos menyambut baik peran OIC sebagai mediator antara keduanya. Hal ini berdasarkan konsideran bahwa OIC menolak pemisahan Moro dari Filipina, dan mendorong MNLF agar menerima tawaran otonomi. Perjanjian damai 1996 menawarkan dua tahapan implementasi: *pertama*, periode transisi pada tiga tahun pertama, dan diikuti Pemerintahan Otonomi Regional Baru yang akan dilaksanakan mulai dari September 1999. Rencana akhir otonomi wilayah plebisit yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2001. Selain itu juga melakukan

---

<sup>182</sup>John Gershman dalam Moeflich Hasbullah (Editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam...*, *loc. cit.*, hlm. 239.

<sup>183</sup>Riswanto et al., 'Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina...', *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>184</sup>Moeflich Hasbullah (editor), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam...*, *op. cit.*, hlm. 240.

Pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur dan perwakilan regional ARMM.

Jadi, konflik Moro di Filipina Selatan berlatar belakang historis begitu panjang, di mana orang-orang yang mendiami kepulauan Sulu dan Mindanao hingga kedatangan agama Islam. Agama Islam kemudian telah membentuk identitas dan kebudayaan bagi masyarakat yang berdiam wilayah itu. Ketika Kota Konstantinopel jatuh ketangan Muslim, orang Eropa kemudian melakukan pelayaran ke benua Timur di mana bangsa Spanyol berhasil menemukan kepulauan Filipina. Hal ini juga merupakan awal permusuhan hingga terjadinya konflik Moro. Filipina bagian Selatan saat itu telah mewariskan kebudayaan Islam akhirnya menolak penjajahan bangsa Spanyol. Konflik ini dikenal dengan perang puluhan tahun yang dikenal dengan sebutan *The Moro Wars*. Konflik Moro kemudian semakin hingga datangnya Amerika Serikat, terlebih ketika AS mendapatkan wilayah Filipina dengan harga 20 juta \$ Mexico. Pencaplokan AS secara sepihak inilah menyebabkan konflik Moro terus berlanjut hingga Filipina mendapatkan kemerdekaan penuh. Latar belakang konflik Moro ternyata lebih disebabkan faktor historis, diskriminasi dan kemiskinan bangsa Moro yang berlangsung hingga kini. Berbagai diskriminasi yang sering diikuti dengan kekerasan, pembunuhan, pengusiran dan kesulitan lapangan kerja selanjutnya merupakan faktor utama dan langgengnya konflik Moro.

Kini, konflik yang terjadi di Mindanao telah berkembang bukan semata pemberontakan warga Filipina atau bangsa Moro. Pemerintah Filipina (26/5/2017) mengatakan bahwa warga asing tergabung dalam kelompok militan pro-ISIS (*Irak Suriah Islamic State*) yang menyerang Kota Marawi di bagian Selatan Filipina. Dikatakan, terdapat warga negara asing tergabung dalam ISIS yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan orang asing lainnya, yang merupakan bagian dari kelompok Maute yang menyerang Marawi. Orang-orang asing itu mendapat panggilan dari ISIS untuk berangkat ke Mindanao dan

mendirikan sebuah wilayah atau provinsi ISIS jika mereka tidak bisa berperang di Irak dan Suriah.<sup>185</sup>

Gerakan ISIS di Marawi, Filipina Selatan tersebut memang mendadak begitu mengejutkan, masif, dan terorganisir, yang sulit terdeteksi oleh intel Filipina. Presiden Duterte pun melakukan pemberlakuan darurat. Saat bermula bernama ISIS (*Islamic State of Iraq & Syria*) dinamakan juga ISIL/DAESH telah mengurangi dua huruf menjadi IS (*Islamic State*) karena memang direncanakan untuk meluas ke luar Timur Tengah. Khususnya di Asia Tenggara yang mudah menjadi wadah sektarian dan lokasi strategis secara geografis untuk mengacau musuh utama AS di Asia Timur. ISIS yang dipimpin sosok yang tidak jelas seperti Abu Bakar Albagdady sebegitu cepat menjadi payung yang menaungi beragam kelompok radikal religi dan radikal politik seperti X Jamaah Tawhid wal Jihad, AlQaeda, Jabhat Nusra, Jays Alfatah, Jays' AlSyam, mantan tentara loyalis Saddam Hussein, dan pemberontak anti Bashar Al-Assad berkumpul. Reklame tujuan ISIS adalah menciptakan khilafa Islam, tetapi nyatanya adalah menciptakan Chaos di negara-negara yang independen atau anti Zionis Amerika Serikat.<sup>186</sup>

Patut dipahami bahwa ISIS berkedok Islam tetapi sebetulnya bukanlah agama atau etnis. Dari yang hitam hingga coklat ada didalamnya. ISIS tidak hanya berada di Irak atau Suriah tetapi bisa muncul di manapun karena ISIS sebagai hasil pemikiran jahil dan perasaan benci yang galau-kacau dan mengacau sehingga bisa meluap

---

<sup>185</sup>Pada pertempuran tanggal 22 Mei 2017, tentara Filipina menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian Isnilon Hapilon, pemimpin kelompok Abu Sayyaf yang kerap menculik warga asing. Isnilon juga diyakini aparat keamanan Filipina sebagai pemimpin ISIS di Filipina. Penggerebekan itu gagal setelah puluhan orang bersenjata muncul dan memukul mundur aparat keamanan, masuk dalam kota, dan sempat mengibarkan bendera hitam khas ISIS. Pemerintah Filipina mengakui sulit untuk menghentikan krisis ini dikarenakan anggota militan itu bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya, memasang bom rakitan di jalan raya, dan menyandera warga. Selain itu, kelompok militant Maute menguasai daerah yang lebih tinggi di kota itu sehingga membuat mereka bisa memperlambat gerak maju pasukan pemerintah. Lihat: 'Sejumlah Militan Penyerbu Kota Marawi Berasal dari Indonesia', Kompas. Com. 25/5/2017, diakses: 30/5/2017).

<sup>186</sup>Jaringan ISIS dari Kota Marawi Filipina ke Kampung Melayu Jakarta', gerilya politik. com, 25/1/2018 (diakses: 30/1/2017).

di manapun. Sosok penggeraknya banyak terdidik di kamp-kamp sahara lalu pulang, selain itu, banyak pula yang terlatih dan disiapkan di negaranya masing-masing. Dikatakan Edward Snowden, dari sekian banyak rahasia yang diungkapkannya bahwa kerjasama tiga badan inteligen AS, Inggris dan Israel yang menciptakan ISIS dan menamakan operasi 'Sarang Lebah'. Diungkapkan bahwa untuk operasi *The Hornet Nest* itu Mossad telah mendidik Abubakar Al-Bagdady secara khusus selama setahun penuh, di mana bukan hanya melatih militer tetapi juga cara ceramah dan lainnya. Korban kejahatan pun biasanya mayoritas umat Islam, bukan orang Yahudi-Israel. Operasi 'Sarang Lebah' biasanya menggunakan Takbir untuk membunuh manusia. Semboyan Jihad beralih dituju pada umat sebangsa sementara musuh yang sebenarnya nyaman dalam koridor negosiasi upaya damai terpanjang dalam sejarah. Kelompok teroris mencuri nama Islam memang sudah dibekali semua yang dibutuhkan untuk menjadi monster dari dalam. Pelatihan militer, logistik, senjata, dana, strategi, dan segala teknologi mutakhir dan satelit.<sup>187</sup>

Pandangan di atas dapat diperkuat dengan berbagai seranga dilakukan kelompok ISIS atau Negara Islam Irak-Suriah (NIIS) yang menewaskan banyak korban manusia dan bahkan dapat melumpuhkan kekuatan militer suatu negara. Sebagai umpama, kelompok NIIS atau ISIS ini (25/10/2016) mengklaim pengikut mereka sebagai pelaku serangan ke Akademi Kepolisian Balochistan di Quetta, Pakistan. Tiga

<sup>187</sup>Komando diatas berpadu memberikan bantuan, arahan, dan cara kerja operasional yang luar biasa. Anak-anak mudah yang lahir dari 'rahim' dan iklim peperangan telah dicuci otak dan diubah menjadi pribadi yang tanpa perasaan manusiawi yang siap bekerja dan menjadi serdadu zombi yang senang terhadap kekerasan dan pembunuhan. Seperti halnya dengan Kota Mosul di Irak dan kota-kota di Suriah, Marawi di Filipina pun dengan menadadak dan mudah diporak-porandakan dalam waktu yang singkat. Sudah lima tahun lebih Suriah dan Irak porak-poranda sementara kekuatan militer dan rakyat yang Muslim, Kristen, Syiah, Kurdi, Sunnah, Azidi, semua agama dan suku ikut serta berjuang melawan ISIS. Tetapi, dan bahkan dengan bantuan Rusia, Iran, dan Hisbullah, tetap saja mereka tampak kewalahan menghadapi ISIS. Para pakar politik sebelumnya berpendapat bahwa Karen atergempur di Irak dan Suriah di mana banyak kota seperti Aleppo telah didilepaskan kembali maka ISIS pasti akan migrasi ke wilayah lain, termasuk Filipina dan Indonesia. Dikatakan, bila kedua negara ini jatuh ke tangan ISIS barulah AS bisa mimpi melemahkan dan melawan Cina. Lihat kembali: ('laringan dari Kota Marawi Filipina ke Kampung Melayu Jakarta', gerilya politik. com, 25/1/2018 (diakses: 30/1/2017).

pria dengan rompi bom bunuh diri dan senjata berat menyerang akademi itu yang menewaskan sekurangnya 59 orang dan melukai lebih dari 100 orang.<sup>188</sup>

#### 4. Konflik Etnis-Agama: Pattani, Thailand Selatan

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Meskipun demikian, negara ini tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara Pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1990-an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu ini terjadi karena etnis Muslim Melayu menuntut akan kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand. Konflik berawal dari aksi protes yang dilakukan Etnis Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand. Mereka menganggap kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Thailand tidak memihak dan diskriminatif terhadap mereka. Aksi protes tersebut dilakukan dengan melakukan pemberontakan di sejumlah wilayah. Mobilisasi massa dan pemberontakan yang dilakukan etnis Muslim Melayu terjadi karena adanya kecemasan akan keberlangsungan etnis dan identitas mereka. Pemberontakan yang terjadi mulai dari aksi yang kecil hingga aksi yang besar dan terorganisasi.<sup>189</sup>

Wilayah perbatasan (*sempadan*) Selatan Thailand yang dikenaldengan nama *Changwad Chaiden Pak Thai* banyak dihuni

<sup>188</sup>Otoritas Pakistan, sebelumnya Pakistani, menuduh kelompok militan lain, Lashkar-w-Jhangvi (Lej), sebagai pelaku serangan. Tetapi, NIIS atau ISIS menyertakan foto dari ketiga orang yang dituduh sbagai pelaku. Tidak kurang dari 700 taruna berada diasrama akademi kepolisian itu saat para pelaku yang mengenakan penutup wajah menyerbu masuk. Sejumlah taruna dijadikan sandera selama insiden yang berlangsung hampir lima jam. Sebagian besar korban tewas merupakan taruna. Saksi menyatakan bahwa mereka berpura-pura menjadi tentara Pakistan. Mereka mengetuk pintu kamar dan mengaku sebagai anggota militer, lalu, saat pintu dibuka menembak para korban. Para taruna yang berhasil menyelamatkan diri melompat keluar jendela atau memanjat pohon. Para pelaku memasuki kompleks akademi kepolisian dengan melompati tembok pagar yang tidak terlalu tinggi. Lihat: ('NIIS klaim bertanggung jawab', *Kompas*, 26 Oktober 2016).

<sup>189</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme, *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No.1 Tahun 2005*, hlm. 89-117.

oleh komunitas Muslim keturunan Melayu. Wilayah ini terdiri dari empat provinsi; Yala, Narathiwat, Patani dan Satun dengan agama Islam yang mendominasi populasi di wilayah tersebut. Di keempat provinsi ini ikatan sejarah kemelayuan memiliki karakter cukup kuat dibandingkan dengan bangsa Thai. Kenyataan ini membuat komunitas Muslim di Selatan Thailand memiliki perbedaan agama, kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan tata cara kehidupan yang berbeda dengan bangsa Thai umumnya. Identitas yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Thailand Selatan memperlihatkan entitas kolektif orang-orang Melayu di empat provinsi (*"the four provinces"*) sebagai suatu manifestasi dari identitas etnik Melayu yang berada di Thailand (Suhrke 1989). Masyarakat dan pemerintah Thailand lantas menyebut komunitas di selatan ini dengan istilah 'Thai Muslim'. Thai Muslim atau yang lebih dikenal dengan Muslim Patani secara umum lebih banyak dideskripsikan sebagai komunitas Muslim yang secara sporadis sering melakukan gerakan perlawanan bersenjata serta menentang sikap dan perlakuan diskriminatif pemerintah Thailand. Pemberitaan media juga turut menggambarkan bahwa kekerasan kerap berlangsung dan diwarnai dengan aksi balas dendam yang menimbulkan banyak korban, baik dari komunitas Muslim maupun dari masyarakat Thailand yang beragama Buddha. Selain itu, gambaran kaum minoritas Muslim di Thailand adalah kaum tertindas, terutama disebabkan oleh sikap pemerintah yang mau menang sendiri dan tidak bersedia untuk memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Islam Patani.<sup>190</sup>

Keberadaan Pattani dahulunya merupakan sebuah kerajaan bernama Langkasuka. Kerajaan yang diyakini menjadi cikal bakal dari Kesultanan Melayu Patani. Bukti kehadiran dari kerajaan Langkasuka ini bisa dilihat dalam catatan cerita lama teks India maupun Jawa. Saat itu Langkasuka dipandang sebagai salah satu sasaran ekspedisi angkatan laut India yang perlu ditaklukan dan dikuasai bidang perdagangan mereka. Kemudian cerita kepahlawanan Majapahit

<sup>190</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim Thailand...', *ibid.*, hlm. 89-117.



tahun 1365 dalam surat *Nagarakartagama*, yang melukiskan Langkasuka sebagai wilayah pesisir timur dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Langkasuka juga merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan *SriVijayan*. Hal ini ditunjukkan melihat asal usul orang Patani yang berasal dari suku *Javanese-Malay*. Sebagian besar menganggap bahwa *Javanese-Malay* adalah salah satu leluhur orang-orang Melayu di daerah Malaka setelah terjadi penaklukan pada sekitar abad ke-8 dan 9 kemudian berkembang menjadi masyarakat Melayu sekarang. Seiring dengan memudarnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada abad 11 wilayah ini kemudian mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi sebuah wilayah tersendiri. Langkasuka sendiri merupakan suatu daerah yang cukup banyak diminati oleh beberapa kerajaan yang ada di sekitar Asia Tenggara pada sekitar abad 13 dan 14; kerajaan Angkor di Kamboja, kerajaan Burmese di Pagan, Raja Cholas India, Raja Ceylon, kerajaan di Jawa dan Sriwijaya. Hampir kesemua kerajaan tersebut sempat mengintervensi dan berusaha membuat patokan wilayah independen di daerah tersebut.<sup>191</sup>

Salah satu kebijakan populer sebagai 'proyek ambisius' yang dilakukan Pemerintah Thailand terhadap etnis Pattani berupa politik integrasi. Politik integrasi yang dilakukan Pemerintah Thailand terhadap masyarakat Pattani-Muslim perlu dilihat secara komprehensif dari latar belakang sosio-historis terbentuknya nasionalisme dan modernisasi Thai pada permulaan abad ke-20.<sup>192</sup> Proses memasukkan provinsi-provinsi paling selatan ke dalam kerajaan Thai merupakan proses yang lambat dan kompleks. Kondisi pada akhir abad ke-18 ketika kekuasaan kolonial semakin besar dan kuat di Asia Tenggara, Siam dihadapkan pada suatu kesadaran kebangsaan akan keharusan yang mendesak mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan satuan-satuan politik yang terpencar untuk menghadapi bahaya kolonialisme.<sup>193</sup>

<sup>191</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas...', *ibid.*, hlm. 89-117.

<sup>192</sup>John T. Sidel, 'The fate of nationalism in the new states: Southeast Asia in comparative historical perspective', *Comparative study in society and history*, 54 (01), pp. 114-144, 2012 dalam kutipan: (Fatiyah, 'Perspektif Muslim Thailand Tentang Nasionalisme Etnis dan Agama: Studi Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta, *Kontekstualita*, Vol. 32, No. 2, 2016, hlm. 31).

<sup>193</sup>Fatiyah, 'Perspektif Muslim Thailand Tentang Nasionalisme Etnis dan Agama...', *ibid.*, hlm. 31.

## 166 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan etnis Muslim Melayu yang terjadi di Thailand dalam Liow (2006), dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti BRN- C (*Barisan Revolusi Nasional Coordinate*), PULO (*Pattani United Liberation Organization*), dan GMIP (*Gerakan Mujahideen Islam Pattani*). Ketiga organisasi ini merupakan kelompok etnonasionalis yang menuntut akan kemerdekaan yang dipayungi dan dikoordinasi satu organisasi besar dalam tiap gerakan dan pemberontakan yang dilakukannya, organisasi tersebut adalah Bersatu. Organisasi ini melakukan aksinya dengan melakukan perusakan terhadap pos polisi, militer dan infrastruktur pemerintahan yang lain. Ketegangan terjadi hampir di seluruh wilayah Thailand Selatan. Adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh besar pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Serangan-serangan dilancarkan kepada pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan yang terjadi juga semakin terarah dan terkoordinasi. Pada 2004 terjadi ratusan aksi protes dan pengrusakan yang dilakukan masyarakat etnis Muslim Melayu ini. Kekerasan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan kemudian berkembang dan semakin meluas. Para pemberontak tidak hanya menyerang aparat negara dan sarana pemerintah saja, namun mulai melakukan serangan dan pengeboman di kawasan publik dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Serangan yang terjadi meliputi serangan terhadap sekolah – sekolah, pasar, maupun stasiun dan terminal. Serangan – serangan ini menimbulkan korban jiwa 64 guru dan terbakarnya 72 sekolah.<sup>194</sup>

Serangan yang dilakukan menargetkan kawasan banyak penduduk atau merupakan daerah yang ramai dikunjungi seperti pasar dan lain sebagainya. Serangan yang terjadi dilakukan dengan melakukan penembakan secara membabi buta. Hal ini dilakukan untuk menambah korban jiwa dari pihak sipil yang dianggap berpihak kepada Pemerintah Thailand. Terhitung serangan dari kaum militan terjadi di 11 lokasi berbeda di Thailand Selatan dan 106 jiwa menjadi korban di awal 2004 dan hingga pertengahan 2005 di daerah konflik seperti Yala,

<sup>194</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim ...', *ibid.* hlm. 89-117.

Narathiwat dan Patani telah memakan korban jiwa sebanyak 3.500 jiwa (McCargo, 2010). Aksi pemberontakan yang dilakukan dengan jalan kekerasan oleh etnis Muslim Melayu ini telah menimbulkan keresahan dan teror bagi masyarakat Thailand Selatan lainnya. Pemerintah Thailand merasa perlu melakukan tindakan untuk merespon gerakan pemberontakan yang terjadi di wilayahnya.

Yuniarto<sup>195</sup> mengatakan bahwa di tengah upaya yang dilakukan pemerintah, pada era pemerintahan Thaksin misalnya, Bangkok justru sering mengembangkan prasangka dan stigma negatif kepada Muslim Melayu sebagai kelompok kriminal yang berlindung di balik agama. Stigma itulah yang dimanfaatkan tentara Thailand untuk menggelar operasi militer di wilayah selatan. Di tengah ketertindasan ini, kalangan Muslim Melayu semakin gencar menuntut agar Pemerintah Thailand memberikan otonomi khusus sehingga mereka dapat memerintah dan membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Mereka yakin, dengan otonomi itu, Muslim Melayu dapat mengembangkan taraf hidup karena selama ini mereka merasa tidak memperoleh pengayoman dan perlakuan yang sama seperti penganut agama mayoritas di Thailand. Menurut mereka, di negara yang heterogen ini, pemerintah sebagai pihak yang menaungi seluruh warga negara seharusnya mengembangkan budaya saling menghormati terhadap apa yang dianut dan dipercayai orang lain. Belakangan, muncul upaya-upaya yang mencerahkan dari sejumlah kalangan pemuda dan mahasiswa Muslim Thailand. Penjelasan mengenai akar pertikaian dan gambaran Muslim Patani dengan pemerintah dan masyarakat Thai dapat dirunut sejak dimulainya proses penggabungan daerah Patani ke dalam wilayah Thailand. Kurang dari satu abad sejak ditandatanganinya perjanjian pembagian wilayah antara pihak kerajaan Inggris dan kerajaan Siam tahun 1909 (*Anglo-Siam Treaty*)—yang isinya menempatkan wilayah Patani bukan sebagai sebuah kerajaan Melayu lagi, tetapi merupakan wilayah kerajaan Siam (Pitsuwan, 1989)—masyarakat Patani telah terintegrasi menjadi bagian dari masyarakat Thai. Sebagai sebuah kelompok minoritas dengan identitas Islam,

---

<sup>195</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim...', *ibid.* hlm. 117.

## 168 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Muslim Patani Selatan Thailand dihadapkan pada kewajiban mengikuti pola integrasi nasional Thailand yang telah ditetapkan agar menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh. Dilihat secara geografis, perubahan wilayah yang terjadi ini, Patani yang asalnya merdeka dan merupakan mayoritas kemudian berubah sebagai wilayah subordinat Thailand serta menjadi minoritas dilevel nasional.<sup>196</sup>

### a. *Facilitating Context*

#### a) Intervensi Kerajaan Siam

Masalah minoritas Muslim di wilayah Thailand mulai muncul kepermukaan ketika wilayah ini dimasukkan ke dalam Kekuasaan Kerajaan Siam pada 1902. Sebelum penyatuan ini, wilayah Thailand Selatan ini berada dibawah kekuasaan Kesultanan Patani, yang bersama dengan Kedah, Kelantan, Trengganu, dan Perlis, merupakan koloni dari Kerajaan Siam. Sejak abad ke-18, para penguasa Siam telah berupaya untuk menaklukkan negara-negara Melayu ini dan membawanya ke dalam wilayah Kekuasaan Siam.<sup>197</sup> Penyatuan ini, yang diikuti pemakzulan oleh penguasa Patani, telah mengundang munculnya sejumlah pemberontakan sampai Patani terbelah ke dalam unit-unit politik yang dikontrol oleh pangeran Siam.<sup>198</sup>

Dalam upaya memperketat kontrolnya, Pemerintah Thailand kemudian merekrut dan menempatkan para birokratnya untuk mengganti para penguasa Patani. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan nasional dan agar efisien dalam hal penanganan masalah-masalah dan program Kerajaan. Penyatuan (inkorporasi) ini selesai pada tahun 1909 ketika Pemerintah Thai membuat persetujuan dengan pihak Inggris di mana Thai melepaskan klaimnya atas Kelantan, Kedah, Trengganu dan Perlis dan selanjutnya menyerahkannya ke pihak Inggris; sementara pada pihak lain, Inggris

---

<sup>196</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas...', *ibid.* hlm. 89-117.

<sup>197</sup>Farish Noor, 'Peace Remains a Mirage in Southern Thailand', *Haleej Times Online*, 2008 (diakses: 21 November 2017).

<sup>198</sup>Gunn C Geoffrey, 'Racial Islam in Southeast Asia: Retic and Reality in the Middle Eastern Connection', *Journal of Contemporary Asia*, 1, 1986, page 34.

harus menerima upaya penyatuan Pemerintah Thai terhadap Patani. Dengan demikian, selanjutnya menjadi bagian dari birokrasi administratif Pemerintah Thai yang diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi Thai lainnya.<sup>199</sup>

Menurut Yuniarto bertalian dengan politik integrasi terhadap wilayah Thailand Selatan, bahwa permasalahan anti Siam dan perlawanan dari penduduk Pattani disebabkan adanya kontradiksi antara reformasi politik dibawah sistem kerajaan Thailand dengan nilai-nilai atau identitas politik bangsa Melayu Pattani. Kontradiksi tersebut meliputi dua hal sebagai-berikut: a) kontradiksi meliputi pada tingkat kelembagaan, inkorporasi elit politik Muslim dalam praktik politik perwakilan dan ekspansi administrasi nasional termasuk keterlibatan Muslim dalam proses pengambilan kebijakan; dan b) kontradiksi yang bertalian dengan pembangunan komunitas politik ala kerajaan dan praktik-praktik politik pada perang kerajaan yang belum selesai (*incomplete*) di bawah konsep negara bangsa.<sup>200</sup>

#### b) Dampak Asimilasi Kultural

Salah satu salah yang dialami etnis Muslim di Thailand karena adanya asimilasi kultural yang dilakukan pemerintah Thailand, sebagai langkah melakukan kebijakan integrasi nasional. Kebijakan-kebijakan asimilasi<sup>201</sup> pemerintah Thailand dipandang semakin menyudutkan posisis kaum Muslim Melayu sebagai etnis minoritas. Situasi ini selanjutnya telah mendorong orang Melayu Muslim untuk melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah sebagai upaya menuntut kemerdekaan. Konflik yang terjadi di Thailand Selatan yang berlangsung sejak awal 1990-an juga telah menjadi perhatian internasional. Sejarah etnis Melayu dan terjadinya masalah yang dialami mereka sebagai kalangan minoritas setelah menjadi bagian dari pemerintah Thailand.

<sup>199</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius Vol IX, No. 34*, 2010, hlm. 43.

<sup>200</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand....*, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>201</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan....', *ibid.* hlm. 44.

Politik integrasi bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang ada antara orang Thai dan orang Islam Melayu, dengan menanamkan kepada orang-orang Melayu perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap Negara (Kerajaan) Thai. Tetapi, dalam realitasnya politik ini bukan mendekatkan masyarakat Melayu kepada masyarakat Thai, tetapi justru menjauhkannya, karena orang-orang Melayu merasa terancam akan hilangnya identitas kultural mereka. Pada sisi lain, politik integrasi yang diterapkan justru telah mendorong mereka untuk memperkuat ikatan-ikatan tradisionalnya. Ketika itu, suatu yang diinginkan oleh orang Melayu adalah meminta Pemerintah Thai untuk menyebut mereka Muslim Melayu, suatu sebutan yang dipandang relevan menandai masalah disana. Sebutan demikian bukan saja akan membedakan mereka dari orang-orang Thai pada umumnya tetapi juga dari orang Islam Thai yang tidak memiliki masalah berkaitan dengan akar kultural seperti yang dialami oleh orang-orang Islam Melayu di Thailand Selatan.<sup>202</sup>

Kendatipun protes dan pemberontakan telah dilakukan sebelumnya, tahun 1902 merupakan titik balik dalam sejarah Patani, baik sebagai Kekuasaan Kesultanan maupun sebagai etnis Melayu yang berbeda dengan masyarakat Thai lainnya yang beragama Buddha. Titik balik ini bersifat khusus dan berkonsekuensi jauh karena Pemerintah Thai menerapkan 'Politik Integrasi'. Bagi etnis Melayu Muslim di Selatan Thailand politik ini dipandang mengancam. Itulah sebabnya setiap protes atau pemberontakan setelah penerapan politik ini dianggap sebagai perjuangan untuk mempertahankan identitas kultural, dan bahkan identitas religius mereka. Pada tahun 1902 merupakan permulaan masalah yang dihadapi masyarakat Patani dalam menentukan nasib mereka.<sup>203</sup>

Forbes dalam Endang Turmudzi<sup>204</sup> mengatakan bahwa politik integrasi yang diikuti oleh politik asimilasi ini telah direspon negative

<sup>202</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama ...', *ibid.* hlm. 44.

<sup>203</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama ...', *ibid.* hlm.44.

<sup>204</sup> Endang Turmudzi, 'Akar Konflik dan Agama ...', *ibid.*, hlm. 45.

oleh orang-orang Islam Melayu. Kendatipun begitu, Pemerintah Thailand tidak memperdulikan reaksi ini. Pemerintah justeru memperkenalkan pengajaran bahasa Thai, sejarah dan lagu nasional kepada mereka sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan politik integrasi, terutama setelah tahun 1932. Akan tetapi, politik tersebut dipandang kurang sukses, sehingga Phibul Songkram yang memerintah pada 1938 berupaya untuk menekankan pelaksanaan politik ini secara lebih represif lagi. Langkah-langkah integrasi dan asimilasi yang dia ambil telah menyentuh cakupan yang lebih luas dari kehidupan orang-orang Melayu, sehingga perasaan terancam telah berkembang dan meluas dalam diri mereka. Bagi orang-orang Islam Melayu, integrasi dan asimilasi merupakan politik intervensi yang membahayakan mereka, karena hal itu akan menggoyang identitas kultural mereka. Itulah sebabnya, makin efektif politik ini diterapkan makin besar pula perasaan terancam tumbuh di kalangan orang-orang Islam Melayu.

Forbes<sup>205</sup> selanjutnya mengemukakan bahwa dibawah Pemerintahan Songkram berbagai upaya telah dilakukan dengan kekuatan untuk mengasimilasi orang-orang Muslim Melayu. Dalam sejumlah langkahnya, Songkram telah memperlakukan bahasa dan kebudayaan Melayu secara diskriminatif, yang menyebabkan kemarahan kalangan Melayu. Hal yang sama juga terjadi berkaitan dengan hukum Islam yang dicampakkan dengan maksud untuk mendukung Undang-Undang Perkawinan dan Warisan Buddha. Memakai sarung misalnya telah dilarang, sementara orang-orang Melayu ini kemudian diminta untuk memakai pantaloon dan topi ala Barat. Bahkan *policy* Songkram juga menetapkan bahwa beban bawaan harus dipikul dipundak, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Thai, bukan ditaruh diatas kepala, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Melayu.

Secara historis, pergulatan politik, budaya, dan hukum di wilayah ini tampak dinamis. Pada awalnya Pattani merupakan

---

<sup>205</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik ....', *ibid.*, hlm. 45

## 172 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Kesultanan Islam yang independen, namun pada awal abad ke-19 dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Ketika Siam bermetamorfosa menjadi Thailand yang monarkhi konstitusional (1932), Pattani menjadi provinsi dibawah kekuasaan negara Thailand. Ketika menjadi provinsi inilah mulai terjadinya dinamika sosio-kultural dalam kebudayaan masyarakat. Kebudayaan lokal mereka, yang terbentuk melalui akulturasi antara Islam dengan budaya Melayu, berakulturasi dengan budaya baru, yakni budaya Thai, antara keduanya terdapat perbedaan mendasar yang sulit diintegrasikan. Sehingga muncullah perlawanan di kalangan masyarakat Pattani terhadap setiap upaya integrasi dan asimilasi yang dilakukan Pemerintah Thailand.<sup>206</sup>

Seperti dikatakan Leo Suryadinata<sup>207</sup> bahwa adanya kesamaan budaya antara etnis berbeda akan mempermudah terwujudnya integrasi dan asimilasi (budaya). Di Thai, etnis Cina yang beragama Buddha, dan lahir serta dibesarkan di sana dengan mudah telah berasimilasi (budaya) ke dalam masyarakat pribumi Thai. Kebudayaan Buddha Thai lebih dekat dengan kebudayaan Cina, sehingga lebih mudah bagi migran Cina menerima identitas Thai. Akan tetapi, apa yang diungkapkan Suryadinata bersifat relatif, misalnya dalam kasus Cina dengan pribumi Vietnam dapat menimbulkan masalah. Jika demikian, selain adanya kesamaan budaya, sejumlah aspek eksternal merupakan variabel intervensi yang penting dalam identifikasi orang Cina dan pribumi-pribumi dari dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

### b) Pemukiman Terpisah secara Etnis dan Agama

Berbeda dengan umat Islam lainnya di Thailand yang menyebar ke banyak tempat, tidak demikian halnya dengan Muslim beretnis Melayu. Mereka cenderung hidup berkelompok dan bermukim di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand, yaitu Provinsi Pattani, Yala, Naratiwat, Songkhla, dan Provinsi Satun yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Mereka memilih hidup berkelompok karena

---

<sup>206</sup>Ali Sodikin, 'Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya)', *Ibda*, Vol 14, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 32.

<sup>207</sup>Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 6.



mereka sulit berintegrasi dengan budaya Thailand yang identik dengan agama Budha. Hal ini pula yang kemudian mendorong didirikannya Kesultanan Muslim di Thailand Selatan pada abad ke-18. Tujuan didirikannya kesultanan ini adalah untuk menaungi dan melindungi masyarakat Muslim Melayu di Negeri Gajah Putih.<sup>208</sup>

Perbedaan budaya (agama) antara masyarakat Pattani dan Thailand selalu memperlihatkan perbedaan dan perbenturan. Hal ini dapat dikarenakan adanya stigma dari masing-masing kelompok etnis. Etnis Thai menganggap etnis Melayu sebagai orang yang kolot. Sedangkan masyarakat Pattani memandang etnis Thai sebagai orang kafir, penyembah patung. Mereka diibaratkan sebagai jahiliyah modern, yang menjadikan budak bak 'Lata dan Uza', yang menurut hukum Islam wajib diperangi dikarenakan sifatnya yang zalim terhadap orang Melayu, sewenang-wenang, menindas, dan memerangi. Tidak seperti hubungan orang Thai dan Cina, hubungan Thai dengan Melayu-Pattani, penuh diwarnai konflik ideologis, budaya, dan bahkan bentrok fisik. Dipihak Melayu-Muslim Pattani sendiri, mengidentifikasikan hubungan Pemerintah Thailand dengan Pattani sebagai hubungan antara mereka yang menindas (penjajah) dan yang ditindas (dijajah). Pernyataan ini didukung kuat oleh realitas sejarah, di mana Pattani sebelum diintegrasikan ke dalam Thailand merupakan Kerajaan Melayu Islam yang otonom dan berdaulat penuh. Disini pada akhirnya orang Melayu Pattani menganggap dirinya (menyadari identitasnya) sebagai *outgroup* di dalam wilayah tanah kelahirannya sendiri.<sup>209</sup>

Keterkaitan dengan hal ini, K. Shindhunata dan Junus Jahja<sup>210</sup> mengatakan bahwa integrasi dan asimilasi migran Cina dan pribumi Thai, dan terjadi di Filipina, antara migrant Cina dan pribumi Filipina, dan juga terjadi di Minahasa (Menado), Indonesia, disebabkan adanya

<sup>208</sup>Republika, Thursday, 15 June 2017 20 Ramadhan 1438HomeMuslim Melayu di Thailand Selatan Muslim Melayu di Thailand SelatanThursday, 01 Jan 1970, diakses 7 Nopember 2017.

<sup>209</sup>Paulus Rudolf Yuniarto dalam Fatiyah, Perspektif MuslimThailand....', *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>210</sup>K.Shindhunata dan Junus Jahja, Generasi Imlek, *Republika*, 22 Maret 2002. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Editor: Nor Huda, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm. 231).

## 174 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

kesamaan budaya-keagamaan yang dianut kedua etnis berbeda itu, tapi sama-sama beragama Kristen.

Douglas S. Massey<sup>211</sup> mengayatakan bahwa jika suatu pemukiman terdiri dari rumah tangga yang heterogen, hal ini dapat berpengaruh secara positif bagi terjadinya asimilasi spasial (*spatial assimilation*). Lieberman mengungkapkan bahwa terma asimilasi spasial yang dikemukakan Massey belum terlalu jelas.<sup>212</sup> Tingkat segregasi residensial sebaliknya berhubungan dengan indikator-indikator yang tepat dari status sosial-ekonomi dan tingkat asimilasi. Akan tetapi, Massey merujuk kepada asimilasi sebagai integrasi ke dalam struktur sosial, kurang lebih pada terma-terma kesamaan status sosial-ekonomi yang tidak hanya berupa perpindahan dari satu etnis (rumah tangga) ke suatu lingkungan tetangga (*neighborhood*). Asimilasi etnis dapat ditunjukkan dengan berbagai ukuran yang tidak sama dengan asimilasi spasial. Lieberman mengatakan bahwa segregasi residen mungkin berdampak pada aspek berbeda dari asimilasi etnis.

### Operasi Militer

Pemerintah Thailand menuding orang Muslim Melayu sebagai kelompok separatis. Raja Thailand ingin menyatukan Muslim Melayu di bawah naungan Kerajaan Thailand. Mereka menolak karena masyarakat Muslim Melayu saat itu ingin diintegrasikan dengan negara Melayu atau memerintah sendiri. Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah Thailand untuk memberangus kesultanan ini. Akibatnya, pada abad ke-18 itu kerap terjadi bentrokan antara Kesultanan Muslim dengan Pemerintah Thailand. Operasi militer besar-besaran pernah dilakukan pada 1940 ketika Thailand dikuasai partai nasionalis yang dipimpin Pibul Songkhram. Ketika itu rezim Songkhram memaksa orang Melayu menanggalkan identitas mereka sebagai Melayu dan Muslim, selanjutnya bersatu di bawah pemerintahan Thailand. Tak hanya itu, Muslim Melayu juga dilarang mengenakan busana tradisional

<sup>211</sup>Douglas S. Massey, 'Ethnic Residential Segregation: a Theoretical Synthesical and empirical Review', *Sociological and Social Research*, Volume 69, 1998, pages 315-350..

<sup>212</sup>David W.S. Wong, 'Spatial Patterns of Ethnic Integration in the United States', *Professional Geographer*, Volume 50, No. 1, 1988, February, pages 13-30, published by Blackwell Publishers, Oxford, UK.

Melayu dengan ciri khasnya, seperti peci bagi kaum pria dan kerudung bagi wanita. Bahkan, mereka juga dilarang berbicara dengan bahasa Melayu.

Muslim beretnis Melayu cenderung hidup berkelompok dan bermukim di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand, seperti Provinsi Pattani, Yala, Naratiwat, Songkla, dan Satun yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Mereka hidup berkelompok karena mereka sulit berintegrasi dengan budaya Thailand yang identik dengan agama Buddha. Hal ini pula kemudian yang mendorong berdirinya Kesultanan Muslim di Thailand Selatan pada abad ke-18. Tujuan didirikan kesultanan ini adalah untuk melindungi masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan. Tetapi, Pemerintah Thailand langsung menudingnya sebagai kelompok separatis, dan Raja Thailand ingin menyatukan Muslim Melayu dibawah naungan Kerajaan Thailand. Tetapi, mereka menolak karena masyarakat Muslim Melayu ketika itu ingin diintegrasikan dengan negara Melayu atau memiliki pemerintahan sendiri. Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah Thailand untuk memberangus kesultanan ini. Akibatnya, pada abad ke-18 itu kerap terjadi bentrokan antara Kesultanan Muslim dengan Pemerintah Thailand. Operasi militer besar-besaran pernah dilakukan pada 1949, ketika Thailand dikuasai Partai Nasionalis yang dipimpin Pibul Songkhram. Kala itu, rezim Songkhram memaksa orang Melayu meninggalkan identitas mereka sebagai Melayu dan Muslim, selanjutnya bersatu di bawah Pemerintahan Thailand.<sup>213</sup>

Rezim Songkhram juga memaksa masyarakat Muslim Melayu untuk mengadopsi nama Thai. Akses mereka untuk belajar Agama Islam ditutup. Pemerintah Thailand juga menghapus pengadilan Islam untuk menangani urusan keluarga Muslim. Seluruh pelajar dan mahasiswa Muslim di Thailand pun meski bukan pemeluk agama Buddha diwajibkan memberikan penghormatan kepada gambar Buddha di sekolah-sekolah umum. Bila ada yang menolak melaksanakan kebijakan ini, akan ditangkap dan dijatuhi hukuman, bahkan tak jarang

---

<sup>213</sup>'Muslim Melayu di Thailand Selatan', *Republika*, diakses: 30 Mei 2017.

berujung kepada penyiksaan. Meskipun Pemerintah Thailand melunak dan mencabut segala aturan yang menyulitkan umat Islam, seperti dikatakan sejarawan Asia Tenggara asal Singapura, Michael Vatikiotis, tetap saja hubungan Muslim Melayu dengan Bangkok tidak pernah membaik.<sup>214</sup>

Ketika Thailand dipimpin Perdana Menteri Thaksin Sinawatra, upaya berdamai dengan Muslim Melayu pun telah diupayakan tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Thaksin mencoba memfasilitasi pelajar dari selatan Thailand dalam bentuk beasiswa pendidikan. Tetapi, Muslim Melayu menampik hal itu karena mereka beranggapan Thaksin sedang berinvestasi agar kelak keturunan mereka berutang budi kepada Pemerintah Thailand. Ironisnya, ditengah upaya yang sedang diupayakan Thaksin, Bangkok justru semakin mengembangkan prasangka dan stigma negatif kepada Muslim Melayu sebagai kelompok kriminal yang berlindung dibalik agama. Stigma itulah yang dimanfaatkan tentara Thailand untuk menggelar operasi militer di wilayah Selatan. Sementara itu, ditengan ketertindasan tersebut, kalangan Muslim Melayu semakin gencar menuntut agar Pemerintah Thailand memberikan otonomi khusus sehingga mereka dapat memerintah dan membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Muslim Melayu dapat mengembangkan taraf hidup karena selama ini mereka merasa tidak memperoleh pengayoman dan perlakuan yang sama seperti penganut agama mayoritas di Thailand. Menurut mereka, di negara yang heterogen ini, pemerintah sebagai pihak yang menagungi seluruh warga negara seharusnya mengembangkan budaya saling menghormati terhadap apa yang dianut dan dipercayai orang lain.<sup>215</sup>

#### d) Ukuran (*Size*) Etnis Muslim-Melayu

Selama ini banyak yang mengira Thailand adalah negara yang homogen dengan mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Sejatinya tidaklah demikian. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak

<sup>214</sup>'Muslim Melayu di Thailand Selatan', *Republika*, diakses: 30 Mei 2017.

<sup>215</sup>'Muslim Melayu di Thailand Selatan', *Republika*, diakses: 30 Mei 2017.

pernah mengalami penjajahan di zaman kolonial ini ternyata memiliki keragaman etnis dan agama. Selain pemeluk Buddha, tak sedikit warga Thailand yang memeluk agama lain, seperti Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Yahudi, Singh, dan Tao. Patut dicatat, saat ini Thailand menjadi rumah bagi sekitar 64 juta umat Islam. Pemeluk agama Islam di Thailand berasal dari etnis Persia, Cham (Muslim Kamboja), Bengali, India, Pakistan, serta etnis Melayu dari Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia.<sup>216</sup>

Mayoritas penduduk wilayah Pattani (74%) merupakan Muslim, atau sama dengan 4% dari total penduduk Thailand. Kendatipun di Thailand secara keseluruhan terdapat juga mereka yang menganut agama Islam, orang-orang Islam di empat provinsi di wilayah Selatan ini secara etnis berbeda dengan pemeluk Islam lain di Thailand karena mereka berlatarbelakang etnis Melayu. Karena perbedaan dalam hal etnisitas, tradisi, bahasa, dan agama, mereka telah secara nyata terpisahkan dari masyarakat Thai lainnya; dan karena mereka merupakan etnis minoritas, wilayah empat provinsi ini bisa dianggap sebagai *'tributary territory'* yang membedakan tipe dan tingkah laku sosial orang Melayu dan orang-orang Thai pada umumnya.<sup>217</sup>

Keterangan diatas sejalan dengan pandangan Peter M. Blau bahwa jumlah (*size*)

dapat menentukan terjadinya integrasi dan asimilasi. Semakin kecil jumlah (*size*) suatu komunitas, semakin besar kemungkinan heterogenitas di dalamnya, dan komunitas kecil itu dapat meningkatkan anggotanya untuk berasosiasi dengan orang-orang dari kelompok etnis lainnya dan dengan mereka yang berasal dari komunitas berbeda.<sup>218</sup> Hal ini relevan juga dengan pendapat Elizabeth K. Nottingham bahwa jika masyarakat diharapkan tetap stabil dan tingkah laku masyarakat

<sup>216</sup>Republika, Thursday, 15 June 2017 20 Ramadhan 1438Home > > > Muslim Melayu di Thailand SelatanMuslim Melayu di Thailand SelatanThursday, 01 Jan 1970, diakses: 7 November 2017.

<sup>217</sup>Pitsuwan (1985) dalam Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan...', *op.cit.*, hlm.44.

<sup>218</sup>Peter M. Blau, 'Inequality and Heterogeneity', *op. cit.*, hlm. 99.

tetap tertib dan baik, maka tingkah laku yang baik itu harus ditata dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip (nilai-nilai sosial) tertentu yang disepakati bersama, dengan sasaran pokoknya perilaku manusia. Pada saat nilai-nilai suatu masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti, pada saat itulah anggota masyarakat dapat bersatu menuju ke suatu arah dalam perilaku sosial mereka, meskipun tidak pernah sempurna.<sup>219</sup>

**b. Core of Conflicts**

**a) Kebijakan Integrasi Politik-Administratif**

Dalam kebijakan ini dihadapkan pada konsekuensi kebijakan integrasi politik administratif, pada tingkat struktur kemasyarakatan, Muslim Patani yang beretnis Melayu mulai memasuki wilayah kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi Thailand. Masyarakat Patani kemudian mengikuti proses pembangunan kebangsaan Thailand dengan penerapan segala kebijakan-kebijakan yang dimotori negara (*state policies*) dan mengikuti pelaksanaan program-program asimilasi dan akomodasi pemerintah (*State programs*) bagi tujuan dan kepentingan nasional. Selama kurun waktu paska kebijakan integrasi tersebut, berbagai implementasi kebijakan pembangunan dari pemerintah telah diupayakan dalam bentuk kebijakan dengan landasan semangat nasionalisme Thailand. Semangat ini mengkonstruksikan nilai-nilai kebangsaan Thailand pada tiga asas utama, yaitu, satu agama, satu kerajaan, dan tunduk pada kekuasaan raja (*Thai Rak Thai*). Nasionalisme yang menyokong kesatuan berbangsa ini didasarkan pada kebesarankerajaan Siam dan dominasi mayoritas etnis Thai yang beragama Buddha.<sup>220</sup>

Sejatinya, apa yang terjadi dan dialami dalam kurun waktu pascaperjanjian integrasi kemudian sangatlah kontradiktif: masyarakat Muslim Patani dipaksa menjadi bagian negara kerajaan Siam melalui serentetan program integrasi dengan menjadikan mereka bangsa Thai

<sup>219</sup>Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 37.

<sup>220</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7 No. 1 Tahun 2005, hlm. 89-117.

(*Thai-fikasi*). Pihak Kerajaan Siam secara paksa telah menghancurkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat Patani sebagai suatu entitas politik, budaya, bahasa, dan agama yang telah ada sebelumnya. Kegiatan pembangunan kebangsaan diimplementasikan melalui program migrasi yang dipaksakan (*forced migration policy*), sentralisasi pembangunan dan timpangnya pembagian hasil sumberdaya ditambah lagi dengan implementasi praktek asimilasi (*assimilation*)<sup>221</sup> masyarakat mayoritas Thai baik dalam bidang sosial politik, sosial budaya, maupun sosial ekonomi terhadap Muslim Patani. *Gap* atau jarak yang ada antara penduduk Patani dan pegawai pemerintahan setempat, turut menjadi alasan gagalnya pembangunan pendidikan dan ekonomi. Pegawai pemerintah cenderung berasal dari sentral Bangkok dan tidak mampu melakukan pendekatan terhadap penduduk setempat serta tidak mengerti apa yang mereka rasakan dan apa keinginan penduduk Patani yang berbeda agama, etnik, dan budaya.<sup>222</sup>

Kebijakan integrasi dan proyek pembangunan kebangsaan yang dijalankan oleh pemerintah kerajaan Thailand dalam kenyataannya berdampak dengan semakin menguatnya arah pengkategorisasian masyarakat mayoritas-minoritas dalam kehidupan masyarakat Thailand-Patani. Aksi kekerasan sebagai dampak dari kebijakan tersebut, merupakan implikasi dari kebijakan nasionalis yang merekonstruksi identitas Thai yang monolitik (*creation of Thainess as a single identity*) yang gagal diterapkan (Lubis, 2003). Kegagalan ini disebabkan karena identitas Muslim Patani dibangun di atas simbol-simbol atau atribut seperti: pengalaman sejarah atau *collective memory* tentang kebesaran Kerajaan Melayu Patani di masa lalu, bahasa Melayu, agama Islam, dan kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat lokal menjadi

<sup>221</sup>Asimilasi (*assimilation*) dapat didefinisikan sebagai proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Proses asimilasi akan berlangsung lancar dan cepat apabila ada faktor-faktor pendorong. Contohnya, adanya toleransi antarkebudayaan yang berbeda, adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, adanya sikap menghargai terhadap hadirnya orang asing dan kebudayaan yang dibawa, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama, terjadinya perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Lihat: (Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, 2016, hlm. 2013).

<sup>222</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme...', *op.cit.*, hlm. 89-117.

faktor-faktor yang mengiringi pergulatan mencapai identitas ke-Melayuan Muslim Patani. Identitas Patani yang terdiri dari faktor sejarah dan penaklukan oleh kerajaan Siam, masalah kepentingan ekonomi, persoalan migrasi internal (*resettlement*), dan kegagalan mengakomodasi perbedaan identitas, mendorong masyarakat Melayu Muslim Patani untuk melakukan perlawanan (memberontak) terhadap upaya pemerintah Thailand dalam mempersatukan wilayah mereka. Situasi ini didukung oleh keadaan sosial ekonomi Patani yang cenderung miskin terutama di keempat provinsi Islam bagian selatan, yang antara lain disebabkan tidak mendapat persamaan dalam pembangunan ekonomi dan perhatian pemerintahan sebagai bagian dari wilayah negara Thailand dan kini sebagian besar dari kelompok Muslim tersebut menuntut usaha perbaikan kondisi kehidupan.<sup>223</sup>

Setidaknya, keberadaan identitas nasional yang dibentuk dari persamaan etnis, budaya, agama, kepercayaan, dan adat-sitiadat di Thailand dapat memunculkan kekuatan politik bila dimobilisasi. *Pertama*, kebijakan integrasi dan asimilasi terhadap masyarakat Pattani ke dalam budaya Thai berdasarkan budaya Buddha mendapat pertentangan keras dari masyarakat Melayu Pattani. Nilai-nilai Islam menempati peranan penting dan utama dari identitas orang Pattani. Secara historis, nilai-nilai Islam memang telah berasimilasi dengan budaya tradisional pada periode sebelum masuknya Islam. Munculnya gerakan-gerakan perlawanan orang Melayu Pattani diakibatkan dari kurang relevannya nasionalisme *trinitas* Thailand. *Kedua*, gerakan Pattani menjadi percampuran budaya dan kemudian menciptakan tampilan unik dari identitas kelompok ini, yang dapat dilihat dari struktur sosialnya. Identitas yang bersifat permanen, seperti bahasa, kebiasaan (tradisi dan adat-istiadat), dan keyakinan agama merupakan identitas baku dan asli yang masih dipertahankan oleh kelompok Muslim-Pattani. Faktor etnisitas dan solidaritas keagamaan telah membedakan komunitas orang Pattani dari penduduk Thailand pada

---

<sup>223</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme ....*, *ibid.*, hlm. 89-117.



umumnya, sehingga dapat menginspirasi munculnya kelompok 'pejuang' sebagai perlawanan budaya atas diskriminasi dari etnisitas mayoritas penduduk Thailand.<sup>224</sup>

#### b) Kesenjangan Pemerintah–Masyarakat dan Bahasa

Kurangnya pemahaman antara pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh batasan bahasa yang digunakan, antara Melayu dan Thai, seperti diungkapkan Madakakul<sup>225</sup> sehingga umumnya pegawai administrasi di pemerintahan tidak dipercaya oleh penduduk setempat. Muslim Patani memiliki agama dan budaya yang berbeda, juga memiliki kebiasaan, bahasa, dan etnis yang berbeda pula; sehingga mereka sering dianggap sebagai *outsider*, orang luar dan warga negara kelas dua di Thailand. Kelompok minoritas Muslim Patani seakan tidak mendapat tempat dan mendapat perlakuan yang berbeda. Mereka 'dipandang sebagai kelompok lain (*outsiders*) justru di tanah airnya sendiri. Kenyataan ini bisa menjadi acuan, mengapa daerah Selatan Thailand sering muncul konflik dibandingkan daerah lainnya. Perlakuan diskriminatif yang mereka terima telah menyebabkan kemarahan yang semakin memuncak dan menjurus pada berbagai bentuk aksi kekerasan. Beberapa contoh peristiwa yang memicu aksi kekerasan di antaranya; pembantaian pengunjuk rasa 25 Oktober 2004 lalu, kemudian peristiwa berdarah penyerangan Mesjid Krue Sae 28 April 2004, pencurian senjata dari pos militer di Narathiwat 4 Januari 2004, kerusuhan disertai pembunuhan dan perusakan fasilitas umum adalah rangkaian konflik kekerasan internal yang menjadi fenomena umum dalam waktu-waktu terakhir ini. Semua itu menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kasus kericuhan di wilayah Selatan. Namun demikian, pihak pemerintah Thailand hanya menganggap peristiwa kekerasan sebagai tindakan kriminalitas biasa, tanpa dilihat nilai dari konotasi dampak sosial politiknya dan akar permasalahannya atau dikaitkan

<sup>224</sup>Fatyah, 'Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Agama....', *op. cit.*, hlm. 50-51.

<sup>225</sup>Sanee Madakakul, 1987. *Situation And Problems Of The Three Southermost Provinces*. *Journal Asian review* Vol 1: 67-82; dan lihat pula: (Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7 No.1 Tahun 2005, hlm. 89-117).

## 182 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dengan gagasan separatisme yang diusung oleh kelompok-kelompok perlawanan di Pattani.

Keberadaan Pattani dahulunya merupakan sebuah kerajaan bernama Langkasuka. Kerajaan yang diyakini menjadi cikal bakal dari Kesultanan Melayu Patani. Bukti kehadiran dari kerajaan Langkasuka ini bisa dilihat dalam catatan cerita lama teks India maupun Jawa. Saat itu Langkasuka dipandang sebagai salah satu sasaran ekspedisi angkatan laut India yang perlu ditaklukan dan dikuasai bidang perdagangan mereka. Kemudian cerita kepahlawanan Majapahit tahun 1365 dalam surat *Nagarakartagama*, yang melukiskan Langkasuka sebagai wilayah pesisir timur dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit.

Langkasuka juga merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan *SriVijayan*. Hal ini ditunjukkan melihat asal usul orang Pattani yang berasal dari suku *Javanese-Malay*. Sebagian besar menganggap bahwa *Javanese-Malay* adalah salah satu leluhur orang-orang Melayu di daerah Malaka setelah terjadi penaklukan pada sekitar abad ke-8 dan 9 kemudian berkembang menjadi masyarakat Melayu sekarang. Seiring dengan memudarnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada abad 11 wilayah ini kemudian mendapatkan kemerdekaannya dan menjadisebuah wilayah tersendiri. Langkasuka sendiri merupakan suatu daerah yang cukup banyak diminati oleh beberapa kerajaan yang ada di sekitar Asia Tenggara pada sekitar abad 13 dan 14; kerajaan Angkor di Kamboja, kerajaan Burmese di Pagan, Raja Cholas India, Raja Ceylon, kerajaan di Jawa dan Sriwijaya. Hampir kesemua kerajaan tersebut sempat mengintervensi dan berusaha membuat patokan wilayah independen di daerah tersebut.<sup>226</sup>

Catatan mengenai perkembangan daerah Pattani dalam banyak literatur, selalu di kaitkan dengan proses Islamisasi dan perdagangan yang terjadi di wilayah ini. Dilihat kedudukannya secara geografi, daerah Pattani cukup strategis karena berada di pertengahan jalur lalu

---

<sup>226</sup>Auni bin Haji Abdullah. *Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu*, Darulfikir SDN BHO2001, Malaysia, 2001, hlm.300-303.

lintas perdagangan antara negeri Melayu dan negeri Asia Timur dan di antara perairan selat Malaka serta Laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Patani dipandang sebagai pusat komersial yang penting untuk melayani pedagang-pedagang Islam Arab, India, Eropa maupun Cina. Pattani kemudian menjadi *entrepot* dalam perniagaan, di antaranya dengan menjual hasil bumi berupa rempah-rempah yang ditukar dengan tekstil dan tembikar dari Cina (Teeuw & Wyatt, 1970). Selain sebagai wilayah perdagangan yang cukup maju, Patani merupakan salah satu pusat kebudayaan dan penyebaran Islam di alam Melayu. Melalui jalur perdagangan dengan orang-orang Arab dan India serta saudagar-saudagar Muslim Cina, Islam kemudian diperkenalkan di Pattani dan menjadi agama yang dianut oleh penduduk setempat.<sup>227</sup>

Adanya kontak perdagangan maupun penyebaran Islam tersebut mendorong Pattani menjadi kerajaan makmur dan mencapai puncak keemasan perkembangan wilayah terutama pada kurun waktu abad 15. Zaman keemasan Kesultanan Patani terjadi ketika diperintah oleh empat orang Raja perempuan yaitu Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan Ratu Kuning (1635-1651) yang mampu mempersatukan beberapa wilayah Melayu utara seperti Kelantan, Trengganu dan Perlis. Namun zaman keemasan ini tidak berlangsung lama. Gejolak politik internal kerajaan dalam perebutan kekuasaan serta fluktuasi persetujuan politik dengan Kerajaan Siam menjadi pemicu kemunduran kerajaan Patani. Kekalahan Pattani oleh Siam berlangsung pada tahun 1786 setelah mendapat serangan Phya Taksin Raja Thonburi pemimpin kerajaan Ayudhya. Setelah kejatuhan Patani itu muncul gejolak politik dan kekuasaan yang perdagangan terkena imbas dengan mengalami penurunan daya tarik mereka. (Teeuw & Wyatt 1970, 72-94). Bagi para saudagar asing situasi yang tidak menentu mengakibatkan mereka memindahkan perniagaan ke wilayah baru yang mulai mengalami kemajuan seperti; Johor, Malaka, Aceh, Banten, dan Batavia (Jakarta).<sup>228</sup>

<sup>227</sup>Auni bin Haji Abdullah, 'Islam dan Perdagangan....', *ibid.*, hlm. 303.

<sup>228</sup>Auni bin Haji Abdullah, 'Islam dan Perdagangan....', *ibid.*, hlm. 303.

Zaman keemasan Kesultanan Pattani terjadi ketika diperintah oleh empat orang Raja perempuan yaitu Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan Ratu Kuning (1635-1651) yang mampu mempersatukan beberapa wilayah Melayu utaraseperti Kelantan, Trengganu dan Perlis. Namun jaman keemasan ini tidak berlangsung lama. Gejolak politik internal kerajaan dalam perebutan kekuasaan serta fluktuasi persekutuan politik dengan kerajaan Siam menjadi pemicu kemunduran kerajaan Patani. Kekalahan Patani oleh Siam berlangsung pada tahun 1786 setelah mendapat serangan Phya Taksin Raja Thonburi pemimpin kerajaan Ayudhya. Setelah kejatuhan Patani itu muncul gejolak politik dan kekuasaan yang berdampak langsung pada kekacauan dalam negeri Pattani. Bidang perdagangan terkena imbas dengan mengalami penurunan daya tarik mereka. Bagi para saudagar asing situasi yang tidak menentu mengakibatkan mereka memindahkan perniagaan ke wilayah baru yang mulai mengalami kemajuan seperti; Johor, Malaka, Aceh, Banten, dan Batavia (Jakarta). Pada akhirnya wilayah Patani dapat ditaklukan seluruhnya oleh kerajaan Siam pada tahun 1808 setelah Raja Patani Datuk Pengkalan gagal dalam pemberontakan terhadap pihak Siam. Kekalahan ini menciptakan sentimen anti Siam yang berkembang pada periode setelah kekalahan ini. Untuk meredakan konflik yang terjadi pihak Siam lantas memberlakukan beberapa kebijakan memecah Kerajaan Melayu Patani menjadi 7 wilayah yang dikenal dengan *Boriwen Ched Hua Muang*. Pada tahun 1815 atas perintah Raja Rama II, Patani terbagi menjadi tujuh kawasan negeri yang terdiri dari Patani, Nong Chik, Yaring, Saiburi, Legeh, Yala dan Raman. Kebijakan transformasi tradisi birokrasi kerajaan dimaklumkan dengan istilah "*Sistem Thesaphiban*" yang diterapkan pada tahun 1899.<sup>229</sup>

Hal ini berkaitan erat dengan situasi eksternal yang terjadi kurun waktu abad 18, *Pertama*, Perubahan dasar kebijakan pemerintah kerajaan Siam berkaitan erat dengan situasi pergolakan politik dan

---

<sup>229</sup>Keyes, Charles, 2003, *Ethnicity And The Nation-State: Asian Perspectives*, [www2.chass.ncsu.edu/CIES/Keyes Paper.htm](http://www2.chass.ncsu.edu/CIES/Keyes%20Paper.htm), (diakses: 30 Juli 2017).

keamanan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara pada tahun-tahun 1890-an. Kedua, pada tahun 1890-an, munculnya imperialis besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara di mana penguasa kolonial Perancis dan Inggris telah mulai menjejakkan jajahannya di wilayah Asia Tenggara. Apa yang terjadi dari perlombaan mereka untuk menguasai wilayah mencapai puncaknya pada tahun 1893. Kerajaan Siam semakin sulit posisinya di wilayah semenanjung dan dibuat bingung dengan terbentuknya perjanjian Inggris-Perancis pada 15 Januari 1896. Isi perjanjian tersebut di antaranya menyatakan bahwa kedua belah pihak hanya mengakui kedaulatan wilayah Siam atas Lembah Chao Phrayadan tidak menyebutkan tentang kekuasaan mereka di negeri Melayu utara. Walaupun perjanjian tersebut mengakui keberadaan kekuasaan Siam di Lembah Chao Phraya, pihak kerajaan merasa tetap terancam karena dalam isi perjanjian tersebut tidak menghalangi pihak Perancis atau Inggris bila sewaktu-waktu berusaha menguasai Siam. Dalam perjanjian tersebut tidak menjamin mengenai kemerdekaan dan keutuhan wilayah Siam.<sup>230</sup>

Di bawah *Sistem Thesaphiban*, pembagian wilayah disusun dan dikumpulkan ke dalam satu unit yang dikenali sebagai *Monthon*. Tiap-tiap *Monthon* dipimpin oleh seorang Gubernur (*Khaluang Thesaphiban*) yang bertanggung jawab kepada menteri kerajaan. Di bawah peraturan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Raja Patani menjadi berkurang. Raja-raja tidak lagi mempunyai kuasa untuk melantik pegawai-pegawai kerajaan. Selain itu dalam hal menetapkan beberapa kebijakan daerah setiap raja maupun Gubernur diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan administratur Tinggi Wilayah bersangkutan. Sebaliknya, para wakil raja di daerah hanya memiliki kewenangan untuk melantik atau mengangkat pegawai rendah di wilayah mereka. Kerajaan Melayu Pattani yang sebelumnya merupakan daerah jajahan (*tributary states*) yang memiliki otonomi sebagai sebuah kerajaan, berubah menjadi satuan administrasi yang kendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat di Bangkok. Sejak 1902,

<sup>230</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, 'Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme....', *op.cit.* hlm. 89-117.

kedudukan raja-raja Melayu mulai diturunkan dari jabatannya sebagai raja dan digantikan oleh birokrat-birokrat Thai. Kenyataan ini membuat raja terakhir Patani Tengku Abdul Kadir Kamaruddin III, merasa perlu melakukan upaya perlawanan agar pihak Kerajaan Siam tidak terus menerus melakukan campur tangan urusan dalam negeri-negeri Melayu. Tengku Abdul Kadir Kamaruddin tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan perlawanan terhadap Siam dan sempat menulis surat kepada Sir Frank Sweetenham, gubernur Inggris untuk *Strait Settlement* yang berkuasa di Singapura (Pitsuwan, 1989) supaya ikut membantu dalam mempertahankan serta memulihkan kewibawaan kerajaan Pattani yang berdaulat. Namun usaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak Inggris pada akhirnya menemui kegagalan. Pertimbangan mengapa Inggris tidak mau mencampuri urusan di Pattani karena melihat strategisnya wilayah Semenanjung Malaya adalah Sultan terakhir Kerajaan Patani dari dinasti Kelantan. Raja ini menolak integrasi politik dan administratif Kerajaan Siam dan memerintahkan bawahannya untuk melawan penguasa kerajaan pada tahun 1902. Tindakan Sultan memelopori terjadinya pemberontakan terhadap Siam yang berakhir dengan ditahannya Sultan Abdul Kadir di Pitsanulok sampai 1916.<sup>231</sup>

Saat itu orang-orang Jerman sedang mendesak Bangkok agar memberikan konsesi kepada mereka di pulau Langkawi lepas pantai Andaman untuk dijadikan tempat pengisian bahan bakar bagi kapal kapal mereka, sementara itu Rusia juga sedang bersaing dengan Prancis untuk memperoleh konsesi pembuatan sebuah terusan lintasan di Segenting Kra. Inggris juga sebenarnya memiliki rencana khusus dengan empat daerah taklukan penting di sebelah selatan Patani. Daerah-daerah tersebut dianggap lebih penting. Konsolidasi Inggris disana akan lebih menguntungkan daripada bermusuhan dengan Siam dalam persoalan Patani. Sikap hati-hati dan diplomasi adu domba Inggris membuahkan hasil dengan ditandatanganinya suatu perjanjian antara Inggris-Siam yang memutuskan hasil: menyerahkan wilayah Kedah, Kelantan, Trengganu dan Perlis kepada kekuasaan Inggris.

---

<sup>231</sup>Paulus Rudolf Yuniarto, *Minoritas Muslim Thailand...*, *ibid.*, hlm. 89-117.

Sebagai imbalannya Inggris kemudian mengakui kedaulatan Siam terhadap wilayah Patani dan mengembalikan semua persoalan yang menyangkut hak ekstra teritorial dan kenegaraan kepada pengadilan Siam. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Inggris-Siam 1909 (Keyes, 2003). Akibat dari diberlakukannya isi perjanjian tersebut, kerajaan Melayu Patani yang sebelumnya merupakan daerah jajahan (*tributary states*) dengan kekuasaan otonomi sebagai sebuah kerajaan, kemudian berubah menjadi satu kesatuan administrasi pemerintah pusat kerajaan Thai di Bangkok (*tributary states*) dengan kekuasaan otonomi sebagai sebuah kerajaan, kemudian berubah menjadi satu kesatuan administrasi pemerintah pusat kerajaan Thai di Bangkok.<sup>232</sup>

### c. *Fuse Factors*

Prilaku politik atau respons orang-orang Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Thailand. Kekerasan politik yang pernah terjadi selama tahun 1960-1970-an misalnya adalah sebagai reaksi dari kalangan Muslim Melayu terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Thailand. Ketika Pemerintah Thailand cenderung untuk memperkuat kebijakannya tanpa memperdulikan reaksi kekerasan politik yang dilakukan kalangan Muslim Melayu, dipastikan jumlah kelompok Muslim Melayu yang melawan Pemerintah Thailand juga meningkat. Hal ini tampak bahwa ada kecenderungan separatisme di kalangan Melayu ini secara kontinyu seakan direvitalisasi (*revitalization*). Akan tetapi, seperti dikatakan Pitsuwan (1985) bahwa hal itu bukanlah berarti Pemerintah Thailand secara total mengalami kegagalan dalam menerapkan *policy* integrasi dan asimilasinya. Ditengah konsistensi sejumlah orang Islam Melayu melakukan propaganda separatism, dengan otonomi sebagai tujuan akhirnya, disana terdapat pula beberapa Muslim Melayu yang 'loyal' terhadap Pemerintah Thailand. Mereka berupaya untuk memperoleh keuntungan dari setiap kesempatan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Thailand. Mereka

<sup>232</sup>Selanjutnya lihat: (Keyes, Charles, *Ethnicity And The Nation-State: Asian Perspectives*, [www2.chass.ncsu.edu/CIES/KeyesPaper.htm](http://www2.chass.ncsu.edu/CIES/KeyesPaper.htm), 2003, diakses: 3 Agustus 2017)

## 188 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

berpandangan perlu bekerjasama dengan Pemerintah Thai untuk memecahkan masalah-masalah (ekonomi, administrasi, dan pendidikan) yang dialami masyarakat Muslim Melayu. Mereka mengharapkan dan meminta Pemerintah Thai untuk memperlakukan orang-orang Melayu seperti memperlakukan orang-orang Thai, *freedom and equality*, pemisahan diri dari pemerintah dan masyarakat Thai bukanlah pilihan terbaik. Tetapi, mereka yang memilih pandangan perlunya bekerjasama dengan Pemerintah Thai tidaklah terlalu kuat kiprahnya.<sup>233</sup>

Untuk kalangan separatis, perlawanan terhadap Pemerintah merupakan jalan untuk mencapai cita-cita perjuangan mereka. Mereka berpendapat bahwa orang Islam Melayu tidak akan dapat menjaga dan mengembangkan dirinya sebagai komunitas etnis ke dalam masyarakat yang baik dan modern selama mereka dibawah Pemerintah Thailand. Pandangan ini didukung oleh tujuan utama perjuangan mereka, yakni otonomi dan kemerdekaan dari Pemerintah Thailand. Gerakan separatis merupakan paling bergema yang mewakili orang-orang Melayu di empat provinsi Thailand Selatan. Semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah konflik di Thailand Selatan ini dilakukan kalangan separatis ini, yang menolak hampir total untuk bekerjasama dengan Pemerintah. Mereka misalnya tidak mau menggunakan fasilitas pendidikan modern yang disediakan oleh Pemerintah Thailand. McBeth mengungkapkan jumlah mahasiswa Islam yang belajar di Universitas Pattani berjumlah hanya 3%. Minimnya jumlah ini disebabkan adanya persepsi bahwa pendidikan tersebut merupakan media Buddhaisasi. Karenanya, dari pada mengirim anak-anak mereka belajar ke Universitas Pattani, lebih baik mereka mengirimkan anak-anaknya ke Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Beberapa mahasiswa ini belajar mata kuliah Islam, sehingga mereka kemudian sangat terpengaruh oleh identitas Islam yang diwarnai oleh kebanggaan etnis mereka. Anak-anak ini diharapkan bisa menjadi pemimpin Melayu kelak setelah selesai pendidikan, dengan bekal pengetahuan Islamnya. Disisi lain, Pemerintah Thailand, melihat anak-anak ini akan

<sup>233</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik dan Agama...', *op.cit.*, hlm. 47-48.



menjadi masalah dikemudian hari karena mereka memiliki pengalaman luas di luar negeri yang dapat mendukung kemampuan politik mereka.<sup>234</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Thailand untuk mengatasi persoalan konflik etnis dan agama, *ethnic-religious conflicts*, agaknya belum memperlihatkan hasil menggembirakan. *Pertama*, di bidang pendidikan, di mana adanya respons yang berbeda dari kalangan orang Muslim Melayu, dan sebagian memilih sikap penolakan karena adanya kecurigaan terhadap Pemerintah Thailand yang menempatkan kebijakan sebagai upaya mensukseskan upaya-upaya politik integrasi. Orang Muslim Melayu juga merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Thailand terhadap tutupnya 109 pondok pesantren dikarenakan diharuskan memasukkan mata pelajaran Matematika, Bahasa Thai, dan Ilmu Sosial, disamping Mata Pelajaran Agama Islam.<sup>235</sup>

*Kedua*, di bidang komunikasi/bahasa, tampak belum menunjukkan hasil yang optimal pula. Penyebaran birokrasi umumnya masih didominasi oleh orang-orang Thai. Kebanyakan orang Thai tidak bisa berbahasa Melayu sehingga birokrasi mengalami kesulitan menyampaikan pesan-pesan Pemerintah. Tetapi, kendatipun terdapat pegawai pemerintah yang dapat berbahasa Melayu pun tidak menyelesaikan masalah dikarenakan jumlah mereka yang kecil dan pendidikan mereka yang rendah. *Ketiga*, dibidang ekonomi memperlihatkan hal yang sama. Kesenjangan antara penduduk Melayu yang berpendapatan rendah pada satu sisi; dan orang-orang Thai dan Cina berada pada strata ekonomi tertinggi. Hal ini telah memunculkan kecemburuan bagi kalangan etnis Melayu dikarenakan di daerah mereka, Thailand Selatan, dikenal kaya akan penghasilan getah karet. Selain itu, sebagian besar orang-orang Muslim Melayu juga berpandangan bahwa program kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Thailand sebagai upaya untuk melemahkan nilai-nilai sosio-kultural yang sejauh ini telah digunakan sebagai dasar untuk

<sup>234</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik...', *ibid.*, hlm. 48.

<sup>235</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik...', *ibid.*, hlm. 48.

## 190 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

menghadapi penetrasi Pemerintah ke dalam masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan.<sup>236</sup>

### d. *Triggering factors*

Sebagai *triggering factors* dapat dijelaskan bahwa selama 1990-an dan awal 2000-an, situasi di Thailand Selatan relatif amanlah akhir 1980-an. Tidak ada perlawanan bahkan pemberontakan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi pada awal 2004 terjadi lagi kekerasan di Pattani setelah mereda pada akhir 1980-an yang ditandai kesediaan para pemberontak untuk mengakhiri perjuangan bersenjata—menyusul dikeluarkannya program Amnesti Pemerintah. Berdasarkan data Pengawas Hak Asasi Manusia (*Human Right Watches*) memperkirakan bahwa kembalinya kekerasan di Thailand Selatan antara Januari 2004-Juli 2007 telah menyebabkan kematian lebih dari 4.200 orang dan luka-luka 4.000 orang.<sup>237</sup>

Pada kurun waktu 1979 hingga 2003, korban kekerasan hanya 233 orang meninggal dunia. Korban yang terjadi sejak 2004 hingga 2007 tersebut tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat Buddha Thailand, dan Muslim Melayu yang melakukan penyerangan, serta petugas penguasa Thailand saja, tetapi termasuk juga dari kalangan masyarakat Muslim yang tidak bersalah yang dicurigai sebagai mata-mata Pemerintah. Kekerasan juga tidak hanya dilakukan pemberontak tetapi juga dilakukan aparat keamanan. Sejak Januari 2004 hingga Juli 2009, berdasarkan data Komisaris Pusat Operasi Polisi Perbatasan Selatan, Lt. Gen. Phira Phumpichet, telah terjadi 9.947 insiden kekerasan. Kekerasan ini terdiri dari 5.162 penembakan, 1.612 pengeboman dan 1.403 pembakaran.<sup>238</sup>

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi setelah pada 2004 disebabkan para militan Pattani mulai mengubah 'modus operandi' yang dilakukan. Mereka merupakan 'para

<sup>236</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik Etnik...', *ibid.*, hlm. 51-54.

<sup>237</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik...', *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>238</sup>Endang Turmudzi, 'Akar Konflik...', *op. cit.*, hlm. 55.

militan generasi baru yang dilatih berperang dengan gaya serangan tembak lari (*hit and run*) terhadap pasukan anggota keamanan. Gaya perang ini berbeda sekali dengan gaya perang yang dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Terlepas dari itu, hal ini memperlihatkan bahwa para militan Pattani menegaskan kembali ekspresi politik dan permusuhan mereka yang terus-menerus terhadap penguasa Thailand setelah mereka berhenti selama satu dekade.<sup>239</sup> Kasturi Mahkota, berpendapat bahwa perjuangan para militan Pattani ini bukanlah Jihad Islam, tetapi perjuangan untuk melestarikan budaya Muslim yang unik di Thailand Selatan. Mereka tidak ada hubungannya dengan gerakan persaudaraan Islam Internasional, seperti al-Qaeda atau Jama'ah Islamiyah. Pandangan ini ada benarnya, mengingat para militan tidak menyebutkan tuntutan politik mereka.<sup>240</sup>

Jadi, *triggering factor* yang utama yang dapat memicu munculnya konflik *socio-ethno-religious* adalah bertalian dengan perjuangan mereka (para militan) untuk menjaga dan melestarikan identitas kultural-keagamaan orang Muslim Melayu di Thailand Selatan. Ide untuk melestarikan identitas budaya dan agama telah mengakar dalam hati semua Muslim di Thailand Selatan, yang dapat dikatakan sebagai 'harga mati'.

Selanjutnya, *triggering factor* selanjutnya adalah bertalian dengan beragam ketimpangan struktur sosial-ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa orang Muslim Melayu disana telah sejak lama menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, perilaku diskriminatif aparat, dan rendahnya capaian pendidikan (*educational attainment*), dan lain-lain. Kesulitan ekonomi dan buruknya kondisi infrastruktur di wilayah Thailand Selatan yang sangat berbeda dengan penduduk Thailand yang mayoritas Buddha, dapat mempermudah terjadinya kembali perlawanan dan pemberontakan, sekalipun dapat disebabkan hal-hal yang sederhana atau 'sepele' tetapi bersentuhan pada *triggering factors* tersebut.

<sup>239</sup>Endang Turmudzi, 'Konflik Etnis...', *ibid.*, hlm. 57.

<sup>240</sup>Endang Turmudzi, 'Konflik Etnis...', *ibid.*, hlm. 57.

## 192 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Bradley R. Schiller<sup>241</sup> dalam bukunya *The Economics of Poverty and Discrimination (1989)*, mengatakan bahwa anak-anak kulit putih Amerika Serikat tersingkir akibat adanya diskriminasi pendidikan, yakni mereka tidak dapat berpindah dari lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah orang kulit hitam. Tapi, meskipun di mana-mana tidak terdapat orang-orang kulit hitam, orang kulit putih miskin mungkin dibatasi untuk sekolah-sekolah yang terisolasi dan kurang berkualitas. Masyarakat bahkan tampak homogen atas dasar persamaan pendapatan (*income*) ketimbang karena berdasarkan etnis, ras, agama. Kelompok keluarga miskin dilokasikan di area tertentu pada suatu kota. Selain itu, badan-badan administratif yang sebagian berkomposisi orang-orang kaya, maka sekolah pada masyarakat miskin tersebut tampak memiliki kesamaan dalam hal kekurangan fasilitas.

### 5. Konflik Etnis-Agama: Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Pada mulanya, penduduk asli Malaysia adalah etnis Melayu. Namun, pada masa penjajahan Inggris di Malaysia antara tahun 1910-1918, Inggris membawa pekerja dari etnis Tamil di India Selatan untuk menjadi pekerja pada perkebunan karet dan pertambangan timah di Malaysia. Kemudian, di tahun 1919 sampai 1929 terjadi imigrasi etnis Cina ke Malaysia. Etnis Cina ini kemudian menetap di daerah perkotaan Kuala Lumpur dan banyak yang menjadi pedagang. Sejak saat itu, etnis Cina di Malaysia menguasai perdagangan di Malaysia sekaligus menguasai sebagian besar kekayaan negara. Sedangkan etnis Melayu sebagai penduduk asli Malaysia tetap miskin. Hal ini yang menjadi pemicu terjadinya konflik etnis di Malaysia pada 13 Mei 1969 antara etnis Cina dan etnis Melayu. Konflik etnis tersebut merupakan refleksi dari ketimpangan kekayaan antara etnis Cina dan etnis Melayu. Etnis Melayu yang merasa sebagai penduduk asli tidak terima akan adanya

---

<sup>241</sup>Bradley R. Schiller, *The Economics of Poverty and Discrimination*, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989, page 145.

dominasi ekonomi etnis Cina di Malaysia sampai akhirnya terjadilah insiden 13 Mei 1969.<sup>242</sup>

Ibrahim Suffian, direktur perusahaan Poll Pendapat Merdeka Centre dalam *The Straits Times* (25/12/2015), mengungkapkan bahwa suasana sepi kedua pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur itu, tak terlepas dari perkelahian massal berbau rasialis. Yakni antara penduduk Melayu dengan kelompok Tionghoa, yang kebanyakan menjadi penjual telepon pintar di pusat perbelanjaan. Kedua kelompok tidak saling percaya lagi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melorot dan pemerintahan yang kurang tegas. Perseteruan itu dipicu oleh kasus penipuan yang dilakukan penjual telepon selular keturunan Tionghoa terhadap seorang pembeli pribumi, di Mall Kota Raya Juli 2015 lalu. Buntutnya 20 pemuda Melayu menyerang Kota Raya yang menjadi pusat penjualan telepon selular Malaysia. Kasus rasialis ini berkembang pula hingga Low Yat Plaza, setelah Mohammad Ali Baharom memberi orasi anti-China di luar Plaza tersebut, yang dikatakan bahwa "kaum Melayu akan bangkit dan menantang pedagang China di Malaysia" Ali Baharom ditahan beberapa hari dan dibebaskan dengan jaminan. Sejak itu perseteruan rasial antara kelompok Tionghoa dan Melayu makin berkembang dan memanas. Lebih-lebih semakin banyak kelompok pribumi yang menuduh etnis China melakukan kecurangan. Di antaranya kelompok Isma dan Asosiasi Konsumen Islam. Perseteruan antaretnis ini makin berkembang hingga kini. Kelompok etnis minoritas China yang bergabung dalam kelompok berkaos kuning di bawah nama 'Bersih', melawan kelompok pribumi berkaos merah yang mendukung pemerintahan PM Najib Razak yang diduga menilap dana 1 miliar. "Bila terjadi perebutan kekuasaan di lapisan atas, maka politik rasialisme akan dimainkan pula." Dr. Oh Ein, salah satu pengajar di Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura mengungkapkan bahwa "perhatian rakyat dialihkan dari perebutan politik di tingkat atas". Sebagai respons pemerintah dalam hal ini, Ismail Sabri Yaakob, salah satu menteri Malaysia dan pemimpin partai terbesar UMNO,

<sup>242</sup>'Protes Anti Cina Semakin Memanas', *The Straits Times*, Jumat (25/12/2015), diakses: 2 Agustus 2017, dan lihat pula: Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis India di Malaysia', 3 April 2012 (diakses: 1 Agustus 2017).

## 194 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

mendirikan Mara Digital Mall, khusus bagi pengusaha pribumi. Mal yang berada di salah satu gedung milik Pemerintah Malaysia itu memberi banyak kemudahan. Termasuk membebaskan biaya sewa bagi pengusaha telepon genggam.<sup>243</sup>

Sejumlah kasus yang kini berkembang bertalian dengan kejadian konflik sosial-etnis di Malaysia terutama di Kuala Lumpur bertanda bahwa potensi konflik sosial dan agama di negara jiran ini ke depan masih dalam kategori 'rawan'di mana suatu saat bisa saja terjadi kembali. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan diungkapkan beberapa faktor utama yang secara akumulatif sebagai penyebab terjadinya konflik etnis dan agama di Malaysia.

### *c. Facilitating Context*

#### a) Ketimpangan Ekonomi

Seperti diketahui bahwa kasus konflik etnis-rasial atau insiden 13 Mei 1969 yang meletus di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu yang menyebabkan ratusan orang tewas. Sejak 1963, suhu politik di Malaysia mulai menghangat akibat maraknya isu ketimpangan ekonomi antara penduduk keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang yang menguasai sebagian besar ekonomi Malaysia dengan golongan miskin penduduk Melayu. Akibat sistem kolonial Inggris yang diwariskan, etnis Tionghoa menguasai sebagian besar kekayaan negara. Puncak dari isu ketimpangan yang meletus dalam bentuk kerusuhan rasial di Singapura pada 1964, menjadi salah satu penyebab keluarnya Negara Bagian Singapura dari Persekutuan Malaysia dengan tetap memanasakan ketegangan rasial. Kebanyakan orang Melayu tidak puas dengan Negara Singapura merdeka, karena didominasi etnis Tionghoa. Lalu isu-isu berlatar golongan dan ras yang menyulut emosi dan antipati menjadi tema utama sepanjang kampanye Pemilu 1969 yang mengakibatkan meningkatnya semangat permusuhan antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa di Malaysia. Selama kampanye Pemilu

<sup>243</sup> Agus Sunyoto, 'Mei 1969 Akibat Melayu Miskin di Negeri Sendiri', diakses: 31 September 2017).

1969, para calon serta anggota-anggota partai politik, khususnya dari partai oposisi, mengangkat soal-soal sensitif yang berkaitan dengan bahasa nasional (Bahasa Melayu), kedudukan istimewa orang Melayu (Bumiputera), hak kerakyatan warga non-Melayu yang terabaikan, di mana hal ini menimbulkan sentimen rasialis dan kecurigaan antar etnis. Partai Perikatan yang disebut Barisan Nasional (UMNO-MCA-MIC) ternyata mengalami kekalahan telak dalam Pemilu 1969. Jumlah kursi yang dimenangkan Partai Perikatan dalam Dewan Rakyat (Parlemen) telah menurun dari 89 kursi pada 1964 menjadi 66 kursi pada 1969. Partai Perikatan kehilangan sebanyak dua pertiga kursi dalam Dewan Rakyat. Sementara Partai Gerakan, DAP, PPP menang 25 buah kursi dalam Dewan Rakyat, begitu pun partai PAS menang 12 kursi.<sup>244</sup>

Pada Pemilihan Umum 10 Mei 1969, koalisi Aliansi pemerintah diketuai oleh *United Malays National Organization (UMNO)* menderita kekalahan terbesar sejak 1955 sekali pun UMNO masih tetap memenangi Pemilu. Partai terbesar golongan etnis Tionghoa, Democratic Action Party (DAP) dan Partai Gerakan mendapat suara signifikan dalam pemilihan, dan berhak untuk mengadakan pawai kemenangan melalui jalur yang telah ditetapkan di Kuala Lumpur. Pihak oposisi mengadakan pawai besar untuk merayakan kemenangannya. Dr. Tan Chee Khoon dari Partai Gerakan yang menang besar di kawasan Batu, Selangor, meminta izin dari polisi untuk mengadakan pawai kemenangan partainya di Selangor. Pawai ini menyebabkan kemacetan di jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Pawai kemudian bergerak ke Jalan Campbell dan Jalan Hale dan menuju ke Kampong Bahru. Sementara itu di Kampong Bahru, yang penghuninya lebih dari 30.000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO, masyarakatnya merasa terancam dengan kemenangan pihak oposisi di mana Kampong Bahru merupakan kediaman Menteri Besar Selangor, Dato' Harun bin Idris. Di tengah hiruk pawai oposisi, di Jinjang, Kepong, seorang Tionghoa yang meninggal akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan izin polisi. Namun perarakan kematian itu berubah

---

<sup>244</sup>Agus Sunyoto, 'Mei 1969 Akibat Melayu Miskin....', *ibid.*

menjadi perarakan kemenangan pemilu dengan caci-maki penghinaan terhadap etnis Melayu. Peristiwa itu makin memanaskan suasana. Untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan, pada hari Selasa 13 Mei 1969, Yeoh Tech Chye selaku Presiden Partai Gerakan memohon maaf atas tindakan anggota-anggotanya yang melampaui batas selama pawai. Yeoh sendiri menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tapi permohonan maaf sudah terlambat karena dalam Senin 12 Mei 1969 itu pawai etnis Tionghoa itu selain menghina etnis Melayu, orang-orang Tionghoa yang pawai membawa sapu di kendaraan mereka sebagai lambang kemenangan mereka yang berhasil menyapu bersih kursi sambil meneriakkan slogan kemenangan. Namun, ada yang menafsirkan bahwa "sapu" tersebut menunjukkan rencana etnis Tionghoa untuk menyapu bersih orang-orang Melayu dari daratan Malaya ke laut. Lebih menyakitkan, dalam pawai itu orang-orang Tionghoa mencaci-maki dan meludah dari atas truk-truk yang mereka naiki ke arah orang Melayu yang berjalan di pinggir jalan. Akhirnya, meski Partai Gerakan mengeluarkan permintaan maaf keesokan harinya tetapi sudah terlambat karena pimpinan UMNO terlanjur mengumumkan pawai tandingan yang dimulai darikediaman kepala negeri Selangor, Dato' Harun bin Idris, yang terletak di Jalan Raja Muda pada tanggal 13 Mei 1969. Orang-orang Melayu pun berkumpul di rumah Menteri Besar Selangor. Di antara massa yang datang dan berkumpul di kediaman Dato' Harun Idris sebagian membawa senjata pedang, parang panjang, tombak, klewang, dan bambu runcing di mana mereka menunggu lampu hijau dari Dato' Harun bin Idris untuk mengamuk. Dato' Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor ketika itu mencoba menenangkan keadaan.<sup>245</sup>

Di tengah kerumunan pendukung UMNO yang mayoritas etnis Melayu yang sudah tersulut amarah itu, kira-kira pukul 15.00 tersiar kabar bahwa rombongan etnis Melayu yang sedang menuju ke kediaman Dato' Harun bin Idris telah diserang oleh etnis Tionghoa anggota Partai DAP dan Gerakan di Kampong Setapak, kampong yang berjarak dua kilometer di utara Jalan Raja Muda. Para pendukung

<sup>245</sup> Agus Sunyoto, ' Mei 1969 Akibat Melayu....' *ibid.*



UMNO yang sudah berkumpul itu tersulut amarah. Sambil berteriak-teriak akan mengadakan pembalasan mereka mengacungkan senjata. Kebetulan dua pengendara sepeda motor etnis Tionghoa lewat yang langsung dicegat terus dibunuh. Sebuah van yang dikemudikan orang Tionghoa yang membawa rokok dibakar dan pengemudinya dibunuh. Kabar pembunuhan atas tiga orang etnis Tionghoa itu menyulut amarah pemuda-pemuda Tionghoa yang sebagian berasal dari Polisi Kerajaan Malaysia dan organisasi-organisasi liar. Mereka berinisiatif untuk mengambil tindakan pembalasan. Dengan membawa aneka senjata seperti tombak, trisula, pedang, lonjoran besi iring-iringan barisan pemuda Tionghoa itu menyerang dan membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Begitulah, kerusuhan etnis pun meledak dan tidak terelakkan ketika etnis Melayu melakukan tindak pembalasan.<sup>246</sup>

Pemerintah pun mengumumkan keadaan darurat. Tidak seorangpun penduduk diizinkan keluar dari rumah. Pasukan polisi berpatroli di sekitar Kuala Lumpur. Pasukan FRU disiagakan di Kampong Bahru. Tentara dari Resimen Ranger pun dikerahkan untuk menjaga keselamatan penduduk di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi, Pasukan FRU dikeluarkan dari Kampong Bahru digantikan Resimen Ranger yang mengambil alih keadaan. Celakanya, Pasukan Ranger ini terdiri dari etnis Melayu, Dayak Iban, Tionghoa, dan India justru ikut menembaki orang-orang Melayu sehingga menyebabkan orang-orang Melayu semakin marah apalagi setelah diketahui bahwa Ketua Resimen Ranger adalah seorang Tionghoa. Keterlibatan Pasukan Ranger meningkatkan keberanian pemuda-pemuda Tionghoa dari organisasi-organisasi liar, di mana dalam sebuah aksi mereka mengepung bioskop Odeon, di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan dengan tulisan Cina disiarkan di layar bioskop itu meminta penonton keturunan Tionghoa untuk meninggalkan bioskop. Iklan yang ditulis dalam bahasa Tionghoa itu tidak difahami etnis Melayu yang berada di dalam bioskop. Akhirnya, sewaktu bioskop Odeon dibakar, penonton dari etnis Melayu yang berada di dalam bioskop tersebut banyak yang

<sup>246</sup>Agus Sunyoto, ' Mei 1969 Akibat Melayu....' *ibid.*,

mati, termasuk dua orang tentara Melayu yang tinggal di Sungai Ramal, Kajang. Seorang polisi bernama Rahim, penduduk Kuala Lumpur yang menonton film di bioskop Odeon terkena bacokan di kepalanya dan berpura-pura mati. Ia masih hidup hingga sekarang dan menjadi saksi sejarah kerusuhan etnis itu. Akibat tindakan membakar hidup-hidup penonton bioskop ini, orang-orang Melayu melakukan tindakan balas dendam dengan menyerang orang-orang Tionghoa, di mana dalam aksi pembalasan itu kepala seorang Tionghoa yang dipenggal ditusuk tombak dan dipancang di atas pagar. Penduduk yang sudah bersiaga beramai-ramai keluar rumah dan menyerang langsung pemuda-pemuda Tionghoa yang ternyata melengkapi diri dengan pedang, tombak, trisula, dan obor.<sup>247</sup>

Selanjutnya, terjadi perkelahian massal yang dalam tempo singkat dimenangkan penduduk Kampong Datuk Keramat. Setelah meninggalkan puluhan mayat di jalanan, selokan, bak truk, dan kebun, warga kampong yang dipimpin beberapa orang mantan anggota KKO (marinir)—yang sebagian tidak kembali ke Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soekarno dan menjadi warga Malaysia—bergerak menuju ke Kampong Bahru untuk menyerang Pasukan Ranger. Pagi menjelang subuh, di tengah kobaran api yang membakar kedai-kedai dan toko-toko milik etnis Melayu di sekitar Kampong Bahru, terutama di Jalan Tuanku Abdul Rahman, terjadi serangan atas Pasukan Ranger dan toko-toko emas milik etnis Tionghoa disertai penjarahan dan perampokan. Sejumlah Pasukan Ranger tewas dan luka-luka dalam perkelahian melawan penduduk. Akhirnya Resimen Ranger ditarik dari Kampong Bahru digantikan oleh Pasukan Melayu. Pengamanan diambil-alih oleh Pasukan Melayu. Menurut laporan, beberapa orang anggota Pasukan Melayu yang berpakaian preman terlihat ikut gerakan massa masuk ke toko-toko emas Tionghoa dan merampoki harta benda di sana<sup>248</sup>

Pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan Kampong Bahru dengan didukung penduduk migran asal Indonesia mengamuk karena merasa diri mereka terkepung di antara serangan orang-orang

<sup>247</sup>Lihat kembali: (Agus Sunyoto, ' Mei 1969 Akibat Melayu Miskin....', *ibid.*).

<sup>248</sup>Agus Sunyoto, ' Mei 1969 Akibat Melayu Miskin....', *ibid.*

Tionghoa dan Pasukan Ranger, terutama setelah diketahui beberapa serangan ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor Dato' Harun bin Idris. Perlawanan pecah di mana-mana. Entah siapa yang memulai, ketika kerusuhan meledak pengeras suara di masjid-masjid digunakan untuk membakar semangat para pemuda Melayu agar melanjutkan aksi mereka. Sebuah serangan yang dilakukan pemuda-pemuda Tionghoa di pinggiran Kuala Lumpur yang berakibat fatal adalah serangan atas Kampong Datuk Keramat yang sebagian besar dihuni penduduk asal Bawean, Madura dan arek-arek Surabaya. Malam hari sekitar jam 02.00 sewaktu beberapa orang warga mengambil air wudhu untuk melakukan sholat malam, mereka memergoki tiga truk berhenti di pinggir kampong. Setelah diamati, ternyata pemuda-pemuda Tionghoa terlihat menurunkan drum-drum berisi bahan bakar yang diduga untuk membakar Kampong Datuk Keramat. Keadaan darurat nasional dan jam malam pun diumumkan oleh Pemerintah Malaysia pada 16 Mei 1969. Tetapi pada 18 Mei 1969 jam malam dikurangi di beberapa bagian di negara tersebut dan kemudian dihilangkan dalam waktu seminggu di pusat kota Kuala Lumpur. Akibat kerusuhan yang pecah pada 13 Mei 1969 itu, sesuai data kepolisian Malaysia, sejumlah 184 orang meninggal, 356 orang luka-luka, terjadi 753 kasus pembakaran yang tercatat dan 211 buah kendaraan hancur atau rusak berat. Sumber lain menyebutkan jumlah yang meninggal sekitar 196 orang atau bahkan lebih dari 200 orang. Sementara beberapa sumber independen memperkirakan jumlah kematian mencapai 700 orang lebih. Segera setelah pecahnya kerusuhan, pemerintah memberlakukan Undang-undang Darurat dan membekukan parlemen. Pers juga dibekukan. Dewan Operasi Nasional dibentuk. Kerusuhan ini menyebabkan Mahathir Mohamad, tokoh nasionalis Melayu saat itu, dipecat dari UMNO. Namun kejadian ini pun mendorongnya untuk menulis karya pentingnya *The Malay Dilemma*, (Dilema Melayu). Dalam buku ini ia mengusulkan sejumlah alternatif pemecahan terhadap ketegangan rasial di Malaysia. Dalam Peristiwa 13 Mei 1969 itu Tunku Abdul Rahman dipersalahkan oleh orang Melayu dan seluruh warga Malaysia. Setelah kejadian itu, Tunku meletakkan jabatannya pada tahun 1970. Tetapi buku "*Malay Dilemma*" yang ditulis

## 200 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad dilarang beredar karena pasangan Anwar Ibrahim itu dalam bukunya dianggap menjelek-jelekkan Tunku Abdul Rahman.<sup>249</sup>

Dalam perebutan kekuasaan di UMNO menyusul dipecatnya Dr Mahathir Muhammad, Tunku Abdul Rahman digulingkan dari jabatan Perdana Menteri. Pemerintahan yang baru didominasi oleh kelompok "ultra-Melayu" yang dengan segera bertindak untuk menenangkan masyarakat Melayu dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang mengandung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum Bumiputra (Melayu). Undang-undang pers Malaysia yang keras yang berusaha untuk mengendalikan ketegangan rasial ditetapkan pada masa ini. Untungnya kerusuhan antargolongan etnis ini tidak meluas menjadi kasus nasional karena kerusuhan tidak terjadi di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Sabah, Serawak, kecuali di Melaka yang ditandai oleh sedikit kerusuhan. Namun, Peristiwa 13 Mei 1969 yang kelabu itu diingati oleh politisi Malaysia sebagai puncak kemarahan orang Melayu yang terakumulasi lama karena mereka mendapati diri miskin di tanah air sendiri.<sup>250</sup>

### b) Hak Istimewa Etnis Melayu

Ketimpangan terjadi sejak awal dan diperlebar selama penjajahan. Selama penguasaan kolonialisme Inggris, Melayu diberikan hak-hak istimewa dibandingkan etnik non-Melayu, misalnya diberikan kuota yang lebih banyak pekerjaan di sektor pemerintahan. Ketika Federasi Malaya (Malaysia Barat) mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1957, Konstitusinya berisikan sebuah ketentuan (dalam Ayat 153) yang memberikan hak-hak khusus bagi bangsa Melayu. Artinya memang konstitusi yang digunakan di Malaysia seringkali hanya berpihak pada kepentingan salah satu ras (suku) saja. Komisi Reid, yang menyusun draft konstitusi itu menyatakan bahwa, "*In due course the present preferences should be reduced and should ultimately cease.*" Ketika Ma-

<sup>249</sup>Agus Sunyoto, 'Mei 1969 Akibat Melayu....', *ibid*

<sup>250</sup>File:///E:/Carapan Sosial Politik/Hubungan Internasional/Dani HI UMM/Skripsi/Bab II.docx. (diakses: 31 Juli 2017).

laya bergabung dengan Singapura, Sabah, dan Sarawak pada 1963 dalam Federasi Malaysia) konstitusi baru mempertahankan Artikel 153, dan definisi bumiputra diperluas dengan mencakup suku-suku asli di Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Karena terjadi ketegangan antara pemerintah pusat (federal) dengan negara bagian dan penentangan terhadap hak-hak khusus etnik Melayu, maka Singapura keluar dan Federasi pada 1965. Komisi Reid menekankan bahwa maksud dari Artikel 153 tersebut adalah menghilangkan ketidakseimbangan antara etnik China dan Malaysia untuk menciptakan kesetaraan ekonomi. Tetapi, di masa-masa awal pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Malaysia, pendapatan ekonomi bumiputra tidak juga meningkat dan hanya mendapatkan 2,4% dan seluruh ekonomi, sisanya dikuasai China dan pihak-pihak luar negeri. Inilah yang memicu kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969 tersebut.

Karena kerusuhan, pemerintah mengumumkan keadaan darurat dan Parlemen dibekukan, Pemerintah membentuk *National Operations Council* (NOC), diketuai oleh Tun Abdul Razak. Target awal kebijakan NEP adalah untuk mengubah rasio kepemilikan ekonomi di Malaysia dari 2,4:33:63 (bumiputra: orang Malaysia lain: orang luar negeri) menjadi 30:40:30. Target itu dilakukan dengan redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik bumiputra dan 2,4% menjadi 30% dan seluruh kepemilikan saham nasional. Target 30% untuk bumiputra digagas oleh Ismail Abdul Rahman setelah pemerintahannya tidak mampu mendatangkan konsensus dalam sebuah tujuan kebijakan yang sesuai.<sup>251</sup>

### c) *New Economic Policy* (NEP)

Kerusuhan 1969 yang menyebabkan kematian ribuan orang menyadarkan bahwa jika ketimpangan tidak diatasi maka akan terjadi sebuah kehancuran negeri. Hal inilah yang memicu munculnya Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/NEP*), sebuah kebijakan yang ambisius dan kontroversial untuk mengubah struktur

---

<sup>251</sup>Lihat: (File:///E:/Garapan Sosial Politik/Hubungan Internasional/Dani HI UMM/Skripsi/Bab II.docx. (diakses: 31 Juli 2017).

## 202 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

ekonomi sosial masyarakat Malaysia. Diluncurkan pada 1971 di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, NEP bertujuan menghilangkan ketimpangan ekonomi antara minoritas etnik China yang kaya dengan mayoritas etnik Melayu yang miskin. Pada 1975, pemerintah menciptakan insentif untuk memperluas industri manufaktur berskala besar dan bagi industri energi intensif. Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM), misalnya, dibangun untuk membantu industri besi, aluminium, kertas, dan ampas kayu, baja, semen, sepeda motor, dan rekayasa teknologi berat. Pada saat yang sama, insentif ekspor juga diberikan.<sup>252</sup>

### d) Klaim Didiskriminatif Etnis India

Akibat dari terjadinya konflik etnis dan rasial pada tahun 1969, pemerintah Malaysia kemudian membuat sebuah kebijakan ekonomi yang sangat kontroversial. Kebijakan ekonomi tersebut dikenal dengan istilah NEP (*New Economic Policy*). NEP adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Malaysia untuk menyeimbangkan pendapatan serta menaikkan kesejahteraan ekonomi bumiputera atau etnis Melayu dibandingkan dengan etnis lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak saat itu membuat sistem perekonomian Malaysia berubah total. Malaysia sejak saat itu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras. Pada kenyataannya keikutsertaan yang pantas itu hanya sebuah pembohongan. Karena keikutsertaan yang pantas bagi semua ras seperti yang dijanjikan dalam kebijakan NEP tersebut tidak pernah terjadi. Sebaliknya, yang ada hanyalah kebijakan (diskriminatif) yang mengutamakan etnis Melayu daripada etnis lainnya. Etnis non-Melayu semakin ditekan dan dibatasi ruang geraknya terutama dalam bidang ekonomi dengan adanya kebijakan NEP.<sup>253</sup> Sejauh ini kebijakan NEP tersebut telah membawa perubahan dan perbaikan positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan etnis Melayu di Malaysia. Beda hanya

---

<sup>252</sup>Indah Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis India di Malaysia', 3 April 2012, (*diakses: 1 Agustus 2017*).

<sup>253</sup>Lihat: (Indah Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis India di Malaysia....', *ibid.*)

dengan etnis Cina yang NEP hingga kini ditanggapi sebagai diskriminatif. Hal ini juga tentunya sebagai tantangan pengelolaan etnisitas di Malaysia ke depan.

Pemerintah Malaysia berpandangan bahwa NEP bukan suatu bentuk diskriminasi ekonomi terhadap etnis non Melayu di Malaysia. Namun, pada kenyataannya NEP hanya menguntungkan satu kelompok etnis saja yaitu etnis Melayu. NEP memang berhasil memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada perbaikan ekonomi Malaysia terutama dalam meningkatkan kesejahteraan etnis Melayu. Saat ini, tujuan NEP untuk menyeimbangkan kemampuan ekonomi etnis Melayu dengan etnis non Melayu dapat dikatakan berhasil. Namun, pemerintah Malaysia tetap memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan etnis Melayu tersebut sampai detik ini. Hal ini kemudian memicu adanya kecemburuan dari etnis non Melayu yang berakibat pada munculnya berbagai aksi protes dan demonstrasi dari etnis non Melayu. Diskriminasi ekonomi yang terdapat dalam NEP memang dirasakan oleh kedua etnis minoritas yaitu etnis Cina dan etnis India. Tetapi, secara umum etnis Cina tidak terlalu mempermasalahkan adanya NEP walaupun mereka tetap terdiskriminasi. Sebab kemampuan dan kesejahteraan etnis Cina masih cukup tinggi berbeda dengan etnis India<sup>254</sup> yang sejak awal tidak pernah menguasai atau bahkan mendominasi perekonomian di Malaysia.

Kesejahteraan etnis India di Malaysia lebih rendah bila dibandingkan dengan etnis Melayu dan etnis Cina. Sebab sejak dulu etnis India hanya diperbolehkan menempati posisi pada kelas bawah. Sejak diberlakukannya NEP etnis India di Malaysia tampak miskin karena standar kehidupan yang rendah. Sampai saat ini kelompok etnis India terlihat lebih banyak melakukan protes atau demonstrasi kepada pemerintah Malaysia untuk menuntut hak-hak mereka. Seperti demonstrasi etnis India pada 25 November 2007 yang diikuti 8.000 orang etnis India di ibukota Malaysia untuk memprotes kebijakan diskriminasi yang mengutamakan etnis Melayu. Etnis India dalam

---

<sup>254</sup>Indah Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis....', *ibid.*

## 204 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

demonstrasi tersebut menuntut penghapusan kebijakan diskriminatif (NEP). Keluhan-keluhan akan adanya ketidaksamaan dalam perlakuan terhadap etnis India oleh pemerintah Malaysia terus berlanjut.<sup>255</sup> Pemerintah Malaysia justru merespon demonstrasi tersebut dengan tindakan yang tegas terhadap para demonstran yang menggelar demonstrasinya secara damai tersebut. Respon dari militer Malaysia atas perintah dari pemerintah Malaysia adalah menembakkan gas air mata kepada para demonstran, bahkan para demonstran terkadang bentrok dengan pihak keamanan Malaysia sehingga berakhir ricuh dan sebagainya mesti ditahan.<sup>256</sup>

Aksi politik melalui demonstrasi terus dilakukan etnis India sebagai bentuk tuntutan atas ketidakadilan yang ada serta diskriminasi yang sangat tajam bagi etnis non Melayu terutama etnis India. Seperti demonstrasi yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2008. *Hindu Rights Action Force* merupakan LSM yang dipimpin oleh Hindraf yang menuntut ganti rugi kepada Kerajaan Inggris karena telah membawa rakyat India untuk dijadikan buruh kontrak dan mengeksploitasi mereka selama 150 tahun. Kerajaan Inggris juga dituduh telah gagal melindungi hak etnis India dalam perlembagaan (konstitusi) ketika memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. LSM tersebut juga menuntut adanya kesetaraan hak-hak dan perbaikan taraf hidup etnis India di Malaysia. Namun, respon yang diberikan oleh pemerintah Malaysia jauh dari harapan para demonstran. Pemerintah Malaysia justru melakukan penangkapan terhadap Hindraf pemimpin demonstrasi etnis India. Hindraf ditahan karena pemerintah mengecap kumpulan demonstrasi itu tidak terdaftar dan dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Malaysia. Hindraf juga dituduh berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris walaupun pemerintah belum memiliki bukti akan hal tersebut. Dan sampai saat ini tuduhan yang ditujukan oleh pemerintah Malaysia terhadap Hindraf tidak pernah terbukti. Dalam hal ini, dari klaim

---

<sup>255</sup>Indah Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis....', *ibid.*

<sup>256</sup>Indah Ayu Intan Sari, 'Diskriminasi Etnis....', *ibid.*



mereka bahwa telah terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan pemerintah Malaysia.<sup>257</sup>

*f. Fuse Factors*

*a) Sentimen Etnis dan Ras*

Sebanyak 19 orang ditangkap aparat kepolisian Malaysia terkait kerusuhan di Mall Low Yat Plaza di Kuala Lumpur. Kerusuhan itu dipicu pencurian telepon genggam, yang kemudian diduga dibumbui sentimen ras. Orang-orang itu ditahan untuk memfasilitasi penyelidikan atas kerusuhan yang menyebabkan mal tersebut sempat ditutup. Beberapa orang dilaporkan terluka dalam huru-hara di mal terkenal di Kuala Lumpur itu. Sejumlah pihak khawatir kerusuhan dilandasi sentimen ras yang merupakan masalah sensitif di Malaysia. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak juga menyerukan publik untuk tidak memandang insiden itu dari perspektif ras. Najib mengatakan bahwa 'dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya akan dilihat dari perspektif ras. Pada akhirnya, tindakan kriminal diberi pertimbangan rasial. Ini tidak boleh terjadi di negara'. PM Najib pun mengimbau rakyat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.<sup>258</sup>

Kerusuhan di Low Yat Plaza berawal pada Sabtu (11/7/2015) lalu ketika seorang pemuda dilaporkan mencuri sebuah telepon genggam. Menurut pemberitaan media Malaysia, pemuda itu dikejar, dibekuk, dan dianiaya para pedagang di sana sebelum diserahkan ke polisi. Namun teman-teman pemuda tersebut menyerbu mal dan menyerang toko, yang para pegawainya membantu menangkap pemuda itu. Pada Minggu malam (12/7) sekitar 200 orang berkumpul di pusat perbelanjaan tersebut sehingga polisi pun memerintahkan mal ditutup lebih awal. Polisi bahkan sudah melarang siapa pun, termasuk wartawan, masuk ke kawasan sekitar mal. Namun warga kembali berkumpul di sana pada Senin (13/7) dini hari waktu setempat dan keributan pun kembali terjadi. Tidak disebutkan identitas ke-19 orang

<sup>257</sup>'Diduga Berlatar Rasial, Kerusuhan Pecah di Mal Terkenal Malaysia', editor: Nicky Aditya Jul 14, 2015, diakses: 31 Juli 2017.

<sup>258</sup>'Diduga Berlatar Rasial, Kerusuhan Pecah di Mal Terkenal Malaysia....', *ibid.*

## 206 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

yang ditangkap. Kepolisian menyatakan, situasi di mal tersebut saat ini telah kondusif.<sup>259</sup>

### 3.6 Pembahasan dan Implikasi

Permasalahan konflik etnis dan agama, *ethno-religious*, di beberapa negara ASEAN seperti didiskusikan dalam kasus penelitian ini: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Thailand 'bukan murni' faktor etnis dan agama (*ethno-religious*). Tetapi sebagai faktor utama sebagai penyebabnya, yakni sering kali kebijakan yang diambil pemerintah bersangkutan belum merespons secara positif dan akurat atas kebutuhan substantif dari kepentingan masyarakat (*social-needs*) sebuah bangsa. Seperti diungkapkan Benedict Anderson bahwa kondisi demikian hampir dialami banyak negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya, yakni negara-negara post-kolonial menggunakan pendekatan negara dengan fungsi-fungsinya dalam menghadapi masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan aparat negara dan kebijakan-kebijakannya untuk untuk mengamankan kepentingan negara dan mengabaikan kepentingan sebagai sebuah bangsa. Birokrasi dan yang lebih penting lagi adalah militer memainkan peranan yang sangat penting dalam mengamankan kepentingan negara.<sup>260</sup>

Beragam kasus dan potensi-potensi konflik etnis dan agama, *ethno-religious conflicts*, yang terjadi di banyak negara ASEAN tersebut telah berlangsung lama, bahkan berabad-abad lamanya. Salah satu faktor permasalahan yang terjadi yakni bertalian dengan konflik dan kekerasan, tidak hanya disebabkan perbedaan kepentingan politik, tetapi juga memiliki akar konflik yang dalam. Hal tersebut, bisa bertalian dengan sosio-historis, politik, ekonomi, budaya, agama, bahasa, pendidikan, klaim historis atas tanah/kawasan. Atas akar-akar (konflik) tersebut, masyarakat minoritas (etnis dan agama) pada suatu negara misalnya kasus Pattani-Thailand mengklaim bahwa tanah atau

---

<sup>259</sup>Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Revised and Expanded Edition, Verso, London, 1991, hlm. 45.

<sup>260</sup>Thomas Hylland Eriksen, 'Ethnicity versus Nationalism', *Journal of Peace Research*, Vol. 28, No. 3, 1991, hlm. 170.

daerah mereka tidak menjadi bagian integral dari pusat pemerintahan negara Thailand dengan tuntutan merdeka. Tetapi, disisi lain, di dalam komunitas Muslim itu sendiri terkadang muncul kelompok-kelompok dan individu yang satu sama lain berbeda pandangan dan memiliki agenda berbeda pula. Dalam konteks inilah pada beberapa negara ASEAN tersebut umumnya menggunakan pendekatan negara ketimbangan pendekatan bangsa, seperti diungkapkan Anderson. Sering kali pula, pada akhirnya, hasil dari kebijakan-kebijakan adalah adanya konflik berdasarkan identitas etnis dan agama yang dianut masing-masing kelompok seperti perlawanan yang terjadi di Pattani-Thailand.<sup>261</sup>

Sekali konflik sosial terjadi yang melibatkan dua pihak atau lebih, maka proses selanjutnya yang menyusul berupa eskalasi. Dean G. Pruitt<sup>262</sup> mendefinisikan eskalasi sebagai *'the use of increasingly harsh tactics'* (penggunaan taktik yang semakin keras). Eskalasi bisa bermakna semakin luasnya sasaran atau wilayah konflik, atau semakin banyaknya orang yang terlibat, atau semakin canggihnya alat-alat konflik yang digunakan. Terkadang eskalasi itu bersifat *indirectional*, yakni bersifat satu arah, dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Tetapi, biasanya eskalasi itu bersifat *bi-directional*, yakni bersifat dua arah, artinya eskalasi konflik yang dilakukan salah satu pihak akan dibalas dengan eskalasi pihak lawan. Begitulah seterusnya, sehingga tingkat eskalasi itu akan semakin besar dan saling berbalas dari kedua belah pihak yang dapat digambarkan seperti bentuk spiral. Hasilnya, konflik itu akan semakin meluas.

Sebagai faktor pelanggeng suatu konflik sosial tampak ikut serta, yakni berupa *prejudice*. Rupert Brown dan Lorella Lepore<sup>263</sup> mengatakan *prejudice* sebagai *'the holding of derogatory attitudes or beliefs, the expression of negative effect or the display of hostile or*

<sup>261</sup>Dean G. Pruitt dalam: (M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama...', *op. cit.*, hlm.7).

<sup>262</sup>M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama...', *ibid.*, hlm. 8.

<sup>263</sup>M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis...', *ibid.*, hlm. 9.

## 208 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

*discriminatory behavior toward members of a group on account of their membership in that group*'. Maksudnya 'sikap dan kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk merendahkan orang lain, pernyataan negatif atau pengungkapan permusuhan atau diskriminasi terhadap para anggota suatu kelompok masyarakat hanya karena keanggotaan mereka dalam kelompok itu'. Dari definisi ini tampak bahwa *prejudice* tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga meliputi emosi dan perilaku. Biasanya jenis kelamin, kesukuan, ras, dan umur, menjadi ajang sasaran prejudis. Sama halnya dengan kelompok-kelompok sosial yang terbangun karena menganut faham atau ajaran tertentu juga dapat menjadi ajang sasaran prejudis.

Dua kelompok sosial yang terlibat konflik, termasuk komunitas keagamaan, biasanya juga memiliki prejudis satu terhadap yang lain. Kemudian semakin bereskalasi konflik itu terjadi, maka akan semakin peka dan membesar rasa prejudis itu. Apa pun perkataan dan perbuatan pihak lawan, betapa pun baik maksudnya, akan direspon secara negative. Dampaknya, berbagai upaya dan inisiatif untuk mereduksi atau mengakhiri konflik, tidak akan direspon dengan baik karena adanya prejudis. Dalam hal ini, prejudis berperan sebagai pelanggeng konflik. Berbagai konflik sosial-etnis dan agama (*ethno-religious*) di beberapa negara di Asia Tenggara dalam penelitian ini pun mengalami kelanggengan bertalian erat pula dengan kuatnya prejudis diengah masyarakat pluralistik dalam internal negara itu. Apa pun sumbernya, prejudis membuat pemiliknya selalu salah tingkah laku melihat perkataan atau perbuatan orang atau kelompok yang menjadi sasaran prejudis itu. Akibatnya, apabila prejudis itu bersemi pada suatu konflik, maka prejudis itu, berfungsi melanggengkan konflik.<sup>264</sup>

Sumber-sumber prejudis yang dapat menentukan eskalasi konflik sosial-etnis dan agama itu tampak beragam, akan tetapi, memiliki sejumlah kesamaan-kesamaan, seperti pengalaman sosiohistoris, kebijakan kolonial yang diskriminatif dan kekerasan, ketimpangan ekonomi, politik, etnis, budaya, bahasa, agama, dan pendidikan. Hal

<sup>264</sup>M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan ....', *ibid.*, hlm. 9.

ini sejalan dengan pandangan Dean G. Pruitt & Lorella Lepore<sup>265</sup> bahwa terdapat tiga sumber prejudis. *Pertama*, sumber yang bersifat motivasi psikologis, di mana prejudis bisa bersumber dari rasa frustrasi dan kemarahan, atau perasaan ketertindasan relatif (*relative deprivation*), atau rasa keterancaman identitas sosial yang kemudian secara diam-diam dialihkan menjadi sikap memandang rendah atau menyalahkan anggota kelompok lain yang kurang berdaya. *Kedua*, sumber yang bersifat kognitif, di mana prejudis muncul dikarenakan mekanisme proses informasi yang masuk ke dalam diri seseorang atau kelompok yang mula-mula membangun stereotipe dan lama-lama memuncak menjadi prejudis. *Ketiga*, sumber yang bersifat budaya, di mana bertalian dengan transmisi norma dan nilai yang dianut orang-orang disekitarnya. Dampaknya, nilai dan norma yang dianut oleh suatu komunitas diikuti oleh para anggota komunitas itu, termasuk pandangan dan prejudis komunitas itu terhadap komunitas yang lain.

Para peneliti dengan topik '*Conflict Resolution and Anti-Terrorism in ASEAN Countries*', yakni Titik Firawati (Universitas Gadjah Mada, Indonesia), Keokam Kraisorahong (Chulalongkorn University, Thailand), Allan A. Delos Reyes, Carolina G. Hernandez dan Dennis F. Quilala (*Institute for Strategic and Development Studies*, Filipina). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh konflik internal terhadap munculnya radikalisme dan ekstremisme di sejumlah negara anggota ASEAN serta menawarkan kebijakan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik internal sebagai bagian dari kebijakan anti-terorisme dan kontra-radikalisme. Tim peneliti menyampaikan pokok-pokok hasil penelitian bahwa di antaranya: kekerasan komunal yang terjadi di Poso merupakan contoh konflik internal yang bertransformasi menjadi terorisme; aksi terorisme di Thailand Selatan merupakan konsekuensi dari konflik internal yang berbasiskan agama dan etno-nasionalisme dan akar penyebabnya adalah diskriminasi komunitas Muslim Melayu dalam hal etnisitas, budaya, agama, dan bahasa; dan kemunculan kelompok-kelompok

---

<sup>265</sup>Lihat: ('Sinergi Kemenlu Peneliti Dalam Upaya Kontra Terorisme', *Masyarakat ASEAN*, Edisi 8/Juni 2015, hlm. 16-17).

## 210 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

teroris di Filipina dilatarbelakangi oleh beragam faktor, antara lain faktor ideologi, terutama komunisme; faktor politik, terutama visi mewujudkan negara Islam, dan faktor marginalisasi berbasiskan agama.<sup>266</sup>

Sementara itu, untuk topic '*Mapping and Evaluating De-radicalization and Disengagement Programs in ASEAN*', dengan tujuh peneliti: Eric Hiariej, Taufik Adnan Amal, Rizal Panggabean, Poppy S. Winanti, dan Ayu Diasti Rachmawati (INSEP, Indonesia); Sulog G. Bra (Graduate School of Mindanao State University, Filipina); dan Meg Kagawa (Hiroshima, University, Jepang). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan program-program deradikalisasi dan disengagement di ASEAN serta mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program-program tersebut. Penelitian difokuskan pada program-program deradikalisasi dan disengagement di Indonesia dan Filipina sebagai dua negara anggota ASEAN yang paling marak dengan radikalisme dan terorisme.<sup>267</sup>

Adapun pokok-pokok hasil penelitian meliputi program-program deradikalisasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh aktor-aktor pemerintah maupun non-pemerintah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Yayasan Prasasti Perdamaian, Lazzuardi Birru, *Search for Common Ground (SFCG)*, dan *International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)*. Program-program tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik serta masih terfokus pada isu kemiskinan, kesejahteraan, fundamentalisme agama, dan psikologi sebagai akar penyebab akar radikalisasi. Sementara pada kasus di Filipina, upaya mengatasi radikalisasi tidak melalui program deradikalisasi dan *disengagement*, melainkan melalui program perdamaian, selain itu, Pemerintah Filipina juga menggunakan istilah reabilitasi atau reformasi dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.<sup>268</sup>

<sup>266</sup> Sinergi Kemenlu Peneliti Dalam Upaya..., *ibid.*, hlm. 16.

<sup>267</sup> Sinergi Kemenlu Peneliti..., *ibid.*, hlm. 17.

<sup>268</sup> Sinergi Kemenlu Peneliti..., *ibid.*, hlm. 17.

Dalam konteks merespons seminar hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan pentingnya mengambil beberapa pelajaran bernilai yang perlu diambil. *Pertama*, konflik internal berskala kecil dapat bereskalasi menjadi konflik besar yang mengancam keamanan kawasan, oleh karena itu pemerintah perlu segera mengelola konflik yang ada sebelum bereskalasi lebih jauh dan bertransformasi menjadi gerakan terorisme. *Kedua*, pentingnya aspek kemanusiaan dalam program deradikalisasi membuat program-program deradikalisasi ke depan perlu memperhatikan hubungan keluarga, nilai-nilai dan pandangan hidup, serta aspirasi personal para mantan pelaku terorisme. Seminar hasil penelitian tersebut diharapkan disempurnakan untuk penyusunan strategi penanggulangan terorisme secara komprehensif dan efektif.<sup>269</sup>

Selanjutnya, terdapat sejumlah rekomendasi krusial dari hasil penelitian tersebut kepada ASEAN, antara lain: a) penguatan institusi penegak hukum dalam melaksanakan program deradikalisasi dan *disengagement* di masing-masing negara anggota ASEAN; b) penguatan kerjasama intelijen antarnegara anggota ASEAN; c) pemanfaatan media online dan sosial dalam melaksanakan program deradikalisasi dan *disengagement*; d) peran konstruktif yang harus dimainkan ASEAN dalam resolusi konflik dan memperkuat peran *inter-faith organizations* dalam melawan terorisme; dan e) memperkuat peran dan fungsi *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)* melalui upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian dan toleransi.<sup>270</sup>

Suatu implikasi bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sedang menuju bangsa modern dan berperdaban ke depan, perlunya memperhatikan beragam hak-hak sipil sebagai masyarakat pluralistik.<sup>271</sup> Robert W. Heffner (1998) mengungkapkan bahwa dalam

<sup>269</sup>'Sinergi Kemenlu Peneliti....', *ibid.*, hlm. 17.

<sup>270</sup>Abdullah Idi, 'Political Ethnicity of Dutch Colonialism Against Islamic Sultanates in Archipelago', *Islamic and Humanities (Islam and Malay Local Wisdom)*, *Proceeding, The 2nd Annual International Symposium on Islam and Humanities: Islam and Malay Local Wisdom*, Palembang, South Sumatra, Indonesia, 08-11<sup>th</sup>, September, 2017, pages 193-2014.

<sup>271</sup>Robert W. Heffner, *Democratic Civility: On the History and Cross-Cultural Possibility Modern*, Transaction Publishers: New Brunswick (USA) and London (UK), 1998, page 1.

## 212 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

suatu interaksi antarwarga negara dalam masyarakat pluralistik-multikultural, hal penting yang perlu diperhatikan adalah memfasilitasi tentang *civil, free, dan democratic*. Pada dekade terakhir, tantangan krusial terhadap *democracy civility* secara global menjadi lebih tampak. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, telah tampak bahwa suatu transformasi politik internasional yang lebih fundamental dari pada pada masa akhir Perang Dunia II. Runtuhnya Komunisme Eropa, pecahnya Uni Soviet, adanya Program Restrukturisasi Ekonomi, dan usaha-usaha untuk mengembangkan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), dan peranan Hukum (*Law*) di seluruh dunia, dan lainnya, hal ini menandai suatu era politik global yang memiliki karakteristik dengan meluasnya permintaan (*demands*) untuk hak-hak sipil (*civil rights*) dan partisipasi demokrasi.<sup>272</sup> Diungkapkan pula Heffner: '*Indeed, democratic civility is only imaginable within the horizonz of an effectively functioning modern state. This is so because, in its modern form, democracy is premised on civil ideals of universal freedom and citizen equality*'.<sup>273</sup>

Mengutip Heffner<sup>274</sup>, bertalian dengan kondisi-kondisi dari pada suatu kemungkinan moderen, dalam literatur bertalian dengan *plural democracy* yang dimiliki *civil society*, seperti: *friendships, clubs, churches, business associations, unions, human right groups, dan other volunteer associations, dll.*, di bawah lembaga tetapi diluar negara. Ikatan-ikatan sosial ini, para pelaku teori-teori sipil berasumsi, adanya remediasi antara rumah tangga dan negara, untuk belajar kebiasaan-kebiasaan berdemokrasi dari bebas berkumpul (*free assembly*), dialog tanpa tekanan (*non-coercive dialogue*), dan inisiatif sosial-ekonomi (*socioeconomic initiative*). Dengan melakukan demikian, diharapkan dapat berimplikasi sebagai '*balance*', di mana '*civil society*' sebagai 'kunci' untuk keseimbangan beragam interes dan solidaritas publik. Dikatakan Heffner selanjutnya:

---

<sup>272</sup>Robert W. Heffner, 'Democratic Civility: On the History....', *op.cit.*, page 18.

<sup>273</sup>Robert W. Heffner, 'Democratic Civility: On the History ....', *loc.cit.*, page. 5-6.

<sup>274</sup>Robert W. Heffner, 'Democratic Civility: On the History....', *ibid.*, page 19.



*'Indeed, with the related nation of democracy, the diffusion of the phrase 'civil society' become more dramatic examples of the much celebrated process of cultural 'globalizaation' is never merely a matter of untransformative diffusion, but a process in which the item transferred is shaped as much by local context and usage as it is its culture of origins. Context and usage are in turn affected by the way in which a cultural item (like the idea of civil society, or democracy, human rights, etc.) is drawn into social and political rivalries). All this again illustrates that cultural globalization is thoroughly depend upon local articulation'.<sup>273</sup>*

Paul Recoeur<sup>276</sup> mengatakan bahwa orang tidak akan bisa terus-menerus menghadapi konflik, kekerasan dan ketidakpastian. Suatu sistem politik yang rasional, dapat diramakan, dan memperhitungkan manajemen konflik, diperlukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Sistem politik sejenis ini tidak dapat mengabaikan etika politik. Tujuan etika politik itu sendiri, yakni hidup baik bersama dan untuk orang lain agar bisa semakin memperluas lingkungan kebebasan (*freedom*) dan membangun institusi-institusi yang berkeadilan. Sedangkan dalam upaya memenuhi hak-hak masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam demokrasi, seperti dikatakan Heffner<sup>277</sup>, setidaknya perlu memperhatikan tiga hal: *freedom*, *equality*, dan *tolerance*—sebagai formula berharga untuk integrasi politik, sebagai 'basis' dari nilai-nilai, yang dikatakan sebagai *democratic civility*.

Heffner mengungkapkan: *'A civil state must be strong because society itself is not always civil, and the staf provides safeguards of last resort for freedoms of speech, association, and initiative.'*<sup>278</sup> Pluralistik-multikulturalisme itu dirumuskan dalam bentuk 'sejumlah prinsip, kebijakan dan praktis untuk keberagaman sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari suatu masyarakat'. Arah multikulturalisme lebih menuju pada upaya menciptakan, menjamin, dan mendorong pembentukan *public space* yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang yang disesuaikan

<sup>273</sup>Dalam Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 111.

<sup>276</sup>Robert W. Heffner, 'Democratic Civility: On the History ....', *op. cit.*, page 18.

<sup>277</sup>Robert W. Heffner, 'Democratic Civility....' *Ibid.*, page 18.

<sup>278</sup>Haryatmoko, 'Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan....' *op. cit.*, hlm. 113.

## 214 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dengan kemampuan jangkauan langkah masing-masing. Ruang publik, karenanya, memiliki dua dimensi: ruang kebebasan politik (*political freedom*) dan kesamaan (*equality*), di mana kedua unsur ini akan terwujud bila warga negara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi; dan ruang publik merupakan dunia bersama, artinya semua bentuk institusi dan lingkup yang memberi konteks permanen bagi kegiatan warga negara. Ruang publik tidak terlepas dari pentingnya pengakuan dan jaminan terhadap pluralitas serta aksi politik. Ruang publik itu memungkinkan interaksi yang memperkaya beragam budaya sehingga dapat menciptakan 'budaya baru' melalui 'konsensus'. Ruang publik menjadi tempat penyingkapan identitas aktor melalui tindakan dan wicaranya. Tindakan menyingkap manusia memulai dan berinisiatif untuk mengatur dunia. Manusia sebagai subyek yang bertanggung jawab. Konsep kebebasan yang otentik lebih mudah difahami, yakni kemampuan untuk memulai dan melakukan yang berbeda dari yang diduga atau diramalkan (tidak untuk determinisme). Ruang publik sebagai kondisi kebebasan seperti itu menjadi tujuan multikulturalisme.<sup>279</sup>

AS Hikam berpendapat bahwa *civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Ciri-ciri utama *civil society*, diungkapkan Hikam: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara; 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang bertalian

---

<sup>279</sup>Perbedaan antara *civil society* dan masyarakat madani, antara lain, masyarakat madani merupakan sebuah modernitas. Modernitas adalah produk dari gerakan Renaisans, gerakan masyarakat sekuler yang mengabaikan Tuhan. *Civil society* karenanya memiliki moralitas transendental yang rapuh karena mengabaikan Tuhan. Masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini A. Sja'fii Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Lihat kutipan: (Muhammad Muslih, 'Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 1, April 2010, hlm. 133).

dengan kepentingan publik; dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensi. <sup>280</sup> Masyarakat Madinah, dikatakan Nurcholish Madjid dijadikan tipologi masyarakat madani, merupakan masyarakat yang demokratis. Dalam arti, hubungan antarkelompok masyarakat, seperti yang terdapat dalam poin-poin 'Piagam Madinah', *Mitaq al-Madinah*, atau 'Konstitusi Madinah', mencerminkan egalitarianism (setiap kelompok memiliki hak dan kedudukan yang sama), penghormatan terhadap kelompok lain, kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok masyarakat (seperti penetapan strategi perang), dan pelaku ketidakadilan, dari kelompok manapun, diberi sanksi hukuman yang berlaku. <sup>281</sup>

Bernard Lewis mengatakan bahwa kecuali Turki, semua negara mayoritas penduduknya Muslim dipimpin oleh variasi dari rezim otoriter, otokrasi, despotis, dan sebagainya. Dikalangan sosiolog dunia Islam dideskripsikan telah mengalami masa transisi dari masyarakat yang berorientasi pada ekonomi moneter dan masyarakat demokratis, kepada sebuah masyarakat agraris dan rezim militer. Kedua kecenderungan itu memperlihatkan watak yang berbeda, yang pertama, lebih bersifat dinamis dan rasional; sedangkan yang kedua, memperlihatkan sifat tertutup. Hal ini memperlihatkan bahwa negara Islam umumnya memiliki sistem pemerintahan yang beragam. <sup>282</sup> Indonesia, dalam hal ini, suatu negara yang menerapkan demokrasi

<sup>280</sup>Sikap toleran seorang muslim terhadap pemeluk agama lain jelas mendapatkan legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan preseden yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tindakan pertama yang dilakukan Nabi untuk mewujudkan masyarakat Madinah dengan menetapkan dokumen Perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dalam Piagam Madinah ditetapkan adanya pengakuan kepada semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota ummat yang tunggal (*ummah wahidah*), dengan hak dan kewajiban yang sama. Memang prinsip Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya terwujud, karena penghianatan beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang dibuat kaum Muslimin diberbagai daerah yang telah dibebaskan tentara Islam. Semangat ini juga terus menjiwai pandangan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Muslim. Lihat kembali: (Muhammad Muslih, 'Wacana Masyarakat Madani...', *ibid.*, hlm. 134).

<sup>281</sup>Lihat kutipan: (Muhammad Muslih, 'Wacana Masyarakat Madani...', *ibid.*, hlm. 139).

<sup>282</sup>John L. Esposito, *Masa Depan Islam, Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, Pengantar: Karen Armstrong, Penerbit Mizan Media Utama (MMU), Bandung, 2010, hlm. 220.

Pancasila. Demokrasi Pancasila dikatakan Dardji Darmo Diharjo merupakan faham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Notonegoro mendefinisikan demokrasi Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, demokrasi Pancasila seperti diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 dan sila ke-4 Pancasila dirumuskan bahwa 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.<sup>283</sup> Demokrasi deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik-multikulturalistik. Jadi, setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Dileberasi juga diperlukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Diperlukan suatu proses yang 'fair' demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.<sup>284</sup>

Sistem apa pun yang diterapkan negara-negara Islam, barangkali, suatu hal yang terpenting seharusnya dilakukan bagaimana menerapkan nilai-nilai falsafah/ideologi yang dianut dengan mengacu kebutuhan hakiki masyarakatnya, terlebih bagi masyarakat

---

<sup>283</sup>John L. Esposito, 'Masa Depan Islam, Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat...', *ibid.*, hlm. 222-223.

<sup>284</sup>Kredibilitas reformasi pemilihan umum misalnya telah dicerderai dengan kecenderungan pemerintahan Mubarak saat pemilihan untuk menangkapi dan memenjarakan pengecamnya, baik yang secular maupun religious. Referendum nasional terhadap pemilihan umum multi partai tercemar ketika pengadilan militer digunakan untuk menghindari dari pengadilan Mesir dan keputusannya, dan massa propemerintah diizinkan menyerang secara brutal para demonstran di jalan-jalan Kairo. Lihat: (John L. Esposito, 'Masa Depan Islam, Antara Tantangan Kemajemukan ...', *ibid.*, hlm. 224).

pluralistik-multikulturalisme pentingnya mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal, seperti *freedom, equality, tolerance*, dan lain sebagainya. Suatu pemerintahan berkuasa dalam suatu negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dalam istilah Robert W. Heffner, *democratic civility*, akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, suatu pemerintahan berkuasa dalam suatu negara berdaulat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau demokrasi, akan memungkinkan percepatan terhadap potensi dan rentannya terjadinya konflik sosial dan menguatnya resistensi, dan bahkan tidak ada jaminan terhadap keutuhan, integrasi sosial, dan integrasi bangsa.

Keterkaitan Islam dan demokrasi, John L. Esposito<sup>285</sup> mengatakan bahwa sejumlah besar Muslim diseluruh dunia tidak puas dengan keadaan sekarang dan menginginkan demokratisasi lebih luas. Ketika masyarakat di sepuluh negara berpenduduk mayoritas Muslim ditanyakan tentang pandangan mereka terhadap sejumlah negara, sifat-sifat yang banyak mereka asosiasikan dengan Amerika Serikat adalah maju dalam hal sains dan teknologi (68 persen), agresif (66 persen), angkuh (65 persen), dan rendah moral (64 persen). Mayoritas negara yang ditanyakan tentang invasi ke Irak, baik pria maupun wanita Muslim, yakin invasi itu telah mendatangkan lebih banyak kerusakan dari pada kebaikan. Tampak bahwa kaum Muslim tidak bermasalah dengan Barat secara keseluruhan, tetapi lebih dengan politik luar negeri negara-negara Barat tertentu. Kendatipun mengagumi prinsip dan nilai-nilai demokrasi Amerika, mereka tidak melihat nilai-nilai itu diterapkan dalam perlakuan terhadap Muslim. Kesenjangan antara kebijakan Amerika Serikat (AS) dengan prinsip AS memunculkan pandangan bahwa AS telah menganut standar ganda dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kaum Muslim yakin AS tidak sungguh-sungguh membantu demokrasi di wilayah mereka, termasuk di negara-negara yang menjadi sekutu AS dan kemajuan demokrasinya

<sup>285</sup>John L. Esposito, 'Masa Depan Islam, Antara Tantangan....', *ibid.*, hlm. 225.

terlihat paling nyata, seperti Mesir (63 persen) meragukan janji AS mengenai dukungan demokrasi, dan Pakistan (55 persen) berpandangan serupa.

Kendatipun demikian, dikatakan John L. Esposito<sup>286</sup> bahwa kekaguman pada nilai demokratis Barat tidak berarti dukungan terhadap model pemerintahan sekuler Barat. Kebanyakan Muslim berpendapat agama dan nilai-nilai mereka sangat diutamakan bagi kemajuan mereka. Sehingga, walaupun sebagian reformis menolak pertalian agama dengan negara, dan mendesak dibentuknya negara sekuler, mayoritas Muslim menyatakan keinginan mereka agar Syariat, dasar hukum agama, dijadikan 'sebuah' sumber hukum. Kendatipun persepsi mengenai penafsiran Syariat dan sejauhmana hukum-hukum Syariat mungkin diterapkan dalam masyarakat sangat bervariasi, sebagian besar Muslim menginginkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi serta agama sama-sama ada dalam pemerintahan, dan dengan demikian mereka menginginkan peran asas keagamaan dalam penyusunan undang-undang negara.

Rezim Muslim pada masa ini, dikatakan John L. Esposito, sering menggunakan momok terorisme global, seperti dulu ancaman komunisme pada masa Perang Dingin, untuk menggalang dukungan dari Barat dan sebagai alasan penggunaan kekuasaan mutlak atau pendekatan mereka yang setengah hati terhadap liberalisasi politik.<sup>287</sup> Sementara itu, pemerintahan Barat, terdorong oleh kepentingannya sendiri (akses terhadap minyak serta lokasi-lokasi penting dan strategis) memperparah masalah dengan senantiasa mendukung dan menghidupkan persahabatan dengan rezim otoriter. Pemerintah di dunia Muslim, yang diklaim diktator, harus dituntut agar menunjukkan komitmen mereka terhadap liberalisasi politik, masyarakat sipil, dan HAM dengan membantu pengembangan institusi-institusi sipil dan nilai-nilai yang mendukung demokratisasi. Kebijakan yang dihasilkan

---

<sup>286</sup>John L. Esposito, 'Masa Depan Islam, Antara Tantangan....', *ibid.*, hlm. 225-226.

<sup>287</sup>John L. Esposito, 'Masa Depan Islam....', *ibid.*, hlm. 227- 228.

harus membedakan antara organisasi, baik sekular maupun islami, yang mengancam kebebasan dan kestabilan masyarakat dengan bersedia berpartisipasi dalam proses perubahan bertahap dari dalam sistem.<sup>288</sup>

Pemerintahan Barat, karenanya, perlu menyokong penentuan sikap sendiri dan demokrasi perlu menunjukkan melalui kebijakan maupun pernyataan bahwa mereka menghargai hak setiap gerakan serta partai politik, keagamaan ataupun sekuler, untuk berpartisipasi dalam proses politik. Memajukan demokrasi dengan aksi, tidak hanya kata-kata, dapat mengalahkan 'pengecualian demokrasi'. Ambivalensi Barat ditunjukkan dalam kegagalannya menanggapi subversi proses pemilihan umum di Aljazair, Tunisia dan Pakistan dibawah Musharraf, usaha 'mengatur' proses demokratisasi di Irak pasca-Saddam dan penolakan untuk mengakui pemerintahan Hamas yang terpilih secara demokratis di Palestina—harus dihindari jika Barat, Amerika khususnya, ingin menghindari tuduhan bahwa mereka terang-terangan bekerja dengan standar ganda. Rasa hormat dan dukungan terhadap proses demokrasi dan hak asasi manusia mesti terlihat benar-benar universal.<sup>289</sup>

Diungkapkan John L. Esposito<sup>290</sup> bahwa demokratisasi merupakan proses yang tidak beraturan dan berpotensi bahaya. Yang dialami Barat merupakan proses *trial and error*, dilalui perang saudara dan konflik intelektual dan keagamaan. Demokrasi Amerika merupakan produk revolusi bersenjata dan perang saudara yang bahkan lebih berdarah-darah. Hampir dua abad berlalu sebelum hak kesetaraan wanita dan masyarakat Afrika-Amerika diakui. Sama halnya di Timur Tengah, ungkap Esposito, masyarakat juga mencoba mengevaluasi dan mendefinisikan kembali keadaan pemerintahan dan partisipasi politik serta peran identitas dan nilai agama dalam banyak

<sup>288</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Editor: Safarina HD, Rajawali Pers, Cetakan ke-5, Jakarta, 2016, hlm. 120.

<sup>289</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat...* *ibid.*, hlm. 126-127.

<sup>290</sup>Amy Gutman, 'Democratic Education', dalam Firdaus M. Yunus. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

kasus akan mengalami proses trial and error yang rapuh, harus ada resiko jangka pendek (*short-term*) yang dihadapi demi kemungkinan keuntungan jangka panjang (*long-term*). Pemerintahan otoriter bisa jadi mampu menghindari atau menghambat proses perubahan meskipun diyakini hanya menunda suatu hal yang sulit dihindari.

Sebagai upaya menuju proses demokrasi di negara-negara yang sedang berkonflik ke depan diperlukan *nondiskriminatif* dalam berbagai bidang kehidupan, terutama juga dalam memperoleh pendidikan. Dalam hal ini, setiap orang harus diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Dari perspektif pedagogik, anak didik memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan anak didik atas pendidikan dinamakan *home educandum*. Potensi anak didik yang bersifat laten tersebut perlu diaktualisasikan agar anak didik tidak dinamakan lagi sebagai *animal educable*, sejenis binatang yang memungkinkan dididik, tetapi harus dianggap sebagai manusia secara mutlak, karena mereka memang manusia. Sebagai anak didik, mereka memiliki potensi akal yang mesti dikembangkan agar menjadi kekuatan sebagai manusia yang bersusila dan berkecakapan sebagai modal kehidupan nyata.<sup>291</sup>

Pendidikan minoritas dalam suatu negara dapat dimaknai dalam interpretasi *pertama*, sebagai pendidikan atau kelompok belajar yang diselenggarakan oleh sebagian kecil dari kelompok masyarakat. *Kedua*, kelompok-kelompok minoritas yang ada di dalam lembaga pendidikan. *Ketiga*, kegiatan pembelajaran yang terpinggirkan dan belum maksimal peranan pemerintah dalam membantu proses pendidikan yang ada di masyarakat. Selain itu, murid-murid di sekolah sering memperlihatkan perbedaan asal kesukuan atau etnis, agama, adat-istiadat, dan kedudukan sosial. Berdasarkan perbedaan ini mungkin muncul kelompok minoritas di kalangan murid-murid yang tersembunyi ataupun nyata. Kelompok sekolah dapat dikategorikan

<sup>291</sup>Paul Suparno, 'Pendidikan Demokrasi', dalam *Problematika Manusia Indonesia: Permasalahan Kemanusiaan Bangsa Indonesia Zaman Sekarang*, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta, 2001, hlm. 49-50.



berdasarkan: *Pertama*, status sosial orang tua murid yang dapat memengaruhi pergaulan murid. *Kedua*, hobi/minat/kegemaran, di mana kesamaan hobi atau kegemaran tersebut akan mendorong rasa kebersamaan antarmereka. *Ketiga*, intelektualitas, di mana ada peluang terjadi kelompok berdasarkan tingkatan intelektualitas antarmereka meskipun mungkin tidak dominan. *Keempat*, jenjang kelas, di mana perbedaan jenjang kelas ini merupakan faktor dominan terjadi di sekolah. Biasanya anak kelas yang lebih tinggi merasa lebih senior dan sering berbuat sesuka hati terhadap adik kelasnya. Hal ini menyebabkan siswa dibawahnya cenderung bergaul sesama teman selevel dalam kelas, atau telah terjadi berkotak-kotak. *Kelima*, agama, di mana ada peluang terbentuknya kelompok karena persamaan agama. Kegiatan perayaan dan peribadatan yang mereka yakini sering mempertemukan mereka dalam kebersamaan dan kepemilikan, meskipun bukan elemen dominan. *Keenam*, asal daerah, di mana kesamaan asal daerah selanjutnya memberikan peluang bagi terbentuknya kelompok di sekolah, walaupun juga tidak dominan. Di sekolah biasanya murid cenderung lebih mementingkan minat dan hobi dari pada regionalitas.<sup>292</sup>

Seperti diungkapkan Amy Gutman<sup>293</sup> bahwa dalam berdemokrasi, setidaknya ada dua elemen penting, yakni sikap *nondiskriminatif* dan sikap *nonrepresif*. Sikap *nondiskriminatif* berarti sikap tidak membedakan perlakuan terhadap orang atau kelompok lain karena perbedaan etnis, agama, ras, keadaan ekonomi, gender, dan lain-lain. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Sikap *nonrepresif* berarti orang atau lembaga tidak menindas atau menekan orang atau kelompok lain demi kepentingan mereka. Paul Suparno<sup>294</sup> mengklaim bahwa sikap *non-represif* ini belum berkembang di negara-negara berkembang, yang salah satunya dicontohkan Indonesia, terbukti dengan masih banyaknya konflik dan ancaman tflieror.

<sup>292</sup>Jalaluddin, 'Terorisme dan Agama', *Sriwijaya Post*, 17 Januari 2018.

<sup>293</sup>Jalaluddin, 'Terorisme dan Agama....', *ibid.*

<sup>294</sup>Jalaluddin, 'Terorisme dan Agama....', *ibid.*

## 222 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Selanjutnya, konflik etnoreligius yang terjadi pada suatu negara, dalam hal ini di negara-negara Asia Tenggara, sering kali pemberian 'label' radikalisme dan fundamentalisme kepada kelompok minoritas etnis dan agama tertentu. Hal ini justru akan memperlambat dan bahkan mempersulit proses perdamaian antarmasyarakat yang berbeda etnis dan agama di negara pluralistik pada negara tersebut. Menurut John L. Esposito (1994) dalam Jalaluddin (2018) bahwa fundamentalisme acapkali dianggap secara umum sebagai orang yang mengacu kepada orang-orang yang literalis yang kembali meniru masa lalu. Seperti halnya fundamentalisme, sebetulnya radikalisme juga bukan sepenuhnya terdapat dilingkungan aliran keagamaan. Adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif, biasanya dapat memperbesar peluang bagi munculnya radikalisme. Tetapi, sayangnya baik radikalisme ataupun fundamentalisme selalu dihubungkan dengan agama. Hal ini dikarenakan agama memiliki peran sentral dalam pembentukan sistem nilai yang dijadikan filasafat hidup, sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku.<sup>295</sup>

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap benar, perlu dipertahankan dan diperjuangkan. Pada titik puncaknya, tidak jarang orang lebih memilih 'siap untuk mengorbankan nyawa' demi mempertahankan nilai. Sistem nilai ini berasal dari filsafat, tradisi, dan agama. Dalam konteks agama, nilai ini bertalian dengan keyakinan. Oleh sebab itu, dalam gerakan-gerakan yang terindikasi radikalisme dan fundamentalisme 'selalu' masuk ke 'ranah' agama. *Pertama*, agama menyangkut keyakinan. *Kedua*, dengan 'memperalat' agama, akan lebih mudah merekrut anggota. Ajaran agama pada dasarnya berisi nilai-nilai luhur. Tetapi, nilai-nilai ajaran tersebut 'dipasung' oleh tokoh atau oleh kelompok tertentu lalu dimanipulasikan dan sekaligus diformulasikan dalam bentuk mitos. Tindakan yang bersifat manipulatif ini menjadikan ajaran agama kehilangan nilai-nilai luhurnya. Nilai-nilai ajaran agama tadi berubah menjadi 'dongeng

---

<sup>295</sup>Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2015, hlm. 172-173.

keagamaan'. Alam pikiran metodologis (dongeng) ini akan memunculkan fundamentalisme dan radikalisme.<sup>296</sup>

Jalaluddin<sup>297</sup> selanjutnya mengatakan bahwa kelompok yang eskapis berusaha melepaskan kehidupan dunia, mengasingkan diri dan hidup bertapa membebaskan diri dari berbagai kenikmatan hidup duniawi, yang dianggap racun dan bersifat maya. Kelompok yang kedua, muncul dalam bentuk fundamentalisme-radikalisme teologis yang membangun komunitas eksklusif. Lazimnya komunitas 'tertutup' seperti ini pula terorisme 'dibidani'. Kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang abstrak sehingga kebenarannya sulit dibuktikan secara empirik (nyata). Pengaruh yang ditimbulkan terhadap penyimpangan nilai-nilai ajaran agama menjadi mudah untuk disembunyikan. Hingga bisa dijadikan 'alat' untuk mempengaruhi seseorang secara psikologis. Sikap keagamaan yang menyimpang ini dapat memberikan kepercayaan atau keyakinan baru pada seseorang atau kelompok. Untuk mencapai target itu pula, agama dinilai sebagai sarana yang paling empuk dan strategis bagi sosok teroris dalam upaya mewujudkan kiat-kiat buruknya.

Meningkatnya minat terhadap studi tentang fenomena agama akhir-akhir ini tidak terlepas dari serentetan kasus terorisme yang terjadi diberbagai belahan dunia, tanpa terkecuali di Asia Tenggara, seperti di Marawi, Filipina Selatan. Secara garis besar, terdapat dua pandangan mengenai hubungan antara agama dan terorisme. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa agama memiliki keterkaitan dengan aksi terorisme yang paling tidak meragukan keterkaitan antara keduanya. Peter S. Henne (2012), salah seorang tokohnya, berpendapat bahwa aksi terorisme menekankan pentingnya variabel agama. Suatu hal yang menjadi diksusi bahwa apakah agama itu sendiri yang salah (karena mendorong tindakan bunuh diri) atau kelompok teroris agama tertentu yang dalam faktanya mendorong tindakan kekerasan teroris bunuh diri. Dalam teori gerakan sosial dan studi

---

<sup>296</sup>Sindung Haryanto, 'Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern...', *ibid.*, hlm. 173.

<sup>297</sup>Sindung Haryanto, 'Sosiologi Agama...', *ibid.*, hlm. 174-175.

terkini tentang terorisme bunuh diri, tampak bahwa agama berpengaruh terhadap terjadinya serangan teroris bunuh diri sebagai sebagai suatu kelompok ideology yang melegalkan perjuangannya untuk memperoleh dukungan publik.

Henne mengungkapkan, kekerasan dilakukan kelompok teroris agama merupakan produk ideologi agama, bukan semata-mata kondisi sosio-struktural semata. Lebih dari itu, ketika motivasi kelompok menjadi penting, ideologi agama itu sendiri tetap menjadi faktor determinan tingkat kekerasan teroris bunuh diri. Karakteristik kelompok dan persoalan structural yang menentukan level kekerasannya. Penjelasan terorisme agama harus fokus pada ideologi kelompok teroris dan bagaimana mereka menggunakan ideologi tersebut untuk membenarkan tindakan kekerasannya. Implikasi politik dari studi ini bisa pesimistik dan optimistik. Komunitas internasional meerespons kelompok-kelompok yang membenarkan kekerasan yang dilakukannya atas nama agama. Pengambil kebijakan perlu menyadari bahwa kelompok teroris agama akan beroperasi secara berbeda dengan kelompok teroris non-agama.

*Kedua*, fanatisme agama tidak berkorelasi dengan berbagai aksi terorisme. Dari studi yang dilakukan Pape (2003) bahwa terorisme bunuh diri menggunakan logika strategis, secara khusus dirancang untuk memaksa demokrasi liberal modern memberikan konsesi wilayah teroterial yang signifikan. Setelah lebih dari dua kecade, terorisme bunuh diri meningkat pesat karena para teroris mempelajari tentang hasil yang diperoleh dari pengorbanan yang diberikan. Terorisme bunuh diri telah memaksa militer AS dan Prancis meninggalkan Libanon pada 1983, Israel meninggalkan Libanon pada 1985, tentara Israel meninggalkan Jalur Gaza dan tepi Barat pada 1994 dan 1995, pemerintah Sri Lanka memberikan kemerdekaan bagi Tamil pada 1990, dan pemerintah Turki memberikan otonomi khusus bagi suku Kurdi pada akhir dekade 1990-an. Dalam semua kasus kecuali Turki, politik teroris memperoleh hasil yang lebih besar dari pada sebelumnya. Dikatakan Pape, menjelaskan fenomena bunuh diri berkorelasi kuat dengan fanatisme atau fundamentalisme agama.

Kesimpulan tersebut diambil dari studi sejumlah teror bunuh diri yang terjadi pada 1980-2001.

Pemahaman berbagai persoalan konflik sosial *ethno-religious* pada masyarakat pluralistik di Asia Tenggara, agaknya merupakan suatu hal yang kompleks pula. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi konflik sosial *ethnoreligious* yang dalam perkembangannya tidak hanya bertalian dengan dimensi struktural tetapi juga agaknya telah berkembang dalam konteks nonstruktural yang bertalian dengan konteks politik global, yakni motivasi memaksa demokrasi liberal.

Jadi, bertalian dengan analisis terhadap berbagai konflik sosio *ethno-religious* pada beberapa negara di Asia Tenggara sesungguhnya ditentukan banyak faktor, antara lain: faktor struktural (sosial, historis, ekonomi, politik, etnis, agama, dan budaya); dan faktor non-struktural yang bertalian dengan, antara lain: level pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap doktrin agama-agama dalam konteks sosiologis; dan berikutnya bertalian dengan terus berkembangnya isu-isu terorisme global (misal: NIIS atau ISIS) yang dipandang berbagai kalangan justeru memiliki ideologi tersendiri, yang jauh dari ajaran-ajaran atau nilai-nilai kearifan agama yang mengedepankan toleransi. Sehingga, kebijakan pemerintah resolusi konflik dan agama (*ethno-religious*) di negara-negara Asia Tenggara seharusnya memperhatikan fenomena regional (intern negara-negara Asia Tenggara) dan global (isu-isu preventif terhadap persoalan ISIS atau NIIS).

## BAB IV

# KONFLIK ETNO-RELIGIUS DAN PERANAN ASEAN

**P**eranan (*the role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang atau kelompok/organisasi yang menduduki suatu posisi, dan setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu dalam menjalankan peranan politiknya. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang seorang aktor politik. Peran dalam konteks politik adalah perilaku dilakukan para aktor dalam menjalankan peran politik mereka, dan yang membentuk peranan adalah harapan atau dugaan yang datang dari diri sendiri ataupun orang lain. Teori ini juga berkaitan dengan peranan lain yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik.

Secara umum, setidaknya terdapat beberapa cara dalam mengakhiri suatu konflik, antara lain: perjuang kalah-menang (*win-lose*), *bargaining*, *mediation*, *arbitration*, dan *adjudication*. Dalam perjuangan 'menang-kalah' biasanya melibatkan tekanan politik dan fisik yang diharapkan berakhir dengan kemenangan pada salah satu pihak dan kehancuran pada pihak lain, yang dinamakan *zero-sum-game*. Dalam '*bargaining*', tiap-tiap pihak yang terlibat berupaya memperoleh pernyataan kesepakatan (lisan atau tertulis) dengan pihak lawan yang biasanya terjadi dengan saling mengambil dan menerima tuntutan pihak lain. Dalam '*mediasi*', pihak ketiga telah dilibatkan tetapi tidak untuk

mengambil keputusan melainkan sekadar membantu proses negosiasi tersebut. Dalam *'arbitration'*, tiap-tiap pihak menyerahkan kepada pihak ketiga untuk mengambil keputusan yang mengikat. Dalam *adjudication*, prinsipnya sama dengan arbitrase, hanya saja pihak ketiga itu yakni hakim atau pengadilan. Dari lima cara yang ada itu, biasanya cara kedua dan ketiga, yakni *bargaining* dan *mediation*, merupakan cara yang paling sedikit menimbulkan korban, baik fisik maupun psikologis.<sup>1</sup>

Persoalannya muncul karena proses *bargaining* dan mediasi itu biasanya mesti dilaksanakan bersamaan dengan masa berlangsungnya konflik yang berarti juga berlangsungnya eskalasi konflik. Karena itu, upaya *bargaining* dan mediasi mesti diikuti dengan upaya meredakan eskalasi konflik. Para ilmuwan psikologi sosial mengatakan bahwa di antara cara peredaman eskalasi konflik, antara lain: *simple contact*, *cooperation on superordinate goals*, dan *unilateral conciliatory initiatives*. Adapun *cooperation on superordinate goals* berarti upaya kerjasama dalam hal-hala bersama yang lebih besar diluar konflik, sedangkan *unilateral conciliatory initiatives* berarti langkah sepihak untuk rekonsiliasi seperti kunjungan Presiden Mesir, Anwar sadat, secara mengejutkan ke Yerusalem pada tahun 1977.<sup>2</sup>

Berikutnya bertalian dengan konsep peran (*the role*) tersebut, K.J.Holsti<sup>3</sup> mengungkapkan tiga variabel penjelasannya: (1) *beberapa kondisi ekstern*, yang mencakup persepsi ancaman dan perubahan penting dalam kondisi penting luar negeri; (2) *atribut nasional*, yang berkaitan dengan kemampuan negara (lemah atau kuat), pendapat dan sikap umum; kebutuhan ekonomi dan komposisi etnis negara; dan (3) *atribut ideologis dan sikap*, yang mencakup kebijakan atau peran tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip ideologis, serta identifikasi kawasan (kesesuaian nilai dengan negara

<sup>1</sup> M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama...', *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>2</sup> M. Atho Mudzhar, 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial...', *ibid.*, hlm. 10.

<sup>3</sup> <https://galangriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-negara-aseandalampenyelesaian-konflik-etnis-rohingnya> (diakses: 22 Juli 2017).

lain). Menurut Holsti faktor diatas dapat menguji penjelasan mengenai tujuan, keputusan dan tindakan dalam FPA (*Foreign Policy Analysis*). Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik (etnis dan agama) dapat dianalisa dengan menggunakan tiga faktor itu.<sup>4</sup>

Pentingnya kerjasama politik dan keamanan di ASEAN, dapat dilihat dari alasan pembentukan ASEAN. Di tengah perang dingin dan rendahnya kepercayaan antarnegara di kawasan Asia Tenggara, diperlukan suatu terobosan kerjasama kawasan yang paling menguntungkan. Perhatian pada bidang kerjasama ekonomi dan kebudayaan di antara lima negara pendiri menjadi pilihan awal untuk membangun kepercayaan ASEAN. Kesadaran pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan tetap pula menjadi penggerak utama yang terbukti dengan disahkannya *Treaty of Friendship and Cooperation in the South East Asia Region* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama pada 1976 di Bali. Traktat ini menjadi pilar yang menjunjung prinsip penyelesaian sengketa dengan damai, non-intervensi dan peningkatan kerjasama.<sup>5</sup>

Ada sejumlah alasan pentingnya pembangunan pilar politik dan keamanan ASEAN. *Pertama*, tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara terus berkembang, baik sengketa tradisional antarnegara maupun non-tradisional. Secara tradisional, penyelesaian sengketa batas wilayah atau delimitasi maritim antarnegara di ASEAN masih belum tuntas. Adanya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja misalnya di sekitar perbatasan Candi Preah Vihear, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur navigasi penting bagi pelayaran dunia. Konflik terbuka di LTS ini dapat berdampak negatif, baik secara ekonomi maupun geopolitik bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

*Kedua*, pembangunan politik dan keamanan menjadi fondasi awal pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN. Perdamaian dan keamanan selalu menjadi prasyarat pembangunan ekonomi, di tingkat

<sup>4</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Gelara Aksa, Jakarta, 1983, diakses: 30 Mei 2017.

<sup>5</sup> M. Chandra W. Yudha, 'Memimpin Pembangunan Politik dan Keamanan di ASEAN', *Masyarakat ASEAN*, Edisi 8/Juni 2015, hlm. 4-5.



nasional, regional, dan internasional. Pembangunan aspek perdamaian dan keamanan di ASEAN sejak awal berdirinya ASEAN telah menciptakan ruang bagi pembangunan ekonomi di ASEAN. Upaya membangun perdamaian dan keamanan di kawasan tidaklah mudah yang memerlukan peningkatan kerjasama politik dengan negara-negara sekitarnya yang terkait dengan suatu persoalan keamanan kawasan. Bidang kerjasama penanggulangan kejahatan lintas negara dapat mengurangi risiko beban biaya ekonomi yang dikarenakan, antara lain: tindakan korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Selanjutnya, kerjasama keimigrasian yang berhasil meningkatkan kemudahan bergerak bagi masyarakat dari satu negara ke negara lain di ASEAN dan membantu peningkatan turisme di ASEAN.<sup>6</sup>

*Ketiga*, pembangunan politik dan keamanan agar pembangunan ASEAN ditujukan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau kawasan tidak serta merta paralel dengan pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak masyarakat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi terkadang memiliki dampak negatif terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Di bidang hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap migran dan buruh migran menjamin kehadiran ASEAN bagi masyarakat. Kerjasama di bidang hukum, terutama dalam mengupayakan peningkatan integrasi ASEAN berdasarkan kerangka hukum akan berperan penting dalam menjamin norma-norma yang disepakati dan dapat diimplementasikan secara efektif.<sup>7</sup>

### A. ASEAN dan Konflik Kawasan

Peranan ASEAN bertalian dengan politik kawasan dapat dikatakan sangat pro-aktif. Hal ini, misalnya, bertalian dengan isu Lautan Cina Selatan (LCS) akan berdampak pada arsitektur regional kawasan ini dan telah menjadi salah satu agenda resmi isu strategis di

---

<sup>6</sup> M. Chandra W. Yudha, 'Memimpin Pembangunan Politik....', *ibid.*, hlm. 5.

<sup>7</sup> M. Chandra W. Yudha, 'Memimpin Pembangunan Politik ....', *ibid.*, hlm. 5.

forum ASEAN. Isu ini semakin strategis dan krusial bertalian dengan keputusan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan '*Silk Road Economic dan Maritime Silk Road*'. Pendekatan transformasi konflik dalam kasus LCS dipandang tepat dikarenakan dasar klaim sejarah yang belum sepenuhnya dapat diputuskan keabsahannya. Kemudian, hampir seluruh laporan dan dokumen bertalian dengan isu LCS cenderung hanya fokus membahas dan menganalisa tentang konflik antarnegara. Tidak sedikit, misalnya, upaya Indonesia untuk memfasilitasi forum-forum pertemuan dan diskusi sebagai langkah preventif (*preventive diplomacy*) agar tidak terjadi konflik terbuka di kawasan LCS.<sup>8</sup>

Dengan pendekatan transformasi konflik, kehadiran sebuah asas perilaku atau *code of conduct* (COC) bagi Tiongkok dan negara-negara ASEAN tampak semakin penting dan relevan. Hal ini, dikarenakan dinamika konflik di LCS memiliki banyak peluang yang dapat dikelola menjadi kerjasama yang bermanfaat bagi negara-negara terkait dengan konflik, maupun negara-negara lain yang tidak terlibat di dalam konflik LCS. Sebagai bagian dari transformasi konflik di LCS, pandangan negara-negara ASEAN yang menjadi *non-claimant* (selain Indonesia) di LCS, perlu diperhatikan. Meskipun begitu, tidak setiap negara anggota ASEAN dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, bekerjasama membangun kawasan LCS ataupun kerjasama penelitian dan pengembangan tentang potensi sumber daya alam di kawasan itu. Kepentingan internasional (*nonresident countries*) terhadap LCS dalam hal SLOCs dan navigasi, seperti Amerika Serikat, perlu mendapat perhatian. Keberadaan isu LCS bukan untuk mengundang kehadiran Amerika Serikat di kawasan LCS, tetapi tetap perlu menjaga sentralitas ASEAN, peran AS dapat memperkuat rezim internasional untuk mengarahkan arsitektur keamanan di Asia Timur, melainkan lebih untuk dapat membantu rezim internasional untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan LCS.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> 'ASEAN dan Isu Laut China Selatan', Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI, diakses: 30 Mei 2017.

<sup>9</sup> 'ASEAN dan Isu Laut China Selatan....', *ibid.* (diakses: 30 Mei 2017).

forum ASEAN. Isu ini semakin strategis dan krusial bertalian dengan keputusan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan '*Silk Road Economic dan Maritime Silk Road*'. Pendekatan transformasi konflik dalam kasus LCS dipandang tepat dikarenakan dasar klaim sejarah yang belum sepenuhnya dapat diputuskan keabsahannya. Kemudian, hampir seluruh laporan dan dokumen bertalian dengan isu LCS cenderung hanya fokus membahas dan menganalisa tentang konflik antarnegara. Tidak sedikit, misalnya, upaya Indonesia untuk memfasilitasi forum-forum pertemuan dan diskusi sebagai langkah preventif (*preventive diplomacy*) agar tidak terjadi konflik terbuka di kawasan LCS.<sup>8</sup>

Dengan pendekatan transformasi konflik, kehadiran sebuah asas perilaku atau *code of conduct* (COC) bagi Tiongkok dan negara-negara ASEAN tampak semakin penting dan relevan. Hal ini, dikarenakan dinamika konflik di LCS memiliki banyak peluang yang dapat dikelola menjadi kerjasama yang bermanfaat bagi negara-negara terkait dengan konflik, maupun negara-negara lain yang tidak terlibat di dalam konflik LCS. Sebagai bagian dari transformasi konflik di LCS, pandangan negara-negara ASEAN yang menjadi *non-claimant* (selain Indonesia) di LCS, perlu diperhatikan. Meskipun begitu, tidak setiap negara anggota ASEAN dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, bekerjasama membangun kawasan LCS ataupun kerjasama penelitian dan pengembangan tentang potensi sumber daya alam di kawasan itu. Kepentingan internasional (*nonresident countries*) terhadap LCS dalam hal SLOCs dan navigasi, seperti Amerika Serikat, perlu mendapat perhatian. Keberadaan isu LCS bukan untuk mengundang kehadiran Amerika Serikat di kawasan LCS, tetapi tetap perlu menjaga sentralitas ASEAN, peran AS dapat memperkuat rezim internasional untuk mengarahkan arsitektur keamanan di Asia Timur, melainkan lebih untuk dapat membantu rezim internasional untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan LCS.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> 'ASEAN dan Isu Laut China Selatan', Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI, diakses: 30 Mei 2017.

<sup>9</sup> 'ASEAN dan Isu Laut China Selatan....', *ibid.* (diakses: 30 Mei 2017).

## 232 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Dari perspektif strategis negara-negara pihak di LCS, wilayah ini mempunyai nilai politis dan ekonomis. Selain inisiatif Indonesia untuk memfasilitasi pertemuan, pendekatan bilateral lebih dominan dijalankan antara Tiongkok dengan negara-negara pihak ketiga di dalam konflik di LCS, kecuali Taiwan. Secara regional, empat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam) yang terlibat di dalam konflik LCS pun cenderung mengabaikan mekanisme regional ASEAN dalam penyelesaian konflik. Selain mekanisme ASEAN diabaikan dalam konflik LCS menunjukkan bahwa di antara sesama anggota ASEAN masih terdapat perbedaan kepentingan yang juga memperlihatkan rasa saling curiga atau tidak percaya antarnegara dan atas kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik LCS sesuai dengan norma dan nilai ASEAN. Dalam pembentukan Komunitas ASEAN, terutama Komunitas Politik Keamanan ASEAN) pada Desember 2015, ASEAN harus semakin berperan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di LCS.

### B. ASEAN dan Konflik Etnis-Agama

Sekitar 50 tahun sudah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terbentuk. Tentunya telah banyak kerjasama yang dilakukan, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata, keamanan, dan lainnya. Berbagai negara besar juga telah bergabung dalam beberapa kerjasama yang dibentuk ASEAN di berbagai kawasan. Seperti tujuan didirikannya organisasi ini, yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Akan tetapi, ASEAN belum atau tidak pernah melakukan untuk sungguh-sungguh menyelesaikan sejumlah permasalahan (konflik) yang dialami anggotanya. Konflik regional yang terjadi, justeru memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan ASEAN. Suatu yang tampak bahwa apa yang mereka pikirkan hanyalah meningkatkan kemajuan pribadi negara anggotanya, bukan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip yang dianut

organisasi tersebut, yang mengatur bahwa setiap negara anggota tidak diperbolehkan untuk ikut campur di dalam masalah negara anggota lainnya, yang disebut dengan prinsip 'Non-Intervensi'. Prinsip ini kemudian menjadi penting di dalam organisasi tersebut karena setiap negara anggota kemudian lebih memilih untuk memanfaatkan keanggotaan mereka di ASEAN untuk memajukan negaranya masing-masing. Persoalan kemajuan organisasi yang seharusnya bisa berdampak lebih besar bagi negara anggotanya apabila diperhatikan dengan serius, justru tidak mendapatkan porsi yang cukup. Demi memajukan negaranya, sering kali terjadi atau timbul konflik internal yang berdampak atau bahkan turut melibatkan negara anggotanya, di antaranya kasus Rohingya-Myanmar. Konflik internal yang kemudian semakin meluas ke kawasan regional bahkan ke dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan ASEAN dalam menangani masalah internal negara anggotanya, yang dipicu prinsip 'non-intervensi' tersebut.<sup>10</sup>

ASEAN merupakan wilayah dengan penduduknya yang sangat heterogen, sehingga konflik-konflik disintegrasi yang dilatarbelakangi oleh agama, suku, ras, budaya hingga konflik struktural terkait pemerataan ekonomi menjadi rentan terjadi. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki komitmen dalam mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota. Tetapi, dalam bidang HAM, meski ASEAN telah memiliki AICHR, asas Non-Intervensi menjadi dilema tersendiri bagi penegakkan HAM, khususnya wilayah Asia Tenggara adalah wilayah rentan konflik disintegrasi akibat homogenitas tersebut. Dalam hal ini, misalnya, posisi AICHR dan konflik pemerintah Filipina dan bangsa Moro yang masih belum terselesaikan. Bagi sebuah negara, ancaman terhadap kedaulatan, bukan sekadar berasal dari faktor eksternal, melainkan pula berasal dari faktor internal negara. Dalam sebuah permasalahan kedaulatan yang berasal dari internal negara, pada umumnya dipicu oleh disintegrasi kelompok-kelompok yang berlatar belakang perbedaan etnis, ras, suku, agama, ideologi hingga

---

<sup>10</sup> Erick Yunus, 'Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Kasus Rohingya', 11/3/2017, diakses 30 Mei 2017.

## 234 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

perbedaan yang bersifat struktural yakni terkait dengan kondisi pemerataan ekonomi.

Di ASEAN sendiri merupakan wilayah dengan konstelasi konflik kedaulatan yang bersifat internal tinggi. Di antaranya adalah Gerakan Aceh Merdeka– GAM, Laskar Jihad (Indonesia), *Pattani United Liberation Organization*–PULO (Thailand), *Moro Islamic Liberation Front*–MILF (Filipina), KMM (Malaysia). Gerakan-gerakan di atas merupakan gerakan yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara dengan latar belakang ideologi dan agama. Sistem negara-bangsa yang merupakan tata kelola yang bersifat sekuler dianggap bertolak belakang dengan espektasi kelompok-kelompok tersebut dalam menjalankan kehidupan sosial tanpa terpisah dengan pengaturan agama, yang di mana dalam sistem pemerintahan sekuler negara-bangsa, ada keterpisahan antara pengaturan sosial dan agama, menempatkan agama pada wilayah privat. Selain dari pada isu ideologi, muncul pula latar belakang lain yang memicu kelompok-kelompok tersebut dalam upaya memisahkan diri dari negara yakni ketidakadilan distribusi ekonomi antara pusat dan daerah sehingga memicu munculnya sebuah pemberontakan. Hal ini secara khusus misalnya yang pernah terjadi di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina. Dalam konteks ini, konflik kedaulatan di negara regional Asia Tenggara, seperti Filipina atas konflik Moro dan dilema Non-Intervensi ASEAN dalam konflik kedaulatan negara-negara Asia Tenggara. Mengingat wilayah Asia Tenggara yang berpenduduk heterogen, sehingga munculnya konflik horizontal dan vertikal sangat rentan terjadi.

Serjumlah kalangan berpendapat bahwa sejak awal berdirinya ASEAN yang bersifat elitis, mengakibatkan sulitnya mengangkat wacana hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia yang memang berasal dari sebuah perlindungan atas hak-hak sipil. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi Asia Tenggara sulit teresentuh ASEAN, kecuali jika didukung dan dilatarbelakangi oleh gerakan masyarakat sipil transnasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar, gerakan separatistis di Thailand Selatan dan revivalis di

Filipina Selatan, memakan korban baik sipil maupun militer. Konsep keamanan tidak melulu terkait dengan keamanan yang sifatnya *light politic*, namun keamanan yang sifatnya berbasah masyarakat ASEAN (*ASEAN citizenship*). Dalam ASEAN telah ada sebuah komite terkait hak asasi manusia, namun hal tersebut tidak secara serta merta dapat menjadi instrumen penting penegakkan HAM di ASEAN jika konsep Non-Intervensi ASEAN terhadap kedaulatan tradisional negara dipertimbangkan.

Pelanggaran HAM pada umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran negara atas disintegrasi ideologi hingga praktik masyarakat negara ideologi maupun praktik negara yang sering kali dengan sebutan konflik sosial etnis dan agama. Dalam kasus yang terjadi di Filipina sendiri, kasus pelanggaran HAM muncul sebelum negara bangsa terbentuk dan mencapai eskalasi konflik pelanggaran hak sosial, budaya dan nyawa pasca terbentuknya negara. Filipina telah melakukan pengesahan instrumen HAM di ASEAN yang diwakili AICHR (*ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights*), di antaranya: ICERD (*International Convention on the Elimination of Racial*), ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural*), ICCPR (*International Covenant on civil and political right*), CRC (*Convention on the Rights of the Child*), ICRMW (*International Convention for the Protection of All migran worker*), CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), namun pemicu laten pelanggaran HAM seperti konflik-konflik disintegrasi masih bertahan dengan pola-pola keengganan negara mengkui hak bagi masyarakat di Filipina Selatan untuk menentukan kedaulatan sendiri.

ASEAN sebetulnya dapat berperan dalam upaya meredam konflik-konflik disintegrasi untuk menjadi mediator dalam sebuah wujud komitmen penegakkan HAM di ASEAN, sebab yang kerap mengalami represi adalah sipil, walaupun sipil melakukan kekerasan, hal ini sering kali disebabkan oleh faktor sosiohistoris konflik atas kuasa negara dalam kedaulatan. AICHR atau *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights* merupakan komisi HAM antarpemerintah ASEAN yang memiliki tujuan dan fungsi sebagai badan penasihat yang diatur dalam TOR AICHR Pasal 1:

## 236 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;
2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;
3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;
4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;
5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional; dan
6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional di mana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.<sup>11</sup>

Di dalam TOR AICHR Pasal 4, terdapat 14 mandat dan fungsi AICHR yang diringkas sebagai berikut.

1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;
2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;
3. Meningkatkan kesadaran public terhadap HAM;
4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;
5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen HAM;
6. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN;
7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;
8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;

---

<sup>11</sup> <http://fatimahsugandavirtual-wordpress.com/26/02/10-menakar-ulang-peran-asean-telaah-konflik-bangsa-moro-dan-pemerintah-filipina/> diakses: 6/11/2017.



9. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;
10. Mendapatkan informasi dan negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;
11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;
12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;
13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yg diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN(AMM); dan
14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.<sup>12</sup>

Sikap AICHR selaku lembaga dibawah ASEAN yang tentu mengikuti norma instrumen mekanisme HAM yakni 'Non-Intervensionis' seperti yang ditunjukkan pada poin-poin diatas, dalam sebuah laporan penelitian tentang penegakkan HAM di ASEAN lebih cenderung bertolak belakang dengan kecenderungan penegakkan HAM PascaPerang Dunia ke-II yang di mana wacana HAM telah menggeser prinsip kedaulatan negara yang absolut. Menurut Gillies, terdapat lima prinsip panduan dalam melihat 'kedaulatan negara:

1. Kedaulatan negara tidaklah suci, kedaulatan yang sejati berdiam dalam kehendak rakyat, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21(3) DUHAM: "*Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah*";
2. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi pemerintahan yang sah;
3. Kedaulatan negara disalahgunakan dan kehilangan legitimasinya ketika mencoba untuk melindungi pelanggaran berat hak asasi manusia atau penderitaan manusia yang sangat berat dan disengaja;

<sup>12</sup> [http://fatimahsugandavirtual-wordpress.com/26/02/10. menakar-ulang-peran-asean-telaah-konflik-bangsa-moro-dan-pemerintah-filipina/diakses:6/11/2017](http://fatimahsugandavirtual-wordpress.com/26/02/10.-menakar-ulang-peran-asean-telaah-konflik-bangsa-moro-dan-pemerintah-filipina/diakses:6/11/2017).

## 238 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

4. Prinsip non-intervensi tidak dapat digunakan untuk melarang tindakan internasional yang sah untuk melindungi hak asasi manusia; dan

5. Komunitas internasional memiliki tugas untuk bertindak untuk menghentikan penderitaan manusia dan untuk mengakhiri pelanggaran berat hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Hal ini semakin memperkuat bahwa keberadaan ASEAN hingga khususnya komisi HAM di ASEAN masih mempertahankan politik elit negara hal ini tentu kontra produktif dengan komitmen penegakkan HAM sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini terkait beragam konflik bernuansa etnis dan agama ataupun konflik disintegrasi di beberapa wilayah ASEAN akibat disharmonisasi demografis bersifat heterogenitas. Konflik-konflik yang rentan terhadap pola-pola lingkaran kekerasan, baik kekerasan langsung, struktural hingga kultural.

### 1. Kasus: Mindanao, Filipina

Dalam upaya menyelesaikan konflik di Filipina, tentu saja ASEAN sebagai sebuah Organisasi regional tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengingat bahwa prinsip 'ASEAN WAY', yaitu *Non-Interference* urusan domestik negara anggota ASEAN. Namun diperbolehkan bagi negara anggota ASEAN menawarkan sebagai mediator perdamaian. Dalam konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dan Etnis Moro, terdapat beberapa aktor yang berperan dalam mengupayakan kesepakatan damai di antara keduanya. Salah satu negara anggota ASEAN yang paling berperan dan berupaya dalam penyelesaian konflik di antara Filipina dan pemberontak Moro adalah Indonesia. Pada 1993, Indonesia mendapat kepercayaan sebagai ketua *Komite Quartdhipartie*, sebuah komite dibawah Organisasi Konferensi Islam untuk muslim minoritas. Di bawah kepemimpinan Indonesia tercapailah sebuah perundingan antara Pemerintah Filipina dan MNLF yang menghasilkan *Final Peace*

---

<sup>13</sup> <http://fatimahsugandavirtual-wordpress.com/26/02/10. menakar-ulang-peran-asean-telaah-konflik-bangsa-moro-dan-pemerintah-filipina/diakses: 6/11/2017.>

*Agreement (FPA) atau Perjanjian Damai* pada tahun 1996. Tetapi, perundingan ini kemudian tampak tidak berjalan efektif. Kemudian peran Indonesia dalam proses perdamaian muncul lagi pada saat menjabat sebagai Chairman OIC-PCSP (2007–2003). Dengan dilakukannya pertemuan dalam berbagai tingkatan antara Pemerintah Filipina dan MNLF. Dalam perkembangannya, pada 20 April 2010 Indonesia selaku ketua OIC-PCSP berhasil mendorong Pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani Nota Kesepahaman Panel Hukum di Tripoli, Libya. Atas perkembangan di Tripoli, Pemerintah Indonesia kembali berinisiatif mempertemukan kedua pihak, yakni antara Pemerintah Filipina dan MNLF dalam mencapai persetujuan lebih lanjut atas hasil-hasil capaian perundingan di Tripoli. Pada 29 Mei-1 Juni 2012 Indonesia kembali menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan Legal Panel antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Surabaya. Selain untuk perundingan lebih lanjut, pertemuan ini juga telah menghasilkan kesepakatan baru yang menjadi '*Building Blocs*' bagi implementasi secara penuh Perjanjian Damai 1996 yang sebelumnya dianggap kurang efektif.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia sudah cukup lama berkiprah dan berpartisipasi dalam upaya membantu memecahkan persoalan konflik etnis dan agama di Rohingya. Indonesia ikut berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar karena Indonesia memiliki kesamaan identitas dengan etnis Rohingya, yakni kesamaan identitas Islam. Kendatipun konflik tersebut tidak memberi dampak terhadap Indonesia, tetapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa konflik berlangsung asimetris cenderung mengarah pada upaya pembantaian terhadap etnis Rohingya yang pada akhirnya memancing kemarahan masyarakat Indonesia dalam berbagai kelompok sosial politik domestik. Dalam hal ini, media sebagai sumber informasi, hampir seragamnya membahas tentang konflik tersebut, baik nasional maupun daerah, baik cetak maupun elektronik (termasuk didalamnya internet dan jejaringan sosial). Penggunaan kata atau kalimat yang cenderung provokatif, seperti Genosida Muslim, Pembantaian Umat Islam di Myanmar,

## 240 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Pembersihan Etnis Rohingya<sup>14</sup> yang tentunya akan diterima mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pembantaian terhadap umat Muslim. Di mana opini setiap orang per orang ditransformasikan menjadi opini publik, karenanya, hampir seluruh masyarakat Indonesia untuk segera mengambil langkah efektif untuk upaya penyelesaian konflik tersebut dan melindungi etnis Rohingya.<sup>15</sup>

Sebagai respons dari berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat Indonesi terhadap pemerintah agar mengambil sikap yang tegas terhadap konflik di Rakhine. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu melakukan pidato yang diliput beberapa media besar nasional. Sehari sebelum pidato tersebut, Presiden SBY mengirim surat tertulis kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang menyampaikan harapan Indonesia terhadap Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan atas etnis Rohingya tersebut dengan sebaik-baiknya. Setidaknya dalam surat dan pidato tersebut bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan langkah konkrit untuk membantu Pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik internal Myanmar itu.<sup>16</sup>

Selain Indonesia, Malaysia juga merupakan negara anggota ASEAN yang aktif sebagai mediator konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF serta MILF. Pada 1998 pemerintah Malaysia menginisiasi pertemuan dengan Presiden Filipina, Fidel F. Ramos dan Pemimpin MNLF, Prof. Nur Misuari. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam bentrokan senjata di antara kedua belah pihak. Kemudian perundingan dilanjutkan antara Pemerintah Filipina dan MILF pada 2012 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan tersebut, MILF bersikap lunak yang pada awalnya menuntut kemerdekaan menjadi tuntutan Otonomi Khusus Bangsa Moro. Namun hasil perundingan pada 2012 kembali gagal setelah penyerangan MILF terhadap petugas keamanan Filipina, setelah Mahkamah Agung Filipina menarik surat penyerahan

---

<sup>14</sup> 'PKS: Muslim Rohingya Korban Genosida Militer Myanmar', *Republika.co.id.*, 27 Juli 2012, (diakses: 17 November 2017).

<sup>15</sup> 'LSM dan Mahasiswa galang aksi solidaritas Rohingya', *Padangmedia.com*, 11 September 2012, (diakses: 18 November 2017).

<sup>16</sup> 'Peranan Negara ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya', *diakses: 30 Mei 2017.*

wilayah yang di klaim milik etnis Moro (MILF). Terakhir pada tahun 2014, Malaysia kembali menjadi mediator antara Pemerintah Filipina dan MILF, sehingga tercapai sebuah kesepakatan damai di antara keduanya. Indonesia dan Malaysia selaku aktor negara berperan besar dalam penyelesaian konflik berkepanjangan di Filipina.

Selain aktor negara, terdapat juga aktor *non-state* dalam upaya perdamaian di Filipina. Din Syamsudin dan Ormas Muhammadiyah adalah aktor *non-state* yang mencoba menjadi mediator upaya perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF. Din Syamsudin sebagai ketua Muhammadiyah ketika itu terlibat langsung menengahi konflik dunia, yakni dengan aktif menjadi anggota *the International Contact Group (ICG)* yang memediasi dialog antara Pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Islam Moro (MILF). Pada 2012, diadakan negosiasi antara Pemerintah Filipina dan MILF di Universitas Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya aktor negara yang mengupayakan perdamaian di Filipina. Namun juga dari aktor 'Non-State' berupa individu dan organisasi massa.<sup>17</sup>

## 2. Kasus: Rohingya, Myanmar

Pada bulan 2012, konflik etnis dan agama telah terjadi di bagian barat negara bagian Myanmar antara etnis Arakan yang mayoritas beragama Buddha, dengan etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Konflik tersebut berpuncak pada tanggal 8–12 Juni 2012, yang menyebabkan etnis Rohingnya terpaksa mengungsi keluar dari Myanmar untuk mencari perlindungan ke Bangladesh dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Konflik tersebut sebetulnya bukanlah suatu hal baru, di negara bagian Arakan, Myanmar. Sebelumnya, pada Januari 1978 dan Mei 1991 sampai Maret 1992, konflik juga pernah dilakukan Pemerintah Myanmar. Pada 2012, konflik juga pernah terjadi dua kali, pada Juni dan Oktober 2012, yang dilakukan etnis Arakan bersama militer Myanmar terhadap komunitas Muslim, yang menjadi sasaran terhadap

---

<sup>17</sup> 'Konflik ASEAN sebaiknya diselesaikan secara Internal, Proaktif Menjaga Kredibilitas Organisasi Regional ASEAN', (diakses: 30 Mei 2017).

## 244 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Hal berikutnya yang dapat direkomendasikan adalah berkoordinasi untuk menangani para pengungsi hingga batas waktu yang ditentukan atau hingga proses *resettlement* selesai. Proses panjang ini membutuhkan kerjasama, koordinasi, komitmen dan dukungan penuh dari semua pihak agar hasil yang didapatkan menjadi tepat guna. Selain itu, ASEAN perlu terus mendorong anggotanya untuk memperlakukan seluruh warga negaranya dengan adil dan setara, demi menghindari insiden kemanusiaan yang serupa terulang kembali. Hal ini perlu juga dilakukan demi memenuhi visi Masyarakat ASEAN tersebut—*politically cohesive, economically integrated, socially responsible, and a truly people oriented, people centred and rules-based ASEAN*—menuju masa depan ASEAN yang lebih baik.<sup>21</sup>

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait isu Rohingya-Myanmar, sebagai berikut: a) melakukan operasi Search and Rescue (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan; b) melakukan patrol laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan; c) menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migrant yang terdampar di wilayah tiga negara; d) meningkatkan kerjasama dan koordinais dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*; dan e) mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk menyelesaikan krisis tersebut.<sup>22</sup>

Sementara itu, kecaman dari komunitas internasional terus bermunculan terkait konflik yang ada di Rakhine, Myamar. Di Iran, sentimen negatif bermunculan karena dianggap Etnis Rakhine telah melakukan upaya pembantaian terhadap umat muslim di sana. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga mengutuk kekerasan terhadap dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingnya. ASEAN sebagai

---

<sup>21</sup> 'Direktorat Politik-Keamanan....', *ibid.* hlm.11.

<sup>22</sup> 'Direktorat Politik-Keamanan....', *ibid.* hlm.11.

organisasi regional, di mana Myanmar juga adalah bagian dari ASEAN meminta penjelasan secara menyeluruh kepada Myanmar terkait masalah tersebut. ASEAN menganggap bahwa jika benar konflik etnis tersebut berat sebelah maka hal tersebut sangat tidak wajar terjadi di lingkungan ASEAN yang demokrasi. Dengan demikian, pemerintah Myanmar diminta agar secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Di Indonesia, berbagai protes, kritik, dan keberatan hampir dari sejumlah besar elemen masyarakat atas peristiwa tersebut dinyatakan melalui aksi demonstrasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Langkah tersebut ditempuh untuk mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Mereka menganggap ada upaya pembantaian Etnis Rohingya dalam konflik tersebut yang dilakukan etnis Arakan dan pemerintah Myanmar. Sebagai wujud keprihatinan atas apa yang terjadi di Myanmar, pemerintah Indonesia kemudian turut aktif baik secara bilateral, multilateral maupun regional membahas dan berupaya menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Etnis Rohingya, baik di PBB, ASEAN, dan OKI.<sup>23</sup>

Pemerintah Indonesia juga menerima kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingya, kemudian bekerja sama dengan badan-badan PBB dan lembaga internasional lain untuk menyelesaikan, memberikan status, menyalurkan pada pihak ketiga, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, juga terus mendesak pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pemerintah Myanmar agar memperhatikan etnis Muslim Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan—sebagian kalangan berpandangan cenderung adanya upaya pembersihan etnis (*ethnic cleansing*). Hal yang menginspirasi Indonesia di mana mayoritas penduduknya muslim, dengan adanya konflik tersebut cenderung menjadi reaktif, menyebabkan persepsi individu bertransformasi menjadi persepsi kolektif disebabkan kesamaan identitas agama (Islam) yang berujung

<sup>23</sup> <https://galanggriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-negara-asean-dalam-penyelesaian-konflik-etnis-rohingya/> (diakses: 23 Juli 2017).

## 246 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

pada desakan kepada pemerintah Indonesia untuk secepatnya mengambil sikap.<sup>24</sup>

Dalam pertemuan KTT ASEAN di Manila 13 November 2017, KTT ASEAN di Manila tidak membahas persoalan krisis di Rakhine. Dokumen rancangan yang dibuat Filipina, sebagai Ketua ASEAN saat ini, tidak menyebutkan tentang penderitaan rakyat Muslim Rohingya akibat krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan solusi untuk menyelesaikannya. Dalam dokumen yang dikeluarkan usai KTT ASEAN itu juga tidak menyebutkan dengan detail tentang situasi di Rakhine. Dokumen itu pun tidak menggunakan istilah 'Rohingya' untuk etnis minoritas Muslim. Bahkan, kasus yang terjadi di Rakhine hanya disebutkan sekali dalam satu paragraph yakni tentang pentingnya bantuan kemanusiaan untuk diberikan kepada korban bencana alam di Vietnam, korban pertempuran yang melibatkan militan di Marawi dan juga 'komunitas terkena dampak di Rakhine'.<sup>25</sup>

Tidak adanya pembahasan tentang Rohingya di KTT ASEAN yang diselenggarakan di Manila itu turut dibenarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Filipina, Roberto Romulo. Menurut Romulo, hal itu dikarenakan Filipina tidak ingin menyinggung pemimpin Myanmar yang turut hadir dalam KTT tersebut, yakni mencoba untuk menghormati Pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Seperti dikatakan kepada Media Filipina ANC, dikutip dari laman *Reuters*, 13/11/2017. Perwakilan Amnesty Internasional dari Filipina, Winor Papa, tidak menampik topik tentang terorisme dan perdamaian dunia dibahas dalam KTT ASEAN 2017, tetapi ada beberapa hal pula dinilai tidak layak untuk dibahas. Persoalan terorisme dan perdamaian serta ketertiban dunia akan dibicarakan oleh para pemimpin ASEAN, akan tetapi, ada banyak juga hal yang tidak akan dibahas dalam ruangan tersebut dan dengan sengaja diabaikan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <https://galanggriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-negara-asean-dalam-penyelesaian-konflik-etnis-rohingya/> (diakses: 23 Juli 2017).

<sup>25</sup> 'Hormati Suu Kyi, KTT ASEAN di Manila tidak bahas soal krisis di Rakhine', *Merdeka. Com*, 13 November 2017, (diakses: 23 November 2017).

<sup>26</sup> 'Hormati Suu Kyi, KTT ASEAN di Manila...', *ibid*.



Sementara itu, beberapa negara anggota ASEAN, terutama Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim, telah menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi di Rakhine. Tetapi, prinsip ASEAN, *Non Interference*, yang tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain agaknya tetap menjadi kendala dalam membicarakan masalah krusial lainnya, seperti kasus Rakhine. Masalah Rohingya di Rakhine tampaknya sengaja dikesampingkan pada KTT ASEAN di Manila ini.<sup>27</sup> Hanya saja, di sela-sela acara puncak KTT ASEAN di Manila, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengizinkan pengungsi Rohingya yang mengungsi di Bangladesh untuk pulang kembali ke Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB juga menyoroti bahwa upaya yang diperkuat untuk memastikan akses kemanusiaan, pemulihan yang aman, bermartabat, sukarela dan berkelanjutan, serta rekonsiliasi yang benar antara masyarakat juga sangat penting.<sup>28</sup>

Pertemuan itu tentu menambah tekanan global kepada Suu Kyi yang memintanya mengambil tindakan dalam krisis Rohingya. Sebelum Kepala PBB, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, pun melakukan pembicaraan terkait krisis Rohingya dengan Suu Kyi di Manila. Dalam sebuah pertemuan puncak KTT ASEAN yang dihadiri para pemimpin negara, termasuk Suu Kyi, Guterres menyuarakan keprihatinan tentang Rohingya. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sumber ketidakstabilan potensial di kawasan ini serta radikalisasi. Dikatakan Guterres, 'perpindahan ratusan ribu warga Rohingya merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan dalam sebuah tragedi yang berkepanjangan'. Krisis yang terjadi Rakhine State memang menjadi sorotan masyarakat dunia. Pasalnya, akibat konflik ini, lebih dari 600 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam dua setengah bulan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> 'Hormati Suu Kyi, KTT ASEAN di Manila....', *ibid.*

<sup>28</sup> Djanti Virantika/Jurnalis, 'Temui Suu Kyi di KTT ASEAN, Sekjen PBB Desak Myanmar Izinkan Pengungsi Rohingya Kembali', seperti dikutip dalam *The Strait Times*, 14 November 2017, diakses: 14 November 2017

<sup>29</sup> Djanti Virantika/Jurnalis, 'Temui Suu Kyi di KTT ASEAN....', *ibid.*

## 248 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Krisis ini meletus setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi di negara bagian Rakhine, Myanmar, hingga memicu sebuah tindakan keras militer yang membuat ratusan desa dibakar dan memicu eksodus besar-besaran. Pihak berwenang kini telah memblokir akses ke Rakhine utara guna mencegah kembalinya para pengungsi. PBB pun turun tangan untuk menyelesaikan krisis di Rakhine State. Wartawan dan pejabat PBB telah mengumpulkan dokumen kesaksian dari pengungsi Rohingya di Bangladesh yang menggambarkan tindak kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar. Mereka mengaku otoritas berwenang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran massal di permukiman Rohingya. Setelah penyelidikan resmi pejabat PBB dan wartawan tersebut, tentara Myanmar pun menerbitkan sebuah laporan pada pekan ini. Dalam laporan tersebut, mereka berusaha membersihkan diri dari segala pelanggaran. Akibat krisis ini, Suu Kyi mendapat kecaman dari kelompok hak asasi. Suu Kyi dinilai gagal menyelesaikan krisis Rohingya.<sup>30</sup>

Ketika menciptakan satu Kesatuan ASEAN pada tahun 2015, dipandang perlu adanya suatu landasan sebagai tempat berpijak untuk mulai melangkah menghadapi dinamisasi dan glocalisasi. Karena itu perlu ada ikatan kuat sehingga seluruh lapisan masyarakat ASEAN mengerti dan merasakan manfaat dari terbentuknya Komunitas ASEAN ini terkhusus pada generasi muda yang kelak akan keluar sebagai pemimpin dan pembangun ekonomi bangsa. Kesepakatan negara-negara ASEAN pun dalam pembentukan Kesatuan Ekonomi ASEAN tersebut diharapkan dapat menciptakan terjadinya arus lalu lintas barang dan jasa, investasi antarnegara memiliki ruang gerak yang bebas. Oleh karena itu, pemuda dan masyarakat harus lebih mempersiapkan diri dengan mengasah *skill* untuk bisa menghadapi era pasar bebas ini.<sup>31</sup>

Ada 3 Pilar Kesatuan Komunitas ASEAN 2015: *Pertama*, Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang lebih kepada penekanan

---

<sup>30</sup> Djanti Virantika/Jurnalis, 'Temui Suu Kyi di KTT ASEAN, Sekjen PBB Desak Myanmar Izinkan Pengungsi Rohingya Kembali', seperti dikutip dalam *The Strait Times*, 14 November 2017). *ibid.*, (diakses: 14 November 2017).

<sup>31</sup> 'Konflik ASEAN sebaiknya diselesaikan ....' *op.cit.*

aturan dan norma politik bagi negara -negara Asean; *Kedua*, Komunitas Ekonomi ASEAN yang lebih kepada pasar bebas yang berbasis pada pasar tunggal Asean, jadi akan memungkinkan arus lalu lintas ekspor impor lebih sering terjadi tanpa terhambat berbagai syarat yang berat, oleh karena itu persaingan juga akan semakin ketat; dan *Ketiga*, Komunitas Sosial Budaya ASEAN, di mana negara-negara ASEAN bisa bekerjasama dalam hal pengentasan kemiskinan, menjaga lingkungan hidup, penganggulangan terhadap bencana.<sup>32</sup>

Pilar pertama, di mana Politik menjadi pilar nomor 1 bagi ASEAN. Pada dasarnya setiap negara akan mengutamakan kepentingan nasionalnya dalam sebuah kerjasama luar negeri sehingga perhatian pada keamanan menjadi nomor satu dalam pilar ini. Jika terjadi konflik Internal ASEAN, diperlukan kesatuan ASEAN. Konflik antarnegara tentunya terjadi disebabkan oleh setiap negara mempertahankan kepentingan nasionalnya, entah itu dalam hal wilayah kekuasaan atau hal lainnya. Karena itu, diharapkan dengan adanya kesatuan ASEAN, persengketaan yang kelak mungkin saja terjadi, bisa diselesaikan secara internal ASEAN. Ketika terjadi persengketaan antara Kamboja dan Vietnam, posisi Indonesia bisa menjadi mediasi untuk menciptakan perdamaian dan bersama-sama mencari solusi. Ketika terjadi persengketaan tentang wilayah kekuasaan atau batas wilayah suatu negara antara Malaysia dan Singapore, posisi Indonesia atau negara-negara lainnya bisa menjadi mediasi melakukan perundingan mencari jalan keluar.

Sebetulnya setelah pembentukan komunitas ASEAN 2015, apabila terjadi persengketaan, peranan ASEAN menjadi terdepan dalam menyelesaikannya sehingga perdamaian terbentuk. Tetapi, apabila negara bersengketa segera mencari solusi kepada dunia internasional, sama halnya dengan mencoreng ASEAN di masyarakat dunia. Penyelesaian konflik internal dilakukan di Internal ASEAN merupakan bukti bahwa Kesatuan ASEAN itu kuat di internal ASEAN dan Organisasi Regional Global. ASEAN merupakan organisasi regional

---

<sup>32</sup> 'Konflik ASEAN sebaiknya diselesaikan ....' *ibid.*

## 250 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

yang didirikan pada 8 Agustus 1967. ASEAN pun bersatu dan bertumbuh sebagai negara berdasarkan pada hukum. Dalam perjanjian terbentuknya organisasi persahabatan ASEAN, masing-masing anggota juga sepakat untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian suatu konflik dan mengutamakan jalur perdamaian.

Akan tetapi, sering terjadi negara-negara ASEAN lebih memilih membawa konflik internalnya ke lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional (Den Haag). Hal ini pun bisa dimaknai beragam, salah satunya adanya tingkat kepercayaan yang masih rendah di antara sesama negara ASEAN dalam mengatasi konflik internal negara ASEAN. Ketika Indonesia dan Malaysia bersengketa 1966 mengenai wilayah perbatasan yang memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan, di mana kedua negara ini membawa penyelesaian masalah ini ke Mahkamah Internasional. Pada 1990, Filipina juga berupaya menyelesaikan konflik di Mindano Selatan, dan Indonesia bersama Filipina kembali membawa penyelesaian masalah ini ke organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI).<sup>33</sup>

Pengalaman-pengalaman ini sering pula diikuti negara ASEAN lainnya ketika mengalami konflik tanpa perlu pikir panjang untuk meminta dunia internasional menyelesaikannya yang notabene berasal dari negara eksternal ASEAN. Ketika terjadinya Konflik Thailand dan Kamboja, Indonesia melalui Ketua ASEAN Marty melakukan dukungan dan mediasi kepada Thailand dan Kamboja untuk dapat menyelesaikan sengketa secara bilateral. Tetapi, sekalipun Indonesia telah berupaya menjadi mediasi dalam persengketaan ini, ternyata pihak yang bersitegang (Kamboja) justru mengadukan permasalahan ini dengan meminta bantuan PBB untuk membantu menyelesaikan masalah itu, agar negara Thailand segera menarik pasukannya dari wilayah sengketa. Pada kasus konflik ini terdapat baku tembak yang menewaskan banyak militer.

Terbentuknya Kesatuan Komunitas ASEAN 2015 sebenarnya bertujuan bahwa dalam penyelesaian konflik internal ASEAN

---

<sup>33</sup> 'Konflik ASEAN sebaiknya diselesaikan ....' *ibid.*

diharapkan tidak dengan cepat melibatkan pihak eksternal ASEAN yang dipandang dapat mencoreng wajah ASEAN di mata dunia. Setelah terbentuk Kesatuan ASEAN 2015, keberadaan ASEAN sebagai kesatuan kuat di dunia global, diharapkan penyelesaian konflik internal ASEAN diselesaikan secara internal organisasi regional ASEAN ini. Jika kasus konflik sudah dibawa ke Mahkamah Internasional akan menjadi sesuatu tontonan yang menyedihkan bagi masyarakat ASEAN itu sendiri. Bagaimana tidak, konflik "keluarga" selalu berujung penyelesaian dengan pihak di luar "keluarga" ASEAN, sehingga sejak tahun 2015 anggota ASEAN telah mengokohkan Kesatuan ASEAN di mata dunia. Sehingga negara-negara anggota ASEAN, perlu memiliki kepercayaan terhadap negara sesama ASEAN. Jika dalam suatu kasus ternyata sama sekali tidak bisa diselesaikan selanjutnya dapat meminta bantuan internasional untuk menyelesaikannya. Komunitas ASEAN 2105 mendorong masyarakat ASEAN lebih proaktif menunjukkan kredibilitas sebagai organisasi regional dan sebagai satu kesatuan Komunitas ASEAN.<sup>34</sup>

Konflik Malaysia dengan Brunei Darussalam juga pernah terjadi, keterkaitan dalam perebutan wilayah perbatasan. Di mana daerah Limbang yang awalnya dikendalikan Serawak, tetapi melihat dari letak geografisnya Brunei mengklaim bahwa itu merupakan wilayah mereka yang dijadikan Malaysia sebagai wilayahnya dan memasukkan wilayah ini ke Peta Malaysia sebagai penegasakan kepemilikan. Tetapi, terjadi lagi sengketa di perairan Brunei dan Malaysia. Tetapi, kala itu berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kembali dalam keputusan Dewan Internasional 1958. Wilayah ZEE melingkupi seluruh perairan selatan Brunei. Tetapi, pada 1979 (Setelah terbentuknya ASEAN), Malaysia mengeluarkan batas teritorial yang merupakan wilayah ZEE milik wilayah Brunai.

Selain itu, pernah terjadi konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu. Konflik ini terjadi ketika Kesultanan Sulu menganggap bahwa Malaysia dikabarkan telah menyewa Sabah dan Serawak seharga 5.300

<sup>34</sup> 'Konflik ASEAN sebaiknya diselesaikan ....' *Ibid.*

## 252 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

ringgit per tahun. Kesultanan Sulu menuntut kepada Malaysia untuk segera mengembalikan wilayah itu dan mengganti segala kerusakan yang sudah terjadi dalam proses sengketa selama ini. ASEAN harus menjembatani konflik yang terjadi di negara ini. Konflik ini telah menewaskan banyak korban. Banyaknya korban yang terjadi dalam sengketa Malaysia dan Kesultanan Sulu jangan sampai dianggap menjadi kegagalan organisasi regional ASEAN atau kegagalan kesatuan rumpun melayu di zaman modern.<sup>35</sup>

Malaysia juga pernah konflik dengan Singapura. Malaysia mengklaim bahwa Pedra Barca merupakan wilayahnya dan bukan milik Singapura. Negara Malaysia pun membawa masalah ini ke Mahkamah I di Hamburg pada 4 September 2013. Baju Puteh yang terletak di selatan Singapura dan tenggara Johor akhirnya jatuh ke Singapura dengan melihat dasar teritorial pada 23 Mei 2008. Sayang sekali untuk penyelesaian sengketa ini harus melibatkan dunia internasional, padahal ASEAN harusnya menjadi organisasi regional yang diakui dunia, tetapi untuk menyelesaikan konflik internal saj sering kali harus diselesaikan secara eksternal. Jika kemudian telah terjadi perundingan sebaiknya penempatan Patok (pembatas wilayah) lebih diperhatikan, sehingga tidak mengalami pergeseran. Karena ada penyebabnya, misalnya karena kondisi tertentu: bencana alam, longsor, yang menyebabkan patok-patok yang mengalami pergeseran atau bahkan digeser secara sengaja atau hilang. Patok yang sudah ditanamkan diletakkan di tempat tertentu yang berbeda, padahal pergeseran ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena mencakup batas wilayah. Metode pengukuran pun harus terus dikembangkan karena perbedaan interpretasi tentang wilayah batas bisa berbeda. Adanya pengukuran di lapangan memungkinkan demarkasi. Kondisi di Peta belum tentu sama dengan kondisi alam, di mana alam sendiri bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan pengukuran batas wilayah. Misalnya, karena tinggi suatu tempat bersifat relatif, penentuan titik tertinggi itu bisa dihitung dari

---

\* 'Konflik ASEAN sebaiknya ....' *ibid.*

permukaan laut. Penentuan titik koordinat wilayah perlu ditetapkan untuk memudahkan pencarian, hal ini bisa menjadi dasar bila di kemudian hari terjadi sengketa. Sebaiknya setiap negara harus memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan konflik secara internal terlebih dahulu dengan membangun kepercayaan terhadap masing-masing negara ASEAN.<sup>36</sup>

Jika telah mencapai kesepakatan melalui perundingan secara internal, sebaiknya dilakukan deklarasi terhadap kepemilikan wilayah perbatasan secara ASEAN, bukan mengklaim sendiri. Kemudian perlu dilakukan perubahan terhadap Peta Wilayah Negara-negara ASEAN. Karena keberhasilan klaim wilayah di satu negara tertentu akan merubah batas wilayah negara lainnya. Jika sudah dilakukan pemetaan, segera ciptakan pembangunan. Entah dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk penempatan patok yang jelas dan tidak mudah mengalami pergeseran, bisa berupa patok (*tower raksasa*). Demikian juga jika titik koordinat jatuh di wilayah daratan (pegunungan/hutan) dan atau Penempatan Patok khusus untuk wilayah lautan. Jika untuk wilayah daratan yang bisa dijadikan pemukiman penduduk sebaiknya dilakukan pembangunan desa dan dengan segera membuat sistem administrasi wilayah yang lengkap, yang memberikan rasa aman bagi penduduk tinggal di wilayah perbatasan yang juga memberi titik aman bagi suatu negara dengan terbentuknya populasi masyarakat yang kental dan sarat dengan budaya negara tertentu.<sup>37</sup>

Kasus Rohingya-Myanmar terkini misalnya, sudah dipastikan berdampak bagi negara-negara ASEAN lainnya. Pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar, ataupun melakukan perlawanan atau pemberontakan karena diskriminasi seperti di Mindanao-Filipina, dapat menimbulkan ancaman stabilitas internal negara tujuan. Ketakutan terjadi berbagai macam permasalahan, seperti penyelundupan manusia, kamufase teroris di dalam barisan pengungsi, dan lain sebagainya, menjadi ancaman signifikan disebabkan tidak kunjung

---

\* 'Konflik ASEAN sebaiknya ....' *ibid.*

† 'Konflik ASEAN sebaiknya ....' *ibid.*

## 254 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

tuntasnya konflik tersebut. Merespons kondisi dan permasalahan seperti ini, seharusnya prinsip 'non-intervensi' sudah mulai bisa diabaikan, karena selain memberi dampak buruk bagi negara anggota yang lain, konflik ini juga sangat tidak pantas dari sisi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan dapat digunakan untuk menekan prinsip 'non-intervensi' yang dipandang jauh dari rasionalitas-akal sehat, yang selama ini juga dijadikan alat untuk berlindung oleh negara-negara yang tidak ingin dicampuri urusan pribadi<sup>38</sup> atau urusan dalam negerinya—sekalipun misalnya PBB sudah menyatakan bahwa negara-negara tersebut telah terindikasi melakukan pelanggaran HAM dan bahkan mengarah pada pembunuhan missal (*genosida*) ataupun pembersihan etnis (*ethnic cleansing*).

Operasi militer di Rakhine digelar setelah sembilan aparat kepolisian tewas ditembak di dekat perbatasan Bangladesh awal Oktober 2017. Menurut klaim PBB, hingga bulan Mei 2017 diperkirakan sebanyak 69.000 warga etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar. Konflik sectarian tersebut memicu hujan kritik terhadap pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi yang dinilai mendiamkan pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim di Rohingya, Rakhine. Hingga kini pemerintah Myanmar masih menepis dugaan adanya kejahatan kemanusiaan di Rakhine, termasuk pembantaian dan pemerkosaan missal. Yangon sebaliknya berdalih, operasi tersebut merupakan kampanye anti separatism yang sudah sesuai dengan konstitusi. Lebih dari 1.000 warga etnis Rohingya tewas sebagai buntut operasi militer. Militer dan Kepolisian Myanmar memang memiliki tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM setelah Suu Kyi berjanji menindaklanjuti tudingan PBB tersebut.<sup>39</sup>

Atas tindakan brutal dan kekerasan tersebut, Myanmar pun menghadapi kritik tajam dari dunia internasional, termasuk dari PBB dan Amerika Serikat. Komisar HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein mengeritik tentang penanganan pemerintah Myanmar terhadap krisis

---

<sup>38</sup> Erick Yunus, 'Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN...', *op. cit.*

<sup>39</sup> 'Myanmar Akhiri Operasi Militer Terhadap Rohingya', *diakses: 30 Mei 2017.*



itu yang 'tidak berperasaan', yang digambarkannya bahwa tindakan militer Myanmar sebagai 'pelajaran, bagaimana membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk'. Amnesty International juga melontarkan kritik yang tajam dan menyatakan tentera melakukan 'serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil', sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kemudian memicu gelombang protes public di negara-negara ASEAN, dan dunia internasional.<sup>40</sup>

Apabila Myanmar memang tidak melakukan *genosida* atau *ethnic-cleanshing* terhadap etnis Rohingya, seharusnya intervensi kemanusiaan dapat dilakukan oleh ASEAN atau pun PBB untuk membantu para korban yang membutuhkan pertolongan. Peraturan mengenai keterbatasan akses yang dapat dimiliki oleh penduduk Rohingya hanya berlaku untuk pemerintah Myanmar dan bukan dunia internasional, sehingga mereka juga kayak memperoleh bantuan dan rasa aman untuk kehidupan tempat mereka tinggal. Meskipun terkesan mengganggu kedaulatan sebuah negara, tetapi, hal itu masih dapat dilakukan apabila ASEAN memberikan sikap tegas kepada pemerintah Myanmar. Setidaknya memberikan pengertian untuk meminta beberapa kawasan di dekat terjadinya lokasi konflik supaya dijadikan tempat pengungsian dan pos penjagaan bagi para korban konflik sosial etnis dan agama atau konflik *ethno-religious* tersebut.

Organisasi internasional seperti PBB sekalipun agaknya tidak akan dengan mudah masuk Myanmar bila tidak ada keterlibatan ASEAN secara sungguh-sungguh agar Myanmar bersedia bekerjasama dalam upaya mengatasi persoalan konflik *ethno-religious* tersebut. Salah satu keterlibatan ASEAN adalah dengan perlunya merekomendasikan masuknya tim investigasi PBB untuk Myanmar. Apa yang dilakukan ASEAN selama ini belum banyak diketahui publik karena organisasi regional ASEAN ini sejauh ini belum mempraktekkan diplomasi dengan optimal yang menuntaskan konflik *ethno-religious* dan lebih memilih *silent diplomacy*. Praktik kekerasan terhadap minoritas etnis Rohingya

---

<sup>40</sup> 'Myanmar Hadapi Tekanan dari ASEAN Atas Krisis Rohingya', diakses: 30 Mei 2017.

## 256 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

seharusnya segera dihentikan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Konflik Rohingya di Myanmar, apabila tidak mampu diatasi, tentu saja dapat memicu tidak hanya berlanjutnya gelombang pengungsi ke negara ASEAN lainnya. Sama halnya dengan kasus konflik di Mindanao, Filipina Selatan yang dapat dikatakan sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, dan hingga kini belum tertuntaskan. Konflik Moro pun kini sudah berkembang dan bertambah menjadi konflik baru seperti ISIS atau NIIS. Hal ini justru menambah berat dalam upaya mereduksi dan mengatasi konflik bangsa Moro dengan pemerintah Filipina. Bukan tidak mungkin berkembangnya isu perjuangan bangsa Moro dikaburkan dengan isu ISIS atau NIIS, padahal itu dua hal yang berbeda. Karena, apa pun bentuk konflik, seperti konflik komunal bernuansa etnis dan agama di suatu negara ASEAN akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan negara-negara ASEAN lainnya.

Tetapi, dalam mengatasi berbagai konflik etnis dan agama di negara-negara ASEAN, di Rohingya dan Mindanao misalnya, ASEAN tampak tersandera oleh prinsip intervensi untuk bertindak lebih jauh dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di kedua negara itu. Seperti diketahui bahwa prinsip non-intervensi merupakan satu prinsip fundamental yang dianut ASEAN. Prinsip ini mengatakan bahwa ASEAN termasuk anggota-anggotanya, tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal yang dihadapi salah satu negara anggota. Tampak di sini bahwa ASEAN terjebak pada komunal non-intervensi yang menghambat organisasi regional di wilayah Asia Tenggara mendorong perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Keempat prinsip utama ASEAN kemudian diletakkan secara lebih terstruktur pada *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* pada 2003 dan pada ASEAN Charter pada 2008. Idealnya, ASEAN tidak hanya membantu pengungsi Rohingya ataupun pengungsi Moro

---

<sup>4</sup> Terdapat empat prinsip utama ASEAN, *pertama*, penyelesaian masalah dengan cara damai; *kedua*, menghindari kekuatan senjata; *ketiga*, prinsip non-interference; dan *keempat*, pembuatan kebijakan secara consensus. Lihat: (Reza Gunadha, 'Konflik Rohingya, ASEAN Tersandera Kebijakan Non-Intervensi', 09 September 2017), diakses 27 Januari 2017.

misalnya dengan bantuan pangan dan logistik, tetapi mendorong pemerintah Myanmar dan Filipina untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia komunitas Rohingya dan bangsa Moro.<sup>42</sup>

Suatu hal yang lebih penting lagi, mencari persoalan mendasar atau 'akar masalah' persoalan yang dihadapi Muslim Rohingya dan Muslim Moro-Mindanao jauh lebih penting dari pada pendekatan politis yang terkadang justru bisa menimbulkan permasalahan baru—yang menyulitkan proses rekonsiliasi. Misalnya, akar masalah Rohingya merupakan ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. Karena ketidakjelasan identitas ini, mengakibatkan etnis Rohingya tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, dan pekerjaan. Semua itu merupakan hak-hak dasar manusia tentunya.

Sama halnya dengan konflik bangsa Moro-Mindanao, Filipina Selatan, yang sudah terjadi tindakan diskriminatif sejak ratusan tahun yang lalu, tentunya memerlukan upaya solusi dan rekonsiliasi yang substantif yang tidak merugikan etnis dan agama minoritas tersebut, dengan mengedepankan 'win-win solution' bukannya 'win-lose', antara penguasa pemerintah dengan masyarakat minoritas etnis dan agama yang sedang berkonflik di negara masing-masing. ASEAN sesungguhnya tidak boleh membiarkan dengan alasan solidaritas komunitas ASEAN sehingga membiarkan perilaku yang mengarah de-humanisasi (*de-humanization*) yang ditafsirkan dan dilakukan sepihak oleh otoritas pemerintah, karena hal demikian sesungguhnya jauh dari nilai-nilai suci ajaran agama-agama dan nilai-nilai demokrasi yang dianut mayoritas negara-negara Asia Tenggara.

---

<sup>42</sup> Reza Gunadha, 'Konflik Rohingya, ASEAN Tersandera Kebijakan Non-Intervensi....', *ibid.*, diakses 27 Januari 2017.

## BAB V PENUTUP

**B**agian ini merupakan suatu penarikan beberapa simpulan dan saran-saran keterkaitan dengan hasil pembahasan penelitian tentang: dinamika konflik sosial-etnis dan agama; faktor-faktor yang dipandang sebagai pendorong terjadinya konflik sosial (etnis dan agama) di Asia Tenggara; dan peranan *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)* sebagai strategi resolusi berbagai konflik sosial di kawasan internal regional ASEAN.

Terdapat beberapa poin kesimpulan penting dari buku ini: *Pertama*, dinamika konflik sosial-etnis dan agama merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam masyarakat pluralistik pada negara-negara di Asia Tenggara. Konflik etnis-agama minoritas Muslim dengan etnis mayoritas (mendapat dukungan penguasa) sering kali memiliki agama yang berbeda. Perbedaan keyakinan agama ini dan pengalaman sosio-historis-kolonialisme suatu bangsa agaknya berpengaruh kuat sebagai 'akar konflik' bernuansa keagamaan di Asia Tenggara. Selain itu, perbedaan struktur sosial, etnis, agama, ekonomi, politik dan budaya, merupakan faktor lainnya, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 'proses' terjadinya konflik etnis dan agama, minoritas Muslim di berbagai negara di Asia Tenggara.

*Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya konflik sosial-etnis dan agama di Asia Tenggara sebagai berikut. Di Indonesia, kasus terjadinya konflik sosial-etnis dan agama dapat

## 260 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

dijelaskan melalui *facilitating contexts*: politik etnisitas kolonial Belanda atau politik '*divide impera*'; eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi; ketimpangan ekonomi, demografi, dan mayoritas-minoritas; motif ekonomi kolonial dan 'netralitas' terhadap agama-adat istiadat. *Core of conflicts*, suatu tingkat *social deprivation* (penderitaan sosial) atau suatu marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir dalam pembentukan sumber daya (*resource*) maupun kekuasaan (*power*), antara lain: kecenderungan ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat pluralistik (mayoritas-minoritas); perbedaan dan sikap mental; perbedaan suku/etnis, ras dari pemeluk agama; perbedaan tingkat kebudayaan dan masalah mayoritas-minoritas agama. *Fuse factors*, 'sumbu' konflik yang sudah lama adanya yang sedang menunggu tersulut, yang antara lain: sejak era Reformasi munculnya beragam organisasi massa (ormas) agama yang memiliki pandangan berbeda terhadap kelompok etnis dan agama lain. *Triggering factors*: faktor pemicu, sebagai peristiwa atau momentum di mana berbagai elemen diatas diakumulasikan untuk melahirkan konflik.

Di Rohingya-Myanmar, kasus konflik sosial-etnis dan agama, dapat dijelaskan melalui *facilitating contexts*: kebijakan migrasi kolonial Inggris; perilaku diskriminatif dan anti etnis Rohingya yang terbentuk sejak colonial Inggris; dominasi budaya agama Budha dan etnis Burma. *Core of conflicts*: perilaku diskriminatif pemerintah junta militer Myanmar; etnis Rohingya dianggap migran tanpa warga negara yang sah; dan masalah politik dan ekonomi. *Fuse factors*: bertalian dengan sentimen etnis. *Triggering factors*: keberpihakan pemerintah junta militer Myanmar terhadap fundamental Budha.

Di Mindanao-Philipina, terjadinya konflik sosial-etnis dan agama dapat dianalisis bertalian dengan *facilitating contexts*, bertalian dengan kebijakan imperialisme-kolonial (Spanyol, Amerika); kasus Jabiddah Massacare; diskriminatif dan kekerasan. *Core of conflicts*, bertalian dengan: Kebijakan imigrasi etnis Kristen ke Mindanao; sentimen agama-Misionari Kristen; diskriminasi hukum dan marginalisasi; kesulitan pekerjaan dan penghidupan; dan risiko implementasi pemerintahan otonomi khusus. *Fuse factors* bertalian dengan:

ketimpangan sumber daya dan ekonomi; dampak otonomi khusus dan potensi separatism baru (misalnya *Mindanao Independent Movement/MIM*; *Moro National Liberation Front/MNLF*; *Moro Islamic Liberation Front/MILF*). *Fuse factors* bertalian dengan akumulasi berbagai elemen di atas yang memudahkan meletusnya konflik sosial etnis dan agama.

Di Fattani-Thailand Selatan, kasus konflik sosial-etnis dan agama dari *facilitating contexts* bertalian dengan: dampak asimilasi kultural; pemukiman terpisah secara etnis dan agama; operasi militer; jumlah (*size*) etnis minoritas Muslim yang relative besar (20%). *Core of conflicts* bertalian dengan: kebijakan integrasi politik-administratif; kesenjangan pemerintah denan masyarakat; dan faktor bahasa. *Fuse factors* meliputi ketimpangan sumber daya manusia dan kesenjangan ekonomi; pengakuan agama dan etnis; dan diskriminasi pekerjaan. *Trigging factors* meliputi diskriminasi ekonomi dan pekerjaan; diskriminasi etnis, ras, dan agama.

Di Malaysia, konflik sosial-etnis dan agama berhubungan dengan *facilitating contexts* bertalian dengan: warisan diskriminasi kolonial Inggris yang diskriminatif; etnis Cina/Tionghoa menguasai sebagian besar kekayaan negara yang menimbulkan sentimen dari etnis Melayu/Bumi Putera. *Core of conflicts* bertalian dengan: hak istimewa etnis Melayu dan *New Economic Policy (NEP)*; dan klaim diskriminatif bidang ekonomi dari kalangan etnis minoritas India. *Fuse factors* bertalian dengan: sentimen etnis, ras, dan agama, serta kompetisi ekonomi. *Trigging factors* berhubungan dengan akumulasi elemen-elemen masa lalu (kebijakan diskriminasi kolonial Inggris, sentimen ras, etnis, agama, dan ekonomi) yang memungkinkan konflik sosial-etnis dan agama kapan bisa saja terjadi.

Potensi-potensi konflik sosial (etnis dan agama) di negara-negara Asia Tenggara sebetulnya lebih dominan disebabkan adanya pengalaman sosio-historis perjalanan bangsa-bangsa (*nations*) tersebut—terutama bertalian dengan pengalaman sosio-historis atas kebijakan bangsa kolonial yang cenderung diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat pribumi (*natives*), terutama kebijakan dalam bidang sosial-budaya, politik dan ekonomi. Ketimpangan (*gap*) dalam

## 262 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

struktur sosial-ekonomi yang diciptakan bangsa kolonial di beberapa negara Asia Tenggara kemudian berpengaruh dan berlanjut terhadap relasi antara kelompok etnis dan agama berbeda. Tidak jarang kondisi struktur sosial (ekonomi dan politik) yang diciptakan tetap berlanjut hingga memasuki pascakemerdekaan (*independent*) negara-negara regional ASEAN. Hingga kini pun sebenarnya, konflik sosial bernuansa etnis dan agama di Asia Tenggara tersebut lebih dominan dikarenakan adanya kenyataan sosiologis yang memperlihatkan ketimpangan (*gap*) struktural di tengah masyarakat pluralistik Asia Tenggara. Jadi, keberadaan ideologi dan ajaran-ajaran agama bukanlah faktor dominan dan bersifat tidak langsung, yakni hanyalah sebagai *triggering factor* yang berfungsi sebagai pemicu bagi dimulainya suatu konflik sosial (etnis dan agama) dalam skala lebih besar. Dalam kasus Mindanao, konflik etnis dan agama mengalami pergeseran atau pengembangan isu global, seperti NIIS atau ISIS, sehingga memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah Filipina dalam mencari solusi konflik komunal bangsa Moro yang sudah terjadi berabad lamanya.

*Ketiga*, peranan ASEAN dalam strategi dan upaya resolusi konflik sosial-etnis dan agama di Asia Tenggara memperlihatkan tampak belum optimal dan bahkan cenderung 'tersandera'. Hal ini dikarenakan, terutama, bertalian dengan dilema Misi ASEAN dan Prinsip 'Non-Interference'. Visi Masyarakat ASEAN: '*politically cohesive, economically integrated, socially responsible, and a truly people oriented, people centred and rulebased ASEAN*'. Dalam menghadapi persolaan etnisitas yang kompleks, seperti kasus konflik sosial etnis dan agama /separatism di Rohingya-Myanmar dan Moro-Philippine, ASEAN bersikap hati-hati. Pasalnya, ASEAN memegang suatu prinsip '*Non-Interference*' yang melarang intervensi atas urusan dalam negeri satu sama lainnya, sehingga beberapa kasus konflik internal di kawasan Asia Tenggara seringkali diselesaikan ke lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Sebagai faktor utama penyebab konflik sosial (etnis dan agama) di Asia Tenggara agaknya yang paling signifikan disebabkan kuatnya 'warisan' sosio-historis atas kebijakan bangsa kolonial di Asia Tenggara

yang cenderung diskriminatif. Kebijakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan sosial telah membentuk ketimpangan (*gap*) dalam berbagai struktur sosial (ekonomi, politik, pendidikan, budaya, etnis/ras, dan agama) di mana dalam perkembangannya belum banyak perubahan signifikan bagi negara-negara tersebut hingga era kemerdekaan meskipun proses pembangunan terus dikembangkan. Untuk mengantisipasi dan mereduksi berbagai kemungkinan potensi dan kasus-kasus konflik yang akan muncul ke depan, diperlukan orientasi kebijakan yang betul-betul berpihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dalam berbagai bidang. Kesejahteraan masyarakat ASEAN dalam berbagai bidang tersebut diharapkan akan dapat memperkuat toleransi, integrasi, kesatuan, dan kemandirian Masyarakat ASEAN.

Ke depan, negara-negara ASEAN diharapkan secara kolektif dapat terus menumbuhkan iklim demokratisasi internal (regional) upaya memperkuat solidaritas sesama anggotanya sebagai upaya memperkuat eksistensi, peranan dan fungsi, serta wibawa dari lembaga ASEAN dalam pergaulan global. Dalam merespons berbagai konflik sosial (etnis dan agama) di Asia Tenggara dan sebagai upaya resolusi dan rekonsiliasinya ke depan memerlukan revitalisasi peranan dan fungsi ASEAN yang lebih serius di mana selama dipandang belumlah optimal. Melibatkan atau meminta bantuan dunia internasional dapat dilakukan sepanjang berbagai kasus konflik sosial (etnis dan agama) di Asia Tenggara memang sungguh tidak dapat diselesaikan dalam konteks internal ASEAN, sehingga membutuhkan bantuan dari lembaga internasional, seperti *United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB) atau organisasi internasional lainnya.



# DAFTAR PUSTAKA

- Ajid Thohir. 2008. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, PT. Rajawali RajaGrafindo. Jakarta.
- Akhil Malaki. 2001. 'Theoretical and Methodological Notes/ Notas Teoreticas' Y Metodologicas, A Push-Pull Model of Ethnic (Re)configuration in A Plural Society: Trinidad and Tobago' *Iberoamericana, Nordic Journal of Latin America and Caribbean Studies*, Vol. XXXI: 2 2001. Pp. 103-117.
- Ali Maksum. 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta.
- Ali Sodikin. 2016. 'Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya)', *Ibda*, Vol 14, No. 1, Januari-Juni 2016. hlm. 32.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities*. Revised and Expanded Edition, Verso, London.
- Asry, M. Yusuf. 2010. 'Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama (Studi tentang Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara)', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius Vol IX, No. 34, April-Juni 2010*. hlm. 93-106.
- Azra, Azyumardi. 2009. 'Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Muslim Indonesia', *Merayakan*

## 266 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

- Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Diterbitkan atas Kerjasama ICRP dan Kompas. Jakarta. 2009.
- Bachtiar, Harsja W. 1976. 'Masalah Integrasi Nasional di Indonesia'. *Prisma*, No. 8, Agustus 1976. Hlm. 11-12.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2008. *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*. Jakarta.
- Blau, Peter M. 1977. *Inequality and Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structure*. The Free Press: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc. New York.
- Dhakide, Daniel. 2017. 'Demokrasi, Demografi, & Kemaslahatan'. *Prisma*, Volume 36, 2017, LP3ES. Jakarta. Hlm. 2.
- Daniel, Bell. 1996. 'Ethnicity and Social Change'. *Ethnicity*. Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford University Press, Oxford, New York.
- Dewi, Asriyani. 2013. 'Peran Office of the Hight Commisioner f or Human Right dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar (1978-2012)'. *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013, 1 (2): 42-50.
- Djamaludin Ancok (Epilog). 2015. 'Membaca Kembali Arah Pembangunan', *Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Politik, Kebijakan, Sosial, dan Budaya*, Editor: Darol Arkum & Shulby Yozar Ariadhy, Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 1. Bangka-Belitung.
- Fatimah. 2016. 'Perspektif Muslim Thailand Tentang Nasionalisme Etnis dan Agama: Studi Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta'. *Kontektualita*, Vol. 32, No. 2, 2016. Hlm. 31.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1991. 'Ethnicity versus Nationalism'. *Journal of Peace Research*, Vol. 28, No. 3, 1991. Page 170.
- Fredrich Barth. 1996. 'Ethnic Group and Boundaries', in John Hutchinson and Anthony D. Smith. *Ethnicity*. University Press. Oxford. New York.

G.E. Simpson dan J.M. Yinger. 1972. *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*. Harper and Row Publication. New York.

Geoffrey, Gunn C. 1986. 'Racial Islam in Southeast Asia: Retic and Reality in the Middle Eastern Connection', *Journal of Contemporary Asia*, 1, 1986. Page 34.

Gutman, Amy. 2005. 'Democratic Education', dalam Firdaus M. Yunus. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*. Logung Pustaka. Yogyakarta.

Hamdi, Ahmad Zainul dan Muktafi. 2017. 'Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman'. *Wacana & Praktek Pluralisme Keagamaan Di Indonesia*. Penerbit Daulatpress. Jakarta.

Haryadi, Sugeng. 2002. *Sejarah Berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebek Besar*. CV. Mega Berlian. Jakarta.

Haryanto, Sindung. 2015. *Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern*. Cetakan ke-1. Penerbit Ar-Ruzz Media. Yogyakarta,

Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama dan Kompas Gramedia. Jakarta.

Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosio-Kultural*. Cetakan ke-3, Editor: Afif Nadjih Anies. Penerbit. Lantabora Press. Jakarta.

Heffner, Robert W. 1998. *Democratic Civility: On the History and Cross-Cultural Possibility Modern*. Transaction Publishers: New Brunswich (USA) and London (UK). 1998. Page 1.

Hidayah, Zulyani. 1999 "Kemajemukan dan Konflik: Pendekatan Kebudayaan", *Wacana Antropologi: Media Komunikasi antar-Peminat dan Profesi Antropologi*, Volume 2, Nomor 4, Januari-Februari 1999. Pages. 1-4.

Hilmy, Masdar. 2017. 'Politik Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia'. Pendewasaan Sikap Beragama melalui Rasionalisasi Publik'. *Wacana & Praktik Pluralisme*

## 268 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

- Keagamaan di Indonesia*. Editors: Ahmad Zainul Hamdi dan Mukafi. Penerbit daulatpress. Jakarta.
- Henk Schulte Norholt dan Hanneman Samuel (Eds.). 2004. "Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories". *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Hoda Lacey. 2003. *How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Idi, Abdullah. 2017. 'Political Ethnicity of Dutch Colonialism Against Islamic Sultanates in Archipelago'. *Islamic and Humanities (Islam and Malay Local Wisdom)*. *Proceeding of The 2nd Annual International Symposium on Islam and Humanities: Islam and Malay Local Wisdom*. 08-11<sup>th</sup>, September, 2017. Palembang, South Sumatra. Indonesia. Pages 193-2014.
- .2016. 'Jabatan Publik, Virus, Suap, dan Agama'. *Sriwijaya Post*. 26 September 2016.
- .2016. 'Seminar Duta Toleransi, dengan Tema: Dialog Antaragama dan Peningkatan Pelayanan Publik'. *Paper Seminar Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 September 2016.
- .2016. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Editor: Safarina HD, RadjaGrafindo Persada. Cetakan ke-5. Jakarta, 2016.
- .2015. *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- .2015. 'Conflict Ethnic Minorities in Asia: Cases of Ethnic Muslim Minorities Myanmar, Cambodia, Philippine, Thailand, China, and Indonesia'. *Proceeding International Seminar: Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to the Development of Islam at Southeast Asia*, Palembang, 10-11<sup>th</sup> November,

2014. Academic Center Building UIN Raden Fatah Palembang. 2015. Pp. 97-101.
- 2015. 'Istilah Cina, Tionghoa dan Politik'. *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. LKiS, Yogyakarta.
- 2015. 'Selamatkan Generasi Muda dari Perilaku Korupsi'. *Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Politik, Kebijakan, Sosial, dan Budaya*. Editor: Darol Arkum & Shulby Yozar Ariadhy. Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12. Bangka-Belitung.
- 2014. 'Conflict Ethnic-Minorities in Asia: Cases of Ethnic-Muslim minorities Myanmar, Cambodia, Filipina, Thailand, China, and Indonesia'. *Proceeding of International Seminar on Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to the Development of Islam at Southeast Asia*. Academic Centre, Islamic State University (UIN) Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia, 10-11, November, 2014, pages. 97-101.
- 2014, 'Orang Melayu, Jati Diri, dan Globalisasi'. *Paper Seminar Nasional*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2014.
- 2009. *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*. Editor: Nor Huda. Tiara Wacana Press. Yogyakarta.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*. Penerbit Gema Insani. Jakarta.
- International Idea Institute for Democracy and Electoral Assistance*. Stromborg, Stockholm Swedia. 2016, Pages.4-5.
- Ishiyama, Jhon T. & Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke 21*, Kencana PM. Group. Jakarta.
- John T. Sidel. 2012. 'The Fate of Nationalism in the New States: Southeast Asia in Comparative Historical Perspective'.

## 270 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

- Comparative study in society and history*, 54 (01), Pp. 114-144.
- J.S. Furnivall. 1980. 'Plural Societies'. *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne. Pages 80-103.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Leo Suryadinata. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. LP3ES. Jakarta.
- Lubis, M. Ridwan. 2015. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Sambutan: Prof. Achmad Fedyani Saifudin. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Louis Wirth. 1962. 'The Problem of Minority Group', in Talcott Parsons, et al., *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*, Volume 1, The Free of Glancoe, USA, 1962, pages 309-318).
- Massey, Douglas S. 1998. 'Ethnic Residential Segregation: a Theoretical Synthetical and Empirical Review'. *Sociological and Social Research*, Volume 69, pages 315-350.
- Mudzhar, M. Atho. 2003. 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama'. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Editor: Moh. Soleh Isre. Departmen Agama RI. Jakarta.
- Muhammad Rendi. 2014. Mohammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001', *Hasil Penelitian Skripsi*. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanudin.
- M. Kurokawa (Editor). 1972. *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*, Random House, New York, 1972. Page 44.
- Mustafa Ishak, Mohamed. 2016. *The Politics of Bangsa Malaysia: Nation-Building in a Multiethnic Society*. Versi Indonesia. Penerbit Progressio. Jakarta, Indonesia.

- M. AthoMudzhar. 2003. "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernunsa Agama". *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Editor: Moh. Soleh Isre. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Bersama, Departemen Agama RI, Jakarta.
- M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Magniz-Suseno, Franz. 2003. 'Faktor-faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan'. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Diterbitkan atas Kerjasama Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan Pusat Bahasa dan Budaya Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- M. Kurokawa (Editor). 1972. *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*. Random House. New York..
- Muslih, Muhammad. 2010. 'Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan. *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 1, April 2010. Hlm. 133.
- Noor. Farish. 2008. 'Peace Remains a Mirage in Southern Thailand', *Haleej Times Online*, 2008 (diakses: 21 November 2017).
- Nottingham, Elizabeth K.1996. *Agama dan Masyarakat*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Panggabean, Rizal, et.al. 2014. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM, dan The Asia Foundation. Jakarta.
- PM. Laksono. 2001. 'Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme'. *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Editor: Th. Sumarthana, Elgasarapung, Zuly Qodir, Samuel A. Bless. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001.

## 272 Konflik Etno-Religius di Asla Tenggara

- Paskarina, Caroline. 2017. 'Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal'. *Prisma*, Vol. 36, No. 1, 2017. LP3ES, Jakarta. Hlm. 51-66.
- Paul Suparno. 2001. 'Pendidikan Demokrasi' dalam *Problematika Manusia Indonesia: Permasalahan Kemanusiaan Bangsa Indonesia Zaman Sekarang*. Universitas Sanata Darma. Yogyakarta.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2015. 'Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine, Myanmar, Tahun 2012-2013'. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 6 No. 1, 2015. Hlm. 36.
- R. Dahrendorf. 1972. *Toward a Theory of Social Conflict, Social Change: Sources, Patterns and Consequences*, Amital Etzoini and Eva Etzoini Haley (Eds.), New York, Basic Book Inc., 1972. Page 108.
- Rizkyan Adiyudha. 2107. 'Tuduhan Genosida untuk Suu Kyi'. *Republika*. 19 Desember 2017.
- R. Schermerhorn. 1970. *Comparative Ethnic Relations: Framework for Theory and Research*. Random House. New York.
- Schiller, Bradeley R. 1989. *The Economics of Poverty and Discrimination*. Fifth Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Setiono, Benny G. 2016. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Elkasa. Jakarta.
- G.E. Simpson & J.M. Yinger. 1972. *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*. Harper and Row Publication. New York.
- Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2003. 'Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia'. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Diterbitkan atas Kerjasama *Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)* dan Pusat Bahasa dan Budaya (*The Center for Languages and Cultures*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Pages.79-80.



- Siti Musdah Mulia. 2003. 'Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di era Reformasi', *Merayakan Kebebasan Beragama: BungaRampai 70 Tahun Johan Effendi*, Diterbitkan atas Kerjasama ICRP dan Kompas, Jakarta, 2009. Pages.343-344.
- Timo, Kivimaki. 2005. *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: DewiPortuna Anwar, HeleneBouvie, Glend Smith, RogerTol. Yayasan Obor Indonesia-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-Jakarta. Jakarta.
- Tomagola, Tamrin Amal dalam M. Atho Mudzhar. 2003. 'Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernunsa Agama', *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Editor: Moh. Soleh Isre. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Bersama. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Tomagola, Tamrin Amal. 2003. 'Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan', *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Editor: Moh. Soleh Isre, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Bersama. Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Thung Ju Lan. 2010. 'Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia'. *Jurnal Antropologi Indonesia 1, 2010, hlm. 36*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Turmudz,i Endang. 2010. 'Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius Vol IX, No. 34, 2010, hlm. 41-61*.
- Wong, David W.S. 1988. *Spatial Patterns of Ethnic Integration in the United States, Profesional Geographer*, Volume 50, No. 1, February, Copyright by Association of American Geographers, published by Blackwell Publishers, Oxford, UK, pages 13-30.
- Zubir, Zaiyardam dan Nurul Aizah Zaysda 2009. 'Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat'. Dana dari DP2M DIKTI Depdiknasmelalui Program

## 274 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

HibahStrategisNasional, 2009, dipublikasi dalam *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia-LIPI*, Edisi XXXV No.1, 2010, 2009. Pages.49-70.

### Sumber-Sumber Lain:

*berita.islamedia.id*, (diakses: 25 Oktober 2016).

Djanti Virantika/Jurnalis, 'Temui Suu Kyi di KTT ASEAN, Sekjen PBB Desak Myanmar Izinkan Pengungsi Rohingya Kembali', seperti dikutip dalam *The Strait Times*, 14 November 2017, (diakses: 14 November 2017).

Erick Yunus, 'Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Kasus Rohingya'/11/3/2017 (diakses 30 Mei 2017).

'Hormati Suu Kyi, KTT ASEAN di Manila tidak bahas soal krisis di Rakhine', *Merdeka. Com*, 13 November 2017, (diakses: 14/11/2017).

Hasil Musyawarah Antarumat Beragama. 1981.

<http://nimassyafitri.wordpress.com>. 'Konflik Antaragama di Indonesia', diakses: 5/9/2017.

<https://galangriawan.wordpress.com/2014/01/09/peran-negara-aseandalampenyelesaian-konflik-etnis-rohingya>. (diakses: 22/7/2017).

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/26/20007/muitragedi-muslim-rohingya-berlatar-belakang-agama-stop-genocide/#sthash.1H26NKi6.dpuf>. (diakses: 8/10/2014).

'Jaringan ISIS dari Kota Marawi Filipina ke Kampung Melayu Jakarta', *gerilya politik.com*, 25/1/2018 (diakses: 30/1/2017).

Jalaluddin, 'Terorisme dan Agama', *Sriwijaya Post*, 17 Januari 2018.

K. Shindunata dan Junus Jahja, 'Generasi Imlek', *Republika*, 22 Maret 2002.

'Konflik Rohingya Meluas Jadi Genosida', *Republika.co.id.*, diakses: 25 November 2017.

'Konflik Etnis dan Agama', internet, diakses 4 Juni 2017.

*Majalah Tempo*, 11 September 2005.

- 'NIIIS klaim bertanggung jawab', *Kompas*, 26 Oktober 2016.
- Nimas Syafitri, 'Konflik Antaragama di Indonesia', internet, (diakses 27 Januari 2018).
- 'Muslim Uighur, Muslim Minoritas Yang Tertindas', (diakses: 7/10/2014).
- Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.
- 'Peranan Negara ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya', *Republika*, 5 September 2005.
- Republika*, 16 Januari 2018.
- Riswanto, et al., 'Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina 1968-1996 (Suatu Kajian Historis)', *Hasil Penelitian, FKIP-Universitas Riau* (diakses: 16 Januari 2018).
- Riva Dessthanian Suastha & Riva Dessthanian Suastha, 'Malaysia: Kekerasan terhadap Rohingya adalah Pemusnahan Etnis', *CNN Indonesia*, Senin, 05/12/2016 11:21 WIB (diakses: 30 Mei 2017).
- Sarlito Wirawan Sarwono, 'Dari Streetip Etnis ke Konflik Etnis', (diakses 23 November 2017).
- 'Sejumlah Militan Penyerbu Kota Marawi Berasal dari Indonesia', *Kompas. Com.* 25/5/2017 (diakses: 30/5/2017).
- Septian Tri Kusuma, 'Apa sebenarnya penyebab Myanmar menindas Muslim Rohingya?' Senin, 21 November 2012, (diakses: 27/7/2017).
- Simela Victor Muhamad, 'Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN', *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, *Info Singkat Internasional* Vol. VII, No. 10/II/P3DI/Mei 2015, (diakses: 26/8/2017).
- [www. bbc.com/berita\\_indonesia/2016/07/160730/Amuk Massa di TanjungBalai, ViharadanKlenteng di bakar](http://www.bbc.com/berita_indonesia/2016/07/160730/Amuk_Massa_di_TanjungBalai_ViharadanKlenteng_di_bakar) (30/7/2016). (Diakses: 24/10/2016).
- [www. bbc. com/Indonesia/majalah/2016/08/160801\\_trensosial\\_tanjungbalai\\_walubi](http://www. bbc. com/Indonesia/majalah/2016/08/160801_trensosial_tanjungbalai_walubi), 'Serangan Vihara di TanjungBalai, Pelajaran Tolerans', (diakses 25/10/2016).

## TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed. Lahir di Bangka pada 27-09-1965. Menyelesaikan pendidikan SD/ Diniyah (1979), SMP (1982), dan SMA (1985) di Bangka; S1 (Drs.) Jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang (1990); Master of Education (M.Ed.), School of Education, University of Tasmania, Australia (1994)); dan S3 (Dr) Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2006). Profesor Sosiologi (SK Mendiknas RI, 1 Desember 2006).

Pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III IAIN Raden Fatah Palembang (2003-2007); Direktur Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang (2008-2011), Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2012-2016); Wakil Ketua Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia (ISI) Sumatera-Selatan (2013-2017); dan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sumatera-Selatan (2016-2021).

Menulis sebanyak 15 buku bertalian dengan sosiologi, agama, dan pendidikan. Menulis artikel di pelbagai jurnal nasional dan internasional, media massa, dan majalah. Kunjungan akademik ke beberapa universitas di ASEAN (Malaysia, Singapore, Thailand, dan Brunei Darussalam: 2004, 2006, 2007, 2012, 2013, 2015, dan 2017).

## 278 Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara

Berarticipasi dalam *Short-Course on Social Welfare*, McGill University, Montreal-Canada (2007); *Research Fellowships*, The University of Melbourne, Australia (2010); dan *Visiting Professor*, Gottingen Universitat, Germany (2012); *Visiting Professor* Newcastle University (UoN), Australia, 2016, dan Universiti Sultan Idris Brunei Darussalam 2017. Aktif sebagai pembicara pada seminar nasional dan internasional dan kolokium. Penulis dapat dihubungi di: [idi\\_abdullah@yahoo.com](mailto:idi_abdullah@yahoo.com)